



EMBRACING A NEW NORMAL

Laporan Tahunan
Terintegrasi

2018

PT BFI Finance Indonesia Tbk

COVER STORY

Sepanjang sejarah, sidik jari manusia selalu menjadi sarana identifikasi, namun seiring berjalannya waktu, fungsinya telah berevolusi secara signifikan. Dari sidik jari menggunakan tinta hingga fitur pengenalan sidik jari pada perangkat seluler terbaru, inovasi dalam teknologi identifikasi sidik jari telah berkembang pesat. Namun, perlunya identifikasi sidik jari menunjukkan bahwa bahkan teknologi paling canggih sekalipun masih memerlukan sentuhan manusia. Sentuhan manusia tetap menjadi hal yang penting, bahkan saat kita menjadi semakin bergantung pada teknologi.

Hal tersebut diilustrasikan dalam konsep sampul BFI Finance untuk tahun ini. Perusahaan menjalankan bisnis yang berfokus pada konsumen agar senantiasa berkembang dengan konsumennya dan menyempurnakan cara berbisnisnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Semua ini tentunya dengan tetap menjaga interaksi manusia, sehingga dapat lebih memahami konsumen dan mendampingi mereka setiap saat.

Disclaimer

PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance atau Perusahaan) telah melakukan segala upaya untuk memastikan akurasi informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Namun, Perusahaan tidak menjamin kesesuaian, ketepatan, kegunaan atau hal lain apapun mengenai informasi ini. Laporan Tahunan Terintegrasi ini memuat beberapa pernyataan berwawasan ke depan tentang harapan masa depan, rencana, dan strategi yang bukan merupakan fakta sejarah. Hal-hal tersebut didasarkan pada harapan, perkiraan, prakiraan, dan proyeksi saat ini tentang bisnis dan lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan keyakinan dan asumsi yang dibuat oleh manajemen. Sehubungan dengan harapan, perkiraan, prakiraan, dan proyeksi tersebut yang tergantung pada sejumlah risiko, ketidakpastian, dan asumsi, hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang diproyeksikan sebelumnya. Oleh karena itu, pembaca diingatkan untuk tidak menempatkan ketergantungan sepenuhnya pada pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tersebut sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau perkembangan lainnya. Pihak-pihak yang mengandalkan isi dari Laporan Tahunan Terintegrasi dan Laporan Keuangan ini sepenuhnya menanggung risiko mereka sendiri. Perlu diketahui juga bahwa seluruh angka dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini telah dibulatkan ke bilangan dalam juta atau miliar rupiah terdekat, dan dengan demikian, mungkin terdapat perbedaan dalam perhitungan persentase perubahannya, dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan angka dari Laporan Keuangan Tahunan.

EMBRACING A NEW NORMAL

Satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan. Sejalan dengan evolusi teknologi dan cara berbisnis yang terus berlangsung, BFI Finance berupaya menjadi penyedia layanan keuangan yang terpercaya di Indonesia, bagi generasi mendatang. Kami terus menekankan pentingnya membangun organisasi yang dinamis dan gesit dengan karyawan yang mudah beradaptasi dan selalu siap menerima tantangan baru. “Embracing a New Normal”, tema kami untuk 2018, dengan tepat menggambarkan pola pikir perubahan tersebut.

Kami harus tumbuh bersama konsumen kami, serta senantiasa menyesuaikan strategi kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, peran teknologi informasi dewasa ini sangat penting untuk menumbuhkan dan mendukung bisnis. Kapasitas dan kemampuan teknologi informasi yang tepat akan membuat Perusahaan semakin fleksibel dalam menawarkan berbagai produk dan layanan yang cakupannya lebih luas, serta mendukung operasi bisnis dan manajemen risiko yang efisien. Pengalaman operasional dan transaksional yang fleksibel juga akan

mendorong pertumbuhan Perusahaan, sejalan dengan kebutuhan dan harapan konsumen yang kian berkembang.

Secara internal, BFI Finance senantiasa menerapkan pendekatan dan metodologi baru untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih baik dan membuat Perusahaan kian tangkas. Bersama dengan konsumen, kami berevolusi dengan mempekerjakan generasi muda yang lebih *melek* teknologi dan inovatif. Melalui inisiatif ini, Perusahaan berupaya mencari dan mengembangkan para pemimpin baru, yang akan memajukan bisnis BFI Finance dan membuatnya tetap relevan, di saat ini dan masa depan.

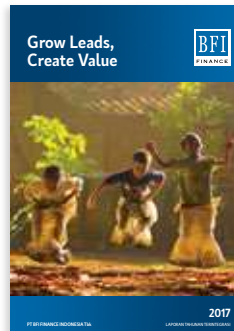


KESINAMBUNGAN TEMA



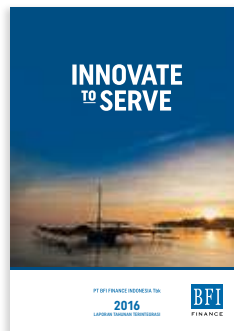
EMBRACING A NEW NORMAL

Di dunia saat ini, peran teknologi informasi dalam mendukung kinerja Perusahaan dan sebagai katalis proses bisnis semakin penting. Untuk mengembangkan layanan yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, Perusahaan telah menyelaraskan strategi bisnisnya dan berfokus untuk senantiasa memberikan layanan yang lebih baik, sambil mempercepat pengembangan teknologi informasi berbasis digital, demi menjawab tantangan di era modern dan berkembang bersama dengan konsumennya.



GROW LEADS, CREATE VALUE

Upaya menciptakan nilai dengan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan diwujudkan dengan terus mengembangkan kapabilitas internal Perusahaan dan menjangkau pasar yang lebih luas secara optimal.



INNOVATE TO SERVE

Merupakan inisiatif Perusahaan untuk memperbaiki cara menjalankan usaha. Perusahaan yakin bahwa peluang perubahan selalu ada, sekecil apapun perubahan itu.



OPTIMIZE • GROW • LEAD

Strategi optimalisasi untuk mencetak kinerja unggul dalam rangka memperkuat pertumbuhan Perusahaan tidak hanya saat ini, melainkan juga untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan terutama di masa-masa yang penuh tantangan.



PEOPLE AT THE CORE

Peningkatan dalam proses dan teknologi tentunya tidak akan cukup tanpa dukungan dari tenaga kerja yang kompeten dan beretos kerja baik. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki komitmen jangka panjang untuk memperkuat bisnis dengan sumber daya manusia sebagai intinya untuk dapat membangun organisasi yang lebih baik, kuat dan efisien.

PENGANTAR LAPORAN TERINTEGRASI

BFI Finance menyajikan Laporan Tahunan 2018 ini dalam bentuk Laporan Terintegrasi. Laporan ini menggambarkan bagaimana keseimbangan *Triple Bottom Line (Profit-People-Planet)* berkontribusi terhadap pencapaian BFI Finance dalam jangka panjang, serta bagaimana Perusahaan, yang bergerak di jasa keuangan, berfokus pada inovasi agar mampu memenuhi aspirasi para pemegang saham, berinteraksi lintas generasi, menjawab berbagai kebutuhan konsumen dan rekanan bisnis Perusahaan yang senantiasa bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

REFERENSI DALAM PELAPORAN

Laporan Terintegrasi BFI Finance 2018 ini memadukan Laporan Tahunan (termasuk laporan keuangan dari auditor independen) dan Laporan Keberlanjutan. Praktik ini telah dilakukan sejak penyampaian Laporan Terintegrasi BFI Finance 2016 sebagai Laporan Terintegrasi edisi yang pertama, yang diterbitkan pada 24 Maret 2017.

Periode pelaporan dalam Laporan Terintegrasi 2018 ini adalah dari 1 Januari hingga 31 Desember 2018. Perusahaan menerbitkan Laporan Terintegrasi setiap satu tahun sekali.

Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dengan penyajian Laporan Tahunan Perseroan Terbatas serta panduan pembuatan Laporan Keberlanjutan dari Global Reporting Initiatives (GRI).

Data dan informasi finansial dalam laporan ini disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia.

Data dan informasi non-finansial disajikan sesuai dengan ketentuan dari Panduan Pembuatan Laporan Keberlanjutan dari GRI Standards. Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti. Perusahaan tidak meminta pihak eksternal untuk melakukan penjaminan atas Laporan Terintegrasi 2018 ini.

Keterpaduan laporan finansial dan non-finansial dalam laporan ini disusun mengikuti prinsip panduan dari *The International Integrated Reporting Framework* yang

diterbitkan oleh International Integrated Reporting Council. Laporan ini menyajikan beragam topik non-finansial yang material bagi BFI Finance dan pandangan pemangku kepentingannya. Pemilihan topik dalam laporan ini, "Embracing a New Normal", dijelaskan lebih lanjut di bagian Penjelasan Tema (lihat halaman 1).

CAKUPAN DAN PERNYATAAN ULANG

Cakupan pelaporan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan 2018 adalah seluruh operasi bisnis Perusahaan dan entitas anaknya.

Dalam Laporan Terintegrasi 2018, Perusahaan tidak melakukan pernyataan ulang apapun terhadap semua data yang telah disampaikan di Laporan Terintegrasi 2017. Perusahaan juga tidak melakukan perubahan apapun yang bersifat substansial terhadap cakupan dan topik material yang dipilih untuk dibahas dalam laporan.

TENTANG LAPORAN TERINTEGRASI

Penggunaan kerangka Laporan Terintegrasi atau *Integrated Reporting (IR)* yang disusun oleh International Integrated Reporting Council ditujukan untuk menyajikan pelaporan Perusahaan agar menjadi lebih efisien dan produktif.

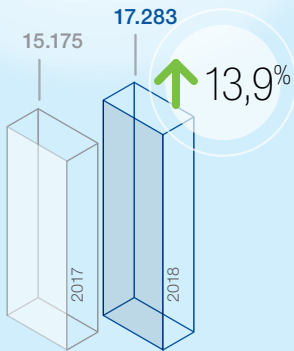
Sesuai dengan namanya, Laporan Terintegrasi menunjukkan bagaimana sumber daya Perusahaan berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan sumber-sumber permodalan yang ada, dalam rangka menciptakan nilai tambah untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Karena interaksi sumber daya dipandang secara holistik dalam kemampuannya menciptakan nilai secara berkelanjutan, maka informasi yang ada di dalam laporan ini, selain bermanfaat bagi kalangan finansial, juga bermanfaat bagi karyawan, pelanggan, pemasok, mitra, masyarakat sekitar, regulator, dan pembuat kebijakan.

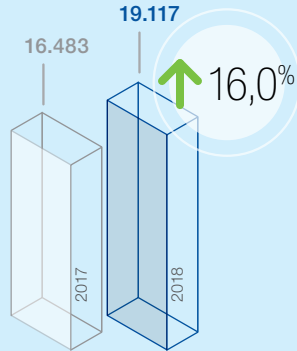
Informasi lebih lanjut mengenai kerangka IR dan informasi pendukungnya dapat ditelusuri melalui situs web <https://integratedreporting.org>.

DATA KEUANGAN

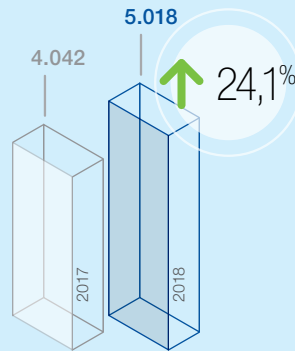
Piutang Pembiayaan - Bersih
(Rp miliar)



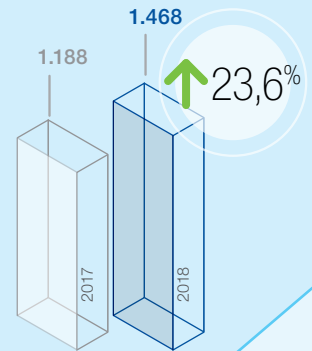
Jumlah Aset
(Rp miliar)



Jumlah Pendapatan
(Rp miliar)



Laba Tahun Berjalan
(Rp miliar)



IKHTISAR PENTING 2018

RASIO UTAMA

ROAA
10,3%

ROAE
26,4%

NPF
1,21%

PRODUK BERDASARKAN JENIS ASET

9,4%

Sepeda Motor

73,7%
Mobil

Alat Berat

15,3%

1,6%

Properti dan Lain-Lain



DISTRIBUSI OUTLET

401
outlet

22 di antaranya
cabang syariah

- Jawa & Bali 55,3%
- Sumatera 17,5%
- Indonesia Timur 17,5%
- Kalimantan 9,7%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

- Trinugraha Capital & Co SCA **42,80%**
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) **41,02%**
- NT Asian Discovery Fund **9,90%**
- PT BFI Finance Indonesia Tbk **6,28%**



↑ 20,7%

565.648

KONTRAK

11.171

KARYAWAN



PENGHARGAAN



Hat-trick Peringkat Pertama
Infobank Multifinance Awards kategori
"Perusahaan Pembiayaan
Beraset Rp10 Triliun ke Atas"
(2016-2018)



Trofi Platinum *Infobank Multifinance Awards 2018* untuk Kinerja Keuangan Sangat Bagus sepuluh tahun berturut-turut (2008-2017)



HR Asia Awards Indonesia
"Best Companies to Work For in Asia" dua tahun berturut-turut (2017-2018)



Peringkat Pertama kategori *Multifinance Top 20 Financial Institutions 2018* dari *The Finance*

DAFTAR ISI

<i>Cover Story</i>	i	Profil Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris:	74
<i>Embracing a New Normal</i>	1	• Komite Audit	74
Kesinambungan Tema	2	• Komite Manajemen Risiko	75
Pengantar Laporan Terintegrasi	3	• Komite Nominasi dan Remunerasi	76
Ikhtisar Penting 2018	4	Profil Manajemen Senior	77
KILAS KINERJA 2018		Komposisi Kepemilikan Saham	80
Ikhtisar Data Keuangan Penting	10	Profil Pemegang Saham Mayoritas	81
Ikhtisar Saham	12	Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham	82
• Struktur Pemegang Saham	14	Pencatatan Efek Lainnya	88
Ikhtisar Obligasi	15	Struktur Korporasi	94
Peristiwa Penting 2018	16	Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi	94
Penghargaan dan Pengakuan	24	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	95
LAPORAN MANAJEMEN		SUMBER DAYA MANUSIA	
Laporan Dewan Komisaris	30	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	98
Laporan Direksi	38	<i>BFI Enhanced Core Competencies (BECOCO)</i>	105
Tanggung Jawab Laporan Tahunan Terintegrasi		Manajemen Rekrutmen	107
• Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk	44	Pengembangan Sumber Daya Manusia	108
• Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk	45	Pengelolaan Kinerja	111
PROFIL PERUSAHAAN		Pengembangan Karier	112
Identitas Perusahaan	48	Kesejahteraan Karyawan	115
Visi dan Misi Perusahaan	49	Hubungan Industrial	117
Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan	50	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	117
Riwayat Singkat Perusahaan	52	<i>Human Capital Technology</i>	119
Jejak Langkah	54	Demografi Karyawan	120
Bidang Usaha	56	UNIT PENDUKUNG BISNIS	
Peta dan Jaringan Operasional	60	Pengembangan Jaringan dan Operasional	126
Struktur Organisasi	62	Pelayanan Konsumen	131
Profil Dewan Komisaris	66	Teknologi Informasi	136
Profil Direksi	70	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	
Profil Dewan Pengawas Syariah	73	Tinjauan Ekonomi dan Industri	142
		Tinjauan Bisnis	145
		Aspek Pemasaran	152

Tinjauan Kinerja Keuangan	158	Hubungan Investor	315
• Laporan Posisi Keuangan	159	Kepatuhan	317
• Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lainnya	174	Kode Etik dan Budaya Perusahaan	317
• Laporan Arus Kas	182	Kebijakan Antikorupsi	321
Analisis Rasio Penting	183	Sistem Pelaporan Pelanggaran	325
Perbandingan Target dan Realisasi pada 2018	185	Aksi Korporasi	326
Struktur Modal (Kecukupan Modal)	186	Opsi Saham	327
Investasi Material atas Barang Modal	187	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	327
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	187	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
Dividen	188	Keberadaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	330
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	188	• Kebijakan Strategis CSR Perusahaan	330
Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal	188	• Kebijakan Program CSR	330
Transaksi dengan Potensi Benturan Kepentingan dan Pihak Berelasi	189	• Anggaran Program CSR	331
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan	189	Implementasi Program CSR	333
Perubahan Kebijakan Akuntansi	190	• Pelestarian Lingkungan	333
Prospek Bisnis 2019	191	• Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	333
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		• Pengembangan Sumber Daya Manusia	335
Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	194	• Fokus pada Layanan Pelanggan	336
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	211	Kontribusi untuk Pembangunan	338
Dewan Komisaris	226	• Manfaat bagi Masyarakat	339
Direksi	243	DATA PENUNJANG PERUSAHAAN	
Dewan Pengawas Syariah	259	Alamat Outlet	342
Komite Audit	263	LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	
Komite Manajemen Risiko	269	Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen	358
Komite Nominasi dan Remunerasi	273	PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN	462
Sekretaris Perusahaan	279	• Topik Material dan Rantai Pasokan Perusahaan	463
Audit Internal	282	• Pelibatan Pemangku Kepentingan	464
Audit Eksternal	287	GLOSARIUM	465
Manajemen Risiko	289	SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 – BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK	466
Sistem Pengendalian Internal	296	INDEKS ISI GRI (OPSI INTI)	476
Kasus Hukum 2018	298		
Akses Informasi dan Komunikasi	309		



“Sehat adalah kunci kesuksesan,” slogan ini selalu menjadi pedoman bagi seluruh karyawan Perusahaan. Olahraga bukan lagi suatu kewajiban, melainkan kebutuhan kami semua untuk terus kuat dalam menyongsong era baru.



Kilas Kinerja 2018

- 10 Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 12 Ikhtisar Saham
- 15 Ikhtisar Obligasi
- 16 Peristiwa Penting 2018
- 24 Penghargaan dan Pengakuan



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka dalam tabel dan grafik di bawah ini disajikan dalam miliar rupiah (kecuali disebutkan lain).

TABEL 1 Ikhtisar Laporan Keuangan dan Rasio

Keterangan	2016	2017	2018
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			
Pendapatan Pembiayaan	3.112	3.936	4.893
Lain-Lain	115	106	125
Jumlah Pendapatan	3.227	4.042	5.018
Bunga dan Keuangan	792	895	1.036
Gaji dan Tunjangan	716	869	1.050
Umum dan Administrasi	392	482	567
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	273	303	509
Lain-Lain	29	5	16
Jumlah Beban	2.202	2.554	3.178
Laba Sebelum Pajak	1.025	1.488	1.840
Beban Pajak Penghasilan	227	300	372
Laba Tahun Berjalan	798	1.188	1.468
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(63)	(29)	71
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	735	1.159	1.539
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Kas dan Setara Kas	165	225	755
Piutang Pembiayaan - Bersih	11.583	15.175	17.283
Piutang Lain-Lain - Bersih	171	414	198
Aset Derivatif	0	0	110
Aset Tetap - Bersih	414	457	530
Aset Tak Berwujud - Bersih	20	20	32
Aset Lain-Lain	123	192	209
Jumlah Aset	12.476	16.483	19.117
Pinjaman yang Diterima	4.691	6.819	6.900
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	2.965	3.909	5.196
Utang Lain-Lain	565	851	817
Jumlah Liabilitas	8.221	11.579	12.913

Keterangan	2016	2017	2018
Ekuitas	4.255	4.904	6.204
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.476	16.483	19.117
Data Saham			
Saham Beredar (juta)*	15.967	15.967	15.967
Laba per Saham Dasar (Nilai Rupiah Penuh)*	52	79	98
Dividen per Saham (Nilai Rupiah Penuh)*	26	39	- **
Rasio-Rasio			
Profitabilitas			
Imbal Hasil atas Rata-Rata Aset (ROAA)***	8,5%	10,3%	10,3%
Imbal Hasil atas Rata-Rata Ekuitas (ROAE)****	19,3%	25,9%	26,4%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	24,7%	29,4%	29,2%
Kualitas Aset			
NPF (termasuk Pembiayaan Bersama)	0,91%	0,95%	1,21%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai terhadap Piutang Pembiayaan yang Dikelola	1,4%	1,5%	2,1%
Coverage terhadap NPF	1,5x	1,6x	1,7x
Likuiditas			
Rasio Likuiditas [^]	1,7 x	1,5 x	1,4 x
Solvabilitas Aset ^{^^}	0,7 x	0,7 x	0,7 x
Rasio <i>Gearing</i> ^{^^^}	1,8 x	2,2 x	1,9 x
Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya			
<i>Financing-to-Assets Ratio</i> (FAR)	92,8%	92,1%	90,4%
Rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD)	1.065,9%	1.228,6%	1.554,1%
Rasio Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO)	69,8%	64,8%	64,6%
Informasi Lainnya			
Jumlah Outlet ^{^^^^}	305	342	401
Jumlah Karyawan	8.941	9.884	11.171

* Disajikan kembali sesuai Pemecahan Saham 10-untuk-1 pada Mei 2017

** Menunggu keputusan RUPS 2019

*** Laba Sebelum Pajak / Rata-Rata Aset

**** Laba Tahun Berjalan / Rata-Rata Ekuitas

[^] Aset Lancar / Liabilitas Lancar

^{^^} Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset

^{^^^} (Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih) / Ekuitas

^{^^^^} Terdiri dari 228 cabang (termasuk 22 cabang syariah) dan 173 gerai

IKHTISAR SAHAM

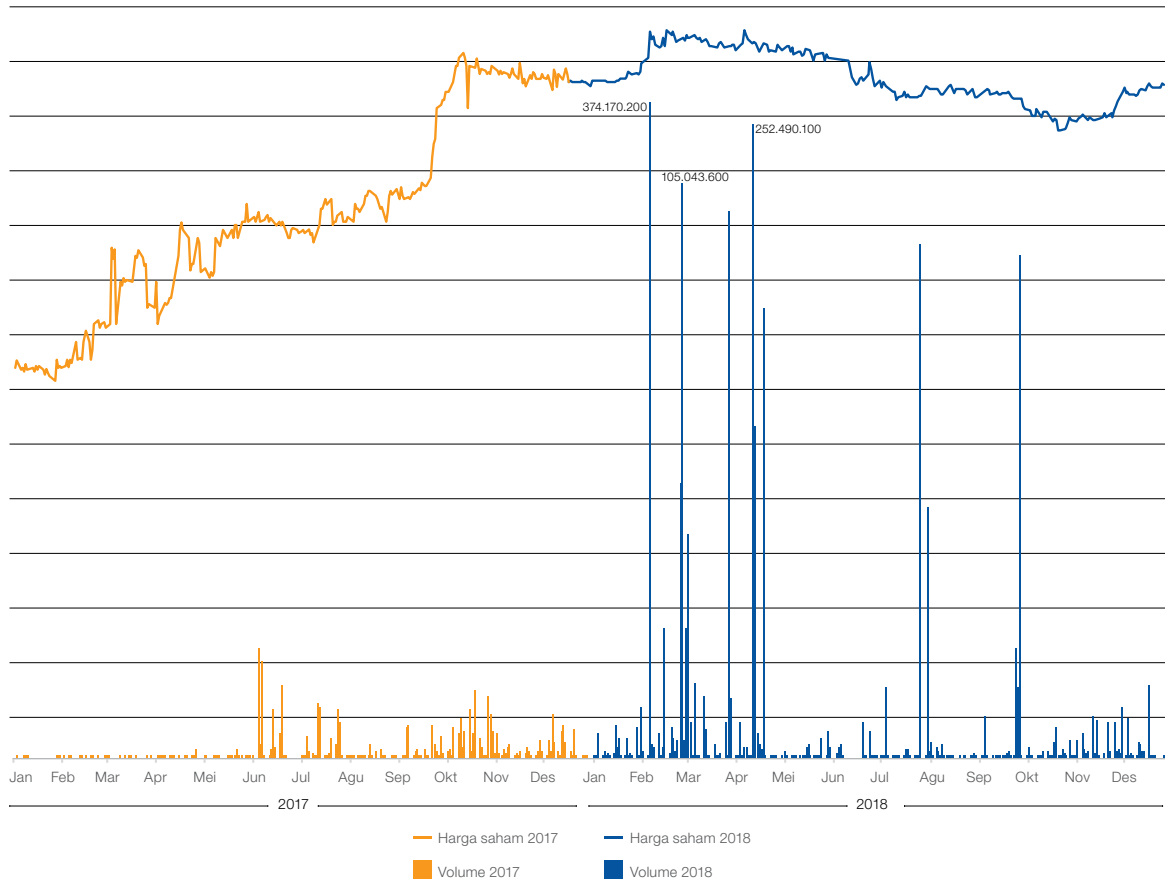
TABEL 2 Sejarah Penerbitan Saham

Aksi Korporasi	Periode	Saham Baru Diterbitkan (juta)	Saham Ditempatkan (juta)
IPO @Rp5.750,00	April 1990	2,1	10,5
1 untuk 10 Saham Dividen	Januari 1993	1,2	11,7
17 untuk 20 Saham Bonus	Juli 1993	9,9	21,6
1 untuk 3 Saham Dividen	Januari 1994	7,2	28,8
1 untuk 1 Penawaran Umum Terbatas @Rp1.500,00	Mei 1994	28,9	57,7
2 untuk 1 Penawaran Umum Terbatas @Rp1.000,00	Maret 1997	115,4	173,1
2 untuk 1 Pemecahan Saham	September 1997	173,1	346,2
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi	Agustus 2002 - Mei 2006	414,2	760,4
2 untuk 1 Pemecahan Saham	Agustus 2012	760,3	1.520,7
MESOP Tahap I - <i>Grant Date</i> 1	Mei 2013	5,9	1.526,6
MESOP Tahap I - <i>Grant Date</i> 2	Mei 2014	23,3	1.549,9
MESOP Tahap II - <i>Grant Date</i> 1	Mei 2015	16,0	1.566,0
MESOP Tahap II - <i>Grant Date</i> 2	Mei 2016	30,8	1.596,7
10 untuk 1 Pemecahan Saham	Juni 2017	14.370,4	15.967,1

TABEL 3 Ringkasan Harga Saham

Periode	Harga Saham						Peredaran Saham di Pasar Reguler				Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)	
	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)		Penutupan (Rp)		Volume Transaksi (Unit)		Nilai Transaksi (Rp miliar)		2017	2018
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
Triwulan 1	500	920	310	660	479	800	774.500	87.820.000	2,8	64,1	7.648,2	12.773,7
Triwulan 2	530	900	370	660	520	680	85.454.600	15.450.700	72,3	11,9	8.302,9	10.857,6
Triwulan 3	600	770	500	580	560	615	94.152.500	65.283.000	49,8	41,5	8.941,6	9.819,8
Triwulan 4	735	700	560	500	680	665	156.960.000	73.783.900	107,1	43,3	10.857,6	10.618,1

GRAFIK 1 Kinerja Saham



Kapitalisasi pasar saham BFI Finance per akhir 2018 mencapai Rp10,6 triliun, turun 2,2% dari Rp10,8 triliun per akhir 2017.

Jumlah volume saham BFI Finance yang diperdagangkan di 2018 mencapai 242.337.600 unit saham atau senilai Rp160,7 miliar.

Perbandingan Kinerja Harga Saham BFI Finance (BFIN) terhadap IHSG 2018

Perdagangan saham BFIN dibuka 2 Januari 2018 dengan harga pembukaan Rp675,00 dan ditutup 28 Desember 2018 dengan harga penutupan Rp665,00 per saham. Ini menunjukkan penurunan 1,5%, sementara IHSG sepanjang 2018 melemah 2,5%.

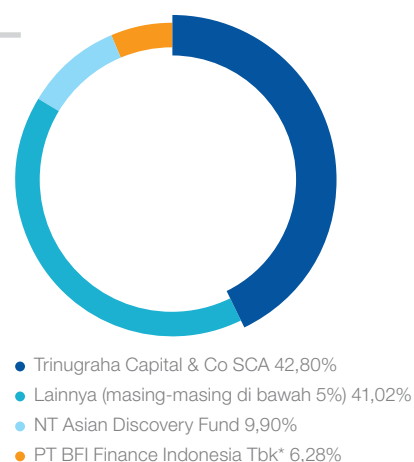
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Struktur pemegang saham BFI Finance dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 4 Struktur Pemegang Saham

Pemegang Saham	2018		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
NT Asian Discovery Fund	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
PT BFI Finance Indonesia Tbk*	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	6.547.858.320	163.696.458.000	41,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00

GRAFIK 2 Komposisi Pemegang Saham



*Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

TABEL 5 Pembayaran Dividen selama Lima Tahun Terakhir

Tahun Buku	2014*	2015*	2016*	2017*	2018
Tanggal Rapat Direksi/RUPS	9 Desember 2014/ 15 April 2015	19 November 2015/ 25 April 2016	21 November 2016/ 18 April 2017	21 November 2017/ 17 April 2018	-
Jumlah Dividen per Saham (dalam nilai penuh - mata uang rupiah)					
Interim**	14	14	15	23	***
Final****	5	7	11	16	****
Jumlah	19	21	26	39	-
Rasio Pembayaran	49,6%	49,7%	48,7%	49,1%	****
Tanggal Pembayaran					
Interim**	15 Januari 2015	16 Desember 2015	16 Desember 2016	18 Desember 2017	***
Final****	15 Mei 2015	25 Mei 2016	18 Mei 2017	18 Mei 2018	****
Jumlah Dividen (Rp miliar)	298	323	389	584	-

* Disajikan kembali sesuai Pemecahan Saham untuk 10-untuk-1 pada Mei 2017

** Dividen tunai interim diputuskan oleh Rapat Direksi

*** Tidak ada pembayaran dividen tunai interim di 2018

**** Perusahaan menentukan pembayaran dividen final untuk 2018 pada RUPS 2019

IKHTISAR OBLIGASI

Efek Perusahaan yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

TABEL 6 Penerbitan Obligasi selama Lima Tahun Terakhir

Efek Utang yang Diterbitkan	Tanggal Pencatatan di BEI	Tanggal Efektif	Peringkat Obligasi	Jumlah (Rp juta)	Nominal yang Diterbitkan (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Status	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Seri A:	10 Maret 2014	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	500.000	225.000	17 Maret 2015	Lunas	
	Seri B:				55.000	7 Maret 2016		
	Seri C:				220.000	7 Maret 2017		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Seri A:	20 Maret 2015	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	1.000.000	345.000	29 Maret 2016	Lunas	
	Seri B:				105.000	19 Maret 2017		
	Seri C:				550.000	19 Maret 2018		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Seri A:	26 Februari 2016	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	1.000.000	200.000	5 Maret 2017	Lunas	
	Seri B:				142.000	25 Februari 2018		
	Seri C:				658.000	25 Februari 2019		Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Seri A:	26 Oktober 2016	17 Oktober 2016 (No. S588/D.04/2016)	1.000.000	317.000	5 November 2017	Lunas	
	Seri B:				550.000	25 Oktober 2019		Belum jatuh tempo
	Seri C:				133.000	25 Oktober 2021		
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Seri A:	3 Maret 2017	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)	1.000.000	540.000	12 Maret 2018	Lunas	
	Seri B:				460.000	2 Maret 2020		Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Seri A:	10 November 2017	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)	835.000	335.000	19 November 2018	Lunas	
	Seri B:				100.000	9 November 2019		Belum jatuh tempo
	Seri C:				400.000	9 November 2020		
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	Seri A:	7 Maret 2018	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)	2.165.000	946.000	16 Maret 2019	Belum jatuh tempo	
	Seri B:				253.000	6 Maret 2020		
	Seri C:				966.000	6 Maret 2021		
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Seri A:	27 Juni 2018	7 Juni 2018 (No. S-67/D.04/2018)	740.000	188.000	6 Juli 2019	Belum jatuh tempo	
	Seri B:				552.000	26 Juni 2021		

PERISTIWA PENTING 2018



JANUARI

18

- Peresmian Kantor Cabang Maluku Tengah, Maluku
- Acara Pengundian UBER Milyaran Periode IV 2017 dan Pembukaan UBER Milyaran 2018, bertempat di Yogyakarta

31

- Peresmian Kantor Cabang Nganjuk, Jawa Timur



FEBRUARI

10

- Penyelenggaraan *Run Clinic* ke-2 dalam rangka menuju BFI RUN 2018 di The Breeze, BSD City, Tangerang Selatan

15

- Program kesehatan karyawan berupa pemberian vaksin anti-difteri, bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk
- Bakti sosial Cabang Sampit berupa pemberian bantuan perangkat komputer dan pelatihan dasar komputer kepada murid-murid SDN di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah



23

- Meraih *Platinum Award* (peringkat pertama) "Indonesia CSR Award-II-2018" untuk kategori Perusahaan Multifinance Tbk dari majalah *Economic Review*

MARET

19

- Peresmian Unit Usaha Syariah dari BFI Finance dan peluncuran produk wisata halal dan umrah dari BFI Finance Syariah, yaitu *My Ihram* dan *My Safar*

24

- Serah terima *Grand Prize* UBER Milyaran 2017 kepada pelanggan Cabang Kendal, Jawa Tengah, dan Hadiah Utama kepada pelanggan Cabang Bitung, Sulawesi Utara



APRIL

8

- Penyelenggaraan BFI RUN 2018 di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang, diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta lari dengan kategori 21,1K (*Half Marathon*) Nasional, 10K Nasional, dan 5K Nasional

9

- Perayaan HUT BFI Finance ke-36 tahun (7 April) yang dirayakan dengan:
 - Kegiatan CSR lokakarya bagi warga masyarakat di daerah Ciledug, Tangerang, bertema “Memulai, Mengatur, dan Mengelola Usaha”
 - Peresmian BFI Sports Hall di BFI Tower, BSD City, Tangerang Selatan

11

- Program “BFI Talk” berupa konsultasi *live streaming* bersama psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang bertema “Dampak Psikologis Akibat Seringnya Penggunaan Gadget”

17

- RUPST dan RUPSLB 2018 serta Paparan Publik Tahunan di Hotel The Dharmawangsa Jakarta

PERISTIWA PENTING 2018

19

- Penyelenggaraan *Leader's Talk* bersama Irzan Raditya, CEO kata.ai, bertema "Facing Industry 4.0 with Artificial Intelligence"

20

- Peresmian Kantor Cabang ke-2 Gresik, Jawa Timur

20 – 28

- Pengundian UBER Milyaran 2018 Tahap Regional Periode I di Tanjung Pinang, Makassar, Cirebon, Jambi, Jakarta, dan Surabaya

23

- Peresmian Kantor Cabang ke-5 Tangerang, Banten

25

- Meraih "Infobank 7th Digital Brand Awards 2018" dari majalah *Infobank*

26

- Peresmian Kantor Cabang ke-3 Malang, Jawa Timur



MEI

4

- Meraih penghargaan "HR Asia Awards Indonesia 2018" sebagai salah satu dari "HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2018" dari majalah *HR Asia*

24

- Bakti sosial berbagi kasih bagi para guru dari berbagai sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk merayakan Bulan Suci Ramadan 1439 H di Kecamatan Bungaya, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

26

- Program edukasi literasi keuangan mengenai pengenalan perusahaan pembiayaan bagi para guru dan kepala sekolah di SMK Negeri 3 Gowa, Sulawesi Selatan
- Penyelenggaraan "Gerakan Pelatihan Karakter bagi 1000 Anak Bangsa" dan buka puasa bersama bagi para siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah dari empat SMK di Gowa, Sulawesi Selatan

31

- Meraih penghargaan "Top 100 Most Valuable Indonesian Brands 2018" dari majalah *SWA* dan *Brand Finance*



JUNI

7

- Meraih “Corporate Image Award 2018” untuk kategori *Heavy Equipment Leasing* dari Frontier Consulting Group dan majalah *MARKETING*

JULI

2

- Peresmian Kantor Cabang ke-2 Depok, Jawa Barat

5

- Peresmian Kantor Cabang ke-6 Bandung, Jawa Barat

14

- Penyelenggaraan *National Dealer Gathering 2018* di Pekanbaru, Riau

21

- Pengundian UBER Milyaran 2018 Tahap Nasional Periode I, bertempat di Mataram, NTT

31

- Konferensi pers untuk memberikan klarifikasi dari BFI Finance atas *legal issue* antara Perusahaan dengan pemegang saham terdahulu, di Jakarta



AGUSTUS

8

- Peresmian Kantor Cabang ke-3 Makassar, Sulawesi Selatan

25

- Serah terima Hadiah Utama UBER Milyaran 2018 (Pengundian Tahap Nasional Periode I) kepada pelanggan Cabang Solo 2, di Sukoharjo, Jawa Tengah

31

- Penyelenggaraan Leader’s Talk bersama Joseph Bataona, tokoh SDM Indonesia, bertema “~~Remove~~ People Before Flight”



SEPTEMBER

1, 4, 5, 6, 12, 14

- Partisipasi enam kantor cabang di Surabaya dalam program “Merdeka dari Sampah 2018” yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan *Harian Radar Surabaya*

6

- Meraih *hat-trick* “Infobank Multifinance Awards” sebagai Peringkat Pertama Rating Perusahaan Multifinance se-Indonesia dari majalah *Infobank*

11

- Serah terima Hadiah Utama UBER Milyaran 2018 (Pengundian Tahap Nasional Periode I) kepada pelanggan Cabang Pangkalan Balai di Palembang, Sumatera Selatan

16

- *Touring* seru berkeliling Kota Denpasar, Bali, bertema “BFI FINANCE is NUMBER ONE” oleh Cabang Denpasar

25

- Peresmian Kantor Cabang ke-5 Pekanbaru, Riau

25 – 26

- Penyelenggaraan perdana dari empat seri Pelatihan Bisnis Mikro untuk para pengusaha UMKM di Malang, Jawa Timur, kerja sama dengan Komunitas Rumah Pengusaha Malang Raya (Rumah PMR)

OKTOBER

1

- Peresmian Kantor Cabang Barito Kuala, Kalimantan Selatan

6 – 19

- Pengundian UBER Milyaran 2018 Tahap Regional Periode II di Samarinda, Semarang, Bekasi, Ambon, Maluku, Denpasar, dan Banjarbaru

15

- Peresmian kantor operasional anak usaha BFI Finance yang bergerak di bidang teknologi finansial, yaitu PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), di BFI Tower, BSD City, Tangerang Selatan

17

- Penyelenggaraan program CSR Regional berupa renovasi sarana olah raga dan kebersihan SD di di Bekasi Utara, Jawa Barat

21

- Penyelenggaraan program CSR Regional berupa renovasi perpustakaan SD di Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara

26

- Meraih “Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2018” sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan Kinerja Terbaik (*Outstanding Performance*) dari majalah *Warta Ekonomi*

26 – 28

- Partisipasi dalam “Multifinance Day 2018” yang diselenggarakan oleh APPI di Makassar, Sulawesi Selatan



PERISTIWA PENTING 2018

NOVEMBER

1

- Presentasi “BFI Tech Scholarships Program” di Purwadhika Startup and Coding School, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang Selatan

6

- Penyelenggaraan *Leader’s Talk* bersama Yoris Sebastian, Founder OMG Creative Consulting, bertema “Thinking Outside the Box, Execute Inside the Box”



6 – 9

- Penyelenggaraan program *Trauma Healing* pascagempa dan *tsunami* bagi para karyawan Cabang Palu di Sulawesi Tengah

7

- Meraih penghargaan *Silver Achievement (Silver Winner)* “OPEXCON Project Competition 2018” kategori *Financial Services* dari majalah *SHIFT Indonesia*

14

- Konferensi Pers *Launching BFI RUN 2019* di Plaza Senayan, Jakarta

19

- Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka (*Term Loan – Uncommitted Line*) sebesar Rp1 triliun dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Jakarta

29

- Meraih penghargaan Peringkat Pertama “Top 20 Financial Institution 2018” dari *The Finance*, portal berita online dari Infobank Group
- Meraih “Best of the Best Awards 2018” sebagai salah satu Perusahaan Terbuka dengan Kinerja Terbaik dari majalah *Forbes Indonesia*



DESEMBER

5

- Meraih penghargaan “Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2018” dari APPI dalam acara “Pertemuan Anggota & Apresiasi APPI”

10

- Meraih Trofi “Best Disclosure and Transparency” dan predikat “Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Big Cap PLCs) dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
- Peresmian bangunan Sekolah Indonesia Cepat Tanggap, kerja sama dengan Iluni FTUI dan FUSI Foundation, di Kabupaten Lombok Utara, NTB

21

- Peresmian Bank Sampah Wira Bintari di Kel. Wirogunan, Kec. Mergansan, Yogyakarta, sebagai salah satu kegiatan CSR Regional dari Region 10 (Jawa Tengah dan Yogyakarta)

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

2018



Trofi Platinum untuk Perusahaan Multifinance dengan **Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Sepuluh Tahun Berturut-turut** (2008–2017) oleh majalah *Infobank*, pada 6 September 2018 di Jakarta



Penganugerahan *Infobank Multifinance Awards 2018* (tahun ke-3 berturut-turut) sebagai **Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2017** dan Peringkat Pertama kategori “Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas” oleh majalah *Infobank*, pada 6 September 2018 di Jakarta



Penghargaan “Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2018” untuk kategori aset di atas Rp5 triliun oleh APPI, pada 5 Desember 2018 di Jakarta



Trofi **“Best Disclosure and Transparency”** sebagai salah satu dari 50 perusahaan publik terbaik dalam penerapan tata kelola yang baik (GCG) oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), pada 10 Desember 2018 di Jakarta



Peringkat pertama dalam penganugerahan **“The Finance Top 20 Financial Institution 2018”** kategori “Perusahaan Multifinance Beraset Rp10 Triliun ke Atas” oleh Infobank Group, pada 29 November 2018 di Jakarta



Penghargaan *HR Asia Awards Indonesia “Best Companies to Work For in Asia 2018”* oleh majalah *HR Asia*, pada 4 Mei 2018 di Jakarta



Penghargaan Khusus **"The Biggest Leasing Financing"** untuk pencapaian terbaik di bidang usaha Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) oleh majalah *Infobank*, pada 6 September 2018 di Jakarta



Penghargaan Khusus **"The Most Efficient Finance Company"** untuk kategori perusahaan beraset Rp10 triliun ke atas oleh majalah *Infobank*, pada 6 September 2018 di Jakarta



Penghargaan **"Best of the Best Awards 2018"** sebagai salah satu dari "The Top 50 Companies for 2018" atau Perusahaan Terbuka dengan Kinerja Terbaik oleh majalah *Forbes Indonesia*, pada 29 November 2018 di Jakarta



Penghargaan *Corporate Image Award 2018* **"The Best in Building and Managing Corporate Image"** kategori *Heavy Equipment Leasing* (Sewa Pembiayaan Alat Berat) oleh Frontier Consulting Group berkolaborasi dengan majalah *MARKETING* berdasarkan hasil survei *Indonesia's Most Admired Companies (IMAC) 2018*, pada 8 Juni 2018 di Jakarta



Penghargaan **"Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2018"** sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan Kinerja Terbaik (*Outstanding Performance*) Kategori Aset di atas Rp10 Triliun oleh majalah *Warta Ekonomi*, pada 26 Oktober 2018 di Jakarta



Penghargaan **"Infobank 7th Digital Brand Awards 2018"** oleh majalah *Infobank* dan *Isentia Indonesia* pada 25 April 2018 di Jakarta



Penghargaan **"Top 100 Most Valuable Indonesian Brands 2018"** oleh Brand Finance dan majalah *SWA*, pada 31 Mei 2018 di Jakarta



Penganugerahan penghargaan *Silver Achievement (Silver Winner)* **"OPEXCON Project Competition 2018"** dari majalah *SHIFT Indonesia* dalam "Indonesia Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) 2018" kategori *Financial Services*, pada 7 November 2018, bertempat di Jakarta



Platinum Award dalam **"Indonesia CSR Award-II-2018"** untuk Kategori Perusahaan Terbuka *Multifinance* oleh majalah *Economic Review*, pada 23 Februari 2018 di Jakarta

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN



2017

Penghargaan "**Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2016**" untuk kategori aset di atas Rp5 triliun oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), pada 24 Januari 2017 di Jakarta

Platinum Award dalam "**Indonesia CSR Award 2017**" Kategori Perusahaan Terbuka *Multifinance* oleh majalah *Economic Review*, pada 24 Februari 2017 di Jakarta

Penghargaan "**The IICD CG Appreciation**" untuk Peringkat Pertama Kategori *Best Overall* dan 50 Perusahaan Publik dengan Kapitalisasi Pasar Menengah dan Praktik GCG Terbaik (Top 50 Emiten MidCap) oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), pada 17 April 2017 di Jakarta

Penghargaan *HR Asia Awards* Indonesia "**Best Companies to Work for in Asia 2017**" oleh HR Asia, pada 19 Mei 2017 di Jakarta

Infobank Multifinance Awards 2017 sebagai **Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2016** dan Peringkat Pertama kategori "Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 triliun ke atas" oleh majalah *Infobank*, pada 14 September 2017 di Jakarta

2016

Penghargaan ***Lifetime Achievement in Multifinance Industry 2015*** untuk Bapak Francis Lay Sioe Ho, Presiden Direktur BFI Finance, oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

Penghargaan *Market Conduct 2015* sebagai **Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang Telah Melaksanakan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan** Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penghargaan ***Infobank Digital Brand Awards 2016*** oleh majalah *Infobank* berdasarkan hasil survei *Infobank* bersama Isentia Research selama 2015

Penghargaan ***Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2016*** untuk kategori *The Best of Human Capital Initiatives (The Best Recruitment System Initiative)* oleh Dunamis Human Capital dan majalah *BusinessNews Indonesia*

Penghargaan untuk Bapak Francis Lay Sioe Ho, **Presiden Direktur dan CEO BFI Finance**, sebagai salah satu Finalis "**CNBC 15th Asia Business Leaders Awards (ABLA) 2016**" dari CNBC Asia



2015

Penghargaan *Corporate Image Award 2015* oleh Frontier Consulting Group dan majalah *TEMPO* untuk **“The Best in Building and Managing Corporate Image”** kategori *Heavy Equipment Leasing* (Sewa Pembiayaan Alat Berat), berdasarkan hasil survei *Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) 2015*

Infobank Multifinance Awards 2015 sebagai Perusahaan **Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2014 dan Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan Multifinance Terbaik** oleh majalah *Infobank*

Trofi Emas untuk **Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut** (2010-2014) oleh majalah *Infobank*

Penghargaan Indonesia Human Capital Study (IHCS) Award 2015 oleh Dunamis Human Capital dan majalah *BusinessNews Indonesia* dalam kategori *Appreciation of Human Capital Management System Improvement*

2014

Penghargaan *Corporate Image Award 2014* oleh Frontier Consulting Group, majalah *TEMPO* dan majalah *MARKETING* untuk **“The Best in Building and Managing Corporate Image”** kategori *Heavy Equipment Leasing* (Sewa Pembiayaan Alat Berat), berdasarkan hasil survei *Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) 2014*

Penghargaan “Maju Berkat Kredit” oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berdasarkan **kinerja Perusahaan dalam membantu pelanggannya meraih kesuksesan** berkat fasilitas pembiayaan dari BFI Finance

Trofi Emas untuk Perusahaan **Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut** (2009-2013) oleh majalah *Infobank*

Penghargaan “Investor Awards Best Listed Companies 2014” oleh majalah *Investor* sebagai **salah satu Emiten Terbaik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kinerja sepanjang** tahun 2013 hingga triwulan pertama 2014

Penghargaan “Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2014” oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk kategori aset di atas Rp5 triliun



Era disrupti memacu kami untuk mampu bergerak dari zona nyaman dan terus terpacu untuk beradaptasi dan melesat maju sehingga tetap menjadi pionir di industri pembiayaan.

Yoga Aryanto
HETO and Machinery Product Head



Laporan Manajemen

- 30 Laporan Dewan Komisaris
- 38 Laporan Direksi
- 44 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 45 Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya terhadap BFI Finance selama 2018 yang telah kita lalui bersama.

Di bawah kendali dan pengelolaan yang baik oleh seluruh anggota Direksi, selama 2018 BFI Finance terus mencatatkan kinerja yang memuaskan dan membukukan pertumbuhan bisnis yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis di industri pembiayaan di Indonesia. Meskipun 2018 merupakan tahun yang sarat tantangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, Direksi berhasil menerapkan pola manajemen yang tepat dan strategi-strategi bisnis yang efektif untuk menghasilkan pencapaian yang unggul, dan membawa Perusahaan pada posisi yang terkemuka dan membanggakan.

Slogan “Embracing a New Normal”, yang menjadi tema Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 ini, sangat relevan sebagai representasi simbolis dari perkembangan bisnis BFI Finance di semua aspek selama 2018. Pergerakan tren-tren dari ranah digital yang perlahan-lahan menggeser pola perilaku konsumen, cara bekerja dan berbisnis, serta menghadirkan fungsi-fungsi baru dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat, telah mendorong

BFI Finance untuk menciptakan proses-proses baru berbasis digital, agar bisnisnya menjadi semakin efisien sekaligus agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan ini. Dengan demikian, BFI Finance dapat tetap mempertahankan bisnis utamanya dan mengembangkan bisnisnya lebih intensif lagi di masa mendatang.

Keberhasilan BFI Finance dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis jangka panjangnya sangat bergantung pada kebijakan dan strategi yang dijalankannya di masa sekarang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengapresiasi setiap upaya dan inisiatif yang telah diterapkan secara disiplin oleh manajemen dan seluruh karyawan, untuk memastikan BFI Finance berada pada peta jalan yang mengarah pada masa depan yang cerah.

SITUASI EKONOMI DAN INDUSTRI PEMBIAYAAN DI 2018

Perkembangan ekonomi global di 2018 menunjukkan kondisi yang sangat kontras. Selama paruh pertama 2018, sentimen pasar cenderung optimistis, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat di berbagai negara maju, didukung oleh kenaikan harga sejumlah komoditas penting. Indonesia menerima sentimen positif dari pasar sehingga arus investasi asing terus masuk, meningkatkan likuiditas di pasar.



**Kusmayanto
Kadiman**

Presiden Komisaris

“

Pergerakan tren-tren dari ranah digital yang perlahan-lahan menggeser pola perilaku konsumen, cara bekerja dan berbisnis, serta menghadirkan fungsi-fungsi baru dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

“

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Efisiensi ekonomi di Indonesia terus meningkat, meskipun belum pada laju yang diharapkan banyak pihak. Selesainya sejumlah proyek infrastruktur yang digagas pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan pola kemitraan dengan pihak swasta menghadirkan kepercayaan diri bahwa dalam waktu dekat arus transportasi akan semakin membaik, sehingga menstimulasi aktivitas ekonomi di hampir semua bidang.

Memasuki paruh kedua 2018, perkembangan positif ini seolah menyentuh titik balik dan bergerak lebih lamban. Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang (*emerging market*) akibat normalisasi kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) untuk menaikkan suku bunga acuannya hingga empat kali selama 2018 turut membuat nilai tukar dolar AS meningkat dan mata uang negara berkembang termasuk rupiah terdepresiasi. Sejalan dengan itu, arus dana asing bergerak keluar dari Indonesia, mengetatkan likuiditas di pasar. Suku bunga pinjaman meningkat sejalan dengan kesigapan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan, agar mengembalikan daya tarik rupiah dan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Pada akhirnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%, lebih baik dari 5,07% yang dialami di 2017.

KINERJA OPERASIONAL DAN FINANSIAL BFI FINANCE DI 2018

Di tengah atmosfer bisnis yang memberatkan dunia usaha pembiayaan, BFI Finance berhasil membukukan kenaikan piutang pembiayaan bersih sebesar 13,9% di 2018, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri pembiayaan sebesar 5,2%.

“
Perusahaan berhasil tetap tumbuh di atas rata-rata industri, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya.
“

Perusahaan berhasil tetap tumbuh di atas rata-rata industri, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, inovasi demi inovasi terus Perusahaan luncurkan, mulai dari intensifikasi produk-produk pembiayaan andalan BFI Finance (pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan), pendalaman pasar dengan pembukaan cabang dan gerai baru, hingga peluncuran produk-produk baru di segmen Pembiayaan Syariah, penguatan Pembiayaan Properti, serta pemberdayaan SDM Perusahaan untuk mengejar *leads* dan mengonversinya menjadi bisnis baru.

Bagi Dewan Komisaris, bagaimanapun juga, inovasi yang dampaknya sangat monumental terhadap penguatan Perusahaan secara keseluruhan adalah upaya digitalisasi proses bisnis, mulai dari proses originasi hingga *collection* dan layanan konsumen. Upaya ini akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang sangat besar, terutama dalam cara Perusahaan mendekati diri ke semua konsumennya, mengelola beragam risiko

bisnisnya, serta tentunya meningkatkan efisiensi operasionalnya. Semua ini akan memperkuat posisi dan kinerja keuangan Perusahaan. Untuk itu, inisiatif seperti ini perlu terus dijalankan di tahun-tahun mendatang. BFI Finance haruslah menjadi perusahaan pembiayaan yang terdepan dalam aspek teknologi informasi, yang paling siap untuk beradaptasi di tengah transformasi pasar.

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi inisiatif yang telah manajemen tunjukkan untuk mengimbangi kemajuan di bidang teknologi informasi ini dengan penguatan segi SDM. Tanpa SDM yang berkualitas, kompeten, dan memiliki *mindset* yang haus inovasi dan siap menghadapi perubahan, semua penyempurnaan dalam sistem, infrastruktur, dan prosedur di Perusahaan tidak akan optimal dampaknya.

Untuk jangka pendek, semua gebrakan dan inisiatif strategis Perusahaan berhasil menciptakan keunggulan dan kinerja yang memuaskan dari segi finansial. Ditopang pertumbuhan pembiayaannya yang mencapai Rp18.342 miliar per akhir 2018, BFI Finance membukukan pendapatan usaha senilai Rp5.018 miliar dan laba bersih senilai Rp1.468 miliar, yang mencerminkan pengembalian atas aset (ROA) sebesar 10,3%. Ini menunjukkan kapabilitas BFI Finance dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang sahamnya.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Sepanjang 2018, Direksi bersama seluruh jajaran manajemen telah menjalankan berbagai kebijakan yang sesuai dengan karakter BFI Finance sebagai perusahaan pembiayaan independen yang bereputasi tinggi di industri. Semua langkah perbaikan sistem, penguatan operasional, dan upaya perluasan bisnis secara keseluruhan sangat tepat dalam upaya Perusahaan meraih target-target jangka menengah dan jangka panjangnya. BFI Finance perlu terus tumbuh secara konsisten, dengan tingkat risiko yang senantiasa terkendali, struktur permodalan yang tangguh, dan didukung oleh sistem yang andal dan SDM yang mumpuni.

Untuk itu, Dewan Komisaris ingin mengapresiasi inisiatif yang ditempuh Direksi di tengah kondisi pasar yang kurang baik di penghujung 2018, yaitu membatasi aktivitas penyaluran kredit baru sambil mengambil waktu untuk meninjau kembali kualitas portofolio pembiayaan Perusahaan secara komprehensif, mengingat kondisi industri pembiayaan di masa mendatang akan semakin menantang.

Setelah berhasil mempertahankan pertumbuhan yang fenomenal selama lima tahun terakhir, dengan CAGR 14,0%, jauh di atas rata-rata industri, BFI Finance dapat tetap menjaga rasio NPF-nya pada posisi yang sangat sehat, yaitu 1,21%. Meskipun nilainya meningkat dibandingkan NPF per akhir 2017, nilai ini masih dalam kategori rendah dan aman, dan jauh di bawah rata-rata industri sebesar 2,71%. Melalui penerapan sistem manajemen risiko yang cermat dan inisiatif-inisiatif baru dalam proses *collection*, Dewan Komisaris berharap NPF di 2019 dapat tetap dijaga.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



DEWAN KOMISARIS kiri ke kanan:

1. **Kusmayanto Kadiman**
Presiden Komisaris
2. **Emmy Yuhassarie**
Komisaris (Independen)
3. **Johanes Sutrisno**
Komisaris (Independen)
4. **Alfonso Napitupulu**
Komisaris (Independen)
5. **Cornellius Henry Kho**
Komisaris
6. **Dominic John Picone**
Komisaris
7. **Sunata Tjiterosampurno**
Komisaris

Kinerja Direksi yang memuaskan menjadikan BFI Finance perusahaan pembiayaan yang terdepan di Indonesia sekaligus memperoleh pengakuan dari pihak-pihak eksternal. Sepanjang 2018, BFI Finance telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, antara lain: Peringkat Pertama Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas untuk tahun yang ketiga berturut-turut dari *Infobank*; *Platinum Award* dan Peringkat Pertama untuk kategori Perusahaan Terbuka *Multifinance* dari *Economic Review*; “Best Disclosure and Transparency” dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); “Top 100 Most Valuable Indonesian Brands 2018” dari Brand Finance dan SWA; “Best Company to Work For in Asia 2018” dalam “HR Asia Awards Indonesia” dari *HR Asia*; “Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2018” dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI); dan “Best of the Best Awards 2018” sebagai salah satu dari “The Top 50 Companies for 2018” dari *Forbes Indonesia*. Ini menunjukkan prestasi BFI Finance yang istimewa di berbagai aspek, tak hanya sebatas kinerja operasional dan finansialnya semata.



KEPATUHAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam mengelola bisnis BFI Finance sepanjang 2018, Direksi senantiasa berkoordinasi dan menyampaikan informasi terkait rencana bisnis dan implementasinya secara transparan kepada Dewan Komisaris. Setiap rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui rapat-rapat berkala dengan Direksi telah ditindaklanjuti dengan baik selama 2018, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dewan Komisaris juga menjaga independensi masing-masing organ tata kelola Perusahaan dengan tidak melakukan interferensi apapun terhadap pengelolaan Perusahaan, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Direksi.

Pada awal 2018, BFI Finance diaudit secara komprehensif oleh OJK. Hasil audit tersebut menunjukkan sebagian besar operasional Perusahaan dan tata kelola telah berjalan baik,

dengan tingkat risiko rendah. Seluruh temuan dan rekomendasi OJK telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan baik. Kami percaya bahwa keberhasilan dalam aspek kepatuhan ini bersandar pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang telah dijiwai oleh setiap karyawan di seluruh lapisan organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Pada saat yang sama, Dewan Komisaris juga berdiri di belakang Direksi yang tengah menghadapi kasus hukum dari pemegang saham terdahulu terhadap BFI Finance, Direksi, pemegang saham utama saat ini, beserta beberapa pihak lainnya. Dewan Komisaris mempercayakan sepenuhnya kepada Direksi atas langkah-langkah hukum yang telah dan akan diambil untuk melindungi kepentingan Perusahaan beserta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap sengketa ini dapat segera diselesaikan secara baik dan berkeadilan.

“
Tanpa SDM yang berkualitas, kompeten, dan memiliki *mindset* yang haus inovasi dan siap menghadapi perubahan, semua penyempurnaan dalam sistem, infrastruktur, dan prosedur di Perusahaan tidak akan optimal dampaknya.
“

KINERJA KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DI 2018

Di 2018 tidak terdapat perubahan terhadap susunan anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen telah menjalankan tugas-tugasnya dalam melindungi kepentingan berbagai pihak minoritas dan eksternal selama 2018 tanpa hambatan ataupun kesulitan, dan telah mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, ketiga komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi, telah bekerja secara independen dan optimal sehingga sangat membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya bisnis Perusahaan di 2018. Setiap komite tersebut rutin menyelenggarakan rapat dan melaporkan hasil rapat serta hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris, berikut rekomendasi yang penting bagi Dewan Komisaris dalam mengambil sikap dan keputusan.

Secara khusus, Komite Audit sesuai tanggung jawabnya telah menelaah laporan keuangan Perusahaan dan memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap semua peraturan terkait pelaporan keuangan dan proses audit, baik internal maupun eksternal. Kinerja auditor eksternal juga telah dievaluasi oleh Komite Audit. Komite Manajemen Risiko telah memastikan seluruh risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi dan dimitigasi dengan cermat dan memadai, sehingga potensi terjadinya penurunan terhadap metrik bisnis Perusahaan dapat diminimalisasi atau diantisipasi dengan baik oleh manajemen. Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi di 2018 telah melakukan kajian terhadap sistem nominasi dan remunerasi yang berlaku di Perusahaan, serta mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan melakukan penyempurnaan sesuai peraturan-peraturan terkait.

PROSPEK DAN RENCANA BISNIS 2019

Dewan Komisaris memandang bahwa 2019 akan kembali sarat dengan tantangan. Pelemahan ekonomi di Tiongkok masih akan terus menjadi kekhawatiran pelaku pasar sepanjang tahun, karena cakupan dampaknya yang berpotensi sangat luas dan besarnya sulit diprediksi. Lesunya pasar komoditas sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Pertumbuhan di pasar modal dan di industri perbankan pun akan sangat dipengaruhi oleh situasi likuiditas. Sementara sumber pendanaan dari bank dalam negeri mungkin mengurangi eksposurnya terhadap industri pembiayaan, para pemain di industri ini harus mulai mampu menjangkau sumber-sumber pendanaan di luar negeri yang siap menyalurkan modalnya ke tempat-tempat yang menjanjikan imbal hasil tinggi namun dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Mencermati perkembangan situasi perekonomian di awal 2019, Dewan Komisaris telah meninjau rencana bisnis yang dibuat Direksi untuk diterapkan sepanjang tahun. Dewan Komisaris optimis bahwa rencana-rencana tersebut dapat mendorong kinerja Perusahaan untuk mempertahankan perspektif pertumbuhannya, dengan kualitas portofolio pembiayaan yang tetap baik dan margin bunga bersih yang atraktif. Dewan Komisaris mendukung rencana manajemen untuk memperkuat sumber-sumber originasi Perusahaan, mendiversifikasi jalur-jalur pemasarannya (termasuk aktivitas usaha PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), anak perusahaan di bidang *P2P lending*), serta memperkuat peranan teknologi informasi dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang kerap dijumpai dalam proses-proses bisnis konvensional.

Dengan demikian, setiap tahapan dalam rantai operasi BFI Finance, mulai dari aplikasi pembiayaan hingga *collection* dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan dilandasi perhitungan dan analisis yang matang.

UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENUTUP

Sebagai penutup, saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih bagi seluruh jajaran Direksi, manajemen, dan karyawan BFI Finance atas kerja keras, dedikasi, dan semangat tinggi, yang memampukan Perusahaan meraih hasil-hasil operasional dan finansial yang sangat memuaskan di 2018. Kami juga menghargai dukungan dan loyalitas dari para pemegang saham, nasabah, dan mitra usaha BFI Finance, serta kepada pemerintah, regulator, dan masyarakat di setiap tempat di mana BFI Finance berada. Harapan kami, keberadaan BFI Finance di tengah-tengah masyarakat dapat menghadirkan manfaat bukan hanya dari segi pemberdayaan finansial melalui produk-produk pembiayaannya, tetapi juga dari segi peningkatan kualitas hidup dan kapabilitasnya untuk meraih dan mewujudkan aspirasi mereka.

Atas nama Dewan Komisaris
PT BFI Finance Indonesia Tbk,



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

LAPORAN DIREKSI

Pemegang saham yang terhormat,

Menjadi kehormatan bagi kami untuk menyampaikan Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 BFI Finance, di mana dalam laporan ini kami menyampaikan secara terperinci kinerja keuangan dan operasional kami untuk tahun tersebut. Tahun 2018 kami awali dengan optimisme tinggi. Harga sejumlah komoditas utama kembali naik karena penguatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan ekspektasi pasar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakpastian makroekonomi dan politik global, kenaikan suku bunga acuan oleh Federal Reserve AS yang berkelanjutan, melemahnya rupiah, dan persiapan Pemilihan Presiden RI di 2019 telah membuat dunia bisnis dan konsumen semakin berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan pembelanjaan anggaran.

Kami tidak dapat mengendalikan kondisi makro ataupun kebijakan pemerintah, tetapi kami terus bersiap menghadapi tantangan yang timbul. Sepanjang waktu, kami terus berfokus untuk mencapai sasaran bisnis kami dengan meluncurkan berbagai inisiatif seperti peningkatan kemampuan penjaminan dengan menggunakan sistem *scorecard*, peningkatan produktivitas penagihan dengan sistem dan analisis data yang lebih baik, serta restrukturisasi organisasi di tingkat cabang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kami juga menyadari pentingnya keberadaan mitra bisnis kami, dan senantiasa meningkatkan pengelolaan jalur agensi melalui penilaian dan struktur insentif yang lebih baik.

Kami berhasil membukukan pembiayaan baru sebesar Rp16,4 triliun di 2018, sehingga jumlah aset kami mencapai Rp19,1 triliun di akhir tahun.

Meskipun laju pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kami tetap bertahan dan berusaha untuk mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan dan tetap lebih tinggi dari rata-rata industri. Kami senantiasa beradaptasi dan memperluas bisnis kami di area-area di mana kami memiliki pengetahuan kuat dan keunggulan kompetitif. Kami tetap fokus pada portofolio pembiayaan berbasis agunan, dan terus berinvestasi dalam karyawan dan sistem kami untuk memberdayakan strategi tersebut. Pertumbuhan kami telah dan akan terus didorong oleh fokus untuk melayani pasar dan demografi masyarakat yang kami kenal baik.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Beberapa peristiwa penting terjadi di 2018. Ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang dampaknya dirasakan di seluruh dunia, dan sejumlah kebijakan ekonomi AS yang agresif dan akhirnya mendorong Federal Reserve untuk menaikkan suku bunganya empat kali menjadi 2,5%.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia turut meningkatkan suku bunga *7-day (reserve) repo rate* tujuh kali sepanjang 2018, dari 4,25% menjadi 6,00%, untuk mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia dan menarik investasi asing sambil menjaga stabilitas rupiah. Meskipun demikian, investasi asing langsung mengalami kontraksi selama 2018, turun 20,2% *year-on-year* per kuartal ketiga 2018, yang merupakan penurunan yang ketiga kalinya dalam tiga kuartal berturut-turut. Likuiditas di pasar domestik masih memadai, namun penyaluran kredit

A full-length portrait of Francis Lay Sioe Ho, President and Director, standing against a blue background. He is wearing a traditional Indonesian batik shirt with a complex brown and gold pattern, black trousers, and black shoes. His hands are in his pockets. An orange rectangular frame is positioned around the upper part of his portrait.

Francis Lay Sioe Ho

Presiden
Direktur

“

Seiring evolusi kami bersama dengan konsumen, kami juga berevolusi dengan angkatan kerja dari generasi baru yang lebih sadar dan terbuka dengan teknologi, inovasi, dan berpotensi membawa ide-ide baru yang segar ke tempat kerja.

“

DIREKSI kiri ke kanan:

1. **Francis Lay Sioe Ho**
Presiden Direktur
2. **Sudjono**
Direktur Keuangan
3. **Andrew Adiwijanto**
Direktur Operasional dan
Sumber Daya Manusia
4. **Sutadi**
Direktur Bisnis
5. **Sigit Hendra Gunawan**
Direktur Risiko Perusahaan
(Independen)



korporasi menjadi lebih lamban sebagai akibat dari kekhawatiran terkait pemburukan kualitas pinjaman, mengingat ketidakpastian ekonomi dan politik yang terjadi. Menurut PEFINDO, pertumbuhan kredit perbankan ke lembaga keuangan hanya 7,7% selama 2018, turun dari 10,4% pada 2017 dan 17,8% pada 2016. Kegagalan beberapa pelaku bisnis pembiayaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya di 2017 dan 2018 juga berdampak pada semakin ketatnya industri perbankan dalam menyalurkan kredit ke lembaga keuangan.

Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,17% di 2018, dengan inflasi terkendali pada 3,13%, lebih rendah dari 3,61% di 2017 dan jauh di bawah kisaran 3,5-4,5% yang ditargetkan pemerintah. Akan tetapi rupiah turut bergejolak dan mencapai posisi terendahnya sejak Krisis Keuangan Asia 1998 ke angka Rp15.253/USD pada Oktober 2018, sebelum akhirnya menutup tahun di angka Rp14.380/USD. Secara keseluruhan, industri pembiayaan Indonesia tumbuh 5,2% di 2018, atau lebih rendah dari 7,1% di 2017. Jumlah piutang naik menjadi Rp436,3 triliun per Desember 2018 dari

Rp414,8 triliun per Desember 2017. NPF industri mencapai 2,71%, lebih rendah dibandingkan 2,96% per akhir 2017.

KINERJA KEUANGAN 2018

Aset di 2018 tumbuh sebesar 16,0%, mencapai Rp19,1 triliun kendati paruh kedua 2018 sangat menantang. Piutang bersih tercatat Rp17,3 triliun, naik 13,9%. Laba tahun berjalan naik 23,6% dari tahun sebelumnya, mencapai Rp1,5 triliun. Pertumbuhan pembiayaan baru mencapai 14,2% *year-on-year*, didorong oleh bisnis pembiayaan kendaraan bermotor, yang memberikan kontribusi 85,0% terhadap jumlah pembiayaan baru di 2018. Dengan demikian, kami dapat membukukan margin bunga bersih yang tinggi sebesar 11,9%, akibat imbal hasil yang stabil dan kemampuan kami untuk dapat memperoleh dana murah sebagai hasil dari bauran liabilitas bersuku bunga tetap.



Di 2018, kami berupaya membendung kenaikan NPF dengan menerapkan standar penjaminan pembiayaan yang lebih tinggi dan prosedur penagihan yang lebih ketat. Berkat pendekatan yang sangat hati-hati dalam pengelolaan portofolio, NPF kami hanya memburuk sedikit, turun ke angka 1,21% dibandingkan 0,95% di 2017. Berdasarkan data OJK, NPF industri untuk 2018 adalah 2,71%, sehingga NPF kami masih jauh di bawah rata-rata.

KINERJA OPERASIONAL 2018

Di 2018, kami memperluas jangkauan jaringan kami dengan membuka 49 gerai dan 11 cabang baru di seluruh Indonesia, sehingga jumlah keseluruhan outlet kami adalah 401, yang terdiri dari 228 cabang dan 173 gerai di seluruh Indonesia. Dari 228 cabang tersebut, di antaranya terdapat 22 unit layanan pembiayaan syariah yang terhubung dengan cabang reguler tersebut.

Pengalaman operasional dan transaksional yang lebih fleksibel berperan sangat penting seiring dengan upaya kami untuk berkembang sesuai kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Sepanjang 2018, kami senantiasa mengadaptasikan dan merampingkan proses-proses, mengoptimalkan manajemen agensi, meningkatkan kinerja penyaluran pembiayaan, serta meningkatkan nilai produk yang kami tawarkan. Salah satunya adalah produk Syariah yang kami pasarkan melalui platform *online* dan konvensional, di mana penilaian kelayakan dilakukan secara digital dengan tujuan untuk memberikan pengalaman istimewa bagi konsumen.

Sebelumnya di 2017, kami mendirikan PT FIT, anak perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech*, yang telah mendapatkan persetujuan untuk terdaftar di OJK pada September 2018 dan sejak saat itu pula telah menjejalkan kaki kami di platform *peer-to-peer lending*. Ini adalah upaya perdana kami untuk masuk ke dunia *Fintech*, sebagai kurva pembelajaran bagi kami dalam membangun infrastruktur, basis data, dan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengembangkan ekosistem di bisnis ini.

Di 2018, operasi bisnis Perusahaan terdampak oleh peristiwa gempa bumi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Untuk memitigasi dampak tersebut, rencana bantuan yang komprehensif berdasarkan *Business Continuity Plan* (BCP) telah dilaksanakan oleh Emergency Response Team (ERT) yang terus mengawal proses identifikasi kerugian potensial, relokasi operasi, dan rehabilitasi fasilitas yang melibatkan aset dan sumber daya kami di daerah yang terdampak.

SUMBER DAYA MANUSIA

Kami senantiasa mengadopsi pendekatan dan metodologi baru untuk memperkuat budaya organisasi dan ketangkasannya di Perusahaan. Seiring evolusi kami bersama dengan konsumen, kami juga berevolusi dengan angkatan kerja dari generasi baru yang lebih sadar dan terbuka dengan teknologi, inovasi, dan berpotensi membawa ide-ide baru yang segar ke tempat kerja. Maka dari itu, kami terus berupaya mengidentifikasi dan mengembangkan calon-calon pemimpin baru, melengkapi dan memberdayakan mereka dengan keahlian yang diperlukan untuk memastikan perkembangannya dalam organisasi BFI Finance.

Manajemen sumber daya manusia kami semakin didukung dan difasilitasi oleh serangkaian inisiatif teknologi informasi yang tengah berlangsung. Berbagai *dashboard* telah dikembangkan dan digunakan dalam operasional harian kami untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Proses tersebut turut didukung oleh redefinisi kompetensi inti untuk karyawan BFI Finance, yang mencakup komitmen berorganisasi dan fokus ke konsumen, hingga kemitraan strategis dan keputusan yang tangkas.

“
Kami senantiasa beradaptasi dan memperluas bisnis kami di area-area di mana kami memiliki pengetahuan kuat dan keunggulan kompetitif.
“

TATA KELOLA PERUSAHAAN

BFI Finance senantiasa menjunjung tinggi reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan independen terkemuka di Indonesia, tak hanya dalam hal kinerja keuangan dan skala bisnisnya, namun juga dalam tata kelola perusahaan. Tata kelola dan kepatuhan yang kuat sangat penting bagi kami karena kepercayaan dari para pemangku kepentingan bergantung pada hal tersebut.

Tim audit internal dan manajemen risiko kami telah dilengkapi untuk mendampingi pertumbuhan bisnis kami dan memitigasi hal-hal yang dapat menghambat di masa mendatang. Kami juga telah melakukan komunikasi yang berkelanjutan dan produktif dengan Dewan Komisaris beserta komite-komite di bawahnya, dan dari mereka kami telah menerima dukungan kuat yang sejalan dengan ekspektasi pemegang saham.

Melalui berbagai mekanisme di atas, BFI Finance tetap menjadi perusahaan pembiayaan yang terdepan di Indonesia dalam aspek keunggulan tata kelola perusahaan, sebagaimana dibuktikan oleh serangkaian penghargaan yang kami terima dari tahun ke tahun. Penghargaan terbaru yang kami terima adalah Trofi “Best Disclosure and Transparency” dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada akhir 2018.

KEBERLANJUTAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bencana alam merupakan pokok berita utama di 2018 dan dengan demikian menjadi fokus dari upaya CSR kami. Namun, kami terus mendukung berbagai bidang lain yang juga menjadi perhatian utama kami. Inisiatif kami dalam bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian beasiswa ke universitas, tetapi juga termasuk proyek-proyek pendidikan yang mempromosikan kewirausahaan tradisional dan teknologi, serta membangkitkan kesadaran untuk pelestarian lingkungan. Selain itu, kami mendukung berbagai proyek terkait penyediaan layanan kesehatan dan air bersih, seperti di tahun-tahun sebelumnya.

TINJAUAN BISNIS DAN RENCANA STRATEGIS 2019

Seiring dengan gerak maju Perusahaan, kami harus senantiasa merangkul tren baru dan antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian yang terus meningkat, sebagai bagian dari era baru ini. Menghadapi prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di Tiongkok dan efek perang dagang AS-Tiongkok, Indonesia harus senantiasa bersiap diri menghadapi kemungkinan keluarnya modal asing dan melemahnya permintaan untuk sejumlah komoditas utamanya. Kami juga memperkirakan investor mengambil sikap *wait-and-see* menjelang Pemilihan Presiden RI pada April 2019. Kami harus senantiasa siap menghadapi

kenaikan dalam biaya dana yang tak terhindarkan karena biaya dana baru yang lebih tinggi.

Dengan begitu banyaknya tantangan baru di 2019, kami berupaya membukukan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui sejumlah infrastruktur baru yang lebih baik dan tersebar merata, serta upaya pemerintah untuk mempercepat kemajuan dan membina produktivitas. Kehati-hatian dan kelincihan dalam berbisnis akan terus menuntun kami dalam mengembangkan basis yang lebih kuat dan independen untuk meningkatkan kinerja pembiayaan baru, sambil mengelola portofolio kami untuk terus memberikan imbal hasil yang tinggi dengan tingkat risiko yang terukur dan mampu dimitigasi sepenuhnya. Dengan penerapan sejumlah teknologi baru, kami juga beraspirasi untuk menjadi lebih maju dalam ranah digital, serta lebih efisien secara operasional, agar kuat menghadapi tantangan di masa depan.

PENUTUPAN DAN APRESIASI

Apa yang telah kami raih di 2018 tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan, kepercayaan, dan keyakinan dari pemegang saham, konsumen, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan, dan yang terpenting, dedikasi dari karyawan kami. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka semua. Kami berharap, bersama dengan mereka semua, BFI Finance dapat mencatat kinerja yang lebih solid di 2019.

Atas nama Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk,



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2018 PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 29 Maret 2019

DEWAN KOMISARIS



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris



Johanes Sutrisno
Komisaris (Independen)



Alfonso Napitupulu
Komisaris (Independen)



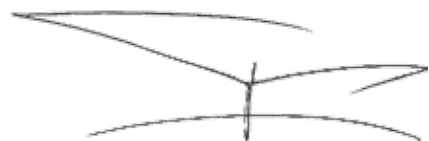
Emmy Yuhassarie
Komisaris (Independen)



Dominic John Picone
Komisaris



Sunata Tjiterosampurno
Komisaris



Cornellius Henry Kho
Komisaris

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2018 PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 29 Maret 2019

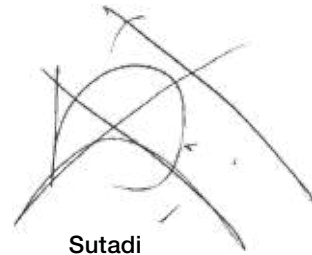
DIREKSI



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur



Sudjono
Direktur Keuangan



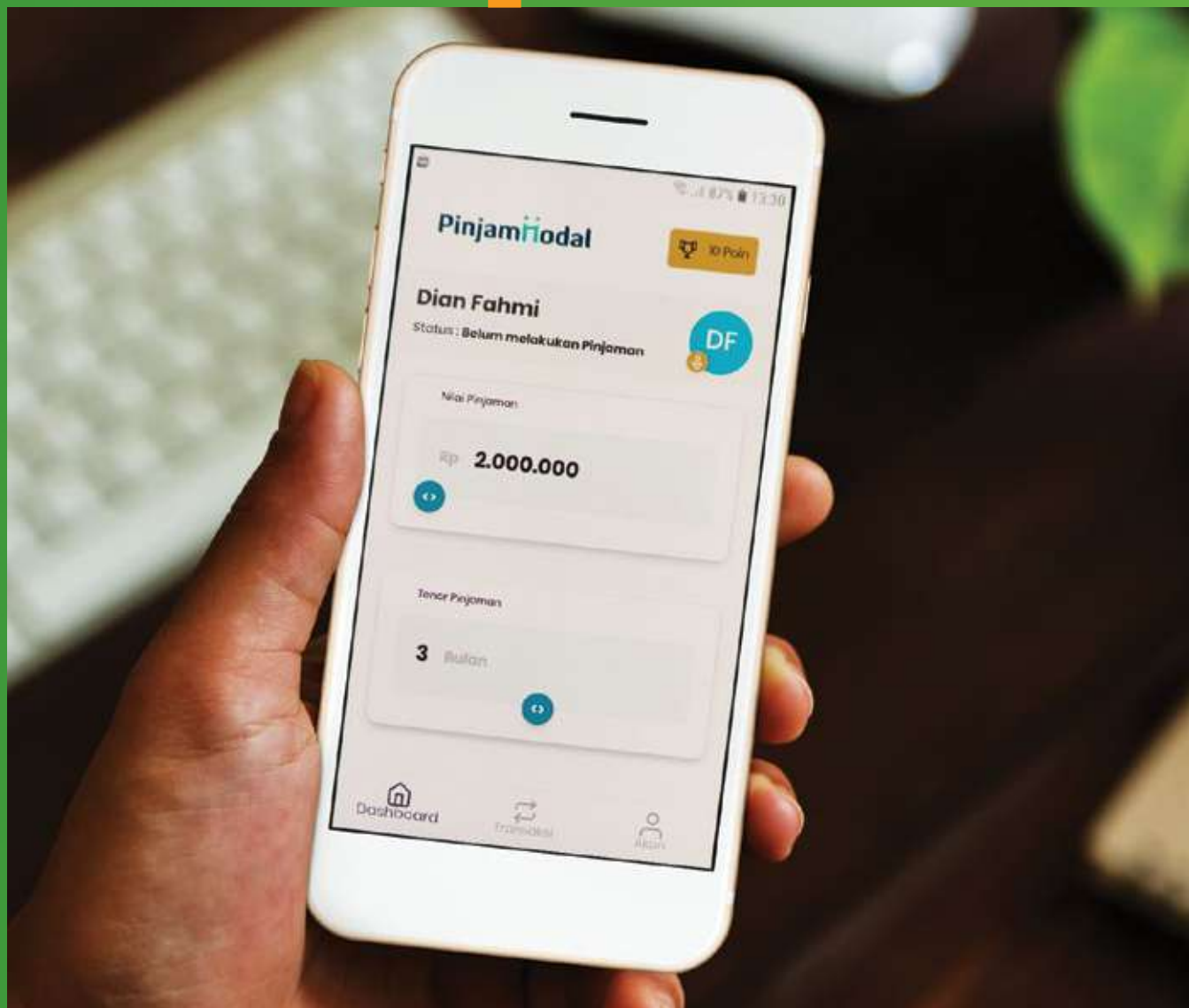
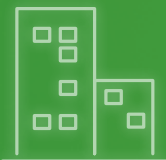
Sutadi
Direktur Bisnis



Andrew Adiwijanto
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia



Sigit Hendra Gunawan
Direktur Risiko Perusahaan (Independen)

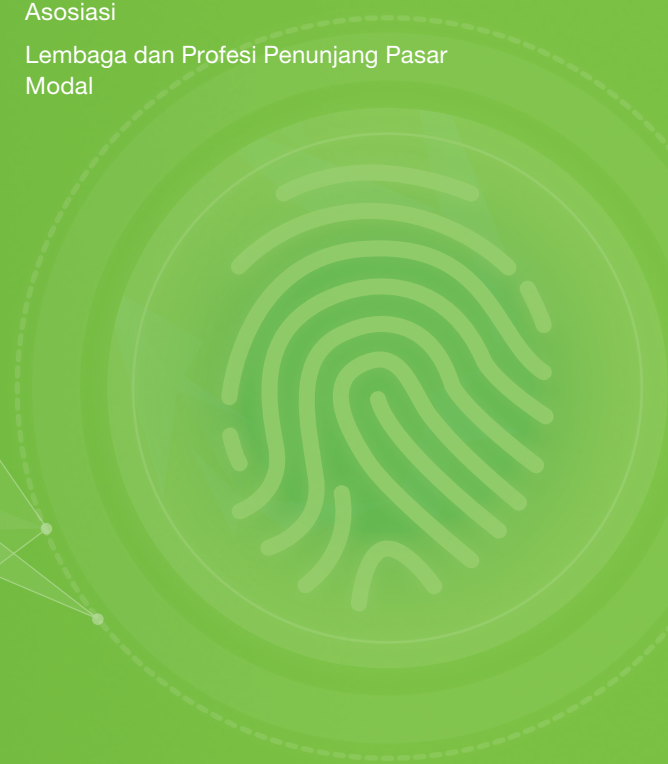


Sinergi adalah kata kunci dalam melengkapi perbedaan yang dilandasi saling percaya. Pinjamodal.id lahir dari sinergi dan kolaborasi kreatif menghadirkan solusi yang inovatif. Kami selalu memberikan jalan untuk mewujudkan impian.



Profil Perusahaan

- 48 Identitas Perusahaan
- 49 Visi dan Misi Perusahaan
- 50 Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan
- 52 Riwayat Singkat Perusahaan
- 54 Jejak Langkah
- 56 Bidang Usaha
- 60 Peta dan Jaringan Operasional
- 62 Struktur Organisasi
- 66 Profil Dewan Komisaris
- 70 Profil Direksi
- 73 Profil Dewan Pengawas Syariah
- 74 Profil Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
- 77 Profil Manajemen Senior
- 80 Komposisi Kepemilikan Saham
- 81 Profil Pemegang Saham Mayoritas
- 82 Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham
- 88 Pencatatan Efek Lainnya
- 94 Struktur Korporasi
- 94 Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi
- 95 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal



IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

PT BFI Finance Indonesia Tbk
(disingkat BFI Finance)

KEDUDUKAN

Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Indonesia

PENDIRIAN PERUSAHAAN

7 April 1982

AKTA PENDIRIAN

Berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

BURSA EFEK

Saham BFI Finance dicatat dan diperdagangkan di BEI.

TANGGAL PENCATATAN SAHAM

16 Mei 1990

KODE SAHAM

BFIN

MODAL DASAR

Rp500 miliar

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp399,2 miliar

KEPEMILIKAN

- Trinugraha Capital & Co SCA: 42,80%
- NT Asian Discovery Fund: 9,90%
- PT BFI Finance Indonesia Tbk*: 6,28%
- Publik/Lainnya (masing-masing di bawah 5%): 41,02%

* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)

SEKRETARIS PERUSAHAAN

corsec@bfi.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

investor@bfi.co.id

SITUS WEB

www.bfi.co.id

CALL CENTER

1500018

MEDIA SOSIAL

 BFI Finance

 @BFIFinance

 bffinance

 PT BFI Finance Indonesia Tbk

 BFI Finance Official

KEGIATAN USAHA UTAMA

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Syariah

Jumlah Outlet: 401 terdiri dari 228 cabang (termasuk 22 cabang syariah) dan 173 gerai

Jumlah Karyawan: 11.171

KANTOR PUSAT

BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City – Tangerang Selatan 15322
Indonesia

Telepon:

(62-21) 2965 0300, 2965 0500

Faksimili:

(62-21) 2966 0757, 2966 0758

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat

- Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami
- Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik yang terpercaya
- Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi
- Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat

Visi dan Misi Perusahaan telah dikaji secara mendalam, sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan yang dinamis. Visi dan Misi tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, untuk menjadi sasaran dari setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

NILAI-NILAI DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

BFI Finance menjunjung nilai-nilai inti yang ditegakkan sebagai Budaya Perusahaan, dan dirangkum dalam akronim **GREAT**. Nilai-nilai GREAT yang dianut oleh BFI Finance terdiri dari:



TABEL 7 Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

Jadwal	Nama Kegiatan	Tempat	Fasilitator
Jan - Des 2018	<i>It's a GREAT Day Video Challenge</i>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Tim Corporate Culture (Kantor Pusat) dan HC Cabang
Jun - Des 2018	<i>GREAT Day: kegiatan di cabang berupa knowledge sharing, BFI 4 U, Town Hall Meeting</i>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Department Head/Associate Department Head/Regional Manager/ Area Manager/Branch Manager/ Corporate Culture/Unit Head
Ags - Des 2018	<i>Captain's Vlog, Captain Inspires, GREAToon</i>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Tim Corporate Culture (Kantor Pusat)
Feb & Des 2018	<i>GREAT Index Survey</i>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang	Tim Corporate Culture (Kantor Pusat)

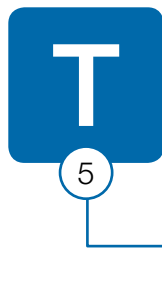


Absolute Integrity
(Absolut dalam Integritas)

Definisi Selalu mengutamakan integritas dalam setiap tindakan untuk menjaga reputasi diri dan Perusahaan yang profesional

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga Perilaku Utama, yaitu:

- Jujur
- Konsisten
- Taat



Trust and Team Spirit
(Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya)

Definisi Semangat kerja sama dan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama

Nilai ini diterjemahkan ke dalam tiga Perilaku Utama, yaitu:

- Komunikatif
- Kooperatif
- Sinergis

Nilai-Nilai Dasar yang menjadi landasan Budaya Perusahaan ini telah dikaji secara mendalam, sehingga sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan yang dinamis. Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, untuk menjadi pedoman perilaku utama bagi seluruh karyawan dalam mencapai sasaran dari setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

Tujuan	Peserta	Jumlah Peserta
Implementasi nilai-nilai BFI Finance	Nasional (seluruh kantor cabang dan pusat)	377
Implementasi nilai-nilai BFI Finance	Nasional (seluruh kantor cabang dan pusat)	11.149
Internalisasi budaya melalui media digital	BOD, Division Head, dan Regional Manager	26
Mengukur kesesuaian perilaku karyawan dengan nilai-nilai Perusahaan	Nasional (seluruh kantor cabang dan pusat)	11.149

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PENDIRIAN

BFI Finance merupakan salah satu pelopor perusahaan pembiayaan di Indonesia. Awalnya dibentuk sebagai PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia, perusahaan kongsi dengan Manufacturers Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat, Perusahaan didirikan pada 7 April 1982 berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Kepemilikan saham Manufacturers Hanover Leasing Corporation pada Perusahaan adalah 70%, sedangkan sisanya dimiliki warga Indonesia.

Perusahaan memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan sebagai perusahaan *leasing* dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982.

Pada 1986, PT Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd, Hong Kong, mengambil alih kepemilikan PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia di Perusahaan, kemudian mengubah nama Perusahaan menjadi PT Bunas Intitama Leasing Indonesia berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Inge Hendarmin, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 September 1986, dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6977.HT.01.04.TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 November 1986, Tambahan No. 1451.

PERKEMBANGAN

Pada 1990, Perusahaan menjadi salah satu perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI) dengan kode saham BFIN. Nama dan status Perusahaan disesuaikan menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk. Perusahaan juga mengubah izin operasinya menjadi perusahaan bisnis *multifinance* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Setelah melewati krisis keuangan Asia 1997, Perusahaan berhasil merestrukturisasi utangnya pada 2001 dan mengubah namanya menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Notaris No. 116 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebelumnya Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 27 Juni 2001, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.

Pada 20 Februari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan No. KEP-038/KM.5/2006 untuk memberlakukan secara surut izin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk sejak tanggal disetujuinya perubahan nama Perusahaan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat AHU-0024031.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan Laporan Tahunan Terintegrasi ini diselesaikan, perubahan ini belum diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

BFI FINANCE KINI

BFI Finance kini termasuk perusahaan pembiayaan besar di Indonesia, dengan jaringan dan cakupan produk terluas, didukung oleh 11.171 karyawan di 228 kantor cabang (termasuk di antaranya 22 cabang syariah yang mulai beroperasi sejak Maret 2018) dan 173 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

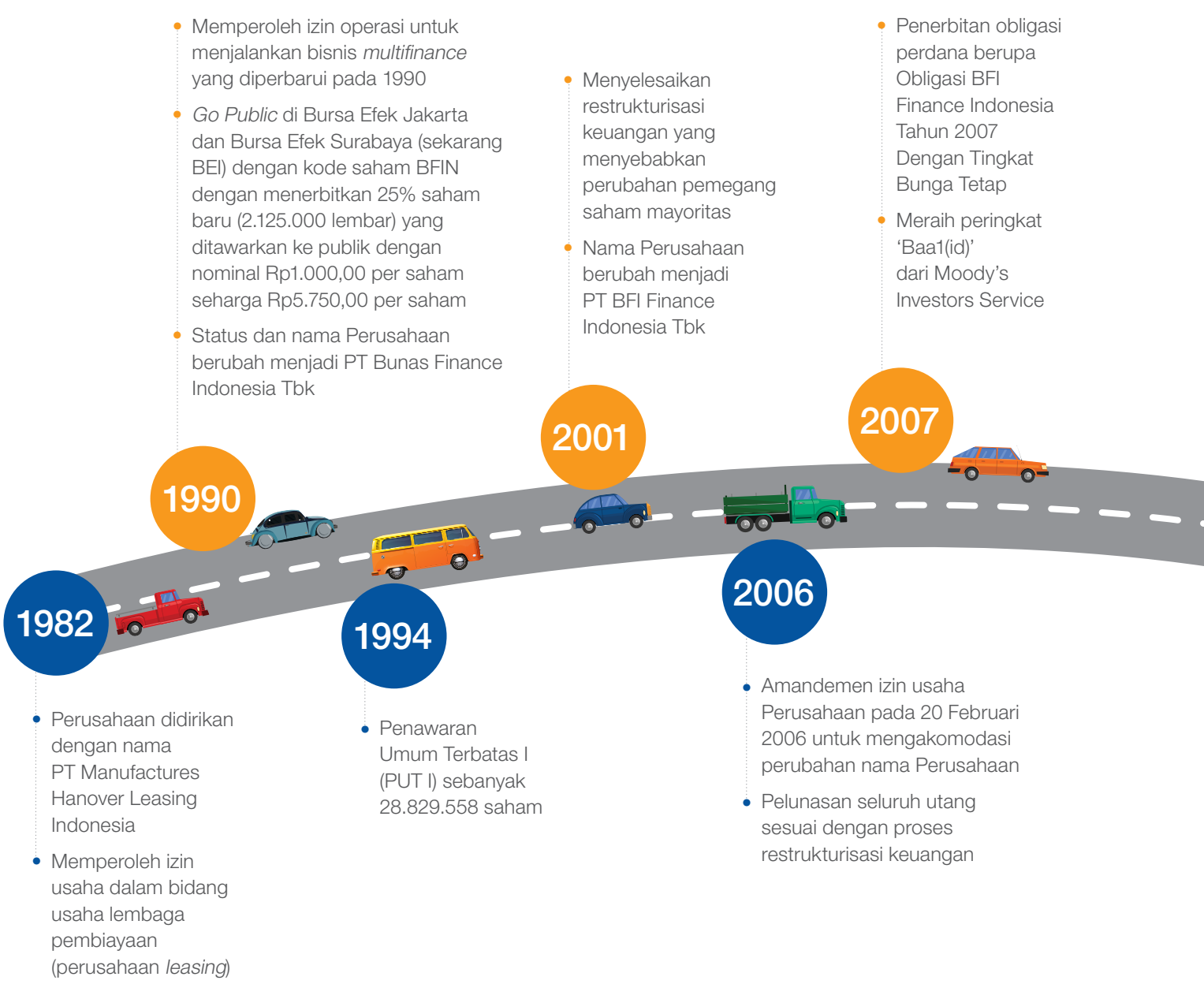


BFI Finance telah menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dan meraih banyak penghargaan, antara lain, predikat “Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus” dari majalah *InfoBank* selama tiga belas tahun berturut-turut (2006-2018). Perusahaan juga mengukir prestasi tersendiri dengan mencetak *hat-trick*, yaitu meraih Peringkat Pertama “Infobank Multifinance Awards” untuk kategori aset di atas Rp10 triliun selama tiga tahun berturut-turut (2016-2018). Khusus di 2018, Perusahaan kembali meraih peringkat teratas “Infobank Multifinance Awards” berdasarkan hasil pemeringkatan atau *rating* 172 perusahaan *multifinance* di Indonesia oleh lembaga riset majalah *Infobank* (sumber: majalah *Infobank* edisi “Rating 172 Multifinance 2018” No. 481 – Agustus 2018 – Vol. XL). Selain penghargaan dalam kinerja bisnis dan keuangan, BFI Finance juga meraih berbagai penghargaan dan pengakuan di bidang-bidang lainnya, seperti manajemen sumber daya manusia, tata kelola perusahaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterangan lengkap mengenai penghargaan dan pengakuan yang diraih Perusahaan selama 2018 disajikan pada bagian Penghargaan dan Pengakuan dalam bab Kilas Kinerja 2018 (halaman 24).

Per 31 Desember 2018, Trinugraha Capital & Co SCA, lembaga keuangan yang berbasis di Luxembourg, adalah pemegang saham mayoritas BFI Finance, dengan kepemilikan sebesar 42,80%.

Sejak 2013, kantor pusat Perusahaan berlokasi di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

JEJAK LANGKAH





BIDANG USAHA

KEGIATAN USAHA

Sesuai POJK No.29/POJK.5/2014 (POJK 29) yang kemudian diperbarui dengan POJK No.35/POJK.05/2018 (POJK 35) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, ruang lingkup bisnis Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan Investasi;
- Pembiayaan Modal Kerja;
- Pembiayaan Multiguna; dan
- Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Ruang lingkup kegiatan usaha tersebut dituangkan dengan cara-cara berikut:

- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
- Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
- *Installment Financing* (pembiayaan dengan angsuran) atau dikenal dengan istilah Pembiayaan Konsumen;
- Anjak Piutang (*with recourse*);
- Pembiayaan proyek, infrastruktur dan pembiayaan lainnya.

Saat ini kegiatan usaha yang sudah dilaksanakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

TABEL 8 Kegiatan Usaha Perusahaan

Jenis Kegiatan Usaha	Cara Pembiayaan				
	Sewa Pembiayaan	Jual dan Sewa-Balik	Pembiayaan Konsumen	Anjak Piutang	Pembiayaan Proyek dan Lain-Lain
Pembiayaan Investasi	√	√	√	x	x
Pembiayaan Modal Kerja	x	√	x	x	x
Pembiayaan Multiguna	√	x	√	x	x
Lain-Lain	x	x	x	x	x

Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan kembali diubah dengan disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam RUPSLB Perusahaan 25 Oktober 2017, yang diaktakan dengan Akta No.6 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta No.7 tanggal 25 Oktober 2017, keduanya dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris

di Tangerang, yang antara lain memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yaitu penambahan kegiatan usaha pembiayaan Perusahaan berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No.AHU-0024031.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017.

Dengan demikian, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berbasis syariah berdasarkan Pasal 3 POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (POJK 31), yang terdiri dari:

- a. Pembiayaan Jual Beli;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

SEGMENT USAHA

Sehubungan dengan pembagian kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, jenis-jenis kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen meliputi pembiayaan mobil baru yang dibeli melalui *dealer*, serta mobil dan motor bekas melalui *dealer* atau tenaga *sales* Perusahaan (*non-dealer*).

1. Pembiayaan Mobil dengan Perantara Dealer

Pembiayaan mobil melalui *dealer* telah menjadi bisnis inti di Perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Produk yang dipasarkan di hampir semua kantor cabang ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan mobil melalui rekanan *dealer*. Jangka waktu pembiayaan antara satu hingga empat tahun dengan suku bunga tetap.

2. Pembiayaan Mobil dan Sepeda Motor Non-Dealer

Pembiayaan *non-dealer* diperkenalkan pertama kali pada 2006 untuk melayani kebutuhan para konsumen secara langsung (pemilik mobil dan sepeda motor), juga para pelanggan yang melakukan transaksi *repeat order*, konsumen baru dari referensi pelanggan (program *Customer-Get-Customer*), atau melalui agen penjualan lepas dan *telesales call center* (pemasaran dan penjualan langsung). Target pemasaran Perusahaan adalah kalangan masyarakat berpenghasilan bawah hingga menengah.

Sewa Pembiayaan

Bisnis Sewa Pembiayaan meliputi jasa keuangan yang ditujukan bagi pelanggan perorangan dan badan usaha yang melakukan pembelian atau *sale and leaseback* atas alat-alat berat, mesin-mesin, kendaraan bermotor dan peralatan lainnya, baik untuk kondisi baru maupun bekas. Pelanggan Sewa Pembiayaan di BFI Finance umumnya berasal dari sektor industri pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.



“ Esty Setianingsih, Sales Head Dealer Suzuki (PT Tridharma Adigraha), Ambon, Maluku

Saya pertama kali mengenal BFI Finance dari promosi Perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Ambon. Saya merasa puas dengan pelayanan BFI Finance, terutama karena kecepatan proses, fleksibilitas prosedur, dan kemudahan persyaratan administrasinya sehingga dapat sangat menguntungkan bisnis perusahaan saya. Saya harap selanjutnya BFI Finance dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produknya, terutama dalam hal suku bunga dan uang muka yang lebih kompetitif untuk mempermudah penjualan, menciptakan program-program penjualan yang lebih menarik, serta memperluas jangkauan usaha pembiayaannya hingga ke Maluku Tenggara.

”

Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Pembiayaan berbasis syariah mulai dijalankan Perusahaan pada Maret 2018 berdasarkan Surat Salinan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk dari OJK Nomor S-218/NB.223/2018 tanggal 14 Februari 2018. Mengacu pada definisi di POJK 31, Unit Usaha Syariah (UUS) ini adalah unit kerja dari kantor pusat BFI Finance yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah (cabang syariah).

Berdasarkan Surat Persetujuan Penggunaan Akad Pembiayaan Syariah PT BFI Finance Indonesia Tbk dari OJK Nomor S-219/NB.223/2018 tanggal 14 Februari 2018, OJK menyetujui UUS BFI Finance untuk menjalankan dan memasarkan penggunaan akad-akad dari pembiayaan berkonsep syariah, yaitu:

1. Akad *Ijarah* untuk pembiayaan umrah;
2. Akad *Ijarah* untuk pembiayaan wisata halal; dan
3. Akad *Murabahah* untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Selama 2018, UUS BFI Finance meluncurkan empat produk pembiayaan syariah untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen secara langsung; baik perorangan maupun badan usaha; yang terdiri dari:

1. *My Ihram* untuk pembiayaan umrah;
2. *My Safar* untuk pembiayaan wisata halal;
3. *My Ta'lim* untuk pembiayaan pendidikan; dan
4. *My Hajat* untuk pembiayaan multiguna dan berbagai keperluan jasa, seperti jasa penyewaan rumah atau ruko, renovasi rumah, dan konsultan.

Seluruh produk pembiayaan di atas ini dipasarkan secara *online* melalui *microsite* BFI Finance Syariah, <https://syariah.bfi.co.id/>, dan secara konvensional melalui cabang-cabang syariah yang tersebar di 22 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

PRODUK PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS ASET

Segmen usaha Pembiayaan Konsumen dan Sewa Perusahaan mencakup portofolio produk berdasarkan jenis aset sebagai berikut:

1. Mobil baru
2. Mobil bekas
3. Motor bekas
4. Alat berat dan lain-lain, terdiri dari:
 - Alat berat
 - Truk dan alat transportasi umum
 - Mesin
 - Lain-lain
5. Properti

Pembahasan lebih lanjut mengenai portofolio produk Perusahaan disajikan dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen di Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 145-151).

PETA DAN JARINGAN OPERASIONAL

Sumatera

47 cabang 23 gerai

6 cabang melayani pembiayaan syariah

Kalimantan

24 cabang 15 gerai

1 cabang melayani pembiayaan syariah

Jadeta

32 cabang 41 gerai

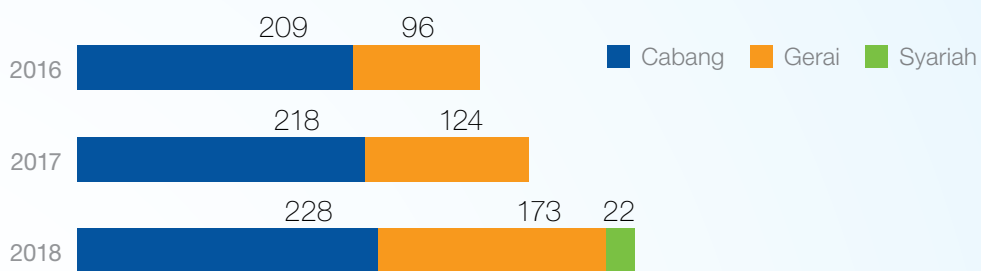
5 cabang melayani pembiayaan syariah

Jawa & Bali

82 cabang 67 gerai

9 cabang melayani pembiayaan syariah

GRAFIK 3 Distribusi Cabang, Gerai, dan Syariah



Indonesia Timur

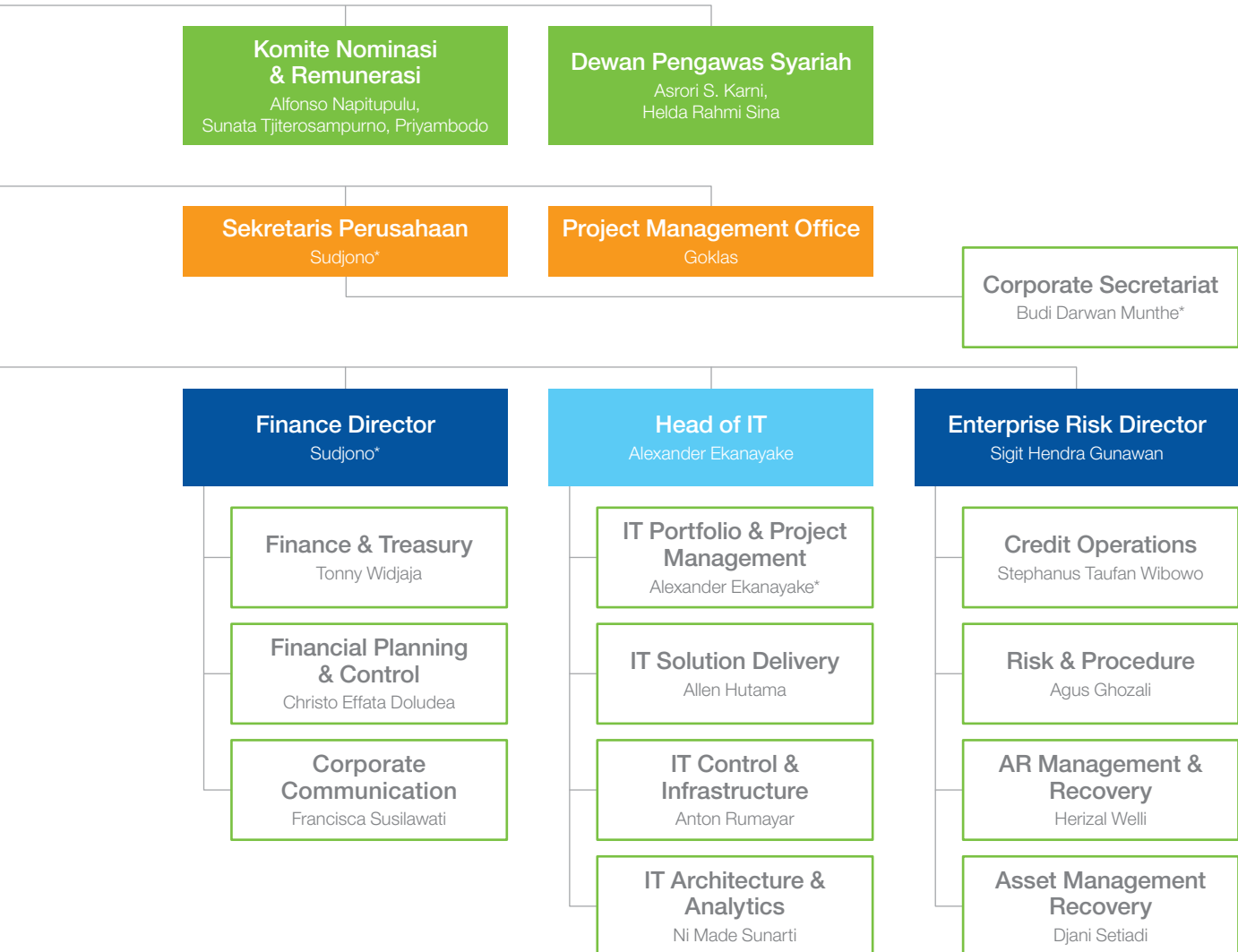
43 cabang 27 gerai

1 cabang melayani pembiayaan syariah

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BFI Finance pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:





*Jabatan rangkap



Kiri ke kanan:

Dominic John Picone
Komisaris

Sunata Tjiterosampurno
Komisaris

Emmy Yuhassarie
Komisaris (Independen)

Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Johanes Sutrisno
Komisaris (Independen)

Alfonso Napitupulu
Komisaris (Independen)

Cornellius Henry Kho
Komisaris

DEWAN KOMISARIS



Kiri ke kanan:

Sutadi
Direktur Bisnis

Sigit Hendra Gunawan
Direktur Risiko Perusahaan
(Independen)

Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

Sudjono
Direktur Keuangan

Andrew Adiwijanto
Direktur Operasional
dan Sumber Daya Manusia

DIREKSI

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Kusmayanto Kadiman

Warga Negara Indonesia
Usia 64 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Power, Komisaris PT Tamaris Hidro, Presiden Komisaris PT Setiabudi Investment Management, dan Komisaris PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris di BFI Finance, beliau menjabat sebagai Komisaris dan Penasihat di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan pembangkit listrik sejak 2009, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada 2004–2009, Ketua Asian–Europe University Network (ASEA–UNINET) pada 2002–2004, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2001–2004, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB pada 1998–2001, Kepala Laboratorium Kontrol ITB pada 1995–1998, Direktur Kelompok Usaha di Jakarta pada 1993–1995, dan Direktur Pusat Komputer ITB pada 1990–1993.

Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari Australian National University, Canberra, Australia, pada 1988, serta Sarjana Teknik Fisika dari ITB pada 1977.



Johanes Sutrisno

Warga Negara Indonesia

Usia 67 Tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No.80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021 serta sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko.

Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bentoel Internasional Investama Tbk sejak Maret 2010 hingga 31 Maret 2016. Beliau bergabung dengan BFI Finance sebagai Credit Officer (1982–1991), kemudian menjabat sebagai Direktur (1991–1999) dan Presiden Komisaris (2000–2011).

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Carsurin dari April 2007 hingga Juni 2013, bergabung dengan Mutual International Finance Corporation (1980–1982), dan sebagai Auditor di SGV, Utomo, Mulia & Co. (1973–1976). Beliau meraih gelar Master of Business Administration (M.B.A.) dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta, pada 2009 dan Sarjana Ekonomi Manajemen (Drs.) dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1980.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021 serta sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Managing Partner Kantor Hukum atau Law Office of Alfonso Napitupulu & Partners, Jakarta, sejak 1993, Direktur Utama PT Nana Mandiri Dwikarya sejak 1989, Komisaris Independen PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance) sejak 2015, Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Sebelum bergabung di BFI Finance, beliau pernah bekerja di Kantor Pengacara Alfonso, Giunseng & Kolopaking, Jakarta, pada 1988–1993, Praktisi *International Lawyer* di Law Office of Bronson, Bronson & McKinnon, San Francisco, California, Amerika Serikat, pada 1984–1985, Kantor Hukum Gani Djemat & Partners pada 1975–1988, serta sebagai Advokat Konsultan Hukum untuk Pasar Modal dan Hak Kepemilikan Intelektual pada 1976. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum (Perdata) dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1975.

Alfonso Napitupulu

Warga Negara Indonesia

Usia 68 Tahun

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



PROFIL DEWAN KOMISARIS



Emmy Yuhassarie

Warga Negara Indonesia

Usia 68 Tahun

Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No.80 tanggal 15 Juni 2011, dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021 serta sebagai Ketua Komite Audit.

Beliau juga menjabat sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sejak tahun 2012, Penasehat HKHPM, Dewan Pengawas Indonesia Institute of Corporate Directorship (IICD) sejak 2012, kemudian diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas IICD sejak tahun 2018, Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sejak tahun 2007 hingga 2018, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Dosen Prodi Hukum Prasetya Mulya.

Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara BUMN Republik Indonesia pada 2007–2012, dan Konsultan Domestik Bank Dunia dan Indonesia National Committee of Good Governance pada 2004–2005.

Beliau meraih gelar Master of Law (L.L.M.) dari University of California (UC), Berkeley, Amerika Serikat, pada 1982 dan Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1979.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 44 tertanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015–2020.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi dari 2011 sampai dengan Maret 2015.

Saat ini beliau juga menduduki posisi sebagai Managing Director dan Partner di TPG Capital (S) Pte. Ltd. di Singapura sejak 2005. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Analis di Divisi Investment Banking Credit Suisse First Boston di Melbourne, Australia (2004–2005), dan menduduki beberapa posisi lainnya di Divisi Consumer Finance Bank ANZ, Australia (1998–2004).

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Law pada 2003 dan Bachelor of Commerce (Honours–Finance) pada 2001 dari University of Melbourne, Australia.

Dominic John Picone

Warga Negara Australia

Usia 40 Tahun

Domisili: Singapura





Sunata Tjiterosampurno

Warga Negara Indonesia
Usia 46 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No.44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015–2020.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dari Mei 2013 hingga September 2014. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Managing Director Northstar Advisors Pte. Ltd. dimulai sejak 2006, Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama sejak 2009, Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk sejak 2011, dan Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak 2013.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris, anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008–2015), Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas (2004–2006), dan Konsultan di Boston Consulting Group, Jakarta (1998–2004). Karir beliau dimulai sebagai Assistant Vice President untuk Riset Ekuitas PT Lippo Securities – SBC Warburg (1995–1998).

Beliau memperoleh gelar Master of Finance (Merit) dari London Business School, Inggris, pada 2002, dan Bachelor of Business Administration (Distinction) dari University of Wisconsin–Madison, Amerika Serikat, pada 1995.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan untuk periode 2017–2022 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No.25 tanggal 18 April 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.15 tanggal 13 Juni 2017.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No.80 tanggal 15 Juni 2011, diangkat kembali untuk menjabat posisi yang sama berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No.43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021, dan kemudian mengundurkan diri per 31 Januari 2017.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Mei 2014 yang membawahi Divisi Operasional, Pengembangan Jaringan dan Pembiayaan Korporasi, Direktur yang membawahi berbagai departemen di BFI Finance periode 2007–2014, antara lain, Human Capital hingga 2012, Finance & Treasury serta Audit Internal hingga 2014, dan pernah merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan hingga Juni 2014. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawas Keuangan dan Treasury BFI Finance (1996–1997), Pengawas Keuangan BFI Finance (1992–1996), dan Auditor di Prasetio, Utomo and Co. (1989–1992). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1990.

Cornellius Henry Kho

Warga Negara Indonesia
Usia 52 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



PROFIL DIREKSI



Francis Lay Sioe Ho

Warga Negara Indonesia
Usia 70 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta

Diangkat sebagai Direktur Perusahaan pada 1983 kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur pada 1986 dan kembali diperpanjang berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 untuk periode 2011–2016 dan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021.

Sebelum bergabung dengan BFI Finance, beliau bekerja sebagai Executive Officer di Kementerian Keuangan atau Ministry of Finance di Singapura pada 1972–1973, kemudian bergabung dengan PT Indovent pada 1975 sebagai Treasury Officer, menjabat sebagai Credit Manager hingga 1980, dan Credit Department Head pada 1980–1983.

Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration (B.B.A.) dari University of Singapore (sekarang National University of Singapore atau NUS) di Singapura pada 1972, dan Master of Business Management (M.B.M.) dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 1975.



Sudjono

Warga Negara Indonesia
Usia 48 Tahun
Domisili:
Tangerang Selatan,
Banten

Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 untuk periode 2014–2019, dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BOD–BOC/VI/2014–0011 tanggal 24 Juni 2014.

Sebelumnya, beliau juga merangkap sebagai Direktur Teknologi Informasi sejak Mei 2014 hingga Mei 2017. Sebelum diangkat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi dan berbagai jabatan lainnya di BFI Finance dari 1993 hingga April 2014, dan Anggota Komite Manajemen Risiko pada 2003–2013.

Sebelum bergabung dengan BFI Finance, beliau pernah menjabat sebagai Auditor Senior Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa – anggota Deloitte Touche Tohmatsu International pada 1991–1993. Beliau meraih gelar Enterprise Risk Manager (ERM™) dari Asia Risk Management Institute (AriMI) dan National University of Singapore (NUS) di Singapura pada 2009, Master of Business Administration (M.B.A.) dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Jakarta, pada 2006, dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1993.

Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014.

Sebelumnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan lainnya di Perusahaan, antara lain, Kepala Divisi Bisnis Ritel hingga April 2014, Kepala Departemen dan Associate Division Head (2008–2012), Pimpinan Regional atau Regional Manager (2006–2008), Pimpinan Cabang atau Branch Manager (2004–2006), Branch Establishment Manager (2001–2004), dan Branch Manager (2000–2001).

Beliau juga pernah menjabat sebagai Sales Executive bidang Marketing Export di PT Tjiwi Kimia Pulp & Paper (1999–2000) serta Collection & Credit Analyst Officer PT Bunas Finance Indonesia (1997–1999).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti di Jakarta pada 1998 dan telah merampungkan studinya untuk meraih gelar Executive MBA dari IPMI Business School, Jakarta.

Sutadi

Warga Negara Indonesia
Usia 44 Tahun
Domisili: Tangerang,
Banten





Andrew Adiwijanto

Warga Negara Indonesia

Usia 50 Tahun

Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia Perusahaan sejak April 2017 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No.25 tanggal 18 April 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 13 Juni 2017 untuk periode 2017–2022.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari April 2015 hingga April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016, juga sebagai Head of Operations & Control (2012–2017) dan Head of Compensation & Benefit (2014–2017).

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1993 sebagai Marketing Officer dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (Branch Manager) di Makassar, Denpasar dan Palembang, Pimpinan Wilayah (Regional Manager) untuk wilayah Sumatera, dan Kepala Departemen (Department Head) Quality Service, Corporate Services, Human Resources, dan Branch Operations.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS), Jawa Timur, pada 1992, dan Master of Business Administration (M.B.A.) dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta, pada 2013. Beliau memperoleh sertifikat khusus mengikuti kursus intensif “Human Capital Management: Making HR & Business Partnership Work” dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 2008.

Beliau bergabung di Perusahaan sebagai Head of Enterprise Risk pada 2015 dan menjabat sebagai Direktur Risiko Perusahaan (Independen) sejak April 2016 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021.

Sebelumnya, beliau meniti karier di Adira Finance pada 2005–2015 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kredit atau Deputy Director – Head of Credit & Collection, dan di PT Astra Sedaya Finance sebagai Account Management Department Head dan Credit Analyst & Risk Department Head (Fleet Division) pada Januari 1994 hingga Agustus 2005.

Beliau memperoleh Sertifikasi Manajemen Bisnis (*Certified Business Management*) pada 2004 dan *Certified Business Management–Operation* pada 2003, keduanya dari Prasetiya Mulya Business School, Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1993.

Sigit Hendra Gunawan

Warga Negara Indonesia

Usia 50 Tahun

Domisili: Tangerang,
Banten



PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Asrori S. Karni

Warga Negara Indonesia
Usia 43 Tahun
**Domisili: Depok,
Jawa Barat**

Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 untuk periode 2017–2022.

Sertifikat Kompetensi sebagai Pengawas Syariah, beliau peroleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini Beliau adalah Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Qanuniah (Hukum) di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi di MUI Pusat.

Saat ini, beliau menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau meraih Magister Hukum, konsentrasi Hukum Ekonomi, dari Universitas Indonesia pada 2010, dan Sarjana Agama dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 1998.

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 untuk periode 2017–2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta (YPFJ), Dosen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun, Jakarta Timur, dan Kepala Divisi Konsultasi dan Pengembangan Program Keuangan Syariah di International Center for Development in Islamic Finance – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF–LPPI).

Sebelumnya, beliau adalah Dosen Mata Kuliah Sharia Contracts & Products pada Program MBA in Sharia Banking & Finance, Institut Teknologi Bandung (2009–2015), Kepala Bagian Penyelenggaraan Program Keuangan Syariah di ICDIF–LPPI (2008–2014), dan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara (STEI Tiara) Rawamangun, Jakarta Timur (2006–2008).

Beliau menyelesaikan Program Doktor di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia di bidang Ekonomi Syariah pada 2007, memperoleh gelar Master in Islamic Economics (M.A.) dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2000, dan Sarjana Syariah Islamiyyah (Lc) dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, pada 1996.

Helda Rahmi Sina

Warga Negara Indonesia
Usia 45 Tahun
**Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta**



PROFIL KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

■ KOMITE AUDIT

Jabatan beliau selaku Ketua Komite Audit dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 68).

Emmy Yuhassarie

Warga Negara Indonesia
Usia 68 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta



Friso Palilingan

Warga Negara Indonesia
Usia 35 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta



Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Senior Partner di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota PKF International), Vice Chairman di NBP Capital, anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Anggota Komite Audit di PT Intiland Development Tbk, PT Duta Intidaya Tbk, dan PT Medikaloka Hermina Tbk.

Sebelumnya, beliau merupakan *partner* dari salah satu kantor akuntan peringkat lima besar dunia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada 2005 dan Magister Akuntansi pada 2008, keduanya dari Kwik Kian Gie School of Business (sebelumnya dikenal sebagai Institut Bisnis & Informatika Indonesia) di Jakarta. Beliau memperoleh gelar *Certified Public Accountant (CPA)* pada 2008 dan *Chartered Accountant (CA)* pada 2013, keduanya dari IAI, serta gelar *Certified Audit Committee Practitioner* dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada 2016.

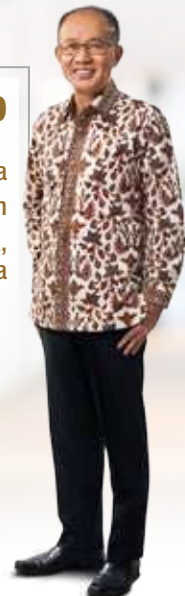
Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia dan Komisaris Independen pada beberapa perusahaan, antara lain, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Wisnilak Inti Makmur Tbk, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2005–2012), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000–2005), dan Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998–2000). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1991.

Edy Sugito

Warga Negara Indonesia
Usia 54 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta



■ KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Beliau diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 67).



Jono Effendy

Warga Negara Indonesia
Usia 44 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021.

Beliau adalah Founder dan Managing Director PT Mudita Finansial Teknologi (sejak September 2018). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Commonwealth Life, anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Commonwealth (sejak Maret 2013).

Sebelumnya beliau pernah menjadi Managing Director di PT Kiran Resources Indonesia (14 tahun) dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di beberapa bank dan lembaga keuangan seperti PT Bank BNP Paribas Indonesia (11 tahun), PT Bank Barclays Indonesia (1 tahun) dan PT BII Finance Centre (2 tahun). Selama periode Juli 2001 hingga Februari 2004, beliau memegang beberapa posisi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Beliau memulai kariernya di PT Tanjung Johor Wood Industry, Jakarta (Desember 1993-Juli 1996) sebagai Akuntan, kemudian sebagai Auditor Senior di Arthur Andersen, Jakarta (Agustus 1996-Juli 1998), dan sebagai Konsultan Senior di Deloitte Touche, Jakarta (Desember 1998-Juli 2001).

Beliau memperoleh gelar Magister bidang Keuangan dari Universitas Pelita Harapan di Tangerang pada 2003, Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada 1996, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) di Indonesia, dan *International Certificate in Banking and Regulation* dari Global Association of Risk Professionals (GARP) pada 2011. Beliau juga memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Perusahaan Asuransi Tingkat 5 dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMA) pada 2015, dan *Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)* dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA), Singapura, pada 2017.

Johanes Sutrisno

Warga Negara Indonesia
Usia 67 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



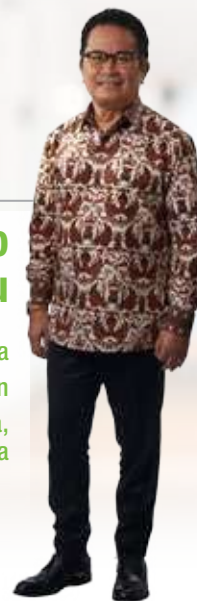
PROFIL KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

■ KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Jabatan beliau selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016–2021. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 67).

Alfonso Napitupulu

Warga Negara Indonesia
Usia 68 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta



Priyambodo

Warga Negara Indonesia
Usia 65 Tahun
Domisili: Jakarta,
DKI Jakarta



Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016–2021.

Beliau pernah bergabung di BFI Finance pada 1983 hingga 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Payroll Compensation, dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya sebelumnya, antara lain, Accounting Manager dan Payroll Unit Head. Beliau memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Akademi Akuntansi Indonesia, Jakarta, pada 1980.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/VI/2017-0103 tanggal 2 Juni 2017 untuk periode hingga 2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015–2020. Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris (halaman 69).

Sunata Tjiterosampurno

Warga Negara Indonesia
Usia 46 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



PROFIL MANAJEMEN SENIOR

■ KANTOR PUSAT

Berikut adalah Manajemen Senior Kantor Pusat yang kedudukannya setingkat di bawah Direksi:



Djani Setiadi

Warga Negara Indonesia
Usia 51 Tahun
Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai Commercial Business Head yang mencakup Corporate Business dan Inventory Management sejak 2016.

Goklas

Warga Negara Indonesia
Usia 40 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2001 dan menjabat sebagai Head of Branch Development Department sejak 2010, lalu menjabat sebagai Head of Non-Dealer Financing Product sejak 2015 dan hingga saat ini menjabat sebagai Head of Project Management Office sejak 2015.



Herizal Welli

Warga Negara Indonesia
Usia 49 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1996 dan menjabat sebagai Head of Collection and Recovery sejak 2016, lalu menjabat sebagai Head of AR Management & Recovery pada 2018.

Herman Handoko

Warga Negara Indonesia
Usia 39 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2003. Beliau menjabat sebagai Head of Channel sejak 2017, dan ditunjuk sebagai Direktur PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), sebuah anak usaha BFI Finance yang fokus di bidang teknologi finansial.



Tan Rudy Eddywidjaja

Warga Negara Indonesia
Usia 48 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997. Beliau menjabat sebagai Head of Consumer Business sejak 2017.

Tonny Widjaja

Warga Negara Indonesia
Usia 51 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai Head of Finance & Treasury sejak 1996.

PROFIL MANAJEMEN SENIOR



Ariyo Putro

Warga Negara Indonesia
Usia 43 Tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2018. Beliau menjabat sebagai Head of Human Capital yang mencakup Human Capital Strategy & Policy, People Development & Culture, Payroll & Compensation, serta HC Management & Services.

■ KANTOR WILAYAH

Berikut adalah Manajemen Senior yang menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (Regional Manager):



Sudi Hartono

Warga Negara Indonesia
Usia 47 Tahun
Domisili: Medan, Sumatera Utara

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Medan dan Pekanbaru sejak 2014, serta area Batam mulai 2018.

Iwan

Warga Negara Indonesia
Usia 48 Tahun
Domisili: Palembang, Sumatera Selatan



Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1995 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Palembang, Jambi, dan Lampung sejak 2005.



Susinto Tenggono Then

Warga Negara Indonesia
Usia 45 Tahun
Domisili: Tangerang Selatan, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Jakarta dan Tangerang sejak 2017.

Stefanus Wibowo

Warga Negara Indonesia
Usia 37 Tahun
Domisili: Bandung, Jawa Barat



Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2003 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Bandung dan Cirebon sejak 2015.



Tan Eng Han

Warga Negara Indonesia
Usia 43 Tahun
Domisili: Surabaya, Jawa Timur

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Surabaya dan Sidoarjo sejak 2016.



Khenriek Tjandra

Warga Negara Indonesia
Usia 45 Tahun
Domisili: Makassar, Sulawesi Selatan

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2002 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara sejak 2015.



Stanly Darisang

Warga Negara Indonesia
Usia 47 Tahun
Domisili: Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1996 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Banjarmasin dan Pontianak sejak 2017.



Rachmadi

Warga Negara Indonesia
Usia 48 Tahun
Domisili: Semarang, Jawa Tengah

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 2006 dan menjabat sebagai Regional Manager untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2011.



Hernandi Kusno

Warga Negara Indonesia
Usia 50 Tahun
Domisili: Samarinda, Kalimantan Timur

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1994 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup Provinsi Kalimantan Timur dan Utara sejak 2007.



John Piter Sinaga

Warga Negara Indonesia
Usia 49 Tahun
Domisili: Tangerang, Banten

Bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Bogor dan Bekasi sejak 2017.



Augusnen Silalahi

Warga Negara Indonesia
Usia 46 Tahun
Domisili: Tangerang, Banten

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1999 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Manado dan Ambon–Papua sejak 2017.



I Kadek Tirtayasa

Warga Negara Indonesia
Usia 47 Tahun
Domisili: Denpasar, Bali

Beliau bergabung dengan BFI Finance pada 1997 dan menjabat sebagai Regional Manager yang mencakup area Kediri di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara sejak 2014.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku BAE Perusahaan, komposisi pemegang saham BFI Finance per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 9 Komposisi Saham dan Pemegang Saham

Keterangan	Nominal Rp25,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	79,84
Jumlah Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	20,16
Pemegang Saham:			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
NT Asian Discovery Fund	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
PT BFI Finance Indonesia Tbk*	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	6.547.858.320	163.696.458.000	41,02
Jumlah	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00

* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

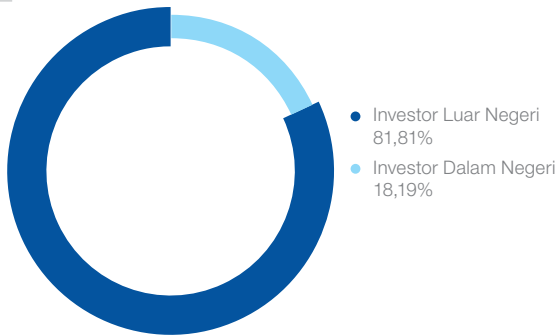
Kepemilikan saham dari anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 10 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

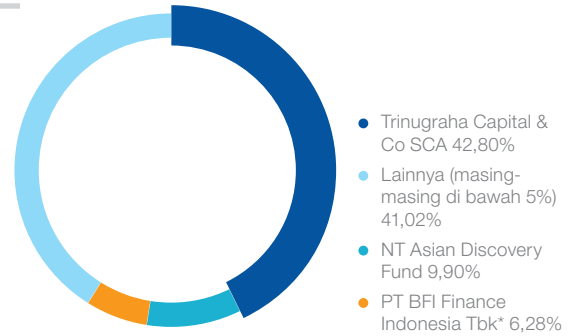
Nama	Jabatan	Jumlah Saham	% Saham
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	389.885.080	2,44
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	74.500	0,00
Sudjono	Direktur	33.380.000	0,21
Sutadi	Direktur	21.382.800	0,14
Sigit Hendra Gunawan	Direktur (Independen)	10.000.000	0,06
Andrew Adiwijanto	Direktur	10.120.000	0,06
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	2.480	0,00
Jumlah		464.844.860	2,91

Struktur kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk per akhir 2018 terdiri dari 1.023 individu dan institusi, di mana 81,81% di antaranya terdaftar di luar negeri dan 18,19% sisanya di dalam negeri. Terdapat tiga institusi yang memegang saham melebihi 5%, yaitu Trinugraha Capital & Co SCA, Luxembourg, dengan kepemilikan 42,80%, NT Asian Discovery Fund dengan kepemilikan 9,90%, dan PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar 6,28%. Saham atas nama PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan hasil pembelian kembali saham Perusahaan.

GRAFIK 4
Komposisi Kepemilikan Saham
berdasarkan Kewarganegaraan



GRAFIK 5
Komposisi Kepemilikan Saham
berdasarkan Struktur Korporasi



* Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

PROFIL PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

TRINUGRAHA CAPITAL & CO SCA

MANAGER

Trinugraha Capital (TC Sarl)

SUPERVISORY BOARD

Anggota:

Garibaldi Thohir

John Viola

Doug Puckett

SEJARAH SINGKAT

Trinugraha Capital & Co SCA (TC&Co) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Maitre Joseph Elvinger, Notaris di Luxembourg dan terdaftar pada Registre de Commerce et des Sociétés di Luxembourg di bawah nomor B 160504. Anggaran dasar TC&Co telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir telah berlaku secara efektif berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa TC&Co tertanggal 20 Mei 2011, dibuat di hadapan Maitre Joseph Elvinger, Notaris di Luxembourg.

MAKSUD DAN TUJUAN TC&CO

Maksud dan tujuan usaha yang dijalankan oleh TC&Co adalah untuk melakukan penyertaan, dalam bentuk apapun, pada perusahaan, kemitraan (*partnership*) atau jenis badan usaha lainnya. TC&Co dapat menjalankan semua hal komersial, teknis dan keuangan atau operasi lainnya, yang berhubungan langsung atau tidak langsung pada semua lingkup dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dari tujuannya.

PENGURUS DAN PENGAWAS TC&CO

Sesuai dengan anggaran dasar TC&Co, TC&Co dikelola oleh satu atau beberapa *manager* yang merupakan pemegang saham tanpa tanggung jawab terbatas (*unlimited liability shareholders/ commandite*). TC Sarl, sebuah *societe a responsabilite limitee*, ditunjuk menjadi Manager tunggal dari TC&Co. Segala hal terkait TC&Co dan kondisi keuangan termasuk secara khusus pembukuan dan rekeningnya diawasi oleh TC&Co Supervisory Board.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 7 April 1982 yang kemudian diubah dengan Akta No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan pada saat didirikan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 terbagi atas 100 saham prioritas dan 1.900 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.500.000,00, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah Rp1.500.000.000,00, yang terbagi atas 100 saham prioritas dan 900 saham biasa.

Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 22 November 1989 dan Akta No. 27 tanggal 8 Maret 1990, modal dasar Perusahaan pada saat Perusahaan hendak melakukan penawaran umum ditingkatkan dari Rp3.000.000.000,00 yang terbagi atas 100 saham prioritas dan 1.900 saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.500.000,00 menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 yang terbagi atas 15.000.000 saham biasa masing-masing bernilai nominal Rp1.000,00 sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah Rp8.500.000.000,00 yang terbagi atas 8.500.000 saham.

1. Penawaran Umum Saham Perdana

Pada 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp1.000,00 per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp5.750,00 per saham.

Pada 16 Mei 1990, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 2.125.000 lembar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

2. Dividen Saham

Berdasarkan Akta No. 31 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., tertanggal 8 April 1993 para pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp1.062.500.000,00 atau 1.062.500 lembar saham kepada pemegang saham yang tercatat pada 11 Mei 1993 dengan mengeluarkan 1 (satu) saham baru untuk setiap 10 (sepuluh) saham yang dimiliki.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 1.062.500 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 14 Juni 1993 dan 11 Juni 1993.

3. Saham Bonus

Berdasarkan Akta No. 32, tanggal 8 April 1993, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp15.000.000.000,00 yang terbagi atas 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00, menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp10.625.000.000,00 yang terbagi atas

10.625.000 saham. Selain itu para pemegang saham juga menyetujui untuk mengkapitalisasi agio saham dengan mengeluarkan saham bonus sebanyak 17 lembar untuk setiap 20 lembar saham yang dimiliki. Total jumlah saham bonus yang dibagikan pada 17 September 1993 adalah 9.934.668 lembar saham atau dengan jumlah nominal sejumlah Rp9.934.668.000,00.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 9.934.668 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 22 September 1993 dan 13 September 1993.

4. Company Listing

Pada 1993, sesuai dengan surat persetujuan No. S-303/BEJ.I.1/XI/1993 tanggal 30 November 1993 dan No. 177/EMT/LIST/BES/XI/93 tanggal 19 November 1993, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah menyetujui untuk mencatatkan tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal Rp8.500.000.000,00 per saham yang sama dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 6 Desember 1993 dan 2 Desember 1993.

Dengan demikian jumlah saham Perusahaan telah tercatat sejumlah 21.622.168 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

5. Dividen Saham

Berdasarkan Akta No. 107 tanggal 22 Januari 1994, yang dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan

antara lain telah menyetujui pembagian dividen saham seluruhnya sebesar Rp7.207.390.000,00 atau sejumlah 7.207.390 lembar saham, dengan perhitungan 3:1, yaitu untuk setiap 3 (tiga) lembar saham yang dimiliki para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 21 Februari 1994, akan memperoleh 1 (satu) lembar saham baru.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 7.207.390 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing tanggal 22 Maret 1994 dan 21 Maret 1994.

6. Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)

Berdasarkan Akta No. 2, tanggal 1 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp30.000.000.000,00 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00, menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp21.622.168.000,00 yang terbagi atas 21.622.168 saham.

Pada 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/ Bapepam-LK dan terakhir dikenal sebagai OJK) melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Pertama (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM

(HMETD) Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham di mana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 1 (satu) saham baru.

Pada 9 Mei 1994, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 28.829.558 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 57.659.116 saham.

7. Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)

Pada 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-71/PM/1997 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Kedua (PUT II) Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp1.000,00 per saham di mana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 2 (dua) saham baru.

Pada 12 Februari 1997, Perusahaan mencatatkan saham-sahamnya sebanyak 115.318.232 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 172.977.348 saham.

8. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan Akta No.97 tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000,00 per saham menjadi Rp500,00 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

Pada 3 November 1997, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 172.977.348 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

9. Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* (MCB) atau Obligasi Wajib Konversi yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan.

Berdasarkan Akta No.67 tanggal 9 Agustus 2006 dengan telah dikonversinya seluruh MCB sebanyak 414.384.585 lembar saham biasa maka jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 414.384.585 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 11 Mei 2006 dan 5 Juni 2006.

10. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan Akta No.65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp500,00 per saham menjadi sebesar

Rp250,00 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham.

Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No.S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

Pada 10 Agustus 2012, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 760.339.281 di BEI sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham.

11. Penerbitan Saham Untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I - Grant Date 1

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penerbitan saham untuk pelaksanaan MESOP untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp250,00 per saham untuk periode sampai dengan 20 Juni 2014. BEI melalui suratnya No.S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan MESOP untuk Tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI.

Pada 31 Mei 2013, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 5.936.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP Tahap I - *Grant Date 1*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.526.614.562 saham.

12. Penerbitan Saham Untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I - Grant Date 2

Pada 30 Mei 2014, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 23.320.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP untuk Tahap I - *Grant Date 2*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.549.934.562.

13. Penerbitan Saham Untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II - Grant Date 1

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penerbitan saham untuk pelaksanaan MESOP untuk Tahap II di BEI. Besarnya saham untuk MESOP Tahap II adalah sebesar sisa saham yang telah dialokasikan pada MESOP Tahap I yang belum dilaksanakan ditambah Hak Opsi Tahap II.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan MESOP untuk Tahap II tersebut secara pra-pencatatan di BEI sebanyak 46.777.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp250,00 per saham.

Pada 29 Mei 2015, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 16.025.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP untuk Tahap II - *Grant Date 1*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.565.959.562.

14. Penerbitan Saham Untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II - Grant Date 2

Pada 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP untuk Tahap II - *Grant Date 2*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562.

15. Pembelian Kembali Saham Perusahaan (Stock Buyback)

Pada 15 April 2015, RUPSLB menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp341.000.000.000,00.

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 100.273.200 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp252.160.169.658.

16. Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan Akta No.25 tanggal 18 April 2017 Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp250,00 per saham menjadi sebesar Rp25,00 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 1.596.711.562 saham menjadi sebanyak 15.967.115.620 saham.

Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-02820/BEI.PP1/05-2017 tanggal 23 Mei 2017.

Pada 5 Juni 2017, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 14.370.404.058 di BEI sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 15.967.115.620 saham.

PERUBAHAN JUMLAH SAHAM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ringkasan kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham beredar Perusahaan adalah sebagai berikut:

TABEL 11 Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham Beredar

Aksi Korporasi	Bursa Saham	Tanggal Pencatatan	Saham Tercatat	Jumlah Saham Tercatat	Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Umum Saham Perdana	BEJ & BES	16 Mei 1990	2.125.000	2.125.000	2.125.000.000
Dividen Saham	BEJ & BES	14 Juni 1993, 11 Juni 1993	1.062.500	3.187.500	3.187.500.000
Saham Bonus	BEJ & BES	22 September 1993, 13 September 1993	9.934.668	13.122.168	13.122.168.000
<i>Company Listing</i>	BEJ & BES	6 Desember 1993, 2 Desember 1993	8.500.000	21.622.168	21.622.168.000
Dividen Saham	BEJ & BES	22 Maret 1994, 21 Maret 1994	7.207.390	28.829.558	28.829.558.000
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)	BEJ & BES	9 Mei 1994	28.829.558	57.659.116	57.659.116.000
Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)	BEJ & BES	12 Februari 1997	115.318.232	172.977.348	172.977.348.000
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEJ & BES	3 November 1997	172.977.348	345.954.696	172.977.348.000
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi	BEJ & BES	11 Mei 2006, 5 Juni 2006	414.384.585	760.339.281	380.169.640.500
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEI	7 Agustus 2012	760.339.281	1.520.678.562	380.169.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I - <i>Grant Date 1</i>	BEI	31 Mei 2013	5.936.000	1.526.614.562	381.653.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I - <i>Grant Date 2</i>	BEI	30 Mei 2014	23.320.000	1.549.934.562	387.483.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II - <i>Grant Date 1</i>	BEI	29 Mei 2015	16.025.000	1.565.959.562	391.489.890.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II - <i>Grant Date 2</i>	BEI	31 Mei 2016	30.752.000	1.596.711.562	399.177.890.500
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEI	5 Juni 2017	1.596.711.562	15.967.115.620	399.177.890.500

PENCATATAN EFEK LAINNYA

PENCATATAN OBLIGASI

TABEL 12 Ikhtisar Pencatatan Obligasi

Efek Utang yang Diterbitkan	Tanggal Pencatatan di BEI	Tanggal Efektif	Peringkat Obligasi	Jumlah (Rp juta)	Nominal yang Diterbitkan (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Status		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Seri A:	10 Maret 2014	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	'AA-(idn)'	500.000	225.000	17 Maret 2015	Lunas	
	Seri B:					55.000	7 Maret 2016		
	Seri C:					220.000	7 Maret 2017		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Seri A:	20 Maret 2015	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	'AA-(idn)'	1.000.000	345.000	29 Maret 2016	Lunas	
	Seri B:					105.000	19 Maret 2017		
	Seri C:					550.000	19 Maret 2018		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Seri A:	26 Februari 2016	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	'AA-(idn)'	1.000.000	200.000	5 Maret 2017	Lunas	
	Seri B:					142.000	25 Februari 2018		
	Seri C:					658.000	25 Februari 2019		Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Seri A:	26 Oktober 2016	17 Oktober 2016 (No. S588/D.04/2016)	'AA-(idn)'	1.000.000	317.000	5 November 2017	Lunas	
	Seri B:					550.000	25 Oktober 2019		Belum jatuh tempo
	Seri C:					133.000	25 Oktober 2021		
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Seri A:	3 Maret 2017	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)	'AA-(idn)'	1.000.000	540.000	12 Maret 2018	Lunas	
	Seri B:					460.000	2 Maret 2020		Belum jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Seri A:	10 November 2017	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)	'AA-(idn)'	835.000	335.000	19 November 2018	Lunas	
	Seri B:					100.000	9 November 2019		Belum jatuh tempo
	Seri C:					400.000	9 November 2020		
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	Seri A:	7 Maret 2018	17 Oktober 2016 (No. S-588/D.04/2016)	'AA-(idn)'	2.165.000	946.000	16 Maret 2019	Belum jatuh tempo	
	Seri B:					253.000	6 Maret 2020		
	Seri C:					966.000	6 Maret 2021		
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Seri A:	27 Juni 2018	7 Juni 2018 (No. S-67/D.04/2018)	'AA-(idn)'	740.000	188.000	6 Juli 2019	Belum jatuh tempo	
	Seri B:					552.000	26 Juni 2021		

2014

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar tercatat di BEI pada 10 Maret 2014. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'A+(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
 Jl. Jend. Sudirman No. 28
 Jakarta 10210, Indonesia
 Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
 Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Kresna Tower, Lt. 6
 Parc 18 Sudirman Central Business District (SCBD)
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel.: (62-21) 2555 7000
 Fax: (62-21) 2939 1950, 2939 1951

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel.: (62-21) 2924 9088
 Fax: (62-21) 2924 9168

Wali Amanat**PT Bank Mega Tbk**

Menara Bank Mega
 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
 Jakarta 12790, Indonesia
 Tel.: (62-21) 7917 5000
 Fax: (62-21) 799 0720

Akuntan Publik**Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan**

Prudential Tower, Lt. 17
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta 12910, Indonesia
 Tel.: (62-21) 5795 7300
 Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum**Jusuf Indradewa & Partners***

Jl. Arteri Kedoya No. 8
 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta
 Barat 11520, Indonesia
 Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
 Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris**Fathiah Helmi, S.H.**

Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
 Jakarta Selatan 12950, Indonesia
 Tel.: (62-21) 5290 7304-06
 Fax: (62-21) 526 1136

Pemeringkat Efek**PT Fitch Ratings Indonesia**

Prudential Tower, Lt. 20
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta Selatan 12910, Indonesia
 Tel.: (62-21) 5795 7755
 Fax: (62-21) 5795 7750

Pada 17 Maret 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A.

Pada 7 Maret 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri B.

Pada 7 Maret 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri C.

Pada 31 Desember 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A, Seri B, dan Seri C.

* Alamat telah berubah dan keterangan alamat baru ada di bagian Pencatatan Obligasi 2017

2015

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 20 Maret 2015. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Securities

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 29 Maret 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A.

Pada 19 Maret 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri B.

Pada 19 Maret 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri C.

Pada 31 Desember 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A, Seri B, dan Seri C.

2016

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 26 Februari 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Securities

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lantai 28

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: (62-21) 526 3445

Fax: (62-21) 526 3603, 526 3507

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara BTN Lt. 18 Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130, Indonesia

Tel.: (62-21) 633 6789

Fax: (62-21) 634 6873

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris**Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru
 Jakarta 12160, Indonesia
 Tel.: (62-21) 739 2801
 Fax: (62-21) 726 5090

Pemeringkat Efek**PT Fitch Ratings Indonesia**

Pada 5 Maret 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A.

Pada 25 Februari 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri B.

Pada 31 Desember 2018, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 yang terutang sebesar Rp658 miliar.

2016

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 26 Oktober 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**PT Danareksa Sekuritas****PT DBS Vickers Securities Indonesia**

DBS Bank Tower Lantai 32 Ciputra World Jakarta 1
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
 Jakarta 12940, Indonesia
 Tel.: (62-21) 3003 4900
 Fax: (62-21) 3003 4944

PT Mandiri Sekuritas**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk****Wali Amanat****PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk****Akuntan Publik****Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan****Konsultan Hukum****Jusuf Indradewa & Partners****Notaris****Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.****Pemeringkat Efek****PT Fitch Ratings Indonesia**

Pada 5 November 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A.
 Pada 31 Desember 2018, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 yang terutang sebesar Rp683 miliar.

2017

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di BEI pada 3 Maret 2017. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**PT Danareksa Sekuritas****PT DBS Vickers Securities Indonesia****PT Mandiri Sekuritas****PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50

Jl. M.H. Thamrin No.1

Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Tel.: (62-21) 2254 4117 (Hunting)

Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 12 Maret 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A.

Pada 31 Desember 2018, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 yang terutang sebesar Rp460 miliar.

2017

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp835 miliar tercatat di BEI pada 10 November 2017. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Pada 19 November 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri A.

Pada 31 Desember 2018, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 yang terutang sebesar Rp500 miliar.

2018

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp2.165 miliar tercatat di BEI pada 7 Maret 2018. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Wali Amanat**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk****Akuntan Publik****Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan****Konsultan Hukum****Jusuf Indradewa & Partners****Notaris****Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.****Pemeringkat Efek****PT Fitch Ratings Indonesia**

Pada 31 Desember 2018, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 yang terutang sebesar Rp2.165 miliar.

2018

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp740 miliar tercatat di BEI pada 27 Juni 2018. Obligasi ini mendapatkan peringkat 'AA-(idn)'. Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia

Tahap I Tahun 2018 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**PT Danareksa Sekuritas****PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia****PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk****Wali Amanat****PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk****Akuntan Publik****Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan****Konsultan Hukum****Jusuf Indradewa & Partners****Notaris****Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.****Pemeringkat Efek****PT Fitch Ratings Indonesia**

Pada 31 Desember 2018, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang terutang sebesar Rp740 miliar.

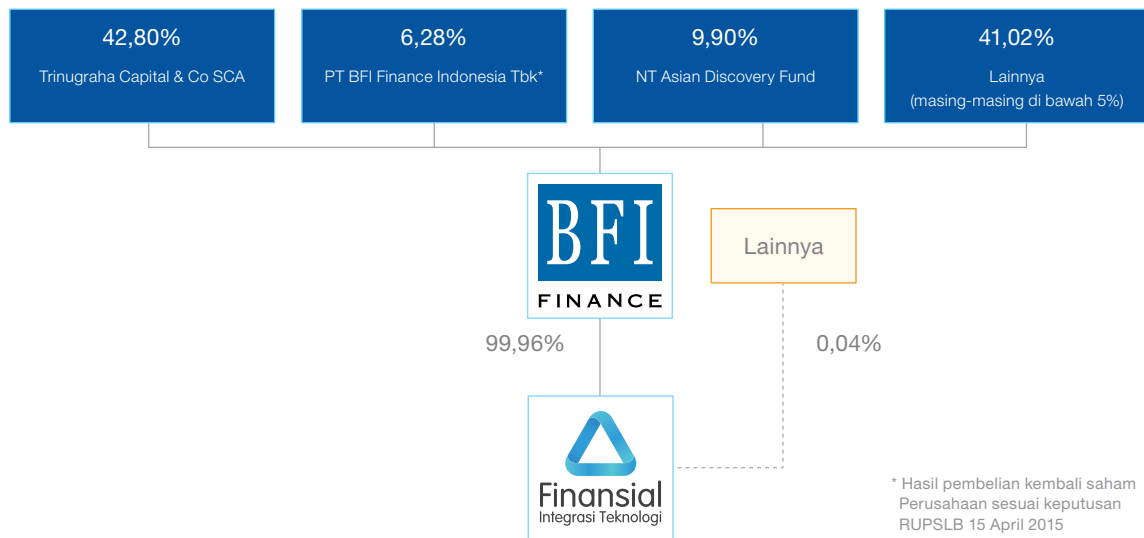
PENCATATAN MTN**TABEL 13 Ikhtisar Pencatatan MTN**

Efek Utang yang diterbitkan	Tanggal Pencatatan di BEI	Peringkat MTN	Jumlah (Rp juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Status
MTN BFI Finance Indonesia II Tahun 2014	Tidak dicatatkan	-	130.000	14 Juni 2015	Lunas
MTN BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	Seri A:	Tidak dicatatkan	50.000	13 April 2017	Lunas
	Seri B:	'AA-(idn)'	50.000	13 Mei 2018	Lunas
MTN BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	Tidak dicatatkan	-	155.000	15 Agustus 2016	Lunas

STRUKTUR KORPORASI

Struktur Korporasi BFI Finance per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

GRAFIK 6 Struktur Korporasi



ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), berdasarkan Akta Notaris Herna Gunawan, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 15 September 2017, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017.

FIT bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perusahaan merupakan salah satu pemegang saham pendiri FIT dengan persentase kepemilikan 99,96% dari modal yang ditempatkan dan modal disetor FIT.

Melalui Surat No. S-588/NB.213/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari OJK, permohonan FIT atas *platform* <http://www.pinjammodal.id> sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disetujui untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK.

FIT berkantor pusat di BFI Tower Lantai 2, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Indonesia

Tel: (62-21) 633 6789 ext. 1844-1847
www.btn.co.id

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Inradewa & Partners

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Indonesia

Tel.: (62-21) 2254 4117 (*Hunting*)
Fax: (62-21) 2254 4367
www.jusufind.com

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Prudential Tower, Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Indonesia

Tel: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301
www.bdo.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sirca Datapro Perdana

Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Indonesia

Tel: (62-21) 314 0032, 390 0645
Fax: (62-21) 314 0185, 390 0652, 390 0671



Integritas dan kualitas Sumber Daya Manusia BFI Finance adalah kekuatan organisasi untuk memberikan nilai lebih bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan penugasan yang tepat sesuai kompetensi dan keahlian, masing-masing individu dapat terus berkarya dan memberikan performa terbaiknya.



Sumber Daya Manusia



- 98 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 105 *BFI Enhanced Core Competencies (BECOCO)*
- 107 Manajemen Rekrutmen
- 108 Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 111 Pengelolaan Kinerja
- 112 Pengembangan Karier
- 115 Kesejahteraan Karyawan
- 117 Hubungan Industrial
- 117 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 119 *Human Capital Technology*
- 120 Demografi Karyawan



PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA



BFI Finance senantiasa memberikan ruang untuk bertumbuh dan berinovasi bagi seluruh karyawannya, serta sepenuhnya memberdayakan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu kunci utama transformasi organisasi.

Transformasi Perusahaan tidak lepas dari peranan Human Capital dan seluruh pimpinan dalam mengelola SDM. Keluwesan dan kemampuan SDM dalam beradaptasi dengan perubahan erat kaitannya dengan kegigihan dan kelincahan organisasi dalam menerapkan kebijakan dan manajemen SDM yang dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

GRAFIK 7 *Human Capital Framework*



PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dimulai dari perancangan organisasi dan SDM yang disesuaikan dengan tujuan organisasi, strategi rekrutmen yang efektif sekaligus kreatif, pengelolaan *talent* berbasis model kompetensi yang relevan, internalisasi budaya yang bertujuan mendorong upaya transformasi, penyusunan *performance-based reward*, penerapan HC Business Partner yang mumpuni, dan tentunya didukung oleh penerapan teknologi SDM terkini, telah dianggap tepat guna oleh seluruh karyawan Perusahaan, yang mayoritas merupakan generasi milenial. Kelima faktor ini juga yang menjadi strategi Human Capital BFI Finance dalam mengelola SDM, agar membawa Perusahaan ke arah transformasi yang diinginkan.

Manajemen perlu terus melakukan penyelarasan teknik-teknik rekrutmen SDM yang menarik minat generasi milenial, agar mampu mengidentifikasi dan memberikan pengembangan talenta terbaik. Generasi milenial adalah tumpuan masa depan dan penggerak utama Perusahaan untuk bertransformasi dan mewujudkan visinya. Tidak hanya mumpuni dari segi adaptasi teknologi, mereka juga diharapkan untuk terus mengamalkan dan menyempurnakan nilai-nilai positif yang telah menjadi budaya dan fondasi pertumbuhan Perusahaan.

Karakter utama generasi milenial, yakni sangat cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perlu diberdayakan seoptimal mungkin untuk menghadirkan gaya manajemen yang “lincah” dan bergerak cepat mengikuti gelombang dan ritme bisnis yang dinamis di Perusahaan. Untuk mendukung hal ini, manajemen menyediakan ruang untuk berinovasi dan bertumbuh bagi seluruh generasi sehingga membuat Perusahaan mampu bersaing di pasar industri pembiayaan.

BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-nilai budaya GREAT serta keteladanan (*role-modeling*) dari para *Leaders* di organisasi terus diinternalisasikan ke seluruh karyawan, agar selalu menerapkan perilaku berbasis nilai-nilai GREAT dalam keseharian mereka. Proses internalisasi budaya memadukan pelaksanaan kegiatannya dengan sarana media digital. Internalisasi budaya dilaksanakan melalui program-program berikut yang berlangsung di kantor pusat dan seluruh kantor cabang:

- Kunjungan *Leaders* ke cabang bertajuk *Leader Inspires*;
- *Sharing* dari para pakar bertajuk *Leader's Talk*;
- *Quarterly Town Hall Meeting*;
- *Annual Kick-Off*;
- *GREAT Video Competition* (setiap dua bulan);
- Pembuatan *vlog* oleh *Leaders*, bernama *BFI Captain's Vlog*;
- *E-flyer* berisi kutipan *Leaders*, bernama *Captain Inspires*;
- Video pendek kegiatan sehari-hari bertajuk *BFI daily*; dan
- *e-cartoon* bersambung mengenai perilaku budaya perusahaan, bernama *GREAToon*.

Berbagai materi terkait internalisasi budaya perusahaan ini disebarluaskan menggunakan media digital, seperti e-mail, grup WhatsApp, dan saluran media sosial resmi milik Human Capital BFI Finance (#BFIners) di Instagram dan YouTube.

Captain's Inspire

CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Di “Jaman NOW” success is about being agile, innovative and have the discipline to focus to achieve your goals”

- Francis Lopy -
CEO BFI Finance



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Integritas adalah menjalankan apa yang diucapkan, dan mengucapkan apa yang dijalankan”

- Saizom -
Chief Finance Officer



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Melakukan sedikit hal yang meaningful akan lebih baik dibandingkan dengan mengetahui banyak hal namun tidak melaksanakannya”

- Andrey Kurniawan -
Chief Operation & IT Officer



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Make absolute integrity the compass that guides you in everything you do. Try to surround yourself only with people of integrity.”

- Setadi -
Chief Marketing Officer BFI Finance



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Dua harga yang harus dibayar oleh karyawan: Integritas merupakan harga mati yang harus selalu kita jaga dan performance menunjukkan harga diri kita”

- Sya Huda Guswono -
Chief Risk Officer BFI Finance



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Semua usaha dan pekerjaan anda akan dikenal oleh konsumen jika anda memiliki sikap Proaktif, Responsif dan Profesional”

- Susanto Wiragomo -
Regional Manager II



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“3 words for the new leaders: Trust, Commitment and Care kepercayaan membuahkan komitmen jangka panjang dan rasa memiliki yang lebih tulus”

- Djani Setiadi -
Area Management Secondary Head



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“If you see customer through customer's eyes, you'll get trust & loyalty. This is the right way to view your business.”

- Rachmadi -
Regional Manager III



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Jaman dulu cukup dengan memiliki pengetahuan & informasi yang baik kita bisa jadi pemenang. Jaman Now kita tidak cukup hanya sekedar tahu tetapi harus lebih kreatif & inovatif agar bisa jadi pemenang”

- Kadek Tirtayasa -
Regional Manager II



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Every leader should know and believe: True respect come from compassion!”

- Goklas -
PMD Head



CAPTAIN'S INSPIRE **BFI FINANCE**

“Satukan Hati & Pikiran dalam Bekerja untuk Meraih Kesuksesan”

- Tommy Wijaya -
Area Manager SB



GREAT Video Competition

BFI FINANCE

It's a Great Day Video Challenge

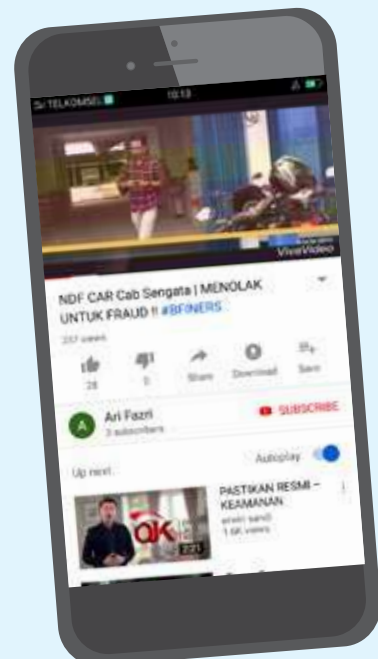
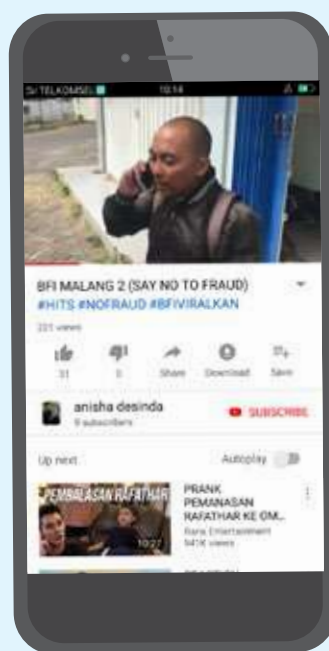
ANTI FRAUD

Bikin Videonya Raih Hadiyahnya

Pengumpulan, 1-10 Agustus 2018.
Upload ke Channel Youtube kalian dengan ketentuan

Description :
#itsagreatday
#BFIANTIFRAUD

Caption :
Nama Cabang
Departemen
Judul Video





Town Hall Meeting

Perusahaan juga telah mengukur pengamalan nilai-nilai Perusahaan oleh karyawan, melalui survei *GREAT Index*, dengan metode 360°, yang menghasilkan nilai rata-rata 3,43 dari skala 4. Ini berarti nilai-nilai Perusahaan telah dijalankan cukup baik dan konsisten.

PENCAPAIAN HUMAN CAPITAL 2018

Pada 2018, transformasi Perusahaan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan strateginya ke depan, dengan tujuan menciptakan organisasi yang lebih lincah dan efektif. Perusahaan telah mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang

teknologi keuangan, yaitu PT Finansial Intergrasi Teknologi (FIT), dengan produk www.pinjammodal.id. Perusahaan juga telah memperkuat upayanya dalam hal digitalisasi seperti manajemen hubungan konsumen (CRM), *big data*, dan pengembangan teknologi.

Untuk menerapkan pembelajaran yang efektif bagi karyawan, terutama generasi milenial, metode belajar dilengkapi dengan aplikasi *mobile digital* M-BEAT (Mobile BFI Edustream & Training), yang dapat diakses seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan secara *online* menggunakan *smartphone* kapan saja dan dimana saja.



Leader's Talk

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk membuat seluruh proses pengelolaan SDM menjadi lebih ramping dan efektif, sekaligus relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan pembelajaran karyawan, BFI Finance terus mengembangkan teknologi yang aplikatif. Selain implementasi M-BEAT, Perusahaan juga menyediakan wadah *HC Dashboard* karyawan yang dapat diakses melalui aplikasi *mobile* secara *real-time*. Penyempurnaan *Human Capital Information System* (HCIS) juga terus berjalan sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan karyawan dalam hal informasi dan transaksi terkait kepegawaian.

BFI Finance kembali meraih penghargaan “*Best Company To Work For*” dari *HR Asia* untuk dua tahun berturut-turut, sebagai bukti pengelolaan SDM-nya yang prima. *HR Asia* menggunakan hasil pengukuran indeks keterlibatan karyawan sebagai kriteria penilaiannya.



Aktivasi Program *Best Place to Work*

BFI ENHANCED CORE COMPETENCIES (BECOCO)

Pada 2018 Perusahaan merumuskan serangkaian kompetensi inti baru bagi seluruh karyawannya, sebagai bentuk penyesuaian dengan strategi bisnisnya di masa depan. Keberhasilan mewujudkan strategi tersebut bergantung pada kualitas SDM yang dikelolanya. Oleh karena itu, kompetensi baru ini telah dijadikan dasar untuk mengukur kualitas SDM dan mengelola SDM di Perusahaan di setiap tahapan ketenagakerjaan, mulai dari rekrutmen, pengembangan kapabilitas, penilaian kinerja, hingga suksesi karir.

Disebut *BFI Enhanced Core Competencies* (BECOCO), sembilan kompetensi inti non-teknis yang telah Perusahaan kembangkan ini dilandasi oleh nilai-nilai dasar dan budaya Perusahaan, yang dikenal dengan GREAT. Kesembilan kompetensi inti tersebut adalah:

1. *Organizational Commitment* (Komitmen Berorganisasi)

Definisi: Bertindak terbuka, jujur, profesional, konsisten, dan sesuai dengan nilai organisasi sehingga mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Menyampaikan informasi secara akurat dan lengkap;
- Menjalankan pekerjaan sesuai kesepakatan;
- Bertindak profesional dengan mematuhi etika, kebijakan dan peraturan Perusahaan;
- Konsisten antara perkataan dan perbuatan (*walk the talk*).

2. *Strategic Execution* (Eksekusi Strategis)

Definisi: Menetapkan rencana dan standar kinerja berdasarkan analisis bisnis makro dan mikro, serta memastikan pelaksanaannya dengan target yang telah ditetapkan.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Menetapkan arah bisnis dan prioritas kerja yang jelas;
- Menguraikan prioritas kerja ke dalam rencana dan target kerja yang lebih spesifik dan mengomunikasikannya ke tim;
- Mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai rencana dan target kerja;
- Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pencapaian kinerja.

3. *Customer Focus* (Fokus ke Pelanggan)

Definisi: Memastikan pelayanan selalu sesuai kebutuhan pelanggan internal dan eksternal dengan menempatkan sudut pandang pelanggan sebagai prioritas.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Aktif mencari tahu kebutuhan pelanggan melalui cara atau metode apapun;
- Mengutamakan kepuasan pelanggan dalam bertindak, bahkan melebihi harapan pelanggan;
- Mengevaluasi kepuasan pelanggan dan membuat tindakan perbaikan layanan.

4. *Innovation* (Inovasi)

Definisi: Menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ide-ide baru untuk menghasilkan solusi yang berbeda dari sebelumnya dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Terbuka dengan ide-ide baru;
- Aktif memberikan ide-ide baru sesuai perkembangan zaman dan menerapkannya;
- Memberikan kesempatan kepada orang di sekitar untuk menyampaikan ide;
- Menciptakan lingkungan dan peluang berinovasi, serta berani mengambil risiko.

5. *Entrepreneurship* (Kewirausahaan)

Definisi: Menggunakan pemahaman atau pengetahuan terkait bisnis, tren, dan pasar, untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Memiliki pemahaman alur proses bisnis dan produk pembiayaan;
- Menggunakan seluruh informasi yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, pasar, untuk mengidentifikasi tren dan peluang bisnis; dan
- Mampu melihat potensi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

6. *Strategic Partnership* (Kemitraan Strategis)

Definisi: Proaktif mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak (internal/eksternal) secara langsung dan tidak langsung untuk mencapai tujuan organisasi.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Mencari peluang kerja sama yang saling menguntungkan atau mendukung kemitraan;
- Proaktif memberikan kontribusi positif dalam membangun relasi dengan pihak internal dan eksternal;
- Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak sesuai etika kerja;
- Mengembangkan peluang bisnis jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi.

7. *Leading Change* (Memimpin Perubahan)

Definisi: Mengarahkan dan mendukung proses perubahan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Terbuka dan positif dalam menghadapi perubahan organisasi;
- Mengidentifikasi peluang perubahan atau perbaikan yang lebih baik;

- Menginspirasi atau memotivasi orang lain dalam melakukan perubahan;
- Mengantisipasi risiko yang muncul akibat perubahan.

8. *Agile Decision* (Keputusan yang Tangkas)

Definisi: Mengidentifikasi dan memahami permasalahan serta terbuka terhadap berbagai alternatif solusi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang ada.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dengan cepat dan tepat;
- Mencari alternatif solusi dan mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data sesuai dengan wewenangnya;
- Sigap dalam mengambil keputusan ketika ada perubahan kondisi;
- Berkomitmen menjalankan keputusan yang diambil sesuai tingkat urgensinya.

9. *Nurturing People* (Membimbing SDM)

Definisi: Mendorong proses belajar dan pengembangan kemampuan dengan memahami keberagaman individu.

Contoh tindakan dan perilaku:

- Membangun komunikasi interaktif dan mendorong anggota tim untuk berani menyampaikan kebutuhan pengembangan dirinya;
- Menyediakan waktu untuk mendengar keluhan-keluhan anggota tim dan mampu berempati;
- Memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu atau anggota tim;
- Membangun budaya dan lingkungan pembelajaran untuk pengembangan (*knowledge sharing*).

MANAJEMEN REKRUTMEN

Untuk mengisi kebutuhan yang muncul seiring perkembangan bisnis, BFI Finance dari waktu ke waktu terus melakukan rekrutmen, baik untuk mengisi posisi strategis, fungsional di lapangan dan juga *trainee*. Rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi strategis dan *trainee* dilakukan di kantor pusat, sedangkan delegasi rekrutmen untuk posisi fungsi lapangan berlangsung di setiap cabang.

Dalam rekrutmen karyawan, manajemen menyelaraskan teknik rekrutmennya untuk menjaring generasi milenial dan tenaga ahli khusus. Efektivitas rekrutmen di Perusahaan senantiasa ditingkatkan melalui penerapan teknologi, seperti:

- Analisis kebutuhan dengan pendekatan antisipatif;
- Penyebaran lowongan pekerjaan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Career.com, LinkedIn, dan JobStreet;
- Pemanfaatan platform digital *BFI Jobs* dan *Applicant Tracking System* untuk menerima dan memproses calon karyawan baru;

- Kerja sama dengan *startup* dan *coding school* (Techinasia, Hacktiv8, Purwadhika, dan Glints) untuk pencarian *talent* yang berkompotensi khusus di dunia teknologi; serta
- Pemberian program beasiswa untuk mencari calon-calon *inovator*, *data scientist*, dan *web developer* yang akan menggerakkan bisnis pembiayaan *peer-to-peer lending* berbasis digital melalui FIT.

Untuk mendapatkan sumber-sumber tenaga kerja yang andal, Perusahaan melakukan *sourcing* melalui kolaborasi dengan pihak eksternal sekaligus memanfaatkan jaringan dari relasi karyawan internal. Di 2018, program rekrutmen yang memiliki *join rate* tertinggi adalah melalui karyawan BFI Finance sendiri, melalui program *employee-get-employee*. Perusahaan juga bekerja sama dengan banyak universitas di Indonesia, melalui program beasiswa, kesempatan magang, rekrutmen di kampus, dan *campus awareness*.



Acara pemberian Beasiswa BFI di Purwadhika Startup & Coding School melalui *Job Connector Program*

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

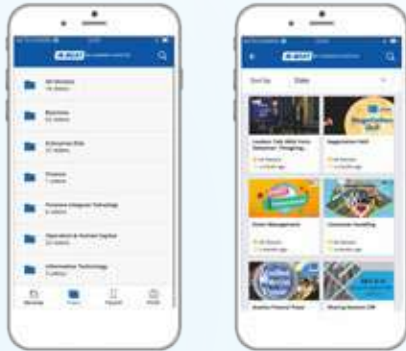
Seiring dengan perkembangan bisnis, pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan SDM di Perusahaan. Dengan jumlah karyawan 11.171 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan cakupan 401 outlet, Perusahaan terus memastikan kompetensi seluruh karyawan berkembang secara merata.

Selama 2018, Perusahaan memberikan 56 program pelatihan bagi 24.685 karyawan, naik 120% dari 2017 sebesar 10.991 karyawan dari seluruh level, status ketenagakerjaan, fungsi, dan daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, kecuali Aceh.

Program pengembangan SDM dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BFI Learning Institute, yang bertugas merumuskan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bisnis yang kerap dijumpai, melalui metode-metode penyampaian yang atraktif dan efektif agar mudah diserap pesertanya.

BFI Learning Institute juga mendorong karyawan untuk aktif menggunakan *platform* M-BEAT. Fitur M-BEAT berupa *Video Library* memuat lebih dari 200 modul video pembelajaran, selain itu fitur *Mobile Video Streaming* dapat diakses seluruh karyawan secara interaktif pada saat berlangsungnya kegiatan penting di Perusahaan. Melalui pemanfaatan M-BEAT, bentuk pembelajaran melalui *smartphone* yang lebih disukai para karyawan kaum milenial dapat menjadi terfasilitasi.





Program-program pelatihan yang konvensional (*offline*) terus dilaksanakan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Program-program ini antara lain berbentuk:

- *Sharing Session/Leader's Talk*;
- *Great Leaders Program* (GLP) untuk persiapan dan pembekalan karier;
- Program Peningkatan Kompetensi (*Enhancement Programs*) yang disinergikan dengan GLP;
- Pelatihan dan sertifikasi eksternal; serta
- Bantuan Pendidikan Profesional.

Di 2018, biaya pelatihan mencapai Rp32,3 miliar, naik 14% dari 2017. Biaya ini mencakup pengembangan kompetensi dan kapabilitas karyawan, sekaligus penggantian biaya akomodasi selama pelatihan dan komponen pendukung lainnya.



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 14 Metriks Pengembangan SDM

	2017	2018	+/-
Biaya Pelatihan	Rp28,5 miliar	Rp32,3 miliar	Rp3,8 miliar
Jumlah Peserta Pelatihan	11.206	24.685	13.479
Jumlah Program Pelatihan	54	56	2

TABEL 15 Program Pendidikan dan Pelatihan

Jenis Pelatihan	Jumlah Program 2018	Jumlah Peserta 2018
Pelatihan Internal	12	22.662
Pelatihan Eksternal	44	2.023
Jumlah	56	24.685

TABEL 16 Peserta Pelatihan berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Jenjang Kepangkatan	Pelatihan Internal	Pelatihan Eksternal	Jumlah Peserta Pelatihan
Dewan Komisaris & Direksi		16	16
Senior Manager	13	141	154
Junior Manager	167	127	294
Officer	2.831	390	3.221
Staff	19.651	1.349	21.000
Jumlah	22.662	2.023	24.685

TABEL 17 Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan per Tahun

Jenjang Kepangkatan	Laki-laki			Perempuan			Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan
	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Karyawan per 31 Des 2018	Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Karyawan per 31 Des 2018	Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan	
Dewan Komisaris & Direksi	118	11	11	10	1	10	10,7
Senior Manager	1.581	331	5	420	87	5	4,8
Junior Manager	12.521	257	49	2.564	53	48	48,7
Officer	182.307	2.111	86	70.897	821	86	86,4
Staff	41.215	6.037	7	13.738	2.010	7	6,8
Jumlah	237.742	8.747	37	87.629	2.972	29	27,8

PENGELOLAAN KINERJA

Untuk memastikan setiap karyawannya bekerja dengan standar kinerja tinggi, BFI Finance melaksanakan sejumlah mekanisme pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Implementasi pengelolaan kinerja karyawan dibagi ke dalam tahapan-tahapan berikut:

1. *Employee Goal Setting*:
 - Karyawan menyusun Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI).
 - KPI karyawan diturunkan secara *cascade* dari KPI atasannya untuk menjamin kesinambungan kinerja.
 - Atasan memberikan masukan dan persetujuan terhadap KPI yang disusun bawahannya.
2. *Performance Review*: atasan melakukan penilaian pencapaian KPI setiap bawahan, setiap tengah tahun.
3. *Performance Appraisal*: atasan menilai pencapaian KPI bawahannya dalam setahun pada akhir tahun untuk menentukan pemberian insentif dan *profit sharing* bagi karyawan yang berkinerja unggul.

Di 2018, struktur KPI BFI Finance mengalami perubahan dengan dimasukkannya aspek “peranan pimpinan dalam mengembangkan timnya”, dan dengan diperkuatnya aspek “keberadaan suksesor”. Perubahan ini membuat KPI saat ini lebih berimbang dalam hal manajerial, kepemimpinan, dan transformasi, dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, di 2018 Perusahaan mengembangkan *Employee Dashboard* bagi para pimpinan, untuk melihat komposisi tim di bawah mereka, status kepegawaian mereka, dan produktivitas mereka, secara *real-time*. Inovasi ini memungkinkan pemantauan kinerja dan penerapan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mencari solusi bagi isu kinerja yang muncul.

TABEL 18 Produktivitas Karyawan

Deskripsi	2017	2018	Perubahan (%)
Jumlah Karyawan	9.884	11.171	1.287 (13,0%)
Jumlah Outlet	342	401	59 (17,3%)
Karyawan / Jaringan	28,9	27,9	-1 (3,5%)
Jumlah Kontrak Baru / Jumlah Karyawan	39,3	41,0	1,7 (4,3%)

PENGEMBANGAN KARIER

BFI Finance berupaya keras untuk mewujudkan potensi dari semua karyawannya secara terarah, dengan menerapkan mekanisme pengembangan karier yang dikelola bersama-sama antara karyawan dengan manajemen (melalui Departemen Human Capital).

Program pengembangan karier ini terbagi menjadi dua tahapan: *GREAT Talent Review* dan *People Development*. Pada tahapan *GREAT Talent Review* tersebut, potensi karyawan dipetakan menggunakan metode *Human Asset Value (HAV)* dan diproyeksikan terhadap kompetensi mereka masing-masing yang mencakup aspek kepemimpinan, fungsional, dan teknis.

Untuk karyawan berkinerja dan berpotensi tinggi (disebut *talent*), manajemen secara khusus mengembangkan mereka melalui program *Talent Development* yang mencakup kegiatan *Bootcamp*, *Flex-learning* dan *coaching* reguler dari para *Leaders* setingkat Direksi dan manajemen senior, secara langsung maupun melalui media digital.



Bootcamp



“ Arman Hamka, Branch Manager Kupang, Nusa Tenggara Timur

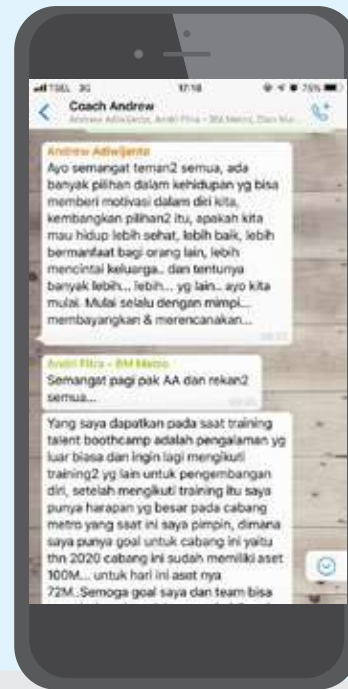
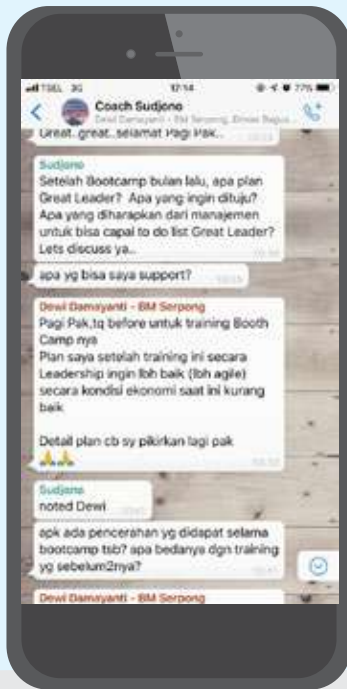
Sebagai karyawan BFI Finance, saya merasa perusahaan ini adalah tempat belajar yang sangat baik untuk pengembangan keahlian dan kompetensi sesuai bidang dan minat karyawan masing-masing. Ini saya rasakan secara pribadi lewat pengembangan karier saya yang dimulai dari sebagai HC Specialist dan sekarang menjadi Branch Manager. Bagi saya, suasana kerja yang nyaman dan sarat rasa kekeluargaan di BFI Finance berperan besar dalam meningkatkan produktivitas saya. Terlebih lagi, transparansi dalam pemberian tunjangan yang sesuai kinerja karyawan mendorong saya untuk lebih gigih lagi dalam mengembangkan karier di sini.

”

TABEL 19: Jumlah Karyawan Peserta Program Manajemen Talenta dan Suksesi

Jenjang Kepangkatan	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Manajerial ke atas	56	18	74	110	44	154	80 (108,1%)
Supervisor	85	31	116	243	51	294	178 (153,4%)
Jumlah	141	49	190	353	95	448	258 (135,8%)

BFI Coaching



KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat loyalitas dan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan, serta memastikan karyawan menunjukkan kinerja terbaiknya, BFI Finance menerapkan standar kompetitif dalam merumuskan paket dan struktur remunerasi yang berlaku untuk seluruh lapisan karyawannya. Kebijakan remunerasi Perusahaan juga disesuaikan dari waktu ke waktu, sesuai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di industri pembiayaan dan pasar tenaga kerja di wilayah operasional Perusahaan.

Selain tentunya mengindahkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku terkait pengupahan dan standar upah minimum, struktur gaji dan bonus kinerja karyawan juga ditentukan oleh faktor dasar (yakni jenjang kepangkatan) dan faktor lainnya (seperti prestasi dan kontribusi terhadap kemajuan individual, tim, dan Perusahaan). Di 2018, Perusahaan telah menetapkan struktur upah yang ketentuannya secara bertahap disosialisasikan kepada karyawan.



“ Devi Veronika, Internal Control Unit Head,
Kantor Pusat

Setelah menjadi bagian dari BFI Finance selama sepuluh tahun, bekerja di sini bagi saya bukan sebatas rutinitas, namun juga telah kesempatan mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga lainnya. Rekan-rekan kerja saya sangat menyenangkan dan saling mendukung, tanpa memandang batasan level atau jabatan. BFI Finance senantiasa memperhatikan pengembangan karir dan kompetensi karyawannya melalui program pelatihan yang menarik. Saya sangat puas dengan fasilitas bagi karyawan, terutama fasilitas kesehatan dan *car ownership program*. Ke depannya, saya harap program pelatihan dan pendidikan untuk karyawan dapat lebih dikembangkan lagi.

”

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Paket remunerasi yang berlaku di Perusahaan untuk seluruh karyawan tetapnya mencakup:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan karyawan, meliputi:
 - a. Tunjangan perumahan;
 - b. Tunjangan perjalanan (transportasi);
 - c. Tunjangan kesusahan (*hardship allowance*);
 - d. Tunjangan hari raya (THR) setahun sekali;
 - e. Tunjangan medis (penggantian biaya perawatan rumah sakit);
3. Program Kepemilikan Motor (*Motorcycle Ownership Program—MOP*) dan Program Kepemilikan Mobil (*Car Ownership Program—COP*);
4. Program kepemilikan fasilitas penunjang kerja;
5. Cuti melahirkan;
6. Keanggotaan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian);
7. Asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa; serta
8. Bonus kinerja (opsional).

Semangat kerja karyawan juga berkaitan erat dengan kinerja mereka. Oleh karena itu, Perusahaan gencar menyelenggarakan aktivitas untuk membangun kebersamaan antarkaryawan dan menghilangkan batasan-batasan kepangkatan melalui interaksi informal. Aktivitas-aktivitas semacam ini di 2018 termasuk kegiatan olahraga (bulutangkis, bola basket, tenis meja, futsal, senam zumba, dan lari), kompetisi video (tentang pengamalan budaya Perusahaan), acara *outbond*, *outing*, serta kegiatan komunitas (Radio BFI, *Music Corner*, Nonton Bareng, buka puasa bersama).

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Terciptanya hubungan industrial yang produktif dan saling menguntungkan merupakan sasaran BFI Finance dalam mengelola interaksinya dengan seluruh karyawan. Untuk itu, BFI Finance senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku terkait ketenagakerjaan dan juga menerapkan Peraturan Perusahaan untuk dipatuhi bersama.

Peraturan Perusahaan memuat aspek-aspek ketenagakerjaan yang penting, seperti kondisi kerja, dialog, pengembangan kompetensi, kesetaraan hak dan keadilan, dan perlindungan hukum. Peraturan Perusahaan melindungi seluruh hak karyawan Perusahaan.

Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2018 disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku untuk periode tiga tahun.

Dalam lingkungan BFI Finance tidak terdapat serikat pekerja, dengan pertimbangan bahwa karyawan Perusahaan belum memandang perlunya pembentukan serikat pekerja untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Setiap keluhan karyawan terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka dan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam Peraturan Perusahaan dapat langsung ditunjukkan oleh karyawan kepada pihak manajemen, secara lisan ataupun tertulis, untuk kemudian diselesaikan secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi BFI Finance. Di 2018 BFI Finance tidak menerima keluhan apapun dari karyawan terkait pelaksanaan hubungan industrialnya.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

BFI Finance berkepentingan untuk senantiasa menjaga aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari setiap karyawannya dalam segala aktivitas mereka di pekerjaan. Oleh karena itu, Perusahaan mengupayakan pembentukan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif menunjang produktivitas pekerja.

BFI Finance memiliki kebijakan dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang berlaku bagi semua karyawannya. Pelaksanaan prosedur K3 yang mengacu ke SMK3 ini dikelola oleh Departemen Human Capital dan Unit Infrastructure Development di bawah Divisi Operations.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Klausul-klausul terkait K3 dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan. Perusahaan mewajibkan seluruh karyawannya untuk mencegah dan menghindari potensi terjadinya kerusakan, kecelakaan kerja atau musibah di tempat kerja atau peristiwa lainnya yang berpotensi merugikan aset Perusahaan, serta untuk berinisiatif menanggulangnya apabila kejadian tersebut dijumpai saat mereka bekerja.

Karyawan Perusahaan dilindungi oleh beberapa jenis asuransi, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, serta asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri dari perusahaan asuransi mitra.

BFI Finance memastikan bahwa standar dan perizinan terkait keamanan untuk gedung dan fasilitas perkantoran yang BFI Finance gunakan senantiasa terpenuhi dan mutakhir. Setiap sistem dan infrastruktur yang mendukung operasional gedung (misalnya lift, genset, dan pengolahan limbah) dipastikan bekerja dengan baik secara berkala, dan perizinannya dimutakhirkan. Sementara itu, aset-aset penting termasuk dokumen milik

pelanggan pada Pusat Kustodian (*Custodian Center*) dilindungi di dalam ruangan tahan gempa dan kebakaran, yang terletak di Kantor Pusat, BFI Finance Tower.

BFI Finance rutin menyelenggarakan latihan evakuasi, uji coba peralatan pemadaman kebakaran, dan pemeliharaan rutin fasilitas gedung. Di setiap lantai, tersedia sarana penyelamatan atas bencana kebakaran dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Tim keadaan darurat siaga untuk menanggulangi kejadian-kejadian darurat dan mempersiapkan seluruh karyawan untuk tanggap dan bertindak tepat terhadap kejadian tersebut.

Karyawan BFI Finance yang bekerja di lapangan, antara lain mereka yang menjalankan fungsi pemasaran, penagihan, dan operasional, menghabiskan banyak waktu mereka di jalan. Untuk melindungi mereka dari kemungkinan kecelakaan lalu lintas, BFI Finance senantiasa memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan berlalu lintas dan mengenakan alat perlindungan yang memadai saat berkendara.

TABEL 20 Kecelakaan Kerja

Tingkat Kecelakaan Kerja	Karyawan Lapangan	Karyawan Non-Lapangan	Jumlah
Kecelakaan Berat	2	3	5
Kecelakaan Ringan	24	4	28
Jumlah Kasus	26	7	33

BFI Finance mendorong semua karyawannya untuk peduli dengan kesehatan mereka dan lingkungan di mana mereka berada, serta memahami potensi berbagai penyakit akibat kerja yang mungkin timbul dari aktivitas sehari-hari mereka. Di 2018, kampanye kesehatan yang Perusahaan selenggarakan meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala, pembekalan informasi seputar wabah penyakit, kondisi lingkungan yang menyebabkan bahaya kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat.

HUMAN CAPITAL TECHNOLOGY

Seluruh aspek pengelolaan SDM di BFI Finance didukung oleh *Human Capital Information System (HCIS)* sebagai suatu sistem informasi terintegrasi. Setiap tahunnya dilakukan pembaruan, peningkatan, serta penyempurnaan terhadap fitur-fitur HCIS. Tujuannya adalah untuk mengotomasi kegiatan pengelolaan SDM Perusahaan secara optimal dan efektif. Selain itu, karyawan dapat memanfaatkan layanan *employee self-service* dalam fitur-fitur HCIS, antara lain, pengajuan cuti, lembur, *medical reimbursement*, pembaruan profil karyawan, dan izin perjalanan dinas.

Bagi para pimpinan dan jajaran manajemen juga dapat memantau produktivitas kinerja setiap tim dan individu secara *real-time*, melalui *Human Capital Dashboard* sehingga mereka dapat mengambil keputusan strategis dan menyusun rencana kerja secara lebih cepat dan akurat.



DEMOGRAFI KARYAWAN

PROFIL KARYAWAN

Pada 2018, BFI Finance merekrut karyawan baru untuk mengisi posisi-posisi baru yang tercipta seiring perluasan bisnisnya dan menggantikan karyawan-karyawan lama yang meninggalkan pekerjaannya karena berbagai alasan. Jumlah karyawan Perseroan per akhir 2018 meningkat 1.287 orang atau 14% dibandingkan per akhir 2017. Lebih dari 90% dari karyawan baru yang direkrut di 2018 merupakan generasi milenial. Kondisi ini mencerminkan profil demografis karyawan BFI Finance yang sangat muda dan tanggap terhadap perkembangan teknologi digital.

TABEL 21 Jumlah Karyawan

Deskripsi	31 Des 2017	31 Des 2018	Perubahan (%)
Jumlah Karyawan	9.884	11.171	1.287 (13,0%)

TABEL 22 Jumlah Karyawan berdasarkan Direktorat

Deskripsi	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Dewan Komisaris	6	1	7	7	2	9	2 (28,6%)
Direksi	5	-	5	5	-	5	0 (0,0%)
Direktorat CEO (Presiden Direktur)	130	42	172	146	57	203	31 (18,0%)
Direktorat Bisnis	3.884	705	4.589	4.319	805	5.124	535 (11,7%)
Direktorat Operasional & SDM	682	1.278	1.960	731	1.477	2.208	248 (12,6%)
Direktorat Risiko Perusahaan	2.505	403	2.908	2.917	448	3.365	457 (15,7%)
Direktorat Keuangan	199	44	243	204	53	257	14 (5,8%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

TABEL 23 Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Permanen	4.319	1.663	5.982	4.797	1.849	6.646	664 (11,1%)
Non-Permanen	3.092	810	3.902	3.532	993	4.525	623 (16,0%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

TABEL 24 Jumlah Karyawan berdasarkan Kontrak Kerja

Kontrak Kerja	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Purnawaktu	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)
Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

TABEL 25 Jumlah Karyawan berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Kantor Pusat	430	335	765	499	398	897	132 (17,2%)
Jadeta	708	201	909	830	232	1.062	153 (16,8%)
Jawa & Bali	2.992	879	3.871	3.417	1.043	4.460	589 (15,2%)
Sumatera	1.272	433	1.705	1.400	476	1.876	171 (10,0%)
Kalimantan	736	212	948	790	243	1.033	85 (9,0%)
Indonesia Timur	1.273	413	1.686	1.393	450	1.843	157 (9,3%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

TABEL 26 Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Magister & Doktor	33	13	46	36	16	52	6 (13,0%)
Sarjana	4.181	1.715	5.896	4.775	2.029	6.804	908 (15,4%)
Diploma	799	380	1.179	2.831	727	3.558	2.379 (201,8%)
SMA dan di bawahnya	2.398	365	2.763	687	70	757	-2.006 (-72,6%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

**DEMOGRAFI
KARYAWAN**

TABEL 27 Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Jenjang Kepangkatan	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Dewan Komisaris & Direksi	11	1	12	12	2	14	2 (16,7%)
Senior Manager	113	32	145	142	37	179	34 (23,4%)
Junior Manager	402	94	496	447	102	549	53 (10,7%)
Officer	1.882	711	2.593	2.099	822	2.921	328 (12,6%)
Staff	5.003	1.635	6.638	5.629	1.879	7.508	870 (13,1%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

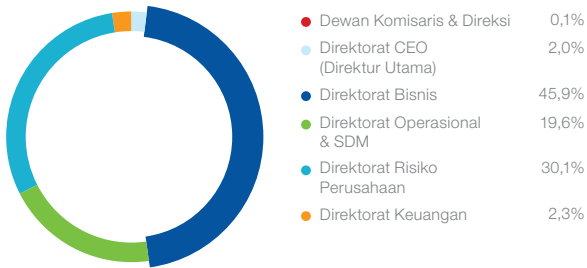
TABEL 28 Jumlah Karyawan berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
< 25 tahun	1.290	750	2.040	2.077	1.217	3.294	1.254 (61,5%)
25-30 tahun	3.711	1.259	4.970	3.965	1.177	5.142	172 (3,5%)
31-40 tahun	2.139	403	2.542	2.041	391	2.432	-110 (-4,3%)
41-50 tahun	245	53	298	222	49	271	-27 (-9,1%)
> 50 tahun	26	8	34	24	8	32	-2 (-5,9%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

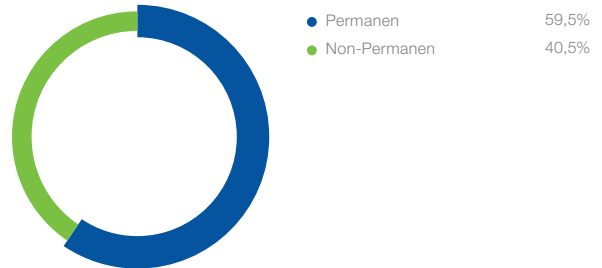
TABEL 29 Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	31 Des 2017			31 Des 2018			Perubahan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
< 3 tahun	4.790	1.389	6.179	5.508	1.708	7.216	1.037 (16,8%)
3-5 tahun	1.461	551	2.012	1.450	536	1.986	-26 (-1,3%)
6-10 tahun	879	404	1.283	1.020	437	1.457	174 (13,6%)
> 11 tahun	281	129	410	351	161	512	102 (24,9%)
Jumlah	7.411	2.473	9.884	8.329	2.842	11.171	1.287 (13,0%)

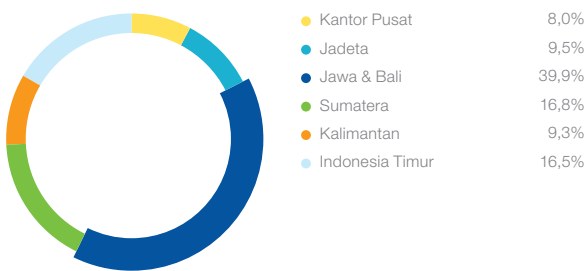
GRAFIK 8 Jumlah Karyawan berdasarkan Direktorat



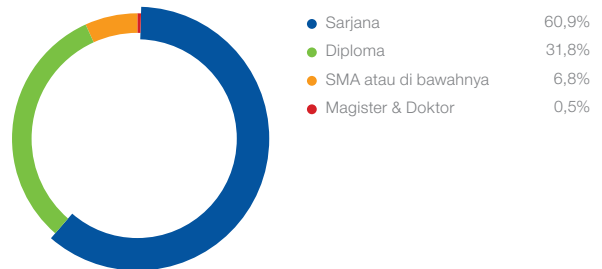
GRAFIK 9 Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian



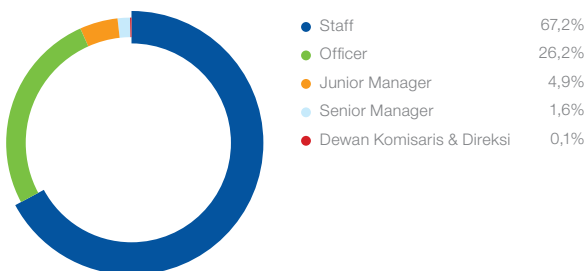
GRAFIK 10 Jumlah Karyawan berdasarkan Wilayah Kerja



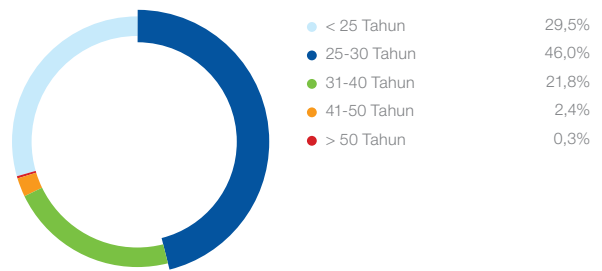
GRAFIK 11 Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan



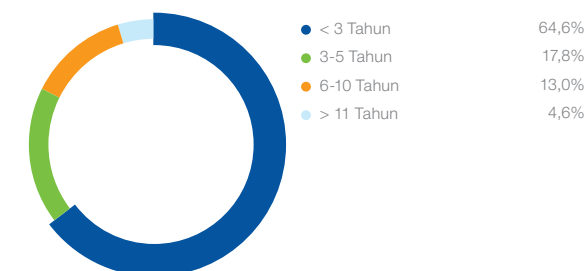
GRAFIK 12 Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Kepangkatan



GRAFIK 13 Jumlah Karyawan berdasarkan Kelompok Usia



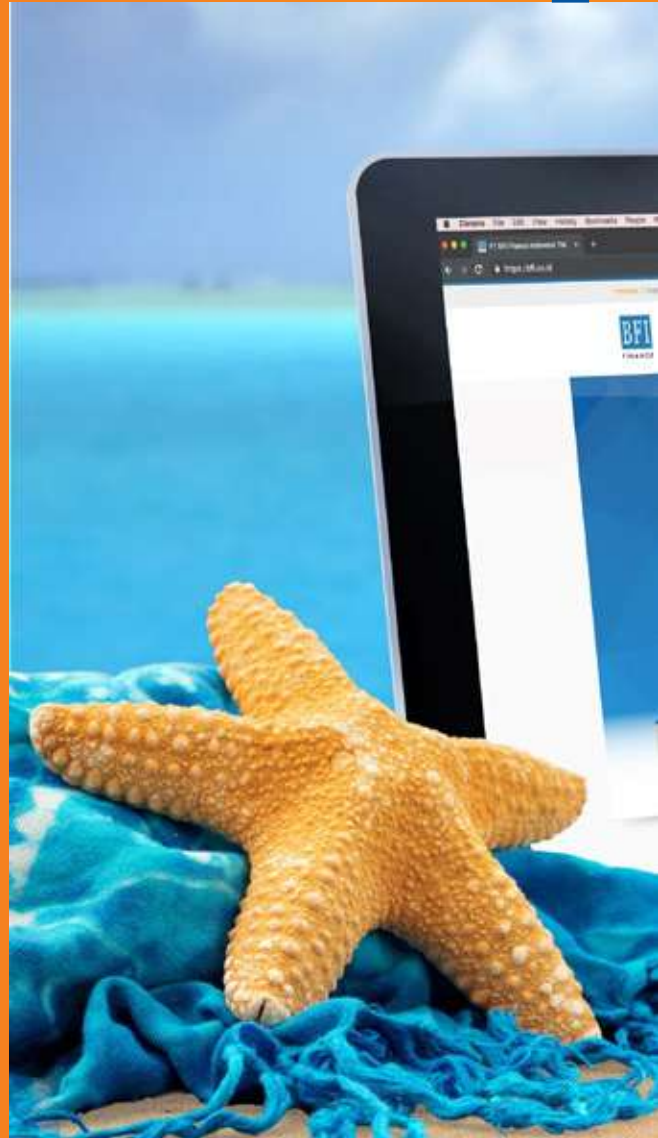
GRAFIK 14 Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja

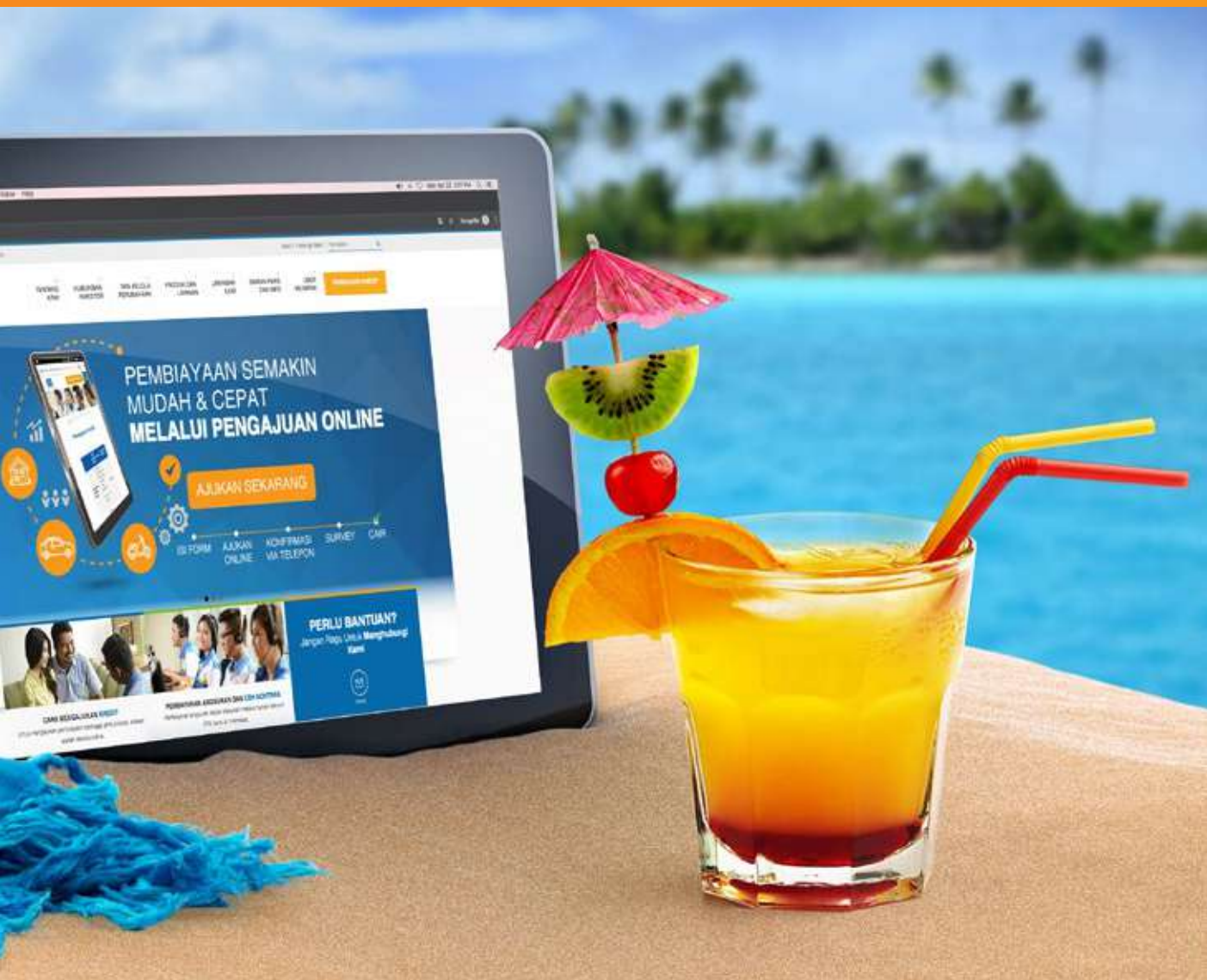




Unit Pendukung Bisnis

- 126 Pengembangan Jaringan dan Operasional
- 131 Pelayanan Konsumen
- 136 Teknologi Informasi





Tak perlu menunggu lama, destinasi impian menjadi kenyataan. Solusi pembiayaan perjalanan wisata tak lagi hanya angan-angan dengan BFI Leisure. Kami memahami bahwa sebuah perjalanan akan membantu setiap individu menjadi pribadi yang lebih baik.

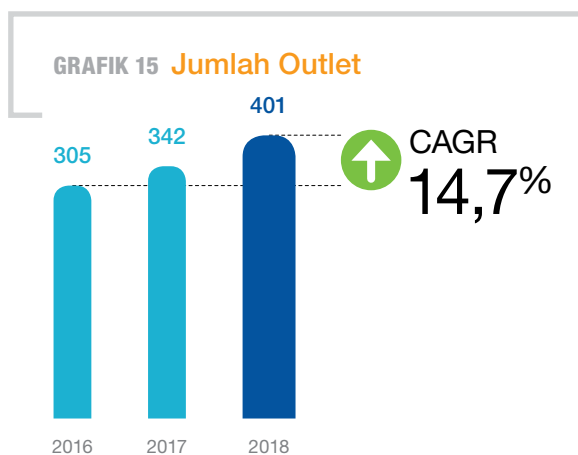
PENGEMBANGAN JARINGAN DAN OPERASIONAL



Perluasan cakupan BFI Finance di Indonesia di 2018 dilakukan melalui pembukaan 60 outlet baru di sejumlah area yang membutuhkan pendalaman bisnis lebih lanjut sekaligus menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik.

Dengan dibukanya 11 cabang dan 49 gerai baru, per akhir 2018 BFI Finance mengoperasikan 228 cabang dan 173 gerai di seluruh Indonesia, meningkat 17,3% atau 59 outlet dari total 342 outlet di 2017.

Perluasan jangkauan usaha tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan skala ekonomi, tingkat kompetisi, kepadatan penduduk, dan ketersediaan perguruan tinggi di area-area sasaran, sesuai dengan strategi BFI Finance dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya.



Mengingat transisi model bisnis dari proses pembiayaan tradisional ke pembiayaan yang bersifat digital dapat membuat operasional Perusahaan semakin lincah dan efektif, sinkronisasi antara upaya-upaya peningkatan infrastruktur, pengembangan kompetensi karyawan, dan adaptabilitas konsumen terhadap proses bisnis digital menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan di tengah agresifnya persaingan di industri pembiayaan.

1. Pengembangan infrastruktur

Pemanfaatan dan optimasi sistem teknologi informasi terkini yang terintegrasi di seluruh proses bisnis BFI Finance menjadi basis peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitasnya. Perusahaan mengembangkan infrastruktur teknologinya seiring dengan perkembangan lanskap industri pembiayaan dan potensi bisnis baru yang bermunculan. Dengan demikian, Perusahaan dapat siap menjawab berbagai kebutuhan konsumen secara cepat dan efisien.

2. Transformasi karyawan

SDM yang tanggap dengan perkembangan teknologi merupakan jantung pertumbuhan usaha di era digital. Keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dan kesiapan penggunaannya (karyawan Perusahaan) memungkinkan

PENGEMBANGAN JARINGAN DAN OPERASIONAL

terjadinya peningkatan produktivitas. Transformasi digital dalam diri karyawan juga membantu BFI Finance untuk menstandarisasi dan merampingkan berbagai prosedur, khususnya di cabang-cabang kecil. Proses ini didukung penuh dengan diberlakukannya BECOCO yang meredefinisikan kompetensi inti karyawan Perusahaan pada 2018. Ke depannya, semua ini akan mengakselerasi pertumbuhan bisnis di tengah persaingan di era digital.

3. Edukasi bagi konsumen

Ketidakterampilan kemampuan konsumen untuk beradaptasi terhadap era digital membuat Perusahaan perlu mengedukasi konsumen terkait proses bisnis berbasis *online*. Proses yang terdigitalisasi dalam interaksi BFI Finance dengan konsumen memungkinkan perluasan kapabilitas dan percepatan akses bagi kedua belah pihak untuk pertukaran informasi, baik terkait kebutuhan konsumen maupun informasi layanan Perusahaan. Semakin pahamnya konsumen terhadap proses-proses BFI Finance yang telah beralih ke metode digital akan membuat Perusahaan semakin leluasa dan lincah untuk menawarkan *unique value proposition* yang menjadi keunggulannya.

Sebagaimana di 2017, inisiatif pengembangan jaringan dan operasional BFI Finance terpusat pada tiga pilar; sentralisasi proses bisnis, otomasi fungsi outlet, dan ekosistem transaksional berbasis non-tunai. Semua ini berlanjut di 2018, dengan tujuan:

1. Melalui integrasi proses bisnis, pengendalian dapat dilakukan secara terpusat dan kualitas layanan kepada konsumen dapat ditingkatkan;

2. Penyediaan informasi di seluruh lapisan Perusahaan menjadi lebih transparan; dan
3. Transaksi pembayaran angsuran melalui *platform* pembayaran digital menjadi lebih mudah.

Beberapa inisiatif dari pengejawantahan tiga pilar tersebut adalah: penataan ulang sejumlah cabang, penetapan zona untuk aktivitas penagihan, *Microbattle Project*, sentralisasi pembayaran kepada pihak ketiga, penggunaan *Gerai Card* atau *Funding Card*, penyebaran titik-titik pembayaran, *telecollection*, dan penerapan Sistem Informasi Tagihan pada *platform* digital.

Salah satu transformasi digital yang paling fundamental di BFI Finance adalah berjalannya operasi pembiayaan syariah. Di 2018, setelah memperoleh izin operasi dari regulator untuk 22 cabang syariahnya, BFI Finance menerapkan metode pemasaran melalui berbagai media *online* dan konvensional untuk menjangkau target pasar pembiayaan syariah, dan menerapkan metode penilaian kelayakan konsumennya secara digital.

Berbeda dari model bisnis pembiayaan konvensional, seiring perkembangan potensi pasar dan tren bisnis syariah, Unit Bisnis Syariah BFI Finance menitikberatkan kemitraan dengan pihak ketiga dalam memasarkan produk-produk pembiayaan syariah yang bersifat non-konvensional dan tanpa agunan.

DAMPAK BENCANA ALAM TERHADAP JARINGAN PERUSAHAAN

Pada 28 September 2018, kawasan Palu dan Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah, mengalami gempa berkekuatan 7,4 SR yang menyebabkan kerusakan dalam skala besar dan melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Operasi bisnis Perusahaan di kawasan tersebut turut terdampak oleh kerusakan akibat gempa ini. Dalam rangka menanggulangi dampak bencana alam tersebut, Perusahaan segera melaksanakan sejumlah langkah strategis termasuk menerapkan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif, yang mencakup tiga golongan proses, yakni:

1. Rehabilitasi

Bertujuan mengembalikan kondisi fisik dan non-fisik ke keadaan semula (normal) pasca-bencana. Ini meliputi rehabilitasi gedung dan jaringan, serta penanganan untuk mengembalikan moral dan kondisi fisik serta psikologis karyawan.

2. Relokasi

Bertujuan untuk memindahkan lokasi operasional bisnis Perusahaan (gedung dan infrastruktur penunjang lainnya) untuk sementara, hingga kondisi di lokasi semula telah kembali kondusif.

3. Identifikasi

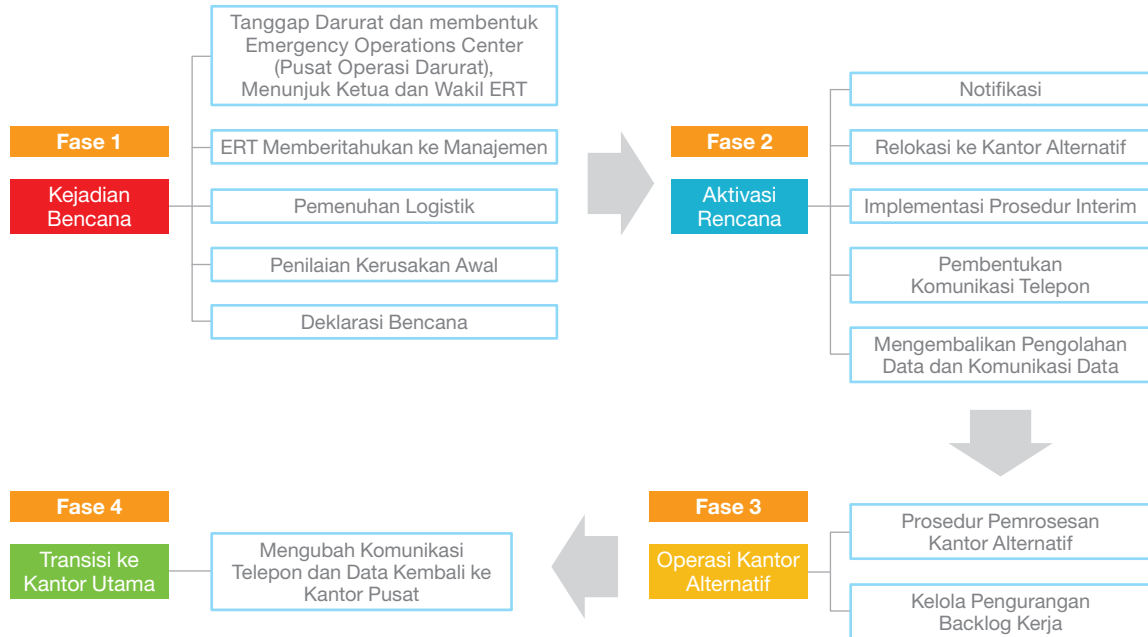
Bertujuan melakukan pemetaan lebih lanjut terkait kondisi karyawan, konsumen dan portofolio pembiayaan, aset dan dokumen penting, serta hal-hal lainnya, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai potensi kerugian yang akan ditanggung Perusahaan. Selain itu, kebijakan terkait program penanganan dan pemulihan selanjutnya akan dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini.

BFI Finance telah memiliki struktur kerja berdasarkan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk mengawal dan melaksanakan ketiga proses tersebut. Struktur kerja ini dipimpin oleh Emergency Operations Center (EOC), yang bertanggung jawab merumuskan langkah-langkah penanggulangan serta memberikan informasi terkini seputar kondisi di lokasi yang terdampak bencana dan melaporkan seluruh kemajuan penanggulangannya.

Didukung oleh Emergency Response Team (ERT), yang menjalankan instruksi dari EOC langsung di lapangan, manajemen puncak Perusahaan akan mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kerusakan di lapangan dan potensi kerugiannya, sehingga kemudian dapat mengambil keputusan strategis yang tepat berdasarkan informasi tersebut dan yang sesuai dengan BCP yang dimilikinya.

PENGEMBANGAN JARINGAN DAN OPERASIONAL

GRAFIK 16 Empat Fase Pemulihan Operasional Pascabencana



Berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan pada Grafik 16 di atas, Perusahaan berhasil memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi pascabencana beserta total kerusakan dan kerugian yang ditanggung. Ini merupakan suatu elemen penting dari proses manajemen risiko Perusahaan. Informasi ini juga menentukan batasan-batasan untuk penerapan kebijakan penghapusbukuan piutang pembiayaan dari para pelanggan yang terdampak bencana. Dengan demikian, risiko terganggunya bisnis Perusahaan akibat bencana alam ini dapat dimitigasi secepatnya dan tidak mempengaruhi posisi keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

PELAYANAN KONSUMEN



Alfan Akbar, Direktur CV Multikalimaji,
Konsumen Pembiayaan Alat Berat,
Tangerang, Banten

Perusahaan saya telah bermitra dengan BFI Finance selama dua tahun, berawal dari perkenalan melalui jaringan industri. Rekomendasi yang saya terima dari para pelanggan alat berat mengenai BFI Finance terbukti memuaskan, terutama karena kualitas pelayanan karyawan BFI Finance serta kecepatan proses pembiayaannya. BFI Finance sangat menunjang usaha saya melalui program-program mereka yang kompetitif dan fasilitas yang meringankan konsumennya. Harapan saya, ke depannya BFI Finance dapat lebih mengembangkan sistem pembiayaan syariahnya, mengingat besarnya potensi usaha di bidang tersebut.



Kepuasan konsumen adalah bagian yang sangat penting untuk BFI Finance dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Menghadapi persaingan di industri pembiayaan yang semakin ketat, BFI Finance terus menyempurnakan layanannya agar dapat menghadirkan solusi yang cepat, tepat, dan memuaskan.

Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan konsumen juga merupakan perwujudan kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Seluruh upaya ini dirangkum dalam kerangka kerja *Service Quality Strategy* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perusahaan secara komprehensif.

SERVICE QUALITY STRATEGY

Service Quality Strategy mengandung empat langkah utama, yaitu:

- 1. Sustaining Service Insight**
(mempertahankan wawasan pelayanan);
- 2. Customer Relationship & Engagement**
(hubungan dan keterlibatan konsumen);
- 3. Converting Customer Service into Sales**
(konversi pelayanan konsumen menjadi penjualan); dan
- 4. Complaint Handling & Service Recovery**
(penanganan keluhan dan pemulihan pelayanan).

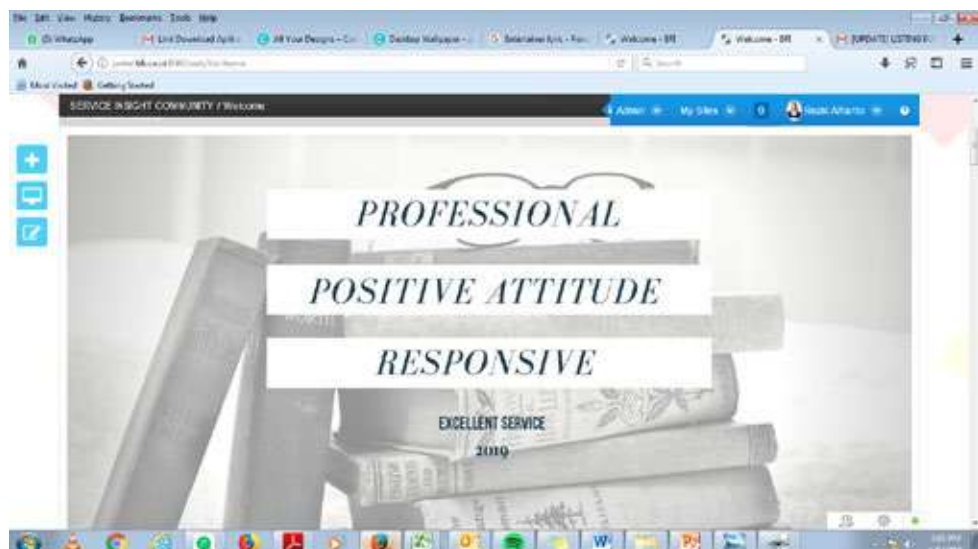
Sustaining Service Insight

BFI Finance telah merumuskan nilai dasar pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan menetapkan prosedur pelayanan standar bagi karyawannya untuk konsumen dan masyarakat luas. Nilai-nilai dasar *Service Insight* ditanamkan pada semua karyawan, terutama unit-unit yang langsung berhadapan dengan konsumen.

Service Insight sejalan dengan salah satu nilai dasar Perusahaan, yakni *Excellent Service* – memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen internal dan eksternal. *Service Insight* diterapkan dalam lima dimensi pelayanan sebagai berikut:

- Nyata (*Tangibles*): Penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan materi komunikasi;
- Dapat Diandalkan (*Reliability*): Kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara andal dan akurat;
- Sikap Responsif (*Responsiveness*): Kesungguhan dalam membantu konsumen dan menyampaikan layanan yang cepat;
- Kepastian/Jaminan (*Assurance*): Pengetahuan dan kesantunan karyawan yang layak dipercaya;
- Empati (*Empathy*): Kepedulian dan perhatian khusus bagi konsumen.

Penerapan *Service Insight* didukung oleh laman web khusus, *Service Insight Community* (SIC). Melalui SIC, karyawan dapat memberi masukan terkait budaya layanan sekaligus memperluas wawasan mengenai pelayanan konsumen yang sesuai dengan zaman milenial.



Customer Relationship & Engagement

Untuk melayani konsumen dengan lebih baik, BFI Finance selalu memperlengkapi setiap karyawan, terutama *Frontliner* dan *Marketing*, dengan berbagai kompetensi dan pemahaman baru terkait kualitas pelayanan dan pengenalan kebutuhan konsumen. Dengan membina hubungan baik antara BFI Finance dengan konsumennya, loyalitas terhadap Perusahaan diharapkan akan semakin kuat.

Pelatihan-pelatihan bagi karyawan di 2018 terkait pelayanan mencakup topik-topik kemampuan berkomunikasi, kecepatan respons, penanganan keluhan, dan cara-cara menjunjung tinggi integritas sesuai Nilai-Nilai Dasar Perusahaan. Di 2018, karyawan bidang pelayanan konsumen juga mengikuti pelatihan *Service Insight*, kegiatan *Service Star Action* bulanan untuk meningkatkan strategi pelayanan serta mempererat hubungan sesama karyawan, serta program *service* yang dirancang khusus untuk konsumen yang disesuaikan dengan perayaan nasional (misalnya Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Konsumen Nasional).

Fokus Perusahaan dalam aspek ini adalah memberikan perlakuan khusus dan pemberian hadiah tertentu (bingkisan) bagi konsumen prioritas dan istimewa dari BFI Finance, termasuk kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi Perusahaan. Melalui “BM Goes to Front Office”, acara tahunan sejak 2015, para Branch Manager bergabung dengan staf *front office* untuk turut melayani konsumen di kantor BFI Finance. Selain perlakuan khusus, Perusahaan juga memacu keterlibatan konsumen, khususnya konsumen prioritas,

untuk mempererat keakraban dengan mereka melalui beberapa kompetisi berhadiah di cabang-cabangnya, seperti acara *Customer Gathering*, program berhadiah UBER Milyaran, dan kado ulang tahun konsumen.

Program-program bagi konsumen prioritas dan konsumen lainnya terus berlanjut di 2018. Sebagai bentuk layanan purnajual, untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas, BFI Finance menjalin kerja sama dengan sejumlah *merchant* favorit di setiap wilayah. Seluruh konsumen BFI Finance di wilayah mereka masing-masing dapat memperoleh diskon khusus saat berbelanja di *merchant*. Hingga akhir 2018, terdapat 268 *merchant* rekanan BFI Finance di berbagai bidang usaha, misalnya restoran dan kafe, cuci mobil, bengkel, kesehatan, kecantikan dan *grooming*, hotel bintang lima, hiburan, dan toko bangunan dan perlengkapan rumah.

Untuk *Customer Experience* yang lebih baik, di 2018 BFI Finance menerapkan *Digital Front Office* pada 33 cabang utamanya. *Digital Front Office* difasilitasi oleh aplikasi Android yang digunakan tim Customer Service (CS) dan Sales Promotion Advisor (SEPIA) di setiap cabang. Aplikasi ini selain meningkatkan kualitas pelayanan juga digunakan untuk pengenalan produk, pengembangan informasi, hingga pengisian survei oleh konsumen, terutama survei kepuasan layanan konsumen dengan *Smart Rating System*. Melalui survei ini umpan balik dari konsumen terkait pelayanan Perusahaan dapat diperoleh secara *real-time*. Penerapannya akan diperluas ke berbagai cabang di pertengahan 2019. Hingga akhir 2018, 97% konsumen yang dilayani tim Front Office merasa puas dengan pelayanan Perusahaan.



Dian Sandra D.A., Konsumen Pembiayaan Mobil BFI Finance sejak 2015, Malang, Jawa Timur

Saya mulai mengenal produk pembiayaan BFI Finance dari kerabat saya dan telah menjadi konsumen BFI Finance sejak 2015. Saya puas dengan pelayanan petugas BFI Finance, terutama dengan kecepatan dan kesopanannya dalam melayani dan memberikan tanggapan serta luasnya pengetahuan mereka akan produk-produk yang BFI Finance tawarkan. Prosedur pelayanan yang cepat dan mudah juga menjadi salah satu keunggulan, sehingga saya merasa nyaman menjadi konsumen selama beberapa tahun terakhir. Jika saya membutuhkan pembiayaan baru di masa yang akan datang, tentunya saya akan tetap ke BFI Finance.



Converting Customer Service into Sales

Di 2018, BFI Finance mengembangkan fungsi Customer Service (CS) yang disebut dengan Sales Promotion Advisor (SEPIA), yang fokus utamanya adalah meningkatkan penjualan dan pemasaran produk-produk BFI Finance. Perusahaan membekali staf CS sekaligus SEPIA di beberapa cabang besar dengan kompetensi seputar pemasaran dan promosi produk, dan juga dengan perangkat dan aplikasi bernama *Apps2U* untuk menghadirkan pelayanan berkualitas dan mendukung upaya promosi produk mereka.

Complaint Handling & Service Recovery

Setiap keluhan yang disampaikan ke Perusahaan segera ditindaklanjuti Unit Customer Care, bekerja sama dengan unit-unit lainnya yang terlibat dalam masing-masing keluhan. Setiap keluhan diselesaikan dengan cepat, tepat, tuntas, serta memuaskan. Untuk itu, diperlukan integrasi dan komunikasi yang lancar antara Unit Customer Care dan kantor-kantor cabang.

BFI Finance mencatat semua umpan balik dari konsumen dan masyarakat umum lainnya yang masuk melalui berbagai jalur. Di 2018, terdapat 12.663 umpan balik dalam bentuk keluhan dan saran, dengan 60% di antaranya merupakan pertanyaan seputar produk Perusahaan. Tidak terdapat keluhan apapun dari konsumen mengenai pelanggaran atas hak atas privasi dan data yang diterima Perusahaan di 2018.

BFI Finance telah menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) berupa periode respons untuk setiap keluhan yang diterima. Ketentuan dalam SLA ini telah sesuai dengan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Di 2018, kualitas SLA Perusahaan dapat dipertahankan. Setiap pengaduan yang diterima di 2018 dapat ditindaklanjuti secara tuntas dalam waktu maksimal 20 hari.

PENGUKURAN KEPUASAN KONSUMEN

BFI Finance mengukur keberhasilan program-program pelayanan konsumennya dengan menghitung Indeks Kepuasan Konsumen (*Customer Satisfaction Index*) atau CSI secara berkala.

Penilaian kepuasan konsumen di 2018 melibatkan 246.795 responden, yang semuanya merupakan konsumen lama Perusahaan. Pengukuran tersebut menghasilkan nilai CSI 2018 sebesar 4,38. Nilai ini sedikit menurun dari 2017, sehingga Perusahaan telah menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah perbaikannya untuk segera diterapkan sehingga dapat mengembalikan tingkat kepuasan konsumen.

INTERNAL CUSTOMER CARE

Selain meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen eksternal, BFI Finance juga meningkatkan kualitas layanan bagi kalangan internalnya. Perusahaan telah membentuk program *Internal Customer Care* untuk menampung keluhan dari internal, antara lain, penilaian dari karyawan kantor cabang terhadap kinerja rekan kerja di kantor pusat dan sebaliknya. Program ini juga memberikan gambaran mengenai kepuasan layanan dari setiap unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan.

FOKUS PELAYANAN KONSUMEN 2019

BFI Finance telah mencanangkan program-program berikut untuk terus memperkuat pelayanannya bagi para konsumen dan untuk menjamin kepuasan konsumen di 2019:

1. Pengembangan dan pelatihan berkelanjutan terkait pelayanan;
2. Pemberian nilai tambah, perlakuan khusus, dan kemudahan bagi konsumen BFI Finance Prioritas;
3. Penguatan pelayanan purnajual dengan menambah kemitraan yang saling menguntungkan dengan *merchant*; dan
4. Pemberian layanan ekstra pada perayaan khusus di hari-hari besar nasional.

TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi (TI) diterapkan secara sistematis dalam proses bisnis BFI Finance dengan *platform* yang mencakup infrastruktur, sistem, dan prosedur yang disempurnakan secara berkala.

Secara umum, *platform* TI mendukung BFI Finance dalam mewujudkan rencana strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi Perusahaan. Pemanfaatan TI secara komprehensif bertujuan utama menunjang efektivitas dan efisiensi proses bisnis BFI Finance, mulai dari pemrosesan kredit calon pelanggan hingga evaluasi kinerja individu dan Perusahaan, serta menjaga akurasi dan keandalan data yang manajemen gunakan untuk mengambil keputusan.

Untuk kelancaran operasional bisnis Perusahaan, di 2018 BFI Finance telah melakukan:

- Peremajaan perangkat komputer utama (*server*) dan media penyimpanan (*storage*) pada area Pusat Data (*Data Center*), dan Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) yang terstandardisasi;
- Peningkatan proses pemantauan pada sistem operasi, basis data, perangkat server dan jaringan; serta
- Persiapan solusi *backup* data dan sistem untuk meningkatkan ketersediaan layanan Perusahaan.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

BFI Finance menjalankan rencana kerja TI yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan perubahan arsitektur pada beberapa sistem aplikasi untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Tujuan proyek strategis TI BFI Finance yang telah dilakukan di 2018, antara lain:

- Meningkatkan kinerja dan layanan TI;
- Mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas proses operasional;
- Mendukung pengembangan dan pertumbuhan bisnis; dan
- Meningkatkan keamanan TI serta keamanan data atau informasi.

Strategi yang mulai dilaksanakan di 2018 dan akan berlanjut di 2019 mencakup perbaikan sistem dan peningkatan infrastruktur TI, dengan inisiatif-inisiatif berikut:

- Solusi teknologi dengan melakukan transformasi digital dan modernisasi sistem lama;
- Data analitik untuk mendukung kebutuhan bisnis dan manajemen;
- Peremajaan sistem dan perangkat keras tertentu;
- Peningkatan keamanan dan pengembangan arsitektur TI; dan
- Pengembangan organisasi dan peningkatan sumber daya TI.

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI 2018

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan operasional, struktur dan fungsi TI juga telah dikembangkan menjadi empat bagian utama, yaitu:

- *IT Portfolio & Project Management*: mencakup area analisis bisnis, manajemen proyek, dan manajemen vendor;
- *IT Solution Delivery*: meliputi fungsi pengembangan aplikasi dan produksi;
- *IT Control & Infrastructure*: mencakup fungsi infrastruktur (perangkat keras, pusat data serta keamanan fisik dan keandalan jaringan); serta
- *IT Architecture & Analytics*: meliputi fungsi *data warehousing*, data manajemen, data analitik, serta mengatur perkembangan dan standarisasi arsitektur TI.

Agar aplikasi, sistem, dan perangkat yang dibangun, diperbaiki, dan diterapkan dapat berkualitas dan berkinerja baik, upaya peningkatan tata kelola TI BFI Finance diterapkan dengan standar berikut:

- Standar siklus pengadaan dan pengembangan sistem/aplikasi (*System Development Life Cycle—SDLC*);
- Standar siklus pemeliharaan dan perbaikan sistem/aplikasi (*System Maintenance Life Cycle—SMLC*); serta
- Standar penanganan masalah TI (*IT Incident Management*).

SISTEM INTI TERINTEGRASI

Seluruh proses bisnis di BFI Finance didukung oleh sistem inti yang terintegrasi yang telah diimplementasikan sejak 2010 dan terus dikelola dan ditingkatkan kapabilitasnya sesuai dengan perkembangan bisnis dari tahun ke tahun.

Sistem inti saat ini memiliki fungsi antarmuka berbasis *web* dan terintegrasi dengan sistem-sistem pendukung lainnya. Dengan demikian, BFI Finance dapat memastikan bahwa seluruh proses bisnis utama di setiap lokasi operasionalnya dapat dipantau dan dibandingkan dengan target yang dinyatakan dalam SLA.

Sampai akhir 2018, sistem-sistem yang telah terintegrasi ke dalam sistem inti BFI Finance meliputi sistem Akuntansi (GL), *Salestrax*, *Telesales*, *Telecollection*, Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*), Pemeliharaan *Fixed Assets*, *Finance & Treasury Control System*, Aplikasi *Mobile* untuk pelanggan, *dealer*, dan agen, Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP), *Mobile Collection*, Persiapan Pelaporan kepada Regulator, serta Sistem Syariah. Selain itu, dukungan dari sisi *Data Warehouse* dan *Business Intelligence* sangat membantu proses pengambilan keputusan strategis.

RENCANA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI 2019

Untuk 2019, BFI Finance telah merencanakan sejumlah pengembangan sistem dan infrastruktur TI yang selaras dengan rencana strategis Perusahaan untuk meningkatkan keamanan, keandalan, dan ketersediaan sistem. Rencana-rencana pengembangan tersebut meliputi:

1. *Loan Origination System Revamp*

Perubahan bisnis yang sangat dinamis dan persaingan yang semakin ketat menuntut BFI Finance untuk senantiasa berinovasi dalam proses pembiayaan yang lebih fleksibel sehingga dapat terus bersaing dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.

2. *Document Management System*

Penyimpanan dokumen secara elektronik (*e-filing*) perlu didukung dengan kemudahan pencarian dokumen sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan dokumen yang memadai.

3. *Human Capital Information System*

Dalam rangka pengelolaan tenaga kerja, BFI Finance mengembangkan sistem baru seperti *Chatbot* untuk mempermudah komunikasi antara Perusahaan dan karyawan, dan juga *Mobile Learning* untuk meningkatkan fleksibilitas cara pembelajaran untuk semua karyawan baik di pusat maupun di cabang di seluruh Indonesia.

4. *Customer Relationship Management (CRM)*

BFI Finance akan mulai melakukan asesmen terkait CRM untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga dapat menawarkan solusi-solusi terbaik.

5. *Credit Scoring & Collection*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan tetap mengedepankan aspek manajemen risiko, BFI Finance mengembangkan sistem TI untuk mendukung proses *credit scoring* dan *collection* yang lebih efektif.

6. *Data Analytics*

BFI Finance melakukan implementasi *Data Management & Analytics* sebagai salah satu strategi untuk terus berkembang dan memiliki fondasi data yang semakin kuat dan akurat dalam menjalankan bisnis di masa mendatang, sekaligus menjaga kualitas serta keamanan data dengan standar tinggi.

7. Pengembangan arsitektur TI akan mengarah pada arsitektur terdistribusi, dengan memanfaatkan API atau *web services*, baik untuk internal Perusahaan maupun mitra bisnis.

8. Pengembangan infrastruktur TI terfokus pada peremajaan dan pengadaan komputer utama (*server*) dan peningkatan kapasitas penyimpanan (*storage*) untuk meningkatkan kinerja perangkat-perangkat TI dan untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis yang mencakup area Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data.

9. Pengembangan dan pengadaan perangkat keamanan jaringan (*firewall*) untuk meningkatkan keamanan berbagai perangkat TI dan informasi Perusahaan.

10. Pengembangan proses pencadangan/pemulihan (*backup/restore*) sistem dan data.

11. Pengembangan sistem *monitoring* perangkat TI di cabang, pusat data, dan pusat pemulihan data.
12. Meningkatkan keamanan infrastruktur, data dan informasi melalui pengembangan dan implementasi berikut:
 - a. Melakukan asesmen kerentanan aplikasi (*Vulnerability Assessment*);
 - b. Simulasi serangan terhadap aplikasi dan sistem (*Penetration Testing*);
 - c. Memperkuat konfigurasi sistem komputer utama;
 - d. Melakukan *monitoring* keamanan perangkat infrastruktur bekerja sama dengan pihak ketiga (*Security Operation Center—SOC*); dan
 - e. Melakukan asesmen standar keamanan TI.
13. Meningkatkan dan mengevaluasi prosedur dan standar TI dengan mengacu kepada tiga elemen penting organisasi, yaitu *People*, *Process*, dan *Technology*.



Pengembangan diri karyawan untuk mencapai talenta terbaik adalah keharusan. Ketika jarak dan waktu bukan menjadi batasan, M-BEAT menjadi aplikasi terkini untuk sarana belajar dan saling berbagi, dilengkapi fitur *video streaming* dan *virtual classroom* yang dapat diakses kapanpun dan di manapun. BFI Finance peduli terhadap pengembangan diri karyawannya.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

- 142 Tinjauan Ekonomi dan Industri
- 145 Tinjauan Bisnis
- 152 Aspek Pemasaran
- 158 Tinjauan Kinerja Keuangan
- 183 Analisis Rasio Penting
- 185 Perbandingan Target dan Realisasi pada 2018
- 186 Struktur Modal (Kecukupan Modal)
- 187 Investasi Material atas Barang Modal
- 187 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- 188 Kebijakan dan Pembayaran Dividen
- 188 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- 188 Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal
- 189 Transaksi dengan Potensi Benturan Kepentingan dan Pihak Berelasi
- 189 Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan
- 190 Perubahan Kebijakan Akuntansi
- 191 Prospek Bisnis 2019



Mobile BFI Business Monitoring Application

Learning application, equipped with video live streaming, video learning content, and virtual classroom for employee of PT BFI Finance Indonesia



TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI



SITUASI MAKROEKONOMI GLOBAL

2018 adalah tahun yang sarat dengan ketidakpastian global, terutama akibat berbagai peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. PDB Indonesia, sebagai perekonomian yang berorientasi ekspor, turut terdampak sehingga pertumbuhannya melambat memasuki penghujung tahun.

Di paruh pertama 2018, kenaikan harga-harga komoditas utama Indonesia—minyak sawit, batubara, dan minyak bumi—mengangkat kinerja ekspor Indonesia dan berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai ekspektasi pasar. Kenaikan ini ikut didukung oleh pertumbuhan ekonomi di AS dan Tiongkok, yang merupakan dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.

Akan tetapi, pertumbuhan melamban di paruh kedua 2018, terutama karena dampak negatif dari normalisasi kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) untuk meningkatkan suku bunga acuannya hingga 2,25–2,5%. Kebijakan ini menyebabkan nilai tukar rupiah tertekan cukup dalam di triwulan ketiga dan keempat 2018. Untuk menstabilkan rupiah, BI meningkatkan suku bunga acuannya hingga mencapai 6% per akhir 2018. Sepanjang 2018, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) tercatat Rp14.247/USD, sekitar 6% lebih tinggi dari target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (sebesar Rp13.400/USD).

Perang dagang akibat penerapan tarif impor antara AS dan Tiongkok di sepanjang 2018 memperburuk kondisi ekonomi global. Tak hanya di Tiongkok, yang mencatat laju pertumbuhan terendahnya sejak krisis finansial global 2008–09, perlambatan pertumbuhan juga dirasakan di negara-negara berorientasi ekspor dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utamanya. Harga-harga komoditas, yang selama paruh pertama memulih secara perlahan, kembali tertekan di paruh kedua, dan kinerja ekspor ikut turun akibat lemahnya permintaan.

ULASAN EKONOMI INDONESIA DI 2018

Di tengah tingginya ketidakpastian global sepanjang 2018, dan terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan skala besar (antara lain di Lombok dan Sulawesi Tengah), Indonesia tetap berhasil menjaga stabilitas perekonomiannya. Laju inflasi tahunan tercatat 3,13% (di bawah ekspektasi pemerintah) sementara tingkat pertumbuhan mencapai 5,17%.

Penerapan sejumlah kebijakan yang tepat dalam merespons pasar dan fokus pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dirasakan perannya terhadap pencapaian ini. Hal ini khususnya dirasakan di bidang transportasi, dengan berkurangnya *bottleneck* di banyak sektor industri. Didukung dengan bergairahnya sektor pertambangan di paruh pertama 2018, penjualan alat berat ke berbagai sektor industri dapat tumbuh dua digit.

Konsumsi domestik di 2018 tumbuh 5,05% dari 2017, di tengah pergeseran perilaku belanja rumah tangga yang semakin mengutamakan belanja untuk gaya hidup dibandingkan belanja barang. Ini dipengaruhi oleh kian terintegrasinya model-model bisnis digital yang berkembang pesat.

Maraknya bisnis transportasi *online* di berbagai kota di Indonesia mengangkat kinerja penjualan produk otomotif. Sebanyak 1,1 juta unit mobil terjual di 2018, sedikit lebih tinggi dibandingkan pencapaian 2017, sementara untuk sepeda motor kenaikannya lebih tajam, dari 5,9 juta unit di 2017 menjadi 6,4 juta unit per akhir 2018.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN DI 2018

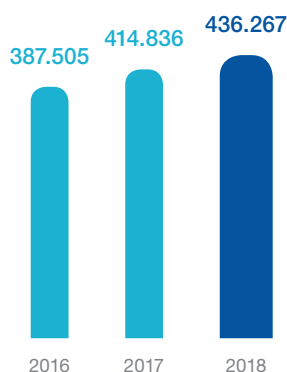
Dengan naiknya suku bunga acuan dan keluarnya modal asing dari Indonesia dengan nilai yang cukup signifikan, bisnis pembiayaan menghadapi banyak tantangan sepanjang 2018. Di pasar saham, penjualan bersih oleh asing di 2018 mencapai USD3,7 miliar, atau sekitar 1% dari total kapitalisasi pasar per akhir 2018. Meskipun di akhir 2018 dan awal 2019 kondisi ini tampak berbalik, dengan derasnya arus modal masuk akibat kembalinya sentimen positif di pasar Indonesia, situasi likuiditas ini belum sepenuhnya pulih.

Kendati diperhadapkan dengan tantangan ini, kredit perbankan tumbuh 12% di 2018. Angka ini jauh di atas laju pertumbuhan di 2017 (8,2%) dan juga menyentuh batas atas proyeksi BI dan OJK (10–12%).

Industri pembiayaan tumbuh sebesar 6% di 2018, dengan jumlah piutang pembiayaan (per Desember 2018) mencapai Rp436.267 miliar. Pertumbuhan ini diimbangi oleh perbaikan kualitas portofolio pembiayaan. NPF bersih industri pembiayaan tercatat 2,71%, sedikit lebih rendah dibandingkan 2,96% per akhir 2017.

Pada 2018, jumlah pembiayaan konvensional mencapai Rp416.794 miliar (per Desember 2018), masih didominasi oleh pembiayaan multiguna (61% dari total pembiayaan konvensional), disusul oleh pembiayaan investasi (33%), serta modal kerja dan lainnya (6%). Kenaikan tertinggi, sebesar 14%, dibukukan oleh pembiayaan investasi, sejalan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri. Di sisi lain, jumlah pembiayaan berbasis syariah turun sekitar 32% dibandingkan akhir 2017, sehingga proporsinya terhadap jumlah pembiayaan mengecil, dari 7% di 2017 menjadi kurang dari 5% per akhir 2018.

GRAFIK 17 Piutang Industri
Pembiayaan (Rp miliar)



TINJAUAN BISNIS

Perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 (POJK 29)—yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 (POJK 35)—tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa ruang lingkup perusahaan pembiayaan terdiri dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Selain keempat bidang tersebut, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis *fee*, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Kegiatan bisnis Perusahaan mencakup pembiayaan untuk dan/atau pembiayaan beragun mobil, sepeda motor, alat berat, mesin dan peralatan lainnya, serta properti. Piutang-piutang tersebut dicatat dalam laporan keuangan di bawah Pembiayaan Konsumen, Sewa Pembiayaan, dan Syariah yang mulai dijalankan Perusahaan di 2018.

TABEL 30 Pembiayaan Baru berdasarkan Jenis Piutang

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Sewa Pembiayaan	9.232	10.781	1.549	16,8%
Pembiayaan Konsumen	5.109	5.588	479	9,4%
Pembiayaan Syariah	-	3	3	n/a
Jumlah	14.341	16.372	2.031	14,2%
Keterangan (unit)				
Sewa Pembiayaan	85.883	96.928	11.045	12,9%
Pembiayaan Konsumen	303.080	360.999	57.919	19,1%
Pembiayaan Syariah	-	176	176	n/a
Jumlah	388.963	458.103	69.140	17,8%

TABEL 31 Pembiayaan Baru berdasarkan Jenis Aset

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Mobil Bekas	10.094	11.226	1.132	11,2%
Pembiayaan Mobil Baru	270	301	31	11,5%
Pembiayaan Mobil	10.364	11.527	1.163	11,2%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	1.878	2.388	510	27,2%
Pembiayaan Alat Berat	1.899	2.309	410	21,6%
Pembiayaan Properti	200	145	(55)	-27,5%
Pembiayaan Syariah	0	3	3	n/a
Jumlah	14.341	16.372	2.031	14,2%
Keterangan (unit)				
Pembiayaan Mobil Bekas	111.138	121.040	9.902	8,9%
Pembiayaan Mobil Baru	1.495	1.491	(4)	-0,3%
Pembiayaan Mobil	112.633	122.531	9.898	8,8%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	271.693	331.426	59.733	22,0%
Pembiayaan Alat Berat	3.650	3.515	(135)	-3,7%
Pembiayaan Properti	987	455	(532)	-53,9%
Pembiayaan Syariah	-	176	176	n/a
Jumlah	388.963	458.103	69.140	17,8%

PEMBIAYAAN BARU

Perusahaan mencatat Jumlah Pembiayaan Baru sebesar Rp16.372 miliar di 2018, meningkat 14,2% dari Jumlah Pembiayaan Baru sebesar Rp14.341 miliar di 2017. Dari jumlah ini, Rp10.781 miliar dicatat sebagai Sewa Pembiayaan dan Rp5.588 miliar sebagai Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan Jenis Aset, maka Jenis Aset terbesar yang dibiayai adalah Mobil, mencapai 70,4% dari total, sebesar Rp11.527 miliar. Sebagian besar portofolio Mobil terdiri dari Mobil Bekas—Rp11.226 miliar atau 97,4%. Sejak 2016, Perusahaan telah memperkecil porsi pembiayaan pembelian Mobil Barunya.

Pembiayaan Mobil

Penjualan mobil di 2018 meningkat 6,6% menjadi 1.151.291 unit, dibandingkan dengan 1.079.534 unit di 2017. Hal ini didorong oleh kenaikan hampir 18% pada penjualan kendaraan komersial menjadi 276.631 unit, dari 235.310 unit pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di bidang infrastruktur dan proyek konstruksi swasta. Penjualan kendaraan penumpang naik hanya 3,6% menjadi 874.660 unit, dari 844.224 unit.

Portofolio Mobil Perusahaan terdiri dari Mobil Baru dan Bekas, dengan tujuan pembiayaan yang berbeda, yaitu untuk pembelian Mobil Baru dan Bekas serta Pembiayaan Mobil Bekas sebagai jaminan. Jumlah

Pembiayaan Mobil yang disalurkan oleh Perusahaan di 2018 adalah Rp11.527 miliar, memberikan kontribusi terbesar, yaitu 70,4%, terhadap Jumlah Pembiayaan Baru. Dibandingkan dengan 2017, terdapat peningkatan 11,2% dari Rp10.364 miliar dalam Pembiayaan Mobil. Jenis Mobil paling populer yang dibiayai adalah Minibus/MPV, naik 14,6% di 2018, dan mencakup 51,9% dari Jumlah Pembiayaan Mobil. Selanjutnya adalah Jip (18,5%) dan Truk (12,2%). Ketiga jenis mobil tersebut menyumbang 82,6% terhadap Jumlah Pembiayaan Mobil.

Mobil bermerek Jepang mewakili 97,1% dari mobil yang dibiayai oleh Perusahaan, di mana Toyota berkontribusi 36,9% terhadap keseluruhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru Perusahaan di 2018. Honda, merek paling populer ketiga, mengalami peningkatan tertinggi sebesar 18,8% pada jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilainya di 2017.

TABEL 32 Pembiayaan Baru Mobil (Baru dan Bekas) berdasarkan Kategori dan Jenis Mobil

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Mobil Penumpang	7.762	8.900	1.138	14,7%
Mobil Komersial	2.602	2.627	25	1,0%
Jumlah	10.364	11.527	1.163	11,2%
Persentase dari Jumlah:				
Mobil Penumpang	74,9%	77,2%	n/a	2,3%
Mobil Komersial	25,1%	22,8%	n/a	-2,3%
Jumlah	100,0%	100,0%		
Minibus/MPV	5.220	5.982	762	14,6%
Jip	1.869	2.132	263	14,1%
Truk	1.402	1.406	4	0,3%
Pick-up	1.126	1.128	2	0,2%
Sedan	673	785	112	16,6%
Bus	74	94	20	27,0%
Jumlah	10.364	11.527	1.163	11,2%
Persentase dari Jumlah:				
Minibus/MPV	50,4%	51,9%	n/a	1,5%
Jip	18,0%	18,5%	n/a	0,5%
Truk	13,5%	12,2%	n/a	-1,3%
Pick-up	10,9%	9,8%	n/a	-1,1%
Sedan	6,5%	6,8%	n/a	0,3%
Bus	0,7%	0,8%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

TABEL 33 Pembiayaan Baru Mobil (Baru dan Bekas) berdasarkan Merek

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Toyota	3.785	4.249	464	12,3%
Mitsubishi	1.642	1.717	75	4,6%
Honda	1.284	1.526	242	18,8%
Daihatsu	1.299	1.486	187	14,4%
Suzuki	985	1.066	81	8,2%
Isuzu	176	159	(17)	-9,7%
Merek Jepang Lain-Lain	862	990	128	14,8%
Di Luar Merek Jepang	331	334	3	0,9%
Jumlah	10.364	11.527	1,163	11,2%
Persentase dari Jumlah:				
Toyota	36,5%	36,9%	n/a	0,4%
Mitsubishi	15,9%	14,9%	n/a	-1,0%
Honda	12,4%	13,2%	n/a	0,8%
Daihatsu	12,5%	12,9%	n/a	0,4%
Suzuki	9,5%	9,2%	n/a	-0,3%
Isuzu	1,7%	1,4%	n/a	-0,3%
Merek Jepang Lain-Lain	8,3%	8,6%	n/a	0,3%
Di Luar Merek Jepang	3,2%	2,9%	n/a	-0,3%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Sepeda Motor

Perusahaan tidak melakukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor, dan oleh karena itu bisnis ini tidak dipengaruhi secara langsung oleh penjualan sepeda motor baru. Bisnis sepeda motor Perusahaan terdiri dari Pembiayaan beragun Sepeda Motor Bekas sebagai jaminan. Selain untuk tujuan konsumsi umum, Pembiayaan Sepeda Motor Bekas ini didorong oleh kebutuhan modal kerja di antara penduduk kelas menengah ke bawah.

Jumlah Pembiayaan Baru Sepeda Motor Bekas Perusahaan mencapai Rp2.388 miliar, meningkat 27,2% dari nilainya di 2017 sebesar Rp1.878 miliar.

Lebih dari 90% agunan berwujud sepeda motor di Perusahaan terdiri dari dua merek sepeda motor paling populer di Indonesia, yaitu Honda dan Yamaha, masing-masing menyumbangkan 54,1% dan 38,7% terhadap nilai agunan Pembiayaan Baru.

TABEL 34 Pembiayaan Baru Sepeda Motor Bekas berdasarkan Merek

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Honda	962	1.292	330	34,3%
Yamaha	743	924	181	24,4%
Suzuki	117	114	(3)	-2,6%
Lain-Lain	56	58	2	3,6%
Jumlah	1.878	2.388	510	27,2%
Persentase dari Jumlah:				
Honda	51,2%	54,1%	n/a	2,9%
Yamaha	39,6%	38,7%	n/a	-0,9%
Suzuki	6,2%	4,8%	n/a	-1,4%
Lain-Lain	3,0%	2,4%	n/a	-0,6%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lainnya

Perusahaan melakukan Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lainnya untuk berbagai industri, termasuk Pertambangan, Konstruksi, Jasa, Industri dan Manufaktur, Pertanian, Perdagangan dan Distribusi, dan Lain-Lain.

Jumlah Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Peralatan Lain Perusahaan di 2018 mencapai Rp2.309 miliar, 21,6% lebih tinggi dari Rp1.899 miliar di 2017. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang diperluas secara agresif selama 2018 telah mendorong Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lainnya dari Perusahaan.

Terkait dengan upaya Perusahaan untuk mempertahankan portofolio pembiayaan yang terdiversifikasi dengan baik yang mencakup berbagai industri, pada 2018 kenaikan tertinggi terlihat di sektor Perkebunan (sebesar 70,0%) dan di sektor Perhutanan (sebesar 34,5%) meskipun kontribusi terhadap jumlah pembiayaan dalam kelompok ini masing-masing hanya 6,6% dan 6,8%.

Hampir setengah dari Jumlah Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lainnya didorong oleh pembiayaan Ekskavator, yang menyumbang 48,5% terhadap total. Pembiayaan Ekskavator juga meningkat 55,6%, dari Rp720 miliar di 2017 menjadi Rp1.120 miliar di 2018. Hal ini sebagian disebabkan oleh pemulihan harga yang berkepanjangan di pasar komoditas Pertambangan tertentu, terutama batu bara sebagai salah satu produk ekspor utama Indonesia.

TABEL 35 Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Lainnya berdasarkan Industri

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pertambangan	481	634	153	31,8%
Konstruksi	444	590	146	32,9%
Jasa	358	311	(47)	-13,1%
Industri dan Manufaktur	224	255	31	13,8%
Perhutanan	116	156	40	34,5%
Perkebunan	90	153	63	70,0%
Perdagangan dan Distribusi	94	100	6	6,4%
Lain-Lain	92	110	18	19,6%
Jumlah	1.899	2.309	410	21,6%
Persentase dari Jumlah:				
Pertambangan	25,3%	27,4%	n/a	2,1%
Konstruksi	23,4%	25,6%	n/a	2,2%
Jasa	18,9%	13,5%	n/a	-5,4%
Industri dan Manufaktur	11,8%	11,0%	n/a	-0,8%
Perhutanan	6,1%	6,8%	n/a	0,7%
Perkebunan	4,7%	6,6%	n/a	1,9%
Perdagangan dan Distribusi	4,9%	4,3%	n/a	-0,6%
Lain-Lain	4,9%	4,8%	n/a	-0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

TABEL 36 Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Lainnya berdasarkan Jenis Alat

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Ekskavator	720	1.120	400	55,6%
Truk	314	302	(12)	-3,8%
Bulldoser	95	90	(5)	-5,3%
<i>Forklift</i>	36	48	12	33,3%
<i>Wheel Loader</i>	35	45	10	28,6%
Alat Berat Lainnya	131	156	25	19,1%
Jumlah Alat Berat	1.331	1.761	430	32,3%
Mesin	533	524	(9)	-1,7%
Lain-Lain	35	24	(11)	-31,4%
Jumlah	1.899	2.309	410	21,6%

TABEL 36 Pembiayaan Baru Alat Berat, Mesin, dan Lainnya berdasarkan Jenis Alat

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Persentase dari Jumlah:				
Ekskavator	37,9%	48,5%	n/a	10,6%
Truk	16,5%	13,1%	n/a	-3,4%
Bulldoser	5,0%	3,9%	n/a	-1,1%
Forklift	1,9%	2,1%	n/a	0,2%
Wheel Loader	1,9%	1,9%	n/a	0,0%
Alat Berat Lainnya	6,9%	6,8%	n/a	-0,1%
Jumlah Alat Berat	70,1%	76,3%	n/a	6,2%
Mesin	28,1%	22,7%	n/a	-5,4%
Lain-Lain	1,8%	1,0%	n/a	-0,8%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Properti

Pembiayaan Properti Perusahaan mengalami penurunan di 2018 yang disebabkan oleh kelesuan sektor properti di negara ini yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Terjadi penurunan 25,7% dalam Pembiayaan Properti Perusahaan, dari Rp200 miliar di 2017 menjadi Rp145 miliar di 2018. Sebagian besar pembiayaan baru disumbangkan oleh Pembiayaan beragun Rumah sebesar 95,9%.

TABEL 37 Pembiayaan Baru Properti berdasarkan Jenis

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Rumah	187	139	(48)	-25,7%
Ruko	13	6	(7)	-53,8%
Jumlah	200	145	(55)	-27,5%
Persentase dari Jumlah:				
Rumah	93,5%	95,9%	n/a	2,4%
Ruko	6,5%	4,1%	n/a	-2,4%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Syariah

Perusahaan memulai bisnis Pembiayaan Syariahnya setelah memperoleh izin OJK di 2017. Pada 2018, nilai Pembiayaan Syariah baru mencapai Rp3 miliar.

ASPEK PEMASARAN



TARGET PASAR DAN STRATEGI PEMASARAN

BFI Finance merumuskan strategi segmentasi pasarnya berdasarkan kriteria geografis, demografis, serta perilaku konsumen yang berubah seiring perkembangan kebutuhan masyarakat. Penetrasi pasar dilakukan dengan menawarkan produk-produk unggulan yang inovatif serta komitmen pelayanan yang cepat dan efisien. Produk dan layanan ini mendapatkan dukungan operasional yang kuat dari seluruh jaringan Perusahaan.

BFI Finance mengevaluasi strategi segmentasi pasar tersebut secara berkala. Hasil evaluasi dan analisis segmentasi pasar saat ini memungkinkan Perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor, antara lain aneka industri UMKM, perdagangan, jasa, infrastruktur, komoditas, manufaktur, makanan dan minuman, transportasi, dan lain-lain, yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Strategi pemasaran BFI Finance di 2018 melibatkan beberapa *channel* utama, yaitu:

- *Dealer/Supplier*: untuk memasarkan pembiayaan mobil, alat berat, dan mesin;
- *Agen*: untuk pembiayaan multiguna dengan mobil, motor, dan sertifikat rumah atau ruko sebagai jaminan; dan
- *In-house telemarketing*: berfungsi sebagai jendela komunikasi langsung dengan konsumen, untuk mempromosikan produk dan layanan Perusahaan melalui telepon, pesan singkat (SMS), dan jaringan *hotline* 1500018.

PENGEMBANGAN JARINGAN

Hingga akhir 2018, BFI Finance mengoperasikan 401 outlet, yang terdiri dari 228 cabang (termasuk 22 di antaranya cabang syariah) dan 173 gerai di seluruh Indonesia, meningkat 17,3% atau 59 outlet dibandingkan dengan jumlah di 2017. Penyebaran outlet BFI Finance yang terbesar berada di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 55,3%, diikuti dengan Sumatera dan Indonesia Timur (termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua) dengan persentase yang sama atau masing-masing sebesar 17,5%, serta 9,7% di Kalimantan.

MANAJEMEN BASIS DATA DAN PEMASARAN DIGITAL

BFI Finance terus memperkuat saluran pemasarannya dan meningkatkan layanannya melalui digitalisasi untuk menjawab kebutuhan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan perilaku pasar. Strategi pemasaran untuk membidik target pasar melalui media digital telah ditempuh dengan melakukan kampanye pemasaran digital, media sosial, serta aktivitas *profiling* berdasarkan kriteria geografis, demografis masyarakat, serta kualifikasi dan riwayat konsumen. Melalui manajemen basis data tersebut, Perusahaan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan kegiatan pemasaran, dan dapat menjangkau potensi pasar dengan cakupan wilayah yang lebih luas.



Mochammad Saikhu, Konsumen Pembiayaan Motor BFI Finance sejak 2011, Malang, Jawa Timur

Saya telah menjadi konsumen BFI Finance sejak 2011, dan selama ini puas dengan pelayanannya, terutama karena persyaratannya mudah. Setiap petugas BFI Finance juga selalu cepat dan sopan menanggapi dan memberikan perhatian kepada setiap keperluan konsumennya, tanpa membedakan status sosial. Saya akan tetap memilih BFI Finance sebagai lembaga pembiayaan pilihan, karena kualitas pelayanan yang tinggi dan kecepatan proses pembiayaannya.



Pada 2018 Perusahaan juga menjalankan kampanye pemasaran digital yang cakupannya luas melalui kerja sama yang dibangun dengan berbagai pihak eksternal. Hasilnya, terjadi peningkatan lebih dari 250% pada jumlah aplikasi yang diajukan secara digital. BFI Finance terus berupaya meningkatkan pengalaman konsumen melalui pelayanan digitalnya agar terus mempertahankan relevansinya di kondisi pasar yang semakin terdigitisasi.

PENGUATAN JALUR TELESALES

Melalui 384 personel *in-house telemarketing* yang ditempatkan di berbagai wilayah, konsumen BFI Finance dapat memperoleh informasi terkait promosi produk dan keunggulan layanan Perusahaan, proses

pembiayaan, serta menyampaikan pengaduan terkait layanan Perusahaan. Selain itu Tim Telemarketing BFI Finance juga menerapkan *One Stop Solution* dengan jalur *hotline* 1500018 yang dapat diakses dengan mudah untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Program *telemarketing* ini juga memberikan kemudahan dalam pengajuan dan mempercepat proses survei serta pencairan dana dengan jalur satu pintu.

Penguatan upaya pemasaran terarah melalui *telemarketing* ini tak hanya berhasil mengangkat efisiensi operasional Perusahaan, tetapi juga tingkat konversi *lead*, serta berkontribusi signifikan sebesar 65% dari total pencapaian pembiayaan mobil, dan 54% untuk motor.

KEMITRAAN DENGAN DEALER

Seiring dengan pembenahan proses-proses internal yang dilakukan secara berkelanjutan, BFI Finance terus menjalin hubungan kerja sama yang kuat dengan banyak *dealer* dalam memasarkan produk mobil, serta alat berat dan mesin. Sampai akhir 2018, Perusahaan telah bekerja sama dengan 1.660 *dealer* mobil di seluruh Indonesia, meningkat dari sekitar 1.500 *dealer* di tahun sebelumnya.

Kerja sama antara Perusahaan dengan *dealer* di 2018 dilakukan secara selektif dan memprioritaskan kualitas, dengan berpegang pada prinsip saling menguntungkan untuk mengembangkan bisnis masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi bagi para *dealer*, di 2018 BFI Finance menyelenggarakan sejumlah program *reward* dan insentif, yang dinamakan program BFI Partnership Loyalty.

HUBUNGAN DENGAN AGEN

Selain *dealer*, Perusahaan juga bekerja sama dengan para agen dalam memasarkan produk pembiayaan multigunanya. Jumlah agen yang bekerja sama dengan Perusahaan adalah sekitar 2.500 agen mobil yang aktif setiap bulannya, dan 6.402 rata-rata agen motor aktif setiap bulannya. Sebagai timbal balik, Perusahaan menyediakan *reward* bagi agen yang berkontribusi positif terhadap pemasaran produk Perusahaan, antara lain:

- Bonus finansial: bonus aplikasi, bonus bulanan, dan bonus tiga bulanan, jumlahnya disesuaikan dengan prestasi agen yang bersangkutan;
- Bonus non-finansial: hadiah tamasya dan pemberian mobil dan motor bagi agen-agen terbaik nasional; dan
- Program *Privilege*: para agen dengan hasil pencapaian tinggi mendapatkan keuntungan dalam prioritas proses aplikasi.

PENGEMBANGAN BISNIS KORPORAT

Hubungan kerja sama antara BFI Finance dengan para pemasok dan konsumen alat berat, mesin, dan peralatan komersial lain terus terjaga di 2018. Komitmen, profesionalisme, dan integritas yang tinggi dari Perusahaan dalam memberikan layanan terbaik menjadikannya sebagai mitra yang dapat mereka andalkan.

Di 2018, proyek infrastruktur dari pemerintah berpengaruh besar pada jumlah pembiayaan baru untuk alat berat yang dibukukan BFI Finance. Selain itu, peningkatan harga batu bara hingga awal triwulan ketiga 2018 turut berdampak pada peningkatan permintaan alat berat di sektor pertambangan. Sementara itu, untuk pembiayaan mesin, jumlah pembiayaan terbesar di 2018 berasal dari industri percetakan (baik digital maupun *offset*), karena kebutuhan bahan cetak yang terus bertumbuh hampir di semua kota besar.

Dalam pengembangan bisnis korporatnya, BFI Finance memanfaatkan dan mengolah basis data konsumennya, terutama konsumen prioritas, secara intensif. Perusahaan memberikan para konsumen prioritas ini kemudahan yakni persetujuan plafon sebelum proses pembiayaan dilakukan. Melihat besarnya potensi pertumbuhan bisnis korporat dalam usaha pembiayaan BFI Finance, dan seiring tingginya kontribusi para *supplier* dalam jasa pembiayaan alat berat dan mesin, di 2018 Perusahaan mencanangkan berbagai program pemasaran untuk mengakuisisi mereka melalui kerja sama dengan para *supplier*, antara lain:

- Program pembiayaan bersubsidi bunga; dan
- Program pembiayaan dengan paket uang muka rendah.

PEMASARAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Setelah memperoleh izin operasi dari regulator di 2018 untuk 22 cabang syariahnya, Unit Usaha Syariah (UUS) BFI Finance memanfaatkan strategi pemasaran digital secara terpadu untuk menjangkau target pasar pembiayaan syariah yang lebih luas. Potensi pembiayaan syariah yang semakin besar, dan tren pasarnya yang karakteristik, mendorong UUS BFI Finance untuk menjalankan strategi pemasaran yang bersifat inovatif dan kreatif untuk produk pembiayaan syariahnya. Dengan demikian UUS BFI Finance menjadi salah satu operasi pembiayaan Perusahaan yang memanfaatkan saluran digital untuk menjadi jalur interaksi utama bagi aktivitas pemasarannya. Selain itu, UUS BFI Finance juga bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu agen-agen perjalanan yang terpercaya dan terdaftar resmi, untuk menjadi basis pemasaran produk pembiayaan syariah yang sebagian besar adalah tanpa agunan.

PROMOSI PRODUK PROPERTY-BACKED FINANCING (PBF)

Sejak peluncurannya beberapa tahun lalu, produk pembiayaan PBF BFI Finance terus diperkenalkan kepada masyarakat luas, mengingat masih lesunya sektor properti nasional di beberapa tahun terakhir. Sejumlah upaya penyempurnaan produk, uji coba, dan proyek percontohan telah dilakukan di 2018, sehingga ekspansi produk PBF akan siap dilakukan di 2019.

PELUNCURAN BFI EDUCATION DAN BFI LEISURE

BFI Finance meluncurkan dua produk pembiayaan di 2018 yang didasarkan pada hasil analisis karakter pasar dan konsumen secara komprehensif. Kini, konsumen BFI Finance dapat memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan dan liburan, yang ditawarkan melalui BFI Education dan BFI Leisure.



APRESIASI UNTUK KONSUMEN

Sebagai bagian dari komitmen *Unique Value Proposition* BFI Finance dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumennya, di 2018 program apresiasi Perusahaan yang utama adalah Program UBER Milyaran.

UBER Milyaran adalah salah satu bentuk apresiasi BFI Finance kepada konsumen personal (individu) dan korporasi di seluruh tanah air yang telah memilih BFI Finance sebagai mitra untuk solusi pembiayaan. Sejak diluncurkan di 2015, program UBER Milyaran disambut antusias oleh konsumen BFI Finance. Program UBER Milyaran 2018 diselenggarakan secara nasional menggunakan mekanisme kupon undian untuk jumlah pembiayaan tertentu. Konsumen BFI Finance selama periode program 1 Januari–31 Desember 2018 dapat mengikuti program ini, yang berlaku untuk seluruh produk pembiayaan BFI Finance, mulai dari mobil, motor, dan properti, hingga beragam kebutuhan masyarakat lainnya (baik konsumtif maupun produktif).

Mekanisme Kupon:

Produk	Kupon Undian
Mobil	Per Rp25 juta = 1 kupon
Motor	Per 1 kontrak = 1 kupon
Properti	Per Rp25 juta = 1 kupon
Mesin	Per Rp50 juta = 1 kupon
Alat Berat	Per Rp50 juta = 1 kupon

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sistem pengundian UBER Milyaran 2018 dibagi dalam 2 periode, yaitu Periode Regional dan Periode Nasional. Terdapat empat kali periode pengundian, yakni 2 kali untuk Periode Regional dan 2 kali untuk Periode Nasional, dan pengundiannya diselenggarakan di 14 kota.

Pengundian regional pertama dilakukan pada April 2018 di enam kota: Cirebon, Tanjungpinang, Makassar, Jambi, Jakarta, dan Surabaya.

Pengundian nasional pertama dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Juli 2018. Pengundian regional kedua dilaksanakan pada Oktober 2018 di Samarinda, Semarang, Bekasi, Denpasar, Ambon, dan Banjarbaru. Sebagai puncak serta penutupan UBER Milyaran 2018, dilaksanakan pengundian nasional kedua di Bandar Lampung, Lampung, pada Januari 2019.

Hadiah untuk pengundian tahap regional terdiri dari sepeda lipat, mesin cuci, *smartphone*, kamera digital, lemari es, *air conditioner* (AC), *smart TV* 32 inci, laptop, dan motor Honda Beat. Sedangkan hadiah untuk Pengundian Tahap Nasional adalah logam mulia 10 gram, motor Yamaha NMAX, mobil Mitsubishi Xpander, dan mobil Honda All-New CR-V 7-Seater.

FOKUS PEMASARAN 2019

Untuk 2019, sebagai tahun politik terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, strategi pemasaran BFI Finance akan berfokus dalam menjaga stabilitas usaha dan melanjutkan serangkaian strategi dari 2018, sambil merancang peningkatan untuk pemasaran produk-produk pembiayaan baru Perusahaan, antara lain, PBF, BFI Education, BFI Leisure, dan BFI Syariah.

Secara khusus, sejalan dengan pergeseran pola perilaku pasar ke segmen-segmen digital, pada 2019 Perusahaan melalui tim digitalnya akan mempersiapkan infrastruktur untuk *front-end* untuk mempercepat implementasi sistem-sistem digital; memperlengkapi sistem pengelolaan data; menjalankan proyek percontohan untuk kolaborasi kanal *online* dan *offline*; mengoptimalkan pemasaran digital dan meningkatkan *brand awareness* terhadap portal digitalnya; serta meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan cabang digital. Seluruh upaya ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman digital yang semakin memuaskan konsumennya, sekaligus membantu meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

TABEL 38 Jumlah Aset

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Kas dan Setara Kas	225	755	530	235,6%
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	9.435	11.358	1.923	20,4%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	5.740	5.923	183	3,2%
Aset Ijarah - Bersih	0	2	2	n/a
Jumlah Piutang Bersih	15.175	17.283	2.108	13,9%
Piutang Lain-Lain - Bersih	414	198	(216)	-52,2%
Aset Derivatif	0	110	110	n/a
Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka	43	54	11	25,6%
Aset Tetap - Bersih	457	530	73	16,0%
Aset Tak Berwujud - Bersih	20	32	12	60,0%
Aset Pajak Tangguhan	66	68	2	3,0%
Aset Lain-Lain	83	87	4	4,8%
Jumlah Aset	16.483	19.117	2.634	16,0%
Persentase dari Jumlah:				
Kas dan Setara Kas	1,4%	3,9%	n/a	2,5%
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	57,2%	59,4%	n/a	2,2%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	34,8%	31,0%	n/a	-3,8%
Aset Ijarah - Bersih	0,0%	0,0%	n/a	0,0%
Jumlah Piutang Bersih	92,0%	90,4%	n/a	-1,6%
Piutang Lain-Lain - Bersih	2,5%	1,0%	n/a	-1,5%
Aset Derivatif	0,0%	0,6%	n/a	0,6%
Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka	0,3%	0,3%	n/a	0,0%
Aset Tetap - Bersih	2,8%	2,8%	n/a	0,0%
Aset Tak Berwujud - Bersih	0,1%	0,2%	n/a	0,1%
Aset Pajak Tangguhan	0,4%	0,4%	n/a	0,0%
Aset Lain-Lain	0,5%	0,4%	n/a	-0,1%
Jumlah Aset	100,0%	100,0%		

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Jumlah Aset pada 31 Desember 2018 mencapai Rp19.117 miliar, meningkat 16,0% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp16.483 miliar.

Porsi terbesar dari Jumlah Aset berasal dari Piutang Bersih, mencapai Rp17.283 miliar (90,4%), meningkat 13,9% dari Rp15.175 miliar pada akhir 2017.

Jumlah Piutang Bersih

Dalam laporan keuangan, Jumlah Piutang Bersih secara luas diklasifikasikan sebagai Piutang Sewa Pembiayaan – Bersih dan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih. Seperti tahun-

tahun sebelumnya, pertumbuhan Piutang Sewa Pembiayaan – Bersih dan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih di 2018 didorong oleh peningkatan pembiayaan beragun mobil bekas, yang rinciannya dijelaskan pada Tabel 39.

Jumlah Piutang Bersih di 2018 mencapai Rp17.283 miliar, naik 13,9% *year-on-year* dari Rp15.175 miliar. Kenaikan ini berasal dari peningkatan Jumlah Piutang yang Dikelola sebesar 15,1% *year-on-year*, dari Rp15.936 miliar menjadi Rp18.342 miliar, dikurangi porsi Pembiayaan Bersama yang dicatat oleh pihak ketiga yang tumbuh 30,2% pada 2018, dari Rp524 miliar menjadi Rp682 miliar.

TABEL 39 Piutang Bersih

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	9.435	11.358	1.923	20,4%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	5.740	5.923	183	3,2%
Aset Ijarah - Bersih	-	2	2	n/a
Jumlah Piutang Bersih	15.175	17.283	2.108	13,9%

Pembiayaan Bersama dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 56 di halaman 172. Hasilnya kemudian disesuaikan dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang berjumlah Rp378 miliar pada akhir 2018, meningkat 59,5% dari Rp237 miliar di tahun sebelumnya. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dijelaskan pada halaman 166.

TABEL 40 Piutang yang Dikelola vs. Piutang Bersih

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Piutang Sewa Pembiayaan	9.521	11.515	1.994	20,9%
Piutang Pembiayaan Konsumen	6.415	6.825	410	6,4%
Aset Ijarah	-	3	3	n/a
Jumlah Piutang yang Dikelola	15.936	18.343	2.407	15,1%
Dikurangi Pembiayaan Bersama - dicatat oleh pihak ketiga	(524)	(682)	(158)	30,2%
Jumlah Piutang Sebelum Cadangan Kerugian	15.412	17.661	2.249	14,6%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	237	378	141	59,5%
Jumlah Piutang - Bersih	15.175	17.283	2.108	13,9%

Untuk kebutuhan analisis lebih lanjut, seluruh pembahasan Piutang di bagian selanjutnya akan difokuskan pada Jumlah Piutang yang Dikelola, berdasarkan Jenis Aset. Hal ini sesuai dengan cara klasifikasi yang diterapkan Perusahaan dalam bisnisnya saat ini.

TABEL 41 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan berdasarkan Jenis Aset

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Mobil Bekas	11.211	12.959	1.748	15,6%
Pembiayaan Mobil Baru	783	554	(229)	-29,2%
Pembiayaan Mobil	11.994	13.513	1.519	12,7%
Pembiayaan Alat Berat	2.231	2.802	571	25,6%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	1.378	1.720	342	24,8%
Pembiayaan Properti	333	305	(28)	-8,4%
Pembiayaan Syariah	-	3	3	n/a
Jumlah Piutang yang Dikelola	15.936	18.343	2.407	15,1%
Persentase dari Jumlah:				
Pembiayaan Mobil Bekas	70,4%	70,6%	n/a	0,2%
Pembiayaan Mobil Baru	4,9%	3,0%	n/a	-1,9%
Pembiayaan Mobil	75,3%	73,6%	n/a	-1,7%
Pembiayaan Alat Berat	14,0%	15,3%	n/a	1,3%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	8,6%	9,4%	n/a	0,8%
Pembiayaan Properti	2,1%	1,7%	n/a	-0,4%
Pembiayaan Syariah	0,0%	0,0%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Pembiayaan Mobil (Bekas dan Baru) mencapai 73,6% dari Jumlah Piutang yang Dikelola per akhir 2018. Jumlah ini meningkat pesat dari Rp11.994 miliar menjadi Rp13.513 miliar. Sisanya, sebesar 26,4%, terdiri dari Pembiayaan Alat Berat (15,3% dari total), diikuti oleh Pembiayaan Sepeda Motor Bekas (9,4%), dan Pembiayaan Properti (1,7%). Terkait bisnis baru Perusahaan, yaitu Pembiayaan Syariah, nilai aset yang diperoleh dari pembiayaan Ijarah di 2018 masih terlalu kecil untuk diperhitungkan.

Jumlah Piutang yang Dikelola – Mobil

Selama bertahun-tahun, Pembiayaan Mobil telah menjadi bisnis pembiayaan unggulan Perusahaan,

dan proporsi Pembiayaan Mobil Bekas dan Pembiayaan Mobil Baru terhadap Jumlah Piutang yang Dikelola di 2018 masing-masing adalah sebesar 70,6% dan 3,0%. Pada akhir 2017, proporsinya masing-masing adalah 70,4% dan 4,9%.

Pada 2018, Perusahaan terus mengurangi bisnis Pembiayaan Mobil Barunya, sehingga dalam pencatatan bisnis untuk pembiayaan tersebut terdapat penurunan 29,2% dalam Jumlah Piutang yang Dikelola di segmen ini. Sementara itu, Pembiayaan Mobil Bekas tumbuh 15,6%, mencapai Rp12.959 miliar pada akhir 2018. Pertumbuhan Pembiayaan Mobil Bekas Perusahaan pada 2018 telah melampaui jumlah penurunan Pembiayaan Mobil Baru.

Pembiayaan Mobil Bekas Perusahaan diklasifikasikan menjadi Piutang Sewa Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan Konsumen, dan terdiri dari berbagai jenis mobil, termasuk Minibus/MPV, Truk, Pick-up, Jip, Sedan, dan Bus.

Di 2018, pembiayaan Minibus/MPV tetap menjadi kontributor terbesar terhadap jumlah portofolio Pembiayaan Mobil, sebesar 52,3% dari total, diikuti oleh Jip sebesar 17,1% dan Truk sebesar 12,9%. Hampir semua jenis mobil mengalami pertumbuhan, kecuali Pick-up. Secara persentase, peningkatan yang cukup signifikan adalah Bus, dengan pertumbuhan sebesar 35,9%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Tabel 42.

TABEL 42 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Mobil berdasarkan Jenis Mobil

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Minibus/MPV	6.046	7.072	1.026	17,0%
Jip	1.955	2.306	351	18,0%
Truk	1.694	1.738	44	2,6%
Pick-up	1.477	1.392	(85)	-5,8%
Sedan	744	899	155	20,8%
Bus	78	106	28	35,9%
Jumlah	11.994	13.513	1.519	12,7%
Persentase dari Jumlah:				
Minibus/MPV	50,4%	52,3%	n/a	1,9%
Jip	16,3%	17,1%	n/a	0,8%
Truk	14,1%	12,9%	n/a	-1,2%
Pick-up	12,3%	10,3%	n/a	-2,0%
Sedan	6,2%	6,6%	n/a	0,4%
Bus	0,7%	0,8%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Merek Jepang tetap mendominasi, mencapai 97,3% dari jumlah portofolio Pembiayaan Mobil yang dikelola Perusahaan pada akhir 2018. Toyota memegang porsi terbesar dengan total 36,8%, sementara Mitsubishi dan Daihatsu berada di urutan kedua dan ketiga, masing-masing berkontribusi sebesar 15,1% dan 13,4%. Dari masing-masing merek tersebut, pertumbuhan yang cukup mencolok berasal dari merek Honda, yang tumbuh 22,1% *year-on-year*. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Tabel 43.

TABEL 43 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Mobil berdasarkan Merek

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Toyota	4.300	4.970	670	15,6%
Mitsubishi	1.971	2.043	72	3,7%
Daihatsu	1.591	1.809	218	13,7%
Honda	1.386	1.692	306	22,1%
Suzuki	1.246	1.303	57	4,6%

TABEL 43 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Mobil berdasarkan Merek

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Isuzu	196	180	(16)	-8,2%
Merek Jepang Lain-Lain	965	1.151	186	19,3%
Di Luar Merek Jepang	339	365	26	7,7%
Jumlah	11.994	13.513	1.519	12,7%
Persentase dari Jumlah:				
Toyota	35,9%	36,8%	n/a	0,9%
Mitsubishi	16,4%	15,1%	n/a	-1,3%
Daihatsu	13,3%	13,4%	n/a	0,1%
Honda	11,6%	12,5%	n/a	0,9%
Suzuki	10,4%	9,7%	n/a	-0,7%
Isuzu	1,6%	1,3%	n/a	-0,3%
Merek Jepang Lain-Lain	8,0%	8,5%	n/a	0,5%
Di Luar Merek Jepang	2,8%	2,7%	n/a	-0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Sepeda Motor Bekas

Pembiayaan Sepeda Motor Bekas Perusahaan diklasifikasikan dalam Piutang Pembiayaan Konsumen. Jumlah Piutang yang Dikelola dengan beragun Sepeda Motor Bekas pada akhir 2018 mencapai Rp1.720 miliar, naik 24,8% dari Rp1.378 miliar di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari peningkatan 32,8% pada sepeda motor Honda, yang porsinya mencapai 54,6% dari jumlah Portofolio Pembiayaan Sepeda Motor Bekas per 31 Desember 2018. Pembiayaan sepeda motor Yamaha, yang berada di urutan kedua (38,4% dari total), tumbuh 20,7% *year-on-year*. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Tabel 44.

TABEL 44 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Sepeda Motor Bekas berdasarkan Merek

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Honda	708	940	232	32,8%
Yamaha	547	660	113	20,7%
Suzuki	84	79	(5)	-6,0%
Lain-Lain	39	41	2	5,1%
Jumlah	1.378	1.720	342	24,8%
Persentase dari Jumlah:				
Honda	51,4%	54,6%	n/a	3,2%
Yamaha	39,7%	38,4%	n/a	-1,3%
Suzuki	6,1%	4,6%	n/a	-1,5%
Lain-Lain	2,8%	2,4%	n/a	-0,4%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Alat Berat, Mesin, dan Lainnya

Perusahaan menyediakan Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lainnya yang diklasifikasikan dalam Piutang Sewa Pembiayaan. Jumlah Piutang yang Dikelola di segmen ini per akhir 2018 meningkat 25,6% *year-on-year*, dari Rp2.231 miliar menjadi Rp2.802 miliar. Komponen terbesar dari jenis pembiayaan ini di 2018 adalah untuk Ekskavator, dengan 46,3% dari jumlah portofolio segmen dan piutang yang dikelola sebesar Rp1.297 miliar. Jumlah Pembiayaan Alat Berat di 2018 mencakup 76,3% dari jumlah portofolio di segmen ini, sedangkan 22,8% sisanya berasal dari Pembiayaan Mesin, dan 0,9% dari Pembiayaan Lain-Lain.

Segmen ini melibatkan beragam industri, dengan porsi terbesar dari sektor Pertambangan (27,2% dari jumlah portofolio yang dikelola di segmen ini per 31 Desember 2018), diikuti oleh sektor Konstruksi (25,4%) dan sektor Jasa (14,3%). Berkat optimisme pasar di sektor komoditas pada awal 2018, pembiayaan yang disalurkan ke sektor Pertambangan mencatat pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 48,2%, dari Rp514 miliar pada akhir 2017 menjadi Rp762 miliar pada akhir 2018. Proyek-proyek infrastruktur yang didukung oleh inisiatif pemerintah turut berkontribusi terhadap peningkatan sebesar 29,5% dalam pembiayaan Perusahaan ke sektor Konstruksi di 2018.

TABEL 45 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lain-Lain berdasarkan Jenis Aset

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Ekskavator	851	1.297	446	52,4%
Truk	328	402	74	22,6%
Buldoser	124	119	(5)	-4,0%
Forklift	55	59	4	7,3%
Wheel Loader	42	53	11	26,2%
Alat Berat Lainnya	192	207	15	7,8%
Jumlah Alat Berat	1.592	2.137	545	34,2%
Mesin	601	639	38	6,3%
Lain-Lain	38	26	(12)	-31,6%
Jumlah	2.231	2.802	571	25,6%
Persentase dari Jumlah:				
Ekskavator	38,1%	46,3%	n/a	8,2%
Truk	14,7%	14,3%	n/a	-0,4%
Buldoser	5,6%	4,3%	n/a	-1,3%
Forklift	2,5%	2,1%	n/a	-0,4%
Wheel Loader	1,9%	1,9%	n/a	0,0%
Alat Berat Lainnya	8,6%	7,4%	n/a	-1,2%
Jumlah Alat Berat	71,4%	76,3%	n/a	4,9%
Mesin	26,9%	22,8%	n/a	-4,1%
Lain-Lain	1,7%	0,9%	n/a	-0,8%
Jumlah	100,0%	100,0%		

TABEL 46 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Alat Berat, Mesin, dan Lain-Lain berdasarkan Industri

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pertambangan	514	762	248	48,2%
Konstruksi	550	712	162	29,5%
Jasa	399	400	1	0,3%
Industri dan Manufaktur	265	300	35	13,2%
Perhutanan	182	206	24	13,2%
Perkebunan	115	166	51	44,3%
Perdagangan dan Distribusi	94	115	21	22,3%
Lain-Lain	112	141	29	25,9%
Jumlah	2.231	2.802	571	25,6%
Persentase dari Jumlah:				
Pertambangan	23,0%	27,2%	n/a	4,2%
Konstruksi	24,6%	25,4%	n/a	0,8%
Jasa	17,9%	14,3%	n/a	-3,6%
Industri dan Manufaktur	11,9%	10,7%	n/a	-1,2%
Perhutanan	8,2%	7,4%	n/a	-0,8%
Perkebunan	5,2%	5,9%	n/a	0,7%
Perdagangan dan Distribusi	4,2%	4,1%	n/a	-0,1%
Lain-Lain	5,0%	5,0%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Properti

Perusahaan menyediakan Pembiayaan Properti dengan Jumlah Piutang yang Dikelola per akhir 2018 menyusut 8,4% menjadi Rp305 miliar, akibat cenderung melemahnya sektor Properti selama beberapa tahun terakhir. Jenis aset ini mencakup 1,6% dari Jumlah Piutang yang Dikelola Perusahaan per akhir 2018.

TABEL 47 Diversifikasi Portofolio Properti berdasarkan Jenis

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Rumah	309	292	(17)	-5,5%
Ruko	24	13	(11)	-45,8%
Jumlah	333	305	(28)	-8,4%
Persentase dari Jumlah:				
Rumah	92,8%	95,7%	n/a	2,9%
Ruko	7,2%	4,3%	n/a	-2,9%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Piutang yang Dikelola – Aset Ijarah

Sejalan dengan bisnis Pembiayaan Syariah yang baru dijalankan Perusahaan, pada akhir 2018 Perusahaan telah mengakumulasi Aset Ijarah – Bersih senilai Rp2 miliar, sementara nilainya per 31 Desember 2017 adalah nihil.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah nilai yang disisihkan dari Jumlah Piutang yang Dikelola untuk mengantisipasi potensi kerugian Piutang di masa depan. Nilai tersebut dihitung secara kolektif

menggunakan metode statistik, dan dihitung secara individual untuk eksposur dan jenis aset tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, terdapat kenaikan 59,1% dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai di 2018, dari Rp237 miliar pada akhir 2017 menjadi Rp378 miliar pada akhir 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan Jumlah Piutang yang Dikelola dan cadangan tambahan yang dibentuk untuk mengatasi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi pada September 2018. Tanpa memperhitungkan cadangan spesifik untuk wilayah Sulawesi, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai hanya meningkat sebesar 21,2%.

TABEL 48 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Jumlah Piutang yang Dikelola	15.936	18.343	2.407	15,1%
NPF (termasuk Pembiayaan Bersama)	151	222	71	47,0%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (termasuk cadangan khusus)	237	378	141	59,5%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (tidak termasuk cadangan khusus)	237	288	51	21,5%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai terhadap Piutang Pembiayaan yang Dikelola (termasuk cadangan khusus)	1,5%	2,1%	n/a	0,6%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai terhadap Piutang Pembiayaan yang Dikelola (tidak termasuk cadangan khusus)	1,5%	1,6%	n/a	0,1%
Coverage terhadap NPF (termasuk cadangan khusus)	1,6x	1,7x	n/a	6,3%
Coverage terhadap NPF (tidak termasuk cadangan khusus)	1,6x	1,3x	n/a	-18,8%

Tingkat penyisihan saat ini adalah 1,7x dari NPF, sementara tahun sebelumnya adalah 1,6x. Hal ini mencerminkan kemampuan Perusahaan untuk

mempersiapkan cadangan untuk kerugian dari pinjaman yang diberikan di masa mendatang tanpa memengaruhi posisi keuangan Perusahaan lebih lanjut.

Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2018, Kas dan Setara Kas Perusahaan mencapai Rp755 miliar, atau naik 2,4x dari Rp225 miliar yang dicatat per 31 Desember 2017. Hal ini sebagian disebabkan oleh penyimpanan uang tunai untuk persiapan pembayaran Obligasi yang jatuh tempo pada triwulan pertama 2019.

Piutang Lain-Lain – Bersih

Perusahaan mencatat Piutang Lain-Lain dalam bentuk, antara lain, akun-akun Piutang dalam Proses Penyelesaian (nilai buku dari jaminan pembiayaan yang dikembalikan oleh atau diambil alih dari konsumen karena tidak mampu menyelesaikan kewajiban), Piutang Penerimaan Angsuran Konsumen (pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen melalui berbagai titik akses pembayaran namun uangnya baru akan

ditransfer ke rekening bank Perusahaan pada hari kerja selanjutnya), Piutang Karyawan, Piutang MESOP, dan Premi Asuransi.

Per 31 Desember 2018, nilai Piutang Lain-Lain – Bersih adalah sebesar Rp198 miliar, turun 52,2% dari Rp414 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari perjanjian pembiayaan digital yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama penyediaan Pembiayaan Bersama dengan PT FinAccel Teknologi Indonesia, perusahaan pembiayaan *Fintech* yang mengelola aplikasi Kredivo, di mana Perusahaan menyediakan fasilitas penerusan pinjaman bagi perusahaan *Fintech* ini hingga Desember 2017, yang telah dilunasi sepenuhnya di 2018; serta Piutang KSEI atas Pajak Dividen, yang masing-masing turun dari Rp180 miliar dan Rp58 miliar di 2017 menjadi nihil di 2018. Akan tetapi, faktor pendorong utamanya adalah Piutang Pembiayaan Bersama Digital (terkait Kredivo, sebagaimana dijelaskan sebelumnya).

TABEL 49 Piutang Lain-Lain

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Piutang dalam Proses Penyelesaian - Bersih	67	93	26	38,8%
Piutang Penerimaan Angsuran Konsumen	44	61	17	38,6%
Piutang Karyawan	25	22	(3)	-12,0%
Piutang MESOP	22	8	(14)	-63,6%
Premi Asuransi	5	2	(3)	-60,0%
Piutang Kerja Sama Pembiayaan Digital	180	0	(180)	-100,0%
Piutang KSEI atas Pajak Dividen	58	0	(58)	-100,0%
Piutang Lain-Lain	13	12	(1)	-7,7%
Jumlah	414	198	(216)	-52,2%

Aset (Liabilitas) Derivatif

Aset (Liabilitas) Derivatif berasal dari perjanjian-perjanjian *swap*, di mana Perusahaan harus melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing—khususnya pinjaman luar negeri dalam

mata uang USD—sebagai salah satu sumber pendanaannya, untuk mengantisipasi risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar mata uang. Langkah mitigasi Perusahaan untuk risiko ini, sebagai bagian dari manajemen risiko yang komprehensif, adalah dengan menerapkan kebijakan lindung nilai yang

ketat untuk pinjaman dalam mata uang asing dan dengan suku bunga mengambang. Semua aktivitas lindung nilai dilakukan melalui perjanjian swap mata uang dengan bank-bank terkemuka. Saat ini, atas seluruh pinjaman dalam mata uang asing telah dilakukan lindung nilai, dan tidak ada posisi yang terekspos pada risiko mata uang asing dan risiko suku bunga.

Per 31 Desember 2018, Perusahaan mencatat Aset Derivatif sebesar Rp110 miliar (diukur dalam nilai wajar), sementara pada akhir 2017 tercatat Liabilitas Derivatif sebesar hampir Rp1 miliar. Rincian ini disajikan pada Tabel 50.

TABEL 50 Aset (Liabilitas) Derivatif

Keterangan	2017		2018	
	Nilai Nosional USD (nilai penuh)	Aset (Liabilitas) Derivatif (Rp miliar)	Nilai Nosional USD (nilai penuh)	Aset (Liabilitas) Derivatif (Rp miliar)
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	65.000.000	12	56.500.000	47
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	84.078.341	(2)	42.000.000	48
PT Bank CIMB Niaga Tbk	23.500.000	(3)	14.833.333	15
PT Bank Permata Tbk	37.500.000	(11)	-	-
PT Bank ANZ Indonesia	30.000.000	3	-	-
Jumlah	240.078.341	(1)	113.333.333	110

Aset Tetap – Bersih

Aset Tetap Perusahaan – Bersih naik 16,0% pada 2018 hingga mencapai Rp530 miliar per 31 Desember 2018, dari Rp457 miliar di tahun sebelumnya. Kontributor terbesar untuk peningkatan Aset Tetap ini adalah dalam bentuk kendaraan, yang jumlah bersihnya pada akhir 2018 tercatat sebesar Rp123 miliar, atau 23,2% dari jumlah Aset Tetap – Bersih. Rinciannya diberikan pada bagian Investasi Material atas Barang Modal.

Aset Tidak Berwujud – Bersih

Per 31 Desember 2018, Aset Tidak Berwujud – Bersih meningkat 60,0% atau menjadi Rp32 miliar, dibandingkan dengan nilai di tahun sebelumnya sebesar Rp20 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan investasi Perusahaan terkait peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi (TI).

Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan mencatat Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp68 miliar per 31 Desember 2018, naik 3,0% dari Rp66 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan Pertumbuhan Aset.

Liabilitas

TABEL 51 Liabilitas

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima	6.819	6.900	81	1,2%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	3.909	5.196	1.287	32,9%
Beban yang Masih Harus Dibayar	294	288	(6)	-2,0%
Liabilitas Imbalan Pascakerja	200	202	2	1,0%
Utang Pajak	140	67	(73)	-52,1%
Utang Lain-Lain	217	260	43	19,8%
Jumlah	11.579	12.913	1.334	11,5%
Persentase dari Jumlah:				
Pinjaman yang Diterima	58,9%	53,4%	n/a	-5,5%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	33,8%	40,3%	n/a	6,5%
Beban yang Masih Harus Dibayar	2,5%	2,2%	n/a	-0,3%
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1,7%	1,6%	n/a	-0,1%
Utang Pajak	1,2%	0,5%	n/a	-0,7%
Utang Lain-Lain	1,9%	2,0%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2018 tercatat Rp12.913 miliar, atau 11,5% lebih tinggi dibandingkan Rp11.579 miliar di tahun sebelumnya. Bagian terbesar dari Jumlah Liabilitas berasal dari sumber-sumber pendanaan, yang terdiri dari Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih.

TABEL 52 Sumber Dana

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima				
Pinjaman Bank (Rupiah)	3.588	5.267	1.679	46,8%
Pinjaman Bank (Mata Uang Asing)	3.231	1.633	(1.598)	-49,5%
Jumlah Pinjaman yang Diterima	6.819	6.900	81	1,2%
Surat Berharga yang Diterbitkan				
Utang Obligasi	3.859	5.196	1.337	34,6%
MTN	50	-	(50)	-100,0%
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	3.909	5.196	1.287	32,9%
Jumlah Sumber Dana	10.728	12.096	1.368	12,8%

Pinjaman yang Diterima

Jumlah Pinjaman yang Diterima yang tercatat per 31 Desember 2018 mencapai Rp6.900 miliar, atau naik 1,2% dari Rp6.819 miliar pada akhir 2017. Terdapat peningkatan besar pada Pinjaman dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp1.679 miliar atau naik 46,8% di 2018, karena adanya fasilitas pinjaman baru yang dimanfaatkan pada 2018. Sebaliknya, pinjaman dalam mata uang dolar AS mengalami penurunan sebesar Rp1.598 miliar atau 49,5% dari posisi tahun sebelumnya karena adanya pelunasan

utang dan tidak adanya penambahan utang baru dalam dolar AS di 2018.

Saat ini, seluruh pendanaan Perusahaan dalam mata uang asing telah dilindungi nilainya oleh perjanjian *swap* mata uang dan suku bunga dengan pihak-pihak bereputasi baik. Rinciannya dijelaskan pada bagian Aset (Liabilitas) Derivatif, halaman 168.

Rincian Pinjaman yang Diterima Perusahaan disajikan dalam Tabel 53.

TABEL 53 Rincian Pinjaman yang Diterima

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya
Pinjaman (Dolar AS)			
Standard Chartered Bank (<i>Facility Agent</i>)	2.184	1.274	(910)
PT Bank CTBC Indonesia	216	154	(62)
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	-	145	145
JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.	101	60	(41)
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	271	-	(271)
PT Bank ANZ Indonesia	270	-	(270)
Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch	134	-	(134)
Standard Chartered Bank, Singapore Branch	29	-	(29)
Emirates NBD Bank PJSC (<i>Facility Agent</i>)	26	-	(26)
Jumlah Pinjaman (Dolar AS)	3.231	1.633	(1.598)
Pinjaman (Rupiah)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.354	1.782	428
PT United Tractors Tbk	536	1.032	496
PT Bank Central Asia Tbk	343	622	279
PT Bank Permata Tbk	73	446	373
Standard Chartered Bank	0	340	340
PT Bank KEB Hana Indonesia	285	253	(32)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	208	225	17
PT Bank ANZ Indonesia	0	218	218
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	95	121	26
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	244	108	(136)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	173	66	(107)
Bank of China Limited, Jakarta Branch	87	37	(50)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	48	15	(33)

TABEL 53 Rincian Pinjaman yang Diterima

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47	2	(45)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	95	0	(95)
Jumlah Pinjaman (Rupiah)	3.588	5.267	1.679
Pinjaman - Bersih	6.819	6.900	81

Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih

Untuk lebih mendiversifikasi sumber pendanaannya, Perusahaan juga telah menerbitkan surat berharga dalam bentuk Obligasi rupiah dan MTN. Per 31 Desember 2018, jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih mencapai Rp5.196 miliar, naik 32,9% dari Rp3.909 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan ini umumnya berasal dari penerbitan dua obligasi di 2018 sebesar Rp2.905 miliar.

Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan Perusahaan disajikan dalam Tabel 54.

TABEL 54 Surat Berharga yang Diterbitkan

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018
Obligasi		
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	550	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	800	658
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	683	683
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	1.000	460
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	835	500
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	-	2.165
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	-	740
Jumlah Nilai Nominal	3.868	5.206
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi yang Belum Diamortisasi	9	10
Jumlah - Bersih	3.859	5.196
MTN		
MTN BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	50	-
Jumlah Nilai Nominal	50	-
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan	3.909	5.196

Utang Pajak

Utang Pajak turun 52,1% atau Rp73 miliar, karena adanya pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Perusahaan (PPH Pasal 25) untuk Desember 2018 yang dibayarkan pada bulan yang sama. Selain itu, tidak ada Utang Pajak atas Dividen Interim yang dicatat di 2018.

Utang Lain-Lain

Utang Lain-Lain terutama terdiri dari Titipan Konsumen dan Pembayaran Lebih Awal, Infrastruktur TI, Utang *Enhancement*, dan Utang Premi Asuransi. Jumlah Utang Lain-Lain per 31 Desember 2018 mencapai Rp260 miliar, atau 19,8% lebih tinggi dari Rp217 miliar per 31 Desember 2017.

Rincian Utang Lain-Lain Perusahaan disajikan dalam Tabel 55.

TABEL 55 Utang Lain-Lain

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Titipan Konsumen	105	120	15	14,3%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	-	58	58	n/a
Premi Asuransi	44	27	(17)	-38,6%
Utang kepada <i>Dealer</i>	31	5	(26)	-83,9%
Lainnya (saldo di bawah Rp2.000,00)	37	50	13	35,1%
Jumlah	217	260	43	19,8%

Perjanjian Pembiayaan Bersama

Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 56, Perusahaan memiliki perjanjian Pembiayaan Bersama dengan bank-bank terkemuka di Indonesia. Porsi Perusahaan dalam Pembiayaan Bersama berkisar antara 5 hingga 10%, sementara sisanya dibiayai oleh bank mitra. Dalam Pembiayaan Bersama ini, Perusahaan berperan sebagai penyedia jasa, yang bertanggung jawab, antara lain, untuk menarik dan menerima pembayaran dari pelanggan dan meneruskan pembayaran ke bank pemberi pinjaman, serta sebagai kustodian dokumen aset yang digunakan sebagai jaminan.

Pembiayaan Bersama Perusahaan per akhir 2018 berjumlah Rp684 miliar, naik 30,5% dari Rp524 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kemitraan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang jumlahnya naik dari Rp335 miliar pada akhir 2017 menjadi Rp666 miliar.

Rincian perjanjian Pembiayaan Bersama Perusahaan disajikan dalam Tabel 56.

TABEL 56 Pembiayaan Bersama

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Porsi BFI Finance	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
				Jumlah	Persentase
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	335	666	5%	331	98,8%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	140	12	5%	(128)	-91,4%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	49	6	10%	(43)	-87,8%
Jumlah	524	684		160	30,5%

Ekuitas

TABEL 57 Jumlah Ekuitas

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Modal Saham	399	399	-	0,0%
Tambahan Modal Disetor - Bersih	553	553	-	0,0%
Saham Treasuri	(252)	(252)	-	0,0%
Penghasilan Komprehensif Lain				
Keuntungan (Kerugian) Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas - Bersih	(36)	2	38	-105,6%
Kerugian Aktuarial Program Manfaat Pasti	(76)	(42)	34	-44,7%
Saldo Laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya	73	86	13	17,8%
Belum Ditentukan Penggunaannya	4.243	5.458	1.215	28,6%
Jumlah	4.904	6.204	1.300	26,5%

Rincian Jumlah Ekuitas Perusahaan disajikan dalam Tabel 57 di atas. Per 31 Desember 2018, Jumlah Ekuitas mencapai Rp6.204 miliar, meningkat 26,5% atau Rp1.300 miliar dari Jumlah Ekuitas pada akhir 2017 sebesar Rp4.904 miliar.

Peningkatan ini didorong oleh Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp5.458 miliar di 2018, yang meningkat 28,6% dibandingkan dengan 2017.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perusahaan per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari 15.967.115.620 saham (setelah pemecahan nilai

nominal saham di 2017), yang setara dengan Modal Saham senilai Rp399 miliar.

Tambahan Modal Disetor

Per 31 Desember 2018, Tambahan Modal Disetor di Perusahaan adalah sebesar Rp553 miliar, tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Saham Treasuri

Tidak terdapat perubahan terhadap jumlah Saham Treasuri di 2018. Saham Treasuri berjumlah Rp252 miliar (1.002.732.000 saham) per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai hasil dari program pembelian kembali saham yang dilakukan pada 2015 dan 2016, berdasarkan keputusan RUPSLB 15 April 2015.

TABEL 58 Saham Treasuri

Keterangan	Lembar Saham	Persentase
Saham Treasuri	1.002.732.000	6,28%

Program MESOP

Perusahaan menerapkan program MESOP berdasarkan keputusan RUPSLB 21 Juni 2012, dan telah berakhir pada 30 Juni 2016.

Jumlah saham baru yang diterbitkan selama program tersebut merepresentasikan 5% dari jumlah Modal Disetor Perusahaan, dan diberikan kepada manajemen dan karyawan yang telah memenuhi syarat dan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham.

TABEL 59 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

2018			
Nama	Jabatan	Jumlah Saham	% Saham
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	389.885.080	2,44
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	74.500	0,00
Sudjono	Direktur	33.380.000	0,21
Sutadi	Direktur	21.382.800	0,14
Sigit Hendra Gunawan	Direktur (Independen)	10.000.000	0,06
Andrew Adiwijanto	Direktur	10.120.000	0,06
Johanes Sutrisno	Komisaris	2.480	0,00
Jumlah		464.844.860	2,91

Penghasilan Komprehensif Lainnya

Di 2018 Perusahaan mencatat Keuntungan Kumulatif atas perubahan nilai wajar Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas – Bersih sebesar Rp38 miliar, dan Kerugian Aktuarial Program Manfaat Pasti sebesar Rp34 miliar. Keduanya dicatat sebagai Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain untuk tahun tersebut.

Laba Ditahan

Jumlah Laba Ditahan Perusahaan di 2018 mencapai Rp5.544 miliar, 28,5% lebih tinggi dibandingkan Laba Ditahan sebesar Rp4.316 miliar di 2017.

LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPRESIF LAINNYA

Dari berbagai kegiatan operasionalnya, Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1.468 miliar di 2018, meningkat 23,6% dari Rp1.188 miliar di 2017.

Pendapatan

Penghasilan Perusahaan berasal dari Pendapatan Pembiayaan—yang terdiri dari Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, dan Pembiayaan Syariah—serta Pendapatan Keuangan dan Pendapatan Lain-Lain. Jumlah Pendapatan Perusahaan pada 2018 meningkat 24,1% dari Rp4.042 miliar di 2017 menjadi Rp5.018 miliar di 2018.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan Pembiayaan di 2018, sebagaimana disebutkan di atas, terdiri dari Pendapatan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Pembiayaan Konsumen, dan Pendapatan Syariah. Pada 2018, Pendapatan Pembiayaan (setelah dikurangi Pembiayaan Bersama, seperti yang dijelaskan sebelumnya) mencapai Rp4.893 miliar, naik 24,3% atau Rp957 miliar dari Rp3.936 miliar di 2017.

Pendapatan Sewa Pembiayaan dan Pendapatan Pembiayaan Konsumen mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 25,8% dan 22,2%. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan sebagaimana tercermin dari Jumlah Piutang yang Dikelola – Bersih. Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen masing-masing berkontribusi sebesar 57,2% dan 40,3% terhadap Jumlah Pendapatan di 2018. Perusahaan juga mencatat Pendapatan Administrasi, Pendapatan Denda Keterlambatan, dan Pendapatan Terminasi (seluruhnya disebut Jumlah Pendapatan Berbasis Biaya dan Pendapatan Lain-Lain), yang dibukukan ke dalam Pendapatan Sewa Pembiayaan dan Pendapatan Pembiayaan Konsumen. Rinciannya ditunjukkan pada Tabel 61. Secara keseluruhan, Jumlah Pendapatan Berbasis Biaya dan Pendapatan Lain-Lain tumbuh 24,3% di 2018, dari Rp3.936 miliar menjadi Rp4.893 miliar. Jumlah

tersebut merupakan 97,5% dari Jumlah Pendapatan di 2018, dibandingkan dengan 97,4% di 2017.

Berdasarkan analisis Jenis Aset, kontributor terbesar adalah Pembiayaan Mobil Bekas, mewakili 68,3% dari Jumlah Pendapatan Pembiayaan, atau sebesar Rp3.371 miliar. Pendapatan dari Pembiayaan Mobil Bekas tumbuh 21,6% dari Rp2.772 miliar pada 2017. Pertumbuhan signifikan sebesar 43,2% dalam Pendapatan dialami Pembiayaan Sepeda Motor Bekas, dari Rp643 miliar di 2017 menjadi Rp921 miliar di 2018, sejalan dengan intensifikasi bisnis Perusahaan di segmen ini.

Dengan dimulainya kegiatan Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan di 2018, Perusahaan mencatat pendapatan Pembiayaan Syariah sebesar Rp1 miliar. Nilainya di 2017 adalah nihil. Rincian mengenai hal ini disajikan dalam Tabel 60.

TABEL 60 Pendapatan Pembiayaan berdasarkan Jenis Aset

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Rincian berdasarkan Jenis Aset				
Pembiayaan Mobil Bekas	2.772	3.371	599	21,6%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	643	921	278	43,2%
Pembiayaan Alat Berat	330	435	105	31,8%
Pembiayaan Mobil Baru	208	139	(69)	-33,2%
Pembiayaan Properti	72	70	(2)	-2,8%
Pembiayaan Syariah	-	1	1	n/a
Jumlah Pendapatan Pembiayaan (termasuk Pembiayaan Bersama)	4.025	4.937	912	22,7%
Persentase Jenis Aset				
Pembiayaan Mobil Bekas	68,9%	68,3%	n/a	-0,6%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	15,9%	18,7%	n/a	2,8%
Pembiayaan Alat Berat	8,2%	8,8%	n/a	0,6%
Pembiayaan Mobil Baru	5,2%	2,8%	n/a	-2,4%
Pembiayaan Properti	1,8%	1,4%	n/a	-0,4%
Pembiayaan Syariah	0,0%	0,0%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain mencakup seluruh sumber pendapatan non-inti yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan di luar kegiatan pembiayaan, yang termasuk bunga dari kas yang ditempatkan di bank, dan juga dari kegiatan lainnya seperti pemulihan piutang yang dihapusbukukan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap, dan lainnya.

Pendapatan Lain-Lain Perusahaan meningkat 17,0% dari Rp106 miliar di 2017 menjadi Rp124 miliar di 2018. Peningkatan tersebut berasal dari posisi kas yang lebih tinggi, pemulihan piutang yang telah dihapusbukukan, dan piutang dalam proses penyelesaian di 2018 dibandingkan dengan di 2017.

TABEL 61 Pendapatan

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pendapatan				
Pembiayaan Sendiri & Bersama	4.025	4.937	912	22,7%
Pendapatan Lain-Lain	106	124	18	17,0%
Jumlah	4.131	5.061	930	22,5%
Dikurangi Pembiayaan Bersama	(89)	(43)	46	-51,7%
Jumlah Pendapatan	4.042	5.018	976	24,1%
Pendapatan (Pembiayaan Sendiri)				
Sewa Pembiayaan				
Pendapatan Sewa Pembiayaan	1.777	2.256	479	27,0%
Administrasi	274	321	47	17,2%
Denda Keterlambatan	138	179	41	29,7%
Terminasi	93	115	22	23,7%
Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan	2.282	2.871	589	25,8%
Pembiayaan Konsumen				
Pendapatan Pembiayaan Konsumen	1.210	1.483	273	22,6%
Administrasi	280	358	78	27,9%
Denda Keterlambatan	121	134	13	10,7%
Terminasi	43	46	3	7,0%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen	1.654	2.021	367	22,2%
Pembiayaan Syariah	-	1	1	n/a
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	3.936	4.893	957	24,3%
Pendapatan Lain-Lain	106	124	18	17,0%
Jumlah Pendapatan	4.042	5.018	976	24,1%

Beban

TABEL 62 Beban

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Gaji dan Tunjangan	869	1.050	181	20,8%
Bunga dan Keuangan	895	1.036	141	15,8%
Umum dan Administrasi	482	567	85	17,6%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	303	509	206	68,0%
Lain-Lain	5	16	11	220,0%
Jumlah	2.554	3.178	624	24,4%

Jumlah Beban Perusahaan di 2018 mencapai Rp3.178 miliar, meningkat 24,4% dari Rp2.554 miliar di 2017. Kontribusi terhadap Jumlah Beban di 2018 terutama berasal dari Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp1.036 miliar, serta Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.050 miliar, masing-masing mewakili 32,6% dan 33,0% dari keseluruhannya.

Beban Bunga dan Keuangan

Beban Bunga dan Keuangan berasal dari kegiatan pendanaan Perusahaan, baik dari Pinjaman maupun Surat Berharga yang Diterbitkan, di luar kegiatan pendanaan dalam bentuk Pembiayaan Bersama.

TABEL 63 Pinjaman, Beban Bunga dan Keuangan, dan Biaya Dana

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima	6.819	6.900	81	1,2%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	3.909	5.196	1.287	32,9%
Jumlah Pinjaman	10.728	12.096	1.368	12,8%
Beban Bunga dan Keuangan	895	1.036	141	15,8%
Rata-Rata Biaya Dana	10,0%	8,6%		-1,4%

Beban Bunga dan Keuangan di 2018 mencapai Rp1.036 miliar, naik 15,8% dari Rp895 miliar yang tercatat di 2017. Beban Bunga dan Keuangan mewakili 32,6% dari Jumlah Beban di 2018. Rata-Rata Biaya Dana selama 2017 adalah 8,6%, atau 1,4% lebih rendah dibandingkan di 2017, sebesar 10,0%. Karena bunga pinjaman Perusahaan bersifat

tetap, pergerakan suku bunga ini tidak serta-merta mengikuti kenaikan suku bunga acuan BI yang meningkat dari 4,25% menjadi 6,00% selama 2018. Sebagian juga berasal dari Biaya Dana yang lebih rendah karena kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan Biaya Dana yang lebih murah melalui penerbitan surat berharga di pasar modal.

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan terdiri dari semua Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan sepanjang tahun berjalan, termasuk semua tunjangan terkait posisi dan kompensasi pensiun yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

TABEL 64 Beban Gaji dan Tunjangan

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Gaji dan Imbalan Kerja	819	991	172	21,0%
Imbalan Pascakerja	50	59	9	18,0%
Jumlah	869	1.050	181	20,8%

Beban Gaji dan Tunjangan meningkat 20,8% dari Rp869 miliar di 2017 menjadi Rp1.050 miliar di 2018. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah karyawan Perusahaan sebesar 13,0%, dari 9.884 karyawan menjadi 11.171 di 2018. Peningkatan ini sesuai dengan ekspansi bisnis Perusahaan dengan membuka sejumlah outlet baru.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi terdiri dari pengeluaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perusahaan.

TABEL 65 Beban Umum dan Administrasi

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Penyusutan Aset Tetap	68	75	7	10,3%
Perbaikan dan Pemeliharaan	46	61	15	32,6%
Beban Penerimaan Angsuran	44	56	12	27,3%
Perjalanan Dinas dan Transportasi	39	47	8	20,5%
Honorarium Tenaga Ahli	62	41	(21)	-33,9%
Asuransi	31	40	9	29,0%
Pemasaran	18	37	19	105,6%
Pendidikan dan Pelatihan	29	32	3	10,3%
Pengiriman, Perangko, dan Materai	20	25	5	25,0%
Sewa Kantor dan Gudang	19	23	4	21,1%
Keanggotaan dan Langganan	9	22	13	144,4%
Beban Kantor	19	21	2	10,5%

TABEL 65 Beban Umum dan Administrasi

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Komunikasi	18	20	2	11,1%
Listrik dan Air	14	16	2	14,3%
Amortisasi Aset Tak Berwujud	7	9	2	28,6%
Jasa Pihak Ketiga	4	6	2	50,0%
Fotokopi dan Legalisir Dokumen	1	3	2	200,0%
Beban Administrasi Bank	2	2	0	0,0%
Program CSR	1	2	1	100,0%
Penyusutan Aset Ijarah	0	1	1	n/a
Lain-Lain	31	28	(3)	-9,7%
Jumlah	482	567	85	17,6%

Beban Umum dan Administrasi di 2018 mencapai Rp567 miliar, meningkat 17,6% dari nilainya di 2017 sebesar Rp482 miliar. Peningkatan terbesar pada 2018 berasal dari Beban Pemasaran, yang naik 105,6% menjadi Rp37 miliar pada 2018. Terjadi penurunan Honorarium Tenaga Ahli sebesar 33,9% setelah di tahun sebelumnya meningkat signifikan sebesar 169,6%.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai merupakan nilai yang ditentukan berdasarkan evaluasi nilai Piutang Pembiayaan Perusahaan untuk Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan, baik secara individual maupun kolektif yang dihitung secara bulanan untuk memastikan kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai dalam Piutang yang dinyatakan dalam Laporan Posisi Keuangan, yang merepresentasikan nilai wajar.

Penyisihan untuk Piutang Pembiayaan Konsumen meningkat 66,1% dari Rp177 miliar di 2017 menjadi Rp294 miliar di 2018, sementara untuk Piutang Sewa Pembiayaan meningkat 70,6% dari Rp126 miliar di 2017 menjadi Rp215 miliar di 2018. Secara keseluruhan, Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai pada akhir 2018 adalah Rp509 miliar, meningkat 68,0% dari Rp303 miliar di 2017. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh penyisihan terkait kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, yakni sebesar Rp90 miliar. Di luar penyisihan bersifat khusus ini, maka jumlah kerugian penurunan nilai hanya meningkat sebesar 38,3%.

TABEL 66 Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - Piutang Pembiayaan Konsumen	177	294	117	66,1%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - Piutang Sewa Pembiayaan	126	215	89	70,6%
Jumlah	303	509	206	68,0%

Laba Tahun Berjalan

TABEL 67 Laba Tahun Berjalan

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Sebelum Pajak	1.488	1.840	352	23,7%
Beban Pajak Penghasilan	300	372	72	24,0%
Laba Tahun Berjalan	1.188	1.468	280	23,6%

Laba Sebelum Pajak Perusahaan pada 2018 adalah Rp1.840 miliar. Hal ini mencerminkan peningkatan 23,7% atau Rp352 miliar dari Rp1.488 miliar pada 2017. Laba Sebelum Pajak berasal dari Jumlah Pendapatan, yang meningkat Rp976 miliar dari angka 2017, dikurangi peningkatan dalam Jumlah Beban sebesar Rp624 miliar.

Laba Tahun Berjalan, yang diperoleh dengan mengurangi Laba Sebelum Pajak dengan Beban Pajak Penghasilan, meningkat 23,6% dari Rp1.188 miliar di 2017 menjadi Rp1.468 miliar di 2018.

Perusahaan saat ini menerapkan tarif pajak penghasilan 20% yang berlaku untuk perusahaan publik, dengan kriteria sebagai berikut:

- Setidaknya 40% dari saham yang diterbitkan dimiliki oleh publik;
- Publik harus terdiri dari setidaknya 300 individu, masing-masing memegang kurang dari 5% dari saham yang diterbitkan; dan
- Kedua syarat ini harus dipenuhi setidaknya selama enam bulan (183 hari) dalam satu tahun pajak.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan ini.

TABEL 68 Rasio Beban Pajak Penghasilan

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Sebelum Pajak	1.488	1.840	352	23,7%
Beban Pajak Penghasilan	300	372	72	24,0%
Rasio Beban Pajak Penghasilan	20,2%	20,2%	n/a	0,0%

Tarif pajak untuk 2017 dan 2018 adalah 20,2%, di atas tarif normal sebesar 20,0%.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Selisih antara laba bersih dan laba komprehensif disebabkan oleh standar akuntansi yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan perhitungan pada program imbalan pascakerja, di mana kerugian disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai bagian yang tidak diklasifikasikan ke dalam laporan laba rugi. Selain itu, perbedaan tersebut juga berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko mata uang dan risiko suku bunga dari transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Selisih tersebut merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan kembali normal ketika kontrak lindung nilai (*swap*) mencapai tenggat waktu.

TABEL 69 Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Tahun Berjalan	1.188	1.468	280	23,6%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(29)	71	100	-344,8%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.159	1.539	380	32,8%

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan meningkat 32,8% dari Rp1.159 miliar di 2017 menjadi Rp1.539 miliar di 2018.

Laba per Saham Dasar

TABEL 70 Laba per Saham Dasar

Keterangan (Rp miliar)	2017*	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Laba Tahun Berjalan	1.188	1.468	280	23,6%
Laba per Saham Dasar (nilai penuh)	79	98	19	24,1%

* Disajikan kembali setelah Pemecahan Saham

Laba per Saham Dasar di 2018 adalah Rp98 per saham, naik 24,1% dari Rp79 di 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan kinerja keuangan Perusahaan yang kokoh di 2018.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Perusahaan dikelompokkan dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pembiayaan, sebagaimana dirinci di bawah ini:

TABEL 71 Laporan Arus Kas

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018	Perbandingan Tahun Sebelumnya	
			Jumlah	Persentase
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	165	225	60	36,4%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(2.335)	(367)	1.968	-84,3%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(183)	(158)	25	-13,7%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2.578	1.055	(1.523)	-59,1%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	60	530	470	783,3%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	225	755	530	235,6%

Kas dan Setara Kas Perusahaan yang tercatat pada 31 Desember 2018 mengalami peningkatan signifikan sebesar 235,6% atau Rp530 miliar, dari Rp225 miliar yang dicatat pada akhir 2017 menjadi Rp755 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penurunan Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menggambarkan pergerakan uang tunai untuk mendanai aktivitas bisnis Perusahaan, terutama pendanaan untuk pembiayaan baru. Pada 2018, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi adalah Rp367 miliar, turun 84,3% dari Rp2.335 miliar di 2017. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang lebih besar dari penerimaan kas atas transaksi pembiayaan dibandingkan peningkatan dari pencairan kas untuk transaksi pembiayaan baru.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi berasal dari keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi Perusahaan dan pengeluaran untuk aset modal. Kas bersih yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan investasi di 2018 menurun 13,7%, dari Rp183 miliar di 2017 menjadi Rp158 miliar di 2018, disebabkan adanya uang muka Perusahaan untuk pembelian tanah di 2017.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menggambarkan jumlah kas yang diperoleh dari transaksi pendanaan. Aktivitas ini termasuk pencairan pendanaan baru, pelunasan utang pendanaan, dan pembayaran bunga atas sumber-sumber pendanaan. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di 2018 mencapai Rp1.055 miliar, turun 59,1% dari kas bersih dari aktivitas pendanaan di 2017, terutama karena aktivitas pembiayaan baru yang lebih sedikit di 2018 dibandingkan di 2017.

ANALISIS RASIO PENTING

PROFITABILITAS

Imbal Hasil atas Aset (ROAA) dan Imbal Hasil atas Ekuitas (ROAE)

ROAA Perusahaan di 2018 tidak berubah dari angka 2017, yaitu 10,3%. Nilai ini jauh lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 4,3%.

Sementara itu, ROAE di 2018 meningkat dari 25,9% per akhir 2017 menjadi 26,4%. ROAE Perusahaan hampir mencapai dua kali lipat rata-rata industri yang dihitung OJK sebesar 13,9%.

TABEL 72 ROAA dan ROAE

Rasio	2017	2018	Rata-Rata Industri*
ROAA	10,3%	10,3%	4,3%
ROAE	25,9%	26,4%	13,9%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Pendapatan	29,4%	29,2%	20,0%

*Sumber: Data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perusahaan menghitung pengukuran berikut untuk menentukan kemampuannya membayar utangnya:

- Rasio Solvabilitas Aset untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai menggunakan kewajiban;
- Rasio Likuiditas untuk mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar;

- *Gearing Ratio* untuk mengukur rasio utang terhadap modal sendiri (ekuitas); dan
- Hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat kredit yang terakreditasi.

Kemampuan Membayar Utang Perusahaan disajikan secara terinci dalam Tabel 73.

TABEL 73 Rasio Kemampuan Membayar Utang

Rasio Penting	2017	2018	Penjelasan
Solvabilitas Aset	0,7x	0,7x	Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset yang dibiayai menggunakan liabilitas, dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan membayar utang adalah tinggi.
Likuiditas	1,5x	1,4x	Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.
<i>Gearing</i>	2,2x	1,9x	Perusahaan memiliki rasio <i>gearing</i> yang termasuk rendah dibanding rata-rata perusahaan pembiayaan sebesar 3,0x, sementara batas maksimal yang diizinkan sesuai POJK 35/2018 adalah 10x.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG (KUALITAS ASET)

Perusahaan mengklasifikasikan Kolektibilitas Piutang berdasarkan jumlah hari jatuh tempo. Sepanjang 2018, Perusahaan berhasil mempertahankan Rasio Kolektibilitasnya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio NPF yang lebih rendah dibandingkan dengan NPF industri pembiayaan.

Kinerja tersebut konsisten dengan strategi Perusahaan terkait penagihan awal, yang telah diterapkan sejak 2014 dan telah menunjukkan hasil positif. Selain itu, standar penjaminan telah diterapkan secara ketat

dengan meminimalkan kegiatan pembiayaan di sektor berisiko tinggi, misalnya sektor komoditas. Sepanjang 2018, Perusahaan berkoordinasi erat dengan tim penagihan, meningkatkan langkah-langkah pengendalian kredit, dan memperkenalkan metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan.

Hasil dari manajemen risiko dan penagihan yang efektif ditunjukkan oleh rasio NPF Perusahaan, yang dihitung dari rasio piutang tertunggak lebih dari 90 hari. Pada 2018, NPF berhasil dijaga pada 1,21%, jauh di bawah NPF rata-rata industri sebesar 2,71%.

TABEL 74 Tingkat Kolektibilitas Piutang (Kualitas Aset)

Keterangan	Hari Tunggakan	Jumlah Piutang		Persentase	
		2017	2018	2017	2018
1 - Lancar	0 - 30 hari	15.519	17.761	97,4%	96,8%
2a - Dalam Perhatian Khusus	31 - 60 hari	189	242	1,2%	1,3%
2b - Dalam Perhatian Khusus	61 - 90 hari	77	118	0,5%	0,6%
3a - Kurang Lancar	91 -120 hari	45	81	0,3%	0,4%
3b - Kurang Lancar	121 - 150 hari	40	51	0,2%	0,3%
4 - Diragukan	151 - 180 hari	32	45	0,2%	0,3%
5 - Macet	>180 hari	34	45	0,2%	0,3%
Jumlah		15.936	18.343	100%	100,0%

RASIO KEUANGAN PENTING LAINNYA

Perusahaan konsisten menjaga kepatuhannya terhadap peraturan BI dan OJK yang berlaku, termasuk terkait Rasio Keuangan.

Tabel 75 menyajikan perbandingan kinerja rasio keuangan penting lainnya di Perusahaan, dibandingkan rata-rata industri pembiayaan di 2018 yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan terhadap industri:

TABEL 75 Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya

Rasio	2017	2018	Rata-Rata Industri*
<i>Financing-to-Assets Ratio (FAR)</i>	92,0%	90,4%	86,4%
Rasio Modal Sendiri-Modal Disetor (MSMD)	1.228,6%	1.554,1%	276,7%
Rasio Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO)	64,8%	64,6%	80,7%

* Sumber: Data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI PADA 2018

TABEL 76 Perbandingan Target dan Realisasi

Keterangan (Rp miliar)	Target	Realisasi	Penjelasan atas Pencapaian Budget
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Baru	20%	14,2%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Bisnis
Pertumbuhan Piutang Bersih	17% - 20%	13,9%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
Pertumbuhan Aset	17% - 20%	16,0%	Tidak mencapai target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
Pertumbuhan Pendapatan	21%	24,1%	Mencapai di atas target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
Laba Bersih	Di atas Laba Bersih 2017	23,6%	Mencapai di atas target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tinjauan Kinerja Keuangan
NPF	< 2%	1,21%	Mencapai di atas target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Tingkat Kolektibilitas Piutang
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)	< 3x	1,95x	Mencapai di atas target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Struktur Modal
Rasio Pembagian Dividen (<i>Dividend Payout Ratio</i>)	Sampai dengan 50%	*	Mencapai di atas target anggaran, sebagaimana dijelaskan di bagian Dividen

* Menunggu keputusan RUPS 2019

Sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Direksi, halaman 38, Perusahaan menyaksikan kenaikan suku bunga berkali-kali oleh Federal Reserve yang kemudian diikuti oleh BI, yang menyebabkan melemahnya rupiah dan mengetatnya likuiditas sekaligus ketidakpastian terkait Pemilihan Presiden 2019. Akibatnya, dunia bisnis dan konsumen mengambil sikap berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan pembelanjaan. Faktor-faktor ini, bersama dengan pemburukan pada Kualitas Aset, menyebabkan perlambatan di paruh kedua 2018, yang diawali dengan optimisme tinggi.

Perusahaan berhasil memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan untuk 2018 terkait Pendapatan, Laba Bersih, Rasio NPF, dan Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas. Akan tetapi, Pertumbuhan Aset tidaklah sekuat yang diperkirakan karena Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Baru yang melambat seiring dengan upaya Perusahaan untuk mengonsolidasikan pertumbuhannya sebagai respons terhadap peningkatan rasio NPF, dan dengan demikian beralih fokus pada peningkatan kualitas penagihan dan kualitas aset, dibandingkan pertumbuhan.

STRUKTUR MODAL (KECUKUPAN MODAL)

KEBIJAKAN MANAJEMEN TENTANG STRUKTUR MODAL

Anggaran Dasar Perusahaan menetapkan bahwa Modal Dasar Perusahaan adalah Rp50 miliar, terdiri dari 20 miliar saham dengan nilai nominal Rp25,00 per saham. Dari Modal Dasar, 15.967.115.620 saham telah diterbitkan dan disetor penuh. Selanjutnya, 1.002.732.000 saham telah dibeli kembali oleh Perusahaan per 31 Desember 2018.

Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 19 November 2014 (POJK 29)—yang kemudian diperbarui dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 (POJK 35)—dalam mengelola modalnya, yang mensyaratkan:

- Modal minimum Rp100 miliar;
- Ekuitas minimum 50% dari jumlah Modal Disetor; dan
- *Gearing Ratio*, yaitu rasio jumlah pembiayaan terhadap ekuitas dikurangi obligasi subordinasi dengan investasi, sebesar maksimum 10 kali, baik untuk pembiayaan domestik maupun internasional.

Sesuai dengan peraturan ini, Perusahaan melaporkan sebagai berikut:

TABEL 77 Struktur Modal

Keterangan (Rp miliar)	Ketentuan POJK	Realisasi Perusahaan	
		2017	2018
Ekuitas	Minimal Rp100 miliar	4.904	6.204
Rasio Jumlah Ekuitas terhadap Modal Disetor	Minimal 50%	1.229%	1.554%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimal 10x	2,2x	1,9x

KOMITMEN MATERIAL

Sepanjang 2018, Perusahaan tidak membuat komitmen material selain dari yang telah dibahas di bagian sebelumnya.

INVESTASI MATERIAL ATAS BARANG MODAL

Belanja Modal Perusahaan di 2018 umumnya berbentuk investasi dalam Peralatan Kantor dan Tanah (dalam wujud uang muka untuk pembebasan lahan). Sumber dana untuk Belanja Modal ini sebagian besar berasal dari dana Perusahaan sendiri.

Jumlah Belanja Modal di 2018 adalah Rp261 miliar, dengan Rp103 miliar di antaranya telah diselesaikan dan Rp77 miliar masih dalam penyelesaian, termasuk uang muka untuk pembebasan lahan sebesar Rp81 miliar.

TABEL 78 Nilai Investasi Barang Modal

Jenis Investasi Barang Modal (Rp miliar)	Nilai Investasi Barang Modal			Jumlah
	Selesai	Dalam Penyelesaian	Uang Muka Pembelian Tanah	
Tanah	-	-	81	81
Bangunan dan Prasarana	4	11	-	15
Peralatan Kantor	29	65	-	94
Kendaraan	62	1	-	63
Perabot dan Perlengkapan Kantor	8	-	-	8
Jumlah	103	77	81	261

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Setelah penerbitan Laporan Keuangan Tahunan 2018 pada 19 Februari 2019, Perusahaan tengah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019, dengan jumlah nominal Rp1 triliun.

DIVIDEN

Kebijakan Dividen Perusahaan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- Seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama, termasuk hak atas Dividen, kecuali saham yang dibeli kembali (Saham Treasuri);
- Tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain, Perusahaan berkeinginan untuk membagikan Dividen Tunai dengan nilai hingga 50% dari Laba Bersih Tahun Berjalan; dan
- Pembagian Dividen dapat dilakukan sekaligus maupun lebih dari satu kali melalui Dividen Interim.

Perusahaan melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih 2017 dan 2018 sebagai berikut:

TABEL 79 Kebijakan dan Pembayaran Dividen

Keterangan (Rp miliar)	2017	2018
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.187	1.468
Dividen Tunai	583	-
% Dividen Tunai terhadap Laba Bersih Tahun Sebelumnya	49,1%	*

* Menunggu keputusan RUPS 2019

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Di 2018, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi berdenominasi Rupiah, yaitu Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 Seri A, B, dan C pada 7 Maret 2018, dengan jumlah nominal Rp2.165 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 Seri A dan B pada 27 Juni 2018, dengan jumlah nominal Rp740 miliar.

Untuk memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan menyampaikan informasi terkait penggunaan dana dari penawaran umum tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus dan informasi tambahan yang diterbitkan terkait penawaran umum, dana tersebut telah digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

Semua dana hasil penawaran umum telah digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis utama Perusahaan, dan dengan demikian sisa dana yang belum digunakan adalah nihil. Tidak ada perubahan dalam penggunaan dana dari penawaran umum tersebut, dan seluruhnya telah dilaporkan ke pihak otoritas.

INVESTASI, DIVESTASI, MERGER & AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG ATAU MODAL

Perusahaan tidak melakukan Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, ataupun Restrukturisasi Utang atau Modal di 2018, selain dari investasi senilai Rp10 miliar yang dilakukan terhadap entitas anaknya, PT FIT.

TRANSAKSI DENGAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pihak Terkait	Sifat Hubungan	Transaksi
Karyawan	Personel manajemen kunci	Imbalan karyawan jangka pendek Imbalan pascakerja

Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di atas terdiri dari Gaji dan Tunjangan karyawan, sebesar Rp65 miliar di 2018, yang merupakan 2,1% dari Jumlah Biaya pada tahun tersebut. Pada 2017, nilainya mencapai Rp55 miliar (2,2% dari total).

Transaksi-transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi ini, kecuali Beban Gaji dan Imbalan Kerja kepada personel manajemen kunci, dilakukan dengan persyaratan operasi bisnis normal.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Sepanjang 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebelas kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan pembiayaan, yakni:

TABEL 80 Perubahan Regulasi

Regulator	Nomor Peraturan	Penjelasan
OJK	Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2018	Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik
OJK	Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018	Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
OJK	Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018	Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
OJK	Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018	Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
OJK	Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018	Perubahan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK
OJK	Peraturan OJK No. 26/POJK.02/2018	Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
OJK	Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018	Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

TABEL 80 Perubahan Regulasi

Regulator	Nomor Peraturan	Penjelasan
OJK	Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
OJK	Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2018	Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
OJK	Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018	Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
BEI	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018	Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Perubahan peraturan dan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, kejelasan, sekaligus tata kelola dalam industri pembiayaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Terdapat amandemen PSAK dan interpretasi PSAK (ISAK) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Keuangan Tahunan, Ekshibit E/12.

Penerapan standar-standar tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan ataupun nilai-nilai yang dilaporkan untuk tahun buku sekarang dan sebelumnya.

Tabel berikut menunjukkan analisis dampak dari Standar Akuntansi yang relevan terhadap Perusahaan:

TABEL 81 Perubahan PSAK yang Berdampak terhadap Perusahaan

Standar Akuntansi	Ringkasan Perubahan	Alasan Perubahan	Dampak terhadap Perusahaan
Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”	Penambahan pengungkapan mengenai rekonsiliasi antara saldo awal dengan saldo akhir atas aktivitas pendanaan pada laporan arus kas	Memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi perubahan pada liabilitas atas aktivitas pendanaan (laporan arus kas), termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun non-kas	Penambahan pengungkapan terdapat di Catatan 35 dari Laporan Keuangan Tahunan yang terlampir dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini

PROSPEK BISNIS 2019

2019 tetap menjadi tahun yang menantang untuk industri pembiayaan, karena dukungan perbankan diperkirakan tidak akan sekuat di tahun-tahun sebelumnya, mengingat rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR) perbankan saat ini cukup tinggi, sehingga likuiditas perbankan ketat dan kemampuan untuk menyalurkan kredit berkurang.

Tidak hanya faktor dalam negeri, di mana pesta politik akan digelar dan pasar akan memberikan sinyal untuk menunggu, juga terdapat faktor eksternal seperti ketegangan perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang turut berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya sektor komoditas, yang pertumbuhannya sangat bergantung pada ekspor.

Mempertimbangkan tren historis pertumbuhan bisnis Perusahaan yang konsisten lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan industri, Perusahaan menargetkan pertumbuhan yang lebih moderat di 2019, seiring Perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian terkait kemampuan proses bisnisnya.

Fokus utama kami di 2019 adalah menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa mendatang. Perusahaan akan meninjau anggaran 2019-nya setelah perhelatan pemilihan umum usai dan menyesuaikan anggarannya dengan perkembangan terbaru di pasar.

TABEL 82 Target Usaha 2019

Keterangan	Target
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Baru	Sekitar 5% dari realisasi 2018
Pertumbuhan Piutang Bersih	Sekitar 5% dari realisasi 2018
Pertumbuhan Aset	Sekitar 5% dari realisasi 2018
Pertumbuhan Pendapatan	Sekitar 5% dari realisasi 2018
Laba Bersih	Sama atau lebih baik dari Laba Bersih 2018
NPF	$\leq 1,5\%$
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)	$< 2,5x$
Rasio Pembagian Dividen (<i>Dividend Payout Ratio</i>)	Sampai dengan 50%



Solusi cepat, tepat, dan efisien bukan hal sulit di BFI Finance. Gagasan, diskusi, dan kesepakatan dapat diperoleh lewat sarana digital. Karena bekerja cerdas dengan memahami prioritas menjadikan keseimbangan hidup lebih terjaga.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik



- 194 Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 211 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 226 Dewan Komisaris
- 243 Direksi
- 259 Dewan Pengawas Syariah
- 263 Komite Audit
- 269 Komite Manajemen Risiko
- 273 Komite Nominasi dan Remunerasi
- 279 Sekretaris Perusahaan
- 282 Audit Internal
- 287 Audit Eksternal
- 289 Manajemen Risiko
- 296 Sistem Pengendalian Internal
- 298 Kasus Hukum 2018
- 309 Akses Informasi dan Komunikasi
- 315 Hubungan Investor
- 317 Kepatuhan
- 317 Kode Etik dan Budaya Perusahaan
- 321 Kebijakan Antikorupsi
- 325 Sistem Pelaporan Pelanggaran
- 326 Aksi Korporasi
- 327 Opsi Saham
- 327 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya



LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



BFI Finance menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan GCG merupakan pedoman dan bentuk tanggung jawab dari manajemen dan karyawan Perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, untuk memelihara keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan juga berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG sebagai bentuk kontribusinya terhadap penguatan industri usaha pembiayaan di Indonesia. Penerapan GCG yang baik akan mendukung upaya-upaya kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus di industri pembiayaan, sekaligus mendukung upaya pengawasan oleh regulator dan otoritas lainnya.

DASAR HUKUM

BFI Finance berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Praktik GCG Perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

TABEL 83 Dasar Hukum Implementasi GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
1	Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku, antara lain:	1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
		2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
		3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
		5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia, antara lain:	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:	1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
		2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya
		3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

TABEL 83 Dasar Hukum Implementasi GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
4	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, antara lain:	1 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
		2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
		3 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
		4 Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
5	Peraturan OJK, antara lain:	1 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
		2 Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan
		3 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
		4 Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan
		5 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
		6 Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
		7 Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
		8 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
		9 Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
		10 Peraturan OJK No. 17/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
		11 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
		12 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
		13 Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
		14 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
		15 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
		16 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

TABEL 83 Dasar Hukum Implementasi GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
17	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
18	Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014	tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
19	Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014	tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
20	Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015	tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
21	Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2015	tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
22	Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015	tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
23	Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015	tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
24	Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015	tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
25	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
26	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
27	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015	tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
28	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015	tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
29	Peraturan OJK No. 41/POJK.05/2015	tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
30	Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
31	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
32	Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016	tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
33	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016	tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
34	Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016	tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
35	Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016	tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
36	Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017	tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
37	Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017	tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

TABEL 83 Dasar Hukum Implementasi GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
		38 Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
		39 Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
		40 Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
		41 Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
		42 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
		43 Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
		44 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka
		45 Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
		46 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik
		47 Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
		48 Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
		49 Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
		50 Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
		51 Peraturan OJK No. 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
		52 Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
		53 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
		54 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
6	Surat Edaran OJK, antara lain:	1 Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat
		2 Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
		3 Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

TABEL 83 Dasar Hukum Implementasi GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
4		Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik
5		Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
6		Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
7		Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan
8		Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
9		Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.05/2015 tentang Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris, dan/atau Penilai Independen sebagai Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
10		Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
11		Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
12		Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah
13		Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan
14		Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan
15		Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
16		Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
17		Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
18		Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
19		Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah
20		Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
21		Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
22		Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

TABEL 83 Dasar Hukum Implementasi GCG

No.	Dasar Hukum	Judul
		23 Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
		24 Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
		25 Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
		26 Surat Edaran OJK No. 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
		27 Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
7	Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK; sekarang OJK) dan Keputusan Ketua Bapepam-LK, antara lain:	<p>1 Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik</p> <p>2 Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>3 Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik</p>
8	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, antara lain:	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Selain peraturan yang terdaftar pada tabel di atas, Perusahaan juga mengacu pada beberapa pedoman GCG, antara lain:

- Pedoman Umum GCG Indonesia yang diterbitkan pertama kali oleh KNKG pada 1999 dan telah beberapa kali mengalami revisi digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan dan penerapan GCG;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan OJK; dan
- Anggaran Dasar Perusahaan.

PRINSIP UTAMA

BFI Finance menerapkan prinsip-prinsip GCG berikut dalam kegiatan usahanya pada seluruh jenjang organisasi:

TABEL 84 Prinsip Utama GCG

No.	Prinsip GCG	Implementasi
1	<p>Keterbukaan (<i>Transparency</i>)</p> <p>Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance mengelola usahanya secara transparan bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi diwujudkan dengan memberikan informasi kepada pemegang saham dengan jujur. Penerapan prinsip ini juga diwujudkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi; • Penyusunan dan penjelasan program kerja Perusahaan; • Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan triwulan dan tahunan; • Penyediaan laporan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha Perusahaan; dan • Pemanfaatan situs web untuk menyampaikan informasi Perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2	<p>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</p> <p>Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien</p>	<p>Terdapat <i>job description</i> yang jelas bagi semua karyawan, dengan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Seluruh organ Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan. Prinsip ini diterapkan dalam pembagian tugas di antara organ-organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta indikator kinerjanya.</p>
3	<p>Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)</p> <p>Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance berkomitmen untuk melaksanakan CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usahanya. Prinsip pertanggungjawaban diterapkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Pelaksanaan program dan kegiatan CSR; dan • Pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan.

TABEL 84 Prinsip Utama GCG

No.	Prinsip GCG	Implementasi
4	<p>Kemandirian (<i>Independence</i>)</p> <p>Kedaaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance memandang independensi dalam pengelolaan usaha mutlak diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan peraturan dari otoritas terkait secara penuh tanpa intervensi pihak luar. Dengan penerapan prinsip independensi, BFI Finance merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan. Penerapan prinsip independensi memperkuat profesionalisme, kreativitas, dan kemandirian dalam pengelolaan bisnis. Penerapan prinsip ini diterapkan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ-organ Perusahaan; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan; dan • Kegiatan Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang dalam RUPS sebagaimana diatur, serta mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
5	<p>Kesetaraan dan Kewajaran (<i>Fairness</i>)</p> <p>Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI Finance bersikap adil serta patuh terhadap seluruh peraturan untuk melindungi pemangku kepentingan. BFI Finance berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil serta bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. Prinsip ini diterapkan antara lain dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • BFI Finance melaporkan informasi terkait rekanan kepada pemangku kepentingan secara adil dan transparan; dan • BFI Finance menghadirkan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan.

TUJUAN GCG

BFI Finance menerapkan prinsip-prinsip GCG antara lain untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi para pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan serta jajaran di bawahnya pada standar etika yang tinggi, peraturan perundang-undangan, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial;
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, serta berdaya saing kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan; dan
5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan bagi perekonomian nasional.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Struktur GCG di BFI Finance terdiri dari organ-organ berikut:

1. RUPS

RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan/ atau Anggaran Dasar Perusahaan dan merupakan forum pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha Perusahaan dan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan perangkat Perusahaan untuk mengawasi pelaksanaan usaha dijalankan sesuai dengan strategi, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan; baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan perangkat eksekutif Perusahaan untuk menjalankan dan mengelola usaha sesuai dengan strategi, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Organ-Organ Pendukung Dewan Komisaris

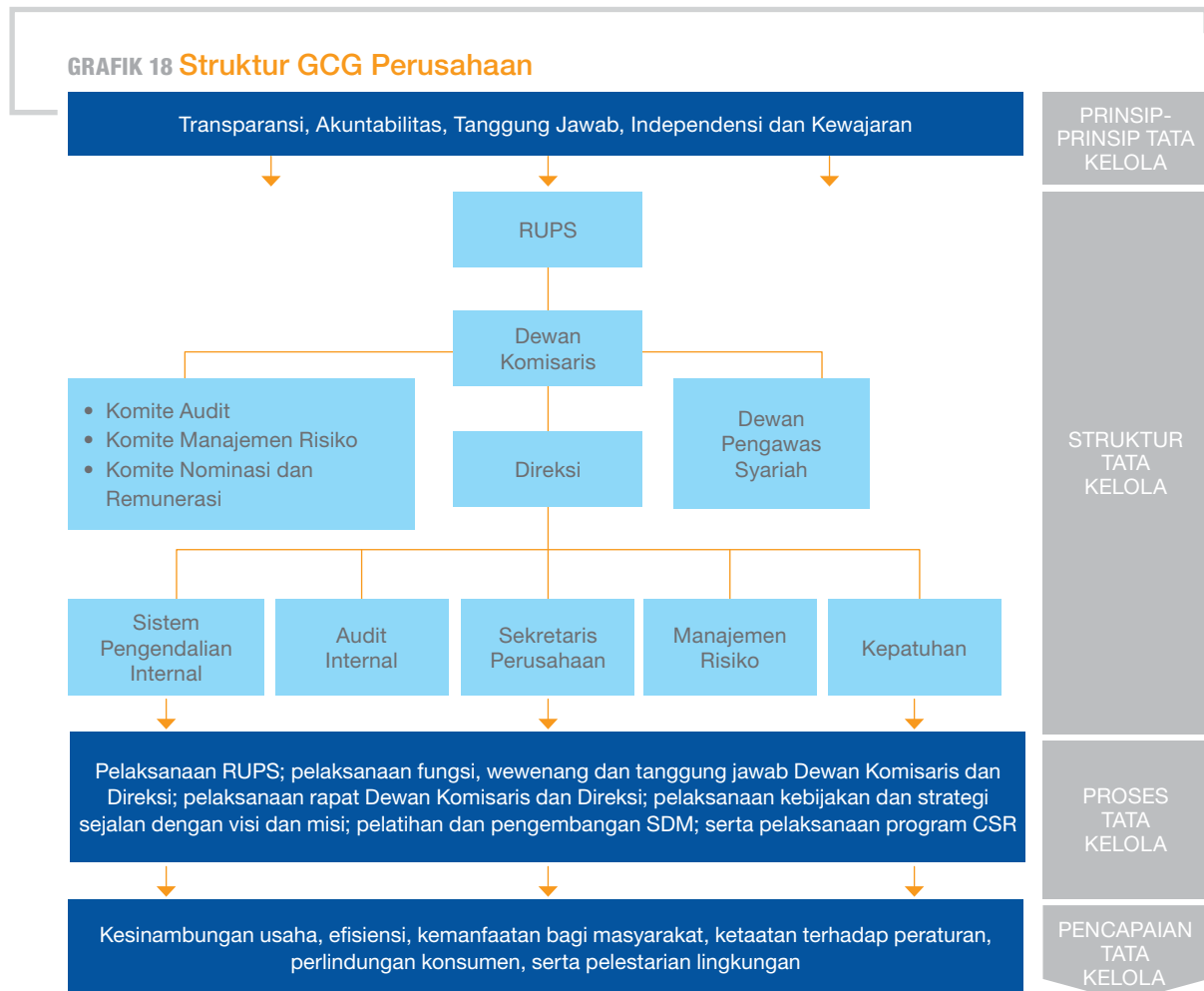
Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang salah satu atau lebih anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

5. Organ-Organ Pendukung Direksi

Dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Departemen Audit Internal, serta masing-masing bagian fungsional terkait.

LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK

Struktur GCG BFI Finance dirangkum dalam bagan berikut:



Keberadaan struktur organ Perusahaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan GCG yang berfungsi memastikan pemetaan fungsi atau kegiatan bisnis yang jelas untuk menghindari potensi benturan kepentingan, serta memastikan bahwa mekanisme *checks and balances* berlangsung efektif dan efisien.

Mekanisme pelaksanaan GCG oleh organ-organ dalam struktur GCG di BFI Finance berlangsung di dalam suatu kerangka infrastruktur GCG, yang mencakup kebijakan, prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing organ. Infrastruktur GCG dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan terkini serta *best practices* dalam penerapan GCG. Infrastruktur GCG di BFI Finance terakhir kali disempurnakan melalui SK Direksi No. 24/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Prosedur Perusahaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan.

TABEL 85 Infrastruktur GCG Perusahaan

No.	Infrastruktur GCG	Bentuk
1	Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (<i>Code of Business Principles</i>), yang berlaku bagi seluruh kegiatan BFI Finance, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, serta bagi setiap karyawannya	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (GREAT) sebagai pedoman perilaku dan budaya Perusahaan • Tanggung Jawab Perusahaan • Integritas Usaha • Komitmen Kegiatan Operasional • Peraturan Perusahaan 2018–2020
2	Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>)
3	Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Komite Audit • Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
4	Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (<i>Code of Business Principles</i>) • GREAT yang merupakan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, pedoman untuk panduan perilaku dan budaya yang berlaku bagi seluruh karyawan • Peraturan Perusahaan 2018–2020 • Piagam Audit Internal • Berbagai kebijakan, SK, SOP, dan panduan yang berlaku di Perusahaan
5	Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Triwulanan • Laporan Keuangan Tengah Tahunan • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Tahunan Terintegrasi (gabungan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan)

ROADMAP GCG

Sebagai perusahaan publik, BFI Finance memenuhi arahan dari OJK terkait pelaksanaan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia 2014.

Roadmap GCG di Perusahaan dinyatakan secara implisit dan disesuaikan dengan arahan OJK tersebut dalam setiap praktik penerapannya. Beberapa struktur dan mekanisme penting yang telah berjalan dalam penerapan GCG di Perusahaan adalah Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (*Code of Business Principles*), Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komite-Komite, serta prosedur dan kebijakan pendukung lainnya, seperti Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Kebijakan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Kepatuhan.

Sebagai bagian dari *Roadmap* GCG, Perusahaan secara berkelanjutan juga melakukan evaluasi, pengkinian, dan sosialisasi GCG kepada seluruh karyawan.

FOKUS PENERAPAN GCG

Pada 2018, fokus implementasi GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan terhadap berbagai peraturan eksternal dan internal yang relevan. Langkah ini dilakukan di seluruh jenjang organisasi Perusahaan melalui berbagai media komunikasi di Perusahaan, termasuk sosialisasi peraturan baru di Perusahaan ke karyawan melalui fasilitas intranet dan media internal lainnya; dan
2. Penilaian kualitas *outcome* (hasil implementasi) yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Ini merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang didukung kecukupan struktur dan infrastruktur GCG.

Outcome ini mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, termasuk:

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Penanganan perlindungan pelanggan;
- d. Independensi audit; dan
- e. Pencapaian kinerja Perusahaan, baik finansial maupun operasional.

EVALUASI PENERAPAN GCG

BFI Finance melakukan evaluasi atas penerapan GCG untuk memastikan terjadi peningkatan dalam kualitas penerapannya dari tahun ke tahun. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan proses bisnis Perusahaan.

Pada 2018, BFI Finance melakukan penilaian pencapaian GCG secara internal. Hasilnya menyatakan bahwa Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan GCG dengan baik, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

TABEL 86 Evaluasi Penerapan GCG

Aspek	Faktor Positif	Faktor Negatif
A Struktur Tata Kelola		
1 Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Direksi	Secara umum telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Perusahaan serta memenuhi peraturan yang berlaku.	Tidak ada
2 Struktur Organisasi	Secara umum, BFI Finance memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, divisi, departemen, dan unit/fungsi kerja, dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal.	Tidak ada

TABEL 86 Evaluasi Penerapan GCG

Aspek	Faktor Positif	Faktor Negatif
3 Kebijakan dan Prosedur	BFI Finance telah memiliki kebijakan dan prosedur yang meliputi Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Komite Audit, Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Audit Internal, Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, Peraturan Perusahaan 2018-2020, Komitmen Kegiatan Operasional, Nilai-Nilai Dasar, serta Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi (IT).	Tidak ada
4 Sistem Informasi	BFI Finance menjalankan <i>Management Information System</i> (MIS) untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasional, dan sistem pengendalian internal.	Tidak ada
B Proses Tata Kelola		
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab	Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah berlangsung dengan baik.	Tidak ada
2 SDM	BFI Finance telah meningkatkan kualitas dan jumlah SDM dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan serta berfokus pada kecukupan ketersediaan SDM.	Tidak ada
3 Manajemen Risiko	BFI Finance secara berkala melakukan tinjauan atas limit risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, dan penilaian model internal atas pengelolaan risiko.	Tidak ada
4 Pengaduan Pelanggan	BFI Finance mengelola dan menyelesaikan pengaduan pelanggan sesuai ketentuan SLA.	Tidak ada
5 Budaya Disiplin dan Kepatuhan	BFI Finance terus menegakkan budaya disiplin dan kepatuhan di seluruh jenjang organisasi dengan menyusun Pakta Integritas untuk meningkatkan penegakan hukum, menjalankan kebijakan <i>anti-fraud</i> , dan Sistem Pelaporan Pelanggaran, menerapkan GREAT sebagai Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal.	Tidak ada
6 CSR	BFI Finance telah menjalankan CSR sebagai bagian dari proses bisnis.	Tidak ada
C Hasil Tata Kelola		
1 Rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris terdokumentasi dalam risalah rapat, dan menjadi masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.	Tidak ada
2 Benturan Kepentingan	Tidak ada indikasi benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan.	Tidak ada
3 Penyampaian Informasi kepada Publik	BFI Finance telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain, melalui pelaporan keuangan triwulanan, tengah tahunan, tahunan, Laporan Tahunan Terintegrasi (gabungan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan).	Tidak ada
4 Kinerja Perusahaan	BFI Finance mencatat pertumbuhan dan kinerja positif, tercermin dari pertumbuhan aset dan laba dan juga terkendalinya piutang macet (NPF).	Tidak ada

PENERAPAN REKOMENDASI PEDOMAN DARI OJK

Kinerja penerapan GCG di BFI Finance dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan, dirangkum dalam tabel berikut:

TABEL 87 Penerapan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan	Penjelasan (apabila belum dipatuhi)
Aspek I: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham				
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS				
		1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Telah dipatuhi	
		2. Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPST dan RUPSLB.	Tidak terpenuhi	Satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota Direksi tidak menghadiri RUPS 17 April 2018 dengan alasan yang telah dinyatakan kepada dan diterima oleh RUPS.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama satu tahun.	Telah dipatuhi	
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor				
		4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Telah dipatuhi	
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Telah dipatuhi	

TABEL 87 Penerapan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan	Penjelasan (apabila belum dipatuhi)
Aspek II: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris				
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris				
	6.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Telah dipatuhi	
	7.	Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Telah dipatuhi	
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris				
	8.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Telah dipatuhi	
	9.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan Terbuka.	Telah dipatuhi	
	10.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Telah dipatuhi	
	11.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi.	Telah dipatuhi	
Aspek III: Fungsi dan Peran Direksi				
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi				
	12.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Telah dipatuhi	
	13.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan.	Telah dipatuhi	
	14.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Telah dipatuhi	
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi				
	15.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Telah dipatuhi	
	16.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Telah dipatuhi	
	17.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Telah dipatuhi	

TABEL 87 Penerapan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan	Penjelasan (apabila belum dipatuhi)
Aspek IV: Partisipasi Pemangku Kepentingan				
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan				
		18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Telah dipatuhi	
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Telah dipatuhi	
		20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Telah dipatuhi	
		21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Telah dipatuhi	
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Telah dipatuhi	
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Telah dipatuhi	
Aspek V: Keterbukaan Informasi				
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi				
		24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Telah dipatuhi	
		25. Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Telah dipatuhi	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk memberikan pengaruh terhadap pengelolaan usaha Perusahaan, dan juga forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta kinerja mereka kepada para Pemegang Saham.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang penyelenggaraannya wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

WEWENANG RUPS

RUPS memiliki wewenang, antara lain, untuk:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham;
2. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
4. Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Menetapkan auditor eksternal;
7. Menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta rencana kerja jangka panjang Perusahaan;
8. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan mata acara dalam setiap RUPS yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan, mengajukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan, terutama untuk tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan di muka dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mempersiapkan pemberitahuan dan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS, termasuk mata acara yang akan dibicarakan dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS DI 2018

Selama 2018, BFI Finance melaksanakan 1 kali RUPST dan 1 kali RUPSLB. RUPS Perusahaan telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS 2018

BFI Finance menyelenggarakan RUPS 2018 dengan melaksanakan tata cara penyelenggaraan berdasarkan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), sebagai berikut:

TABEL 88 Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

No.	Kegiatan	Pelaksanaan RUPST & RUPSLB 17 April 2018	Dasar Hukum
1	Pemberitahuan rencana dan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK No. Corp/SUD/L/II/18-0048 tanggal 28 Februari 2018, dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB), BEI, KSEI, PT Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL	Pasal 8 POJK 32
2	Pemberitahuan kepada Pemegang Saham, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> • Satu surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional; • Situs web BEI; dan • Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklan Pemberitahuan Rencana RUPS kepada Pemegang Saham di surat kabar <i>Kontan</i> pada 7 Maret 2018 • Pemberitahuan Rencana RUPS di situs web BEI pada 7 Maret 2018 • Pemberitahuan Rencana RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada 7 Maret 2018 	Pasal 10 ayat (1) dan (4) POJK 32
3	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Pemberitahuan kepada Pemegang Saham di surat kabar paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, dan BEI No. Corp/SJN/L/III/18-0068 tanggal 7 Maret 2018, dengan tembusan kepada IKNB dan CaMEL disertai Bukti Iklan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham	Pasal 10 ayat (8) POJK 32
4	Tanggal terakhir Daftar Pemegang Saham, pukul 16.00 WIB, satu hari sebelum tanggal Panggilan RUPS	Meminta kepada BAE (PT Sirca Datapro Perdana) rekap nama pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	Pasal 19 ayat (2) POJK 32

TABEL 88 Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

No.	Kegiatan	Pelaksanaan RUPST & RUPSLB 17 April 2018	Dasar Hukum
5	Pemanggilan RUPS, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> Satu surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran nasional; Situs web BEI; dan Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham di surat kabar <i>Kontan</i> pada 23 Maret 2018 Pemanggilan RUPS di situs web BEI pada 23 Maret 2018 Pemberitahuan Pemanggilan RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada 23 Maret 2018 	Pasal 13 ayat (3) POJK 32
6	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Pemanggilan kepada Pemegang Saham di surat kabar paling lambat dua hari kerja setelah pemanggilan RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, BEI, PT Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL No. Corp./Sjn/L/III/18-0082 tanggal 23 Maret 2018, disertai Bukti Iklan Pemberitahuan Pemanggilan kepada Pemegang Saham	Pasal 13 ayat (7) POJK 32
7	Pelaksanaan RUPS	Tanggal 17 April 2018 di Hotel The Dharmawangsa Jakarta, Jl. Brawijaya Raya No.26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia	
8	Menyampaikan Risalah RUPS kepada OJK paling lambat 30 hari setelah tanggal RUPS	Surat BFI Finance kepada OJK No. Corp./Sjn/L/IV/18-0108 tanggal 18 April 2018, dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB,BEI, KSEI, Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL	Pasal 32 dan 33 POJK 32
9	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> Satu surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran nasional; Situs web BEI; dan Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat dua hari kerja setelah tanggal RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman Risalah RUPST dan RUPSLB di surat kabar <i>Kontan</i> pada 19 April 2018 Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS di situs web BEI pada 19 April 2018 Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada 19 April 2018 	Pasal 34 ayat (2) POJK 32
10	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat, paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat	Surat BFI Finance kepada OJK No. Corp/SJN/L/IV/18-0109 tanggal 19 April 2018, tembusan kepada BEI, KSEI, PT Sirca Datapro Perdana, dan CaMEL dengan melampirkan bukti iklan pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat pada 19 April 2018	Pasal 34 ayat (7) POJK 32

Uraian Pelaksanaan dan Keputusan RUPS 2018

RUPST DAN RUPSLB 17 APRIL 2018

Pada Selasa, 17 April 2018, di Hotel Dharmawangsa, Ruang Bimasena, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan RUPST dan RUPSLB Perusahaan dan ringkasan risalahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan:

Dewan Komisaris

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Kusmayanto Kadiman | Presiden Komisaris |
| 2. Johannes Sutrisno | Komisaris Independen |
| 3. Alfonso Napitupulu | Komisaris Independen |
| 4. Emmy Yuhassarie | Komisaris Independen |
| 5. Sunata Tjiterosampurno | Komisaris |
| 6. Cornelius Henry Kho | Komisaris |

Direksi

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Francis Lay Sioe Ho | Presiden Direktur |
| 2. Sudjono | Direktur |
| 3. Andrew Adiwijanto | Direktur |
| 4. Sigit Hendra Gunawan | Direktur Independen |

Dewan Pengawas Syariah

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Asrori S. Karni | Ketua |
| 2. Helda Rahmi Sina | Anggota |

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sejumlah 13.245.774.030 saham atau 88,52% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perusahaan sebanyak 1.002.732.000 saham (Saham Treasuri);

- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sejumlah 13.245.774.030 saham atau 88,52% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perusahaan sebanyak 1.002.732.000 saham (Saham Treasuri);

Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perusahaan per 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPST dan RUPSLB untuk setiap mata acara, para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan (kecuali dalam Mata Acara Kelima RUPST tidak dilakukan sesi tanya-jawab karena hanya bersifat laporan), namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan pemungutan suara, kecuali dalam Mata Acara Kelima RUPST tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

V. Keputusan RUPST

Keputusan dalam Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan; dan
2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik “Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan” sesuai Lapornya Nomor 160/2. B008/FH.1/12.17 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2017.

Dasar pengambilan keputusan dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju – 13.245.774.030 (100%); Abstain – 0 (0%); Tidak Setuju – 0 (0%).

Keputusan dalam Mata Acara Kedua:

1. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp39,00 per lembar saham dari laba bersih Perusahaan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp16,00 per lembar saham, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp23,00 per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Desember 2017. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada 27 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perusahaan pada 18 Mei 2018;
2. Menyisihkan sebesar Rp13.574.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Sisa laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perusahaan; dan

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Dasar pengambilan keputusan dalam Mata Acara Kedua:

Suara: Setuju – 13.231.492.830 (99,892%); Abstain – 0 (0%); Tidak Setuju – 14.281.200 (0,108%).

Keputusan dalam Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

Dasar pengambilan keputusan dalam Mata Acara Ketiga:

Suara: Setuju – 13.181.492.830 (99,515%); Abstain – 14.281.200 (0,108%); Tidak Setuju – 50.000.000 (0,377%).

Keputusan dalam Mata Acara Keempat:

1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp344.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun buku 2018 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp2.882.000.000,00;

2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2018; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

Dasar pengambilan keputusan dalam Mata Acara Keempat:

Suara: Setuju – 13.231.492.830 (99,892%); Abstain – 0 (0%); Tidak Setuju – 14.281.200 (0,108%).

Keputusan dalam Mata Acara Kelima:

Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

Dasar pengambilan keputusan dalam Mata Acara Kelima:

Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

VI. Keputusan RUPSLB

Keputusan dalam Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perusahaan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan; dan
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Dasar pengambilan keputusan dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju – 12.618.740.680 (95,266%); Abstain – 0 (0%); Tidak Setuju – 627.033.350 (4,734%).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2017, maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

TABEL 89 Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Penyelenggaraan RUPS	17 April 2018
2.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan Bursa	18 April 2018
3.	Pengumuman di Bursa, Iklan Hasil RUPS, dan Jadwal Pembagian Dividen di surat kabar	19 April 2018
4.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 April 2018
5.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2018
6.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	27 April 2018
7.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	30 April 2018
8.	Recording date untuk Dividen Tunai	27 April 2018
9.	Pembayaran Dividen Tunai	18 Mei 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan per 27 April 2018, pukul 16.00 WIB.
 - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, Perusahaan akan membayar Dividen Tunai melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan Pemegang Saham Perusahaan akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan.
 - Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik) dan menginginkan pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat banknya serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham itu sendiri, dengan disertai fotokopi KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham dan fotokopi NPWP melalui surat yang bermaterai Rp6.000,00 yang sudah harus diterima selambatnya 27 April 2018 pukul 16.00 WIB, kepada BAE Perusahaan:
- PT Sirca Datapro Perdana
Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340
Tel.: (62-21) 390 0645, 390 5920.
- Dividen Tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat 27 April 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya sebagai berikut:
 - Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka asli Surat Keterangan Domisilinya dikirimkan kepada PT Sirca Datapro Perdana;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham; dan
- c. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, telah diterima oleh KSEI atau BAE selambatnya 27 April 2018, pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada para Pemegang Saham asing akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

KEPUTUSAN RUPS 2018 DAN REALISASINYA

Seluruh keputusan RUPS 2018, baik RUPST maupun RUPSLB pada 17 April 2018, telah direalisasikan sepenuhnya di 2018, sebagaimana dirangkum pada Tabel 90 dan 91 berikut.

TABEL 90 Realisasi RUPST 17 April 2018

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan	Y	-
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan" sesuai Lapo rannya Nomor 160/2.B008/FH.1/12.17 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2017	Y	-
Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp39,00 per lembar saham dari laba bersih Perusahaan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp16,00 per lembar saham, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp23,00 per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Desember 2017. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada 27 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perusahaan pada 18 Mei 2018	Y	-
Menyisihkan sebesar Rp13.574.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Y	-
Sisa laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perusahaan	Y	-

TABEL 90 Realisasi RUPST 17 April 2018

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan	Y	-
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya	Y	-
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp344.100.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun buku 2018 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp2.882.000.000,00	Y	-
Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2018	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi	Y	-
Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus	Y	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TABEL 91 Realisasi RUPSLB 17 April 2018

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perusahaan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan	Y	-
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal	Y	-

KEPUTUSAN RUPS 2017 DAN REALISASINYA

Seluruh keputusan RUPS 2017, baik RUPST dan RUPSLB pada 18 April 2017 maupun RUPSLB pada 25 Oktober 2017, telah direalisasikan sepenuhnya di 2017, sebagaimana dirangkum pada Tabel 92, 93 dan 94 berikut.

TABEL 92 Realisasi RUPST 18 April 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan	Y	-
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan" sesuai Laporrannya Nomor 098/1.B008/AUS.1/12.16 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2016	Y	-

TABEL 92 Realisasi RUPST 18 April 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp260,00 per lembar saham yang merupakan 48,7% dari laba bersih Perusahaan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp110,00 per lembar saham, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp150,00 per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 16 Desember 2016. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada 2 Mei 2017 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perusahaan pada 18 Mei 2017	Y	-
Menyisihkan sebesar Rp41.037.000.000,00 untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Y	-
Sisa laba bersih tahun buku 2016 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perusahaan	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan	Y	-
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya	Y	-
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp248.000.000,00 per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun buku 2017 atau meningkat 5% dari tahun sebelumnya serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 sejumlah Rp1.960.000.000,00	Y	-
Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2017	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi	Y	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TABEL 92 Realisasi RUPST 18 April 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan untuk modal kerja sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus	Y	-

TABEL 93 Realisasi RUPSLB 18 April 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perusahaan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, MTN, dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal	Y	-
Menerima dengan baik dan mengesahkan pengunduran diri Cornelius Henry Kho dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak ditutupnya Rapat ini	Y	-

TABEL 93 Realisasi RUPSLB 18 April 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui pengangkatan Cornellius Henry Kho sebagai Komisaris Perusahaan dan Andrew Adiwijanto sebagai Direktur Perusahaan masing-masing dengan masa jabatan efektif sejak tanggal kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sesuai dengan jabatan yang bersangkutan sampai dengan ditutupnya RUPST 2022. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Kusmayanto Kadiman Komisaris Independen Johannes Sutrisno Komisaris Independen Emmy Yuhassarie Komisaris Independen Alfonso Napitupulu Komisaris Dominic John Picone Komisaris Sunata Tjiterosampurno Komisaris Cornellius Henry Kho Direksi Presiden Direktur Francis Lay Sioe Ho Direktur Sudjono Direktur Sutadi Direktur Independen Sigit Hendra Gunawan Direktur Andrew Adiwijanto	Y	-
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian total remunerasi 2017 sehubungan dengan pengangkatan Cornellius Henry Kho sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat	Y	-

TABEL 93 Realisasi RUPSLB 18 April 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui perubahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>) Perusahaan dengan rasio 1:10 yaitu dari nilai nominal saham masing-masing Rp250,00 menjadi nilai nominal saham masing-masing Rp25,00	Y	-
Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai struktur permodalan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham	Y	-
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham tersebut	Y	-
Menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan memberikan <i>acquitt et de charge</i> atau pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjadi pihak dalam perkara hukum yang sudah diputus oleh pengadilan maupun permasalahan hukum lainnya yang dihadapi Perusahaan	Y	-
Menyetujui pemberian penggantian biaya (<i>indemnifikasi</i>) kepada Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang sedang menjabat maupun yang pernah menjabat, yang menjadi Pihak dalam perkara hukum yang sudah diputus oleh Pengadilan maupun permasalahan hukum lainnya yang dihadapi Perusahaan, sepanjang (i) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan itikad baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan (ii) keputusan atau tindakan yang telah diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tersebut sebagai yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan	Y	-
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama untuk menyusun kebijakan proteksi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat maupun yang menjabat kemudian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Y	-

TABEL 94 Realisasi RUPSLB 25 Oktober 2017

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan menambah satu pasal yaitu Pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Dewan Pengawas Syariah, sehingga Pasal 20, 21, 22, dan 23 yang lama berubah menjadi Pasal 21, 22, 23, dan 24	Y	-
Mengangkat Asrori S. Karni dan Helda Rahmi Sina masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, terhitung efektif sejak tanggal kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah menjadi sebagai berikut: Direksi Francis Lay Sioe Ho Presiden Direktur Sudjono Direktur Sutadi Direktur Andrew Adiwijanto Direktur Sigit Hendra Gunawan Direktur Independen Dewan Komisaris Kusmayanto Kadiman Presiden Komisaris Sunata Tjiterosampurno Komisaris Dominic John Picone Komisaris Cornellius Henry Kho Komisaris Johanes Sutrisno Komisaris Independen Alfonso Napitupulu Komisaris Independen Emmy Yuhassarie Komisaris Independen Dewan Pengawas Syariah Asrori S. Karni Ketua Helda Rahmi Sina Anggota	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu akta notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Y	-

DEWAN KOMISARIS

TUGAS POKOK

Dewan Komisaris dibentuk sebagai perwakilan dari pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan, serta memantau efektivitas penerapan praktik GCG di Perusahaan.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris berlangsung pada dua level, yakni:

1. Level *Performance*, yaitu pengawasan dengan memberikan nasihat kepada Direksi dan menyampaikan usulan dalam RUPS.
2. Level *Conformance*, yaitu pelaksanaan pengawasan pada tahap selanjutnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam melakukan fungsi pengawasan:

- Dewan Komisaris bertindak secara kolektif sebagai dewan dan tidak bertindak sendiri-sendiri.
- Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menjadi pelaksana tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi, kecuali dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- Pengawasan dilakukan terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil (*ex-post facto*) dan/atau keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive basis*).
- Pengawasan dilakukan dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, dan dapat juga melalui tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dewan Komisaris tidak hanya menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan

yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi juga mengawasi seluruh aspek bisnis dan aspek korporat Perusahaan.

- Dewan Komisaris memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas anggota Dewan Komisaris, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di Perusahaan lain, jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Komite di Perusahaan maupun perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta jumlah honorarium yang diterima dari Perusahaan serta informasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, jika anggota Dewan Komisaris tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh POJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan *juncto* POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kandidat diwajibkan untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK. Tetapi jika calon anggota Dewan Komisaris sebelumnya telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya POJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan pada saat mulai berlakunya POJK, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut masih dinyatakan berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jika masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah habis, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali namun tergantung pada penilaian kinerja yang diawasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi jika Komite akan mengesahkan anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya untuk diangkat kembali. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris akan mengusulkan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut dalam RUPS.

PERSYARATAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah mereka yang memenuhi persyaratan berikut, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal, dan yang pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
4. Memenuhi kriteria tambahan bagi Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen, sebagaimana diuraikan pada bagian Komisaris Independen dalam bab ini.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PROFIL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal dua orang, dan salah satunya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jika Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari dua orang anggota, jumlah Komisaris Independen minimal 30% atau sepertiga dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama periode 2018, jumlah anggota dan susunan Dewan Komisaris BFI Finance tidak mengalami perubahan. Susunan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat adalah berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan melalui Akta No. 06 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0027398 tanggal 19 Januari 2018.

Susunan Dewan Komisaris sejak 25 Oktober 2017 dapat dilihat di Tabel 95.

TABEL 95 Komposisi Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal & Dasar hukum Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Keputusan
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-473/BL/2011 tanggal 11 Agustus 2011
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-2020/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-2019/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-474/BL/2011 tanggal 11 Agustus 2011
5.	Dominic John Picone	Komisaris	Singapura	Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015	RUPS 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-283-NB.11-2015 tanggal 1 Juni 2015
6.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015	RUPS 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-282-NB.11-2015 tanggal 1 Juni 2015
7.	Cornellius Henry Kho	Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tanggal 18 April 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-263/NB.11/2017 tanggal 24 Mei 2017

Profil masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan (halaman 66-73).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk (Pedoman), diterbitkan pada 1 Desember 2015.

Pedoman tersebut bertujuan untuk dijadikan rujukan dan/atau pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai organ Perusahaan, meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman tersebut memuat kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman tersebut merupakan hasil kodifikasi berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG.

Terkait Dewan Komisaris, Pedoman mengatur:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Keanggotaan Dewan Komisaris
3. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Hak Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

9. Organ Pendukung Dewan Komisaris
10. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Etika Jabatan Dewan Komisaris mengatur prinsip-prinsip etika bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang berkaitan dengan aspek:

1. Keteladanan
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. Peluang Perusahaan
4. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
5. Benturan Kepentingan
6. Keuntungan Pribadi
7. Etika Berusaha dan Antikorupsi

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab pada hal-hal berikut ini:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan operasional, dengan pengecualian pada persetujuan atas usulan

kredit yang eksposurnya melampaui wewenang persetujuan kredit dari Direksi;

4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkatan Perusahaan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Komisaris dan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris:
 - Meninjau secara luas dan menyeluruh atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik;
 - Meninjau ulang masalah ekonomi makro dan keuangan;
 - Berkomunikasi dengan pemegang saham pengendali sehubungan dengan hal-hal yang melibatkan pemegang saham; dan
 - Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi.
2. Komisaris Independen:
 - Mengawasi dan memberikan nasihat atas pelaksanaan GCG;
 - Meninjau ulang dan menyampaikan rekomendasi tentang setiap usulan dari Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit;
 - Memberikan nasihat dalam masalah hukum;
 - Memberikan nasihat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - Menjaga hubungan baik dengan pihak regulator.

3. Komisaris:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan;
- Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian; dan
- Melakukan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi Perusahaan.

HAK DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris mempunyai hak untuk:

1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, dan transparan;
2. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/ atau anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris;
3. Memberhentikan sementara waktu Anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
4. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya (jika dianggap perlu) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan;
5. Menggunakan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan (jika dianggap perlu);
6. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
7. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purnajabatan; dan
8. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah mencerminkan keberagaman anggotanya, dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan juga keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam rangka memastikan Perusahaan berkinerja secara optimal.

TABEL 96 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kompetensi
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Pendidikan: Doctor of Philosophy dan Sarjana Teknik Fisika Pengalaman kerja: Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur, Rektor ITB, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Usia: 64 tahun
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	Pendidikan: Master of Business Administration (M.B.A.) dan Sarjana Ekonomi Manajemen Pengalaman kerja: Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usia: 67 tahun
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	Pendidikan: Sarjana Hukum Pengalaman kerja: Pengacara, Konsultan Hukum, Komisaris, Komisaris Independen, Direktur Utama Usia: 68 tahun
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	Pendidikan: Master of Law dan Sarjana Hukum Pengalaman kerja: Konsultan Hukum, Dosen, Komisaris, Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Usia: 68 tahun
5.	Dominic John Picone	Komisaris	Pendidikan: Bachelor's Degree in Laws dan Bachelor of Commerce (Honours-Finance) Pengalaman kerja: berbagai jabatan di bidang pembiayaan konsumen (<i>consumer finance</i>), <i>investment banking</i> , <i>investment services</i> , Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, Komisaris, Managing Director, Head of Financial Services Usia: 40 tahun
6.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Pendidikan: Master of Finance dan Bachelor of Business Administration Pengalaman kerja: Konsultan, Direktur, Managing Director, Komisaris, Presiden Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi Usia: 46 tahun
7.	Cornellius Henry Kho	Komisaris	Pendidikan: Sarjana Ekonomi Akuntansi Pengalaman kerja: Auditor, Pengawas Keuangan, Direktur, Sekretaris Perusahaan Usia: 52 tahun

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris BFI Finance tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan, kecuali Kusmayanto Kadiman (Presiden Komisaris), Dominic John Picone, dan Sunata Tjiterosampurno yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali. Sementara Cornelliuss Henry Kho (Komisaris) bukan merupakan Komisaris Independen karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perusahaan sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Komisaris Independen, yaitu bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan dalam waktu enam bulan sebelum menjabat sebagai Komisaris.

TABEL 97 Independensi Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kusmayanto Kadiman	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Johanes Sutrisno	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Alfonso Napitupulu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emmy Yuhassarie	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dominic John Picone	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Sunata Tjiterosampurno	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Cornelliuss Henry Kho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

TABEL 98 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Nama	Jabatan	BFI Finance	Perusahaan Lain
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Dominic John Picone	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Cornelliuss Henry Kho	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada

KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan.

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33), Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
- Tidak memiliki saham; baik langsung maupun tidak langsung; pada Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha; baik langsung maupun tidak langsung; yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat

kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Dalam hal Komisaris Independen menjabat di Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan, sebelum menjalani masa tunggu selama satu tahun.

Dari tujuh orang anggota Dewan Komisaris yang menjabat per 31 Desember 2018, tiga di antaranya merupakan Komisaris Independen. Ini berarti lebih dari 40% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, sesuai dengan ketentuan OJK.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Mengacu pada Pasal 25 POJK 33, masing-masing Komisaris Independen Perusahaan, yaitu Johannes Sutrisno, Alfonso Napitupulu dan Emmy Yuhassarie, telah memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen. Masing-masing dari mereka tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi perusahaan pembiayaan.

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

TABEL 99 Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Wakil Presiden Komisaris of PT Adaro Power Komisaris PT Tamaris Hidro Presiden Komisaris PT Setiabudi Investment Management Komisaris PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	Tidak ada
Alfonso Napitupulu	Komisaris (Independen)	Managing Partner Kantor Hukum Alfonso Napitupulu & Partners Presiden Direktur PT Nana Mandiri Dwikarya Komisaris Independen PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance) Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Emmy Yuhassarie	Komisaris (Independen)	Ketua Dewan Pengawas Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD)
Dominic John Picone	Komisaris	Managing Director dan Partner TPG Capital (S) Pte. Ltd., Singapura
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Managing Director Northstar Advisors Pte. Ltd. Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Cornellius Henry Kho	Komisaris	Tidak ada

Berdasarkan Pasal 24 POJK 33, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada empat emiten atau perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi

Perusahaan Pembiayaan (POJK 30), anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari tiga perusahaan lain. Hal ini tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2018 telah mematuhi ketentuan POJK 30 dan POJK 33 dimaksud.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas atau dua pertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan secara teratur dengan Direksi, dan jika diperlukan Rapat Dewan Komisaris diadakan setelah rapat gabungan, jika dianggap perlu oleh satu anggota Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau jika diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sepersepuluh dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat tersebut.

Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris resmi, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan tersebut dan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris resmi.

Pembuatan Risalah Rapat Dewan Komisaris

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan (*dissenting opinion*) anggota Dewan Komisaris (jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Di 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan 22 kali rapat, yang terdiri dari:

1. Rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 kali; dan
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihatnya kepada Direksi, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi guna membicarakan implementasi keputusan yang dibuat dalam rapat sebelumnya, kinerja keuangan, manajemen risiko dan hal-hal lain yang mungkin berdampak pada kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan.

Tanggal penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris di 2018 disajikan pada Tabel 100. Tanggal penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan selama 2018 disajikan pada Tabel 102.

TABEL 100 Jadwal dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Kusmayanto Kadiman	Johanes Sutrisno	Alfonso Napitupulu	Emmy Yuhassarie	Dominic John Picone	Sunata Tjiterosampurno	Cornellius Henry Kho
23 Januari 2018	√	√	√	√	√	√	√
19 Februari 2018	√	√	√	√	√	√	√
22 Maret 2018	√	√	√	√	√	√	√
17 April 2018	√	√	√	√	√	√	√
22 Mei 2018	√	√	√	√	√	√	√
27 Juni 2018	√	√	√	√	√	√	√
24 Juli 2018	√	√	√	√	√	√	√
21 Agustus 2018	√	√	√	√	√	√	√
25 September 2018	√	√	√	√	√	√	√
23 Oktober 2018	√	√	√	√	√	√	√
21 November 2018	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 101 Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda Rapat
23 Januari 2018	Pembahasan mengenai kinerja Direksi dan Komite-Komite sebagai evaluasi akhir tahun 2017, kondisi ekonomi makro dan industri <i>multifinance</i> pada umumnya, hal lain-lain
19 Februari 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Januari 2018, hal lain-lain
22 Maret 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 28 Februari 2018, tinjauan awal agenda RUPS 2018 dan draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, hal lain-lain
17 April 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan dan triwulan I dari Direksi dan Komite-Komite (per 31 Maret 2018), kondisi ekonomi makro dan industri <i>multifinance</i> pada umumnya selama triwulan I 2018, tinjauan akhir dan persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk RUPS 2018, hal lain-lain
22 Mei 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 30 April 2018, kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
27 Juni 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Mei 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain

TABEL 101 Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda Rapat
24 Juli 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan dan triwulan II dari Direksi dan Komite-Komite (per 30 Juni 2018), kondisi ekonomi makro dan industri <i>multifinance</i> pada umumnya selama triwulan II 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
21 Agustus 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Juli 2018, hal lain-lain
25 September 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Agustus 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
23 Oktober 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan dan triwulan III dari Direksi dan Komite-Komite (per 30 September 2018), kondisi ekonomi makro dan industri <i>multifinance</i> pada umumnya selama triwulan III 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
21 November 2018	Pembahasan mengenai kinerja bulanan Direksi dan Komite-Komite per 31 Oktober 2018, proyeksi bisnis hingga akhir November dan Desember 2018 serta 2019, hal lain-lain

TABEL 102 Jadwal dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Kusmayanto Kadiman	Johanes Sutrisno	Alfonso Napitupulu	Emmy Yuhassarie	Dominic John Picone	Sunata Tjiterosampurno	Cornellius Henry Kho
23 Januari 2018	√	√	√	√	√	√	√
19 Februari 2018	√	√	√	√	√	√	√
22 Maret 2018	√	√	√	√	√	√	√
17 April 2018	√	√	√	√	√	√	√
22 Mei 2018	√	√	√	√	√	√	√
27 Juni 2018	√	√	√	√	√	√	√
24 Juli 2018	√	√	√	√	√	√	√
21 Agustus 2018	√	√	√	√	√	√	√
25 September 2018	√	√	√	√	√	√	√
23 Oktober 2018	√	√	√	√	√	√	√
21 November 2018	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 103 Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Agenda Rapat
23 Januari 2018	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat per 21 November 2017, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Desember 2017, hal lain-lain
19 Februari 2018	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat per 23 Januari 2018, laporan dari Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Manajemen Risiko, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Januari 2018, hal lain-lain
22 Maret 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 19 Februari 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 28 Februari 2018, tinjauan awal agenda RUPS 2018, hal lain-lain
17 April 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 22 Maret 2018, laporan dari Ketua Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Maret 2018, tinjauan akhir agenda RUPS 2018, hal lain-lain
22 Mei 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 17 April 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 April 2018, kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
27 Juni 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 22 Mei 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Mei 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
24 Juli 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 27 Juni 2018, laporan dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 Juni 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
21 Agustus 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 24 Juli 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Juli 2018, hal lain-lain
25 September 2018	Pembahasan mengenai mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 21 Agustus 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Agustus 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
23 Oktober 2018	Pembahasan materi tertunda dari rapat sebelumnya per 25 September 2018, laporan dari Ketua Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, kinerja keuangan dan manajemen risiko per Q3/2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
21 November 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 23 Oktober 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Oktober 2018, proyeksi bisnis hingga akhir November dan Desember 2018, proyeksi bisnis di 2019, hal lain-lain

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pada 2018, Dewan Komisaris melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Menyelenggarakan 11 kali Rapat Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan 11 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menyetujui penunjukan KAP untuk tahun buku 2018;
4. Menyetujui rencana operasional Perusahaan 2018; dan
5. Menyetujui usulan Direksi atas anggaran 2018.

Selama 2018, Dewan Komisaris merekomendasikan, antara lain:

1. Usulan nominasi pejabat internal Perusahaan;
2. Usulan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Penetapan KAP;
4. Tindak lanjut rekomendasi KAP;
5. Usulan penggunaan laba tahun buku 2017;
6. Usulan mengenai hal-hal strategis terkait kegiatan bisnis Perusahaan;
7. Usulan mengenai penanganan kasus hukum yang berasal dari pemegang saham terdahulu; dan
8. Persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Umum

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan menjadi bagian tak terpisahkan yang dipertimbangkan dalam penyusunan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris setidaknya memuat hal berikut:

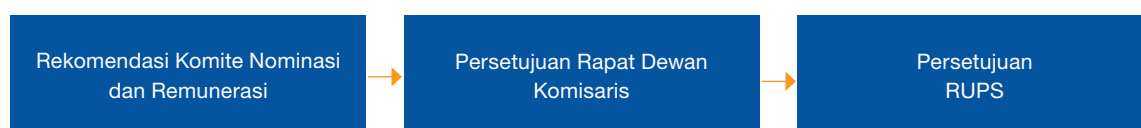
1. Tingkat tercapainya kuorum dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, dan rapat dengan komite-komite;
2. Kontribusi dalam proses pengawasan Perusahaan;
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perusahaan.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 ayat (10) Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS. Namun demikian, RUPS dapat memberikan kuasa pada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menyetujui jumlah remunerasi yang diusulkan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu pada kebijakan internal Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja Perusahaan.

GRAFIK 19: Mekanisme Remunerasi Dewan Komisaris



Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS. Mekanisme remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- Direksi, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan, mengajukan usulan untuk jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa remunerasi yang diusulkan oleh Direksi dengan kondisi pasar untuk industri yang relevan dengan ukuran dan bisnis yang sebanding.
- Dengan mempertimbangkan kinerja bisnis Perusahaan dan kontribusi anggota, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi pada Rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh RUPST, menyetujui jumlah remunerasi, dan menentukan distribusi remunerasi itu di antara anggota Dewan Komisaris sendiri. Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan selama 2018 terdiri dari:

- honorarium;
- tunjangan; dan
- tantiem.

RUPST 17 April 2018 telah menetapkan jumlah remunerasi Dewan Komisaris seluruhnya sebesar Rp344,1 juta per bulan, setelah dipotong pajak untuk tahun buku 2018, serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sejumlah Rp2,88 miliar. Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris pada 2018 adalah sebesar Rp15,74 miliar.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

BFI Finance memberikan program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris, untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perusahaan secara umum dan agar anggota Dewan Komisaris saling mengenal satu sama lain dan dapat bekerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi Dewan Komisaris. Orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Dewan Komisaris yang pertama kali dihadiri oleh anggota baru tersebut.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan mengalokasikan anggaran bagi anggota Dewan Komisaris untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui berbagai seminar dan pelatihan. Daftar pelatihan di 2018 yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris tercantum pada Tabel 104.

TABEL 104: Pelatihan dan Seminar untuk Meningkatkan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris				
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	7 Maret 2018	Seminar Nasional "Mengenali Debitur Pembiayaan di Tahun Politik"	Jakarta	APPI
Alfonso Napitupulu					
Emmy Yuhassarie					
Dominic John Picone	Komisaris	13-15 Maret 2018	TPG ASIA Investors Meeting 2018	Seoul, Korea Selatan	TPG
		23-24 Mei 2018	Goldman Sachs TechNet Conference – Asia Pacific 2018	Hong Kong	Goldman Sachs
Sunata Tjiterosampurno Cornellius Henry Kho	Komisaris	26 Juli 2018	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Pasar Modal"	Jakarta	APPI

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yang senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap.
6. Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas suatu hal, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tersebut kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direksi sehingga tercipta keseimbangan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan komunikasi korporasi melalui informasi satu pintu (*one-gate policy*) dapat tercapai.
7. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, konsisten dan lengkap.
8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan. Dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan setiap anggotanya, sehingga hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yakni Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap komite bertemu secara teratur atau jika diperlukan. Masing-masing komite terdiri atas Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan anggota komite lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Semua komite di bawah Dewan Komisaris di tahun 2018 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat masing-masing dengan baik.

Pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga komite tersebut dijelaskan dalam piagam masing-masing komite. Ketiga komite tersebut melapor kepada Dewan Komisaris. Atas biaya Perusahaan, setiap komite berhak untuk meminta saran dari pihak eksternal jika diperlukan. Penjelasan masing-masing komite di bawah Dewan Komisaris disajikan pada bagian-bagian selanjutnya dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 259-278).

DIREKSI

TUGAS POKOK

Direksi dibentuk sebagai organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam segala hal dan dalam segala kejadian.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Direksi diangkat oleh para pemegang saham dalam RUPS untuk masa jabatan dimulai sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan RUPST kelima, dan anggota Direksi dapat diberhentikan oleh para pemegang saham dalam RUPS setiap saat sebelum masa jabatan masing-masing berakhir.

Sebelum diangkat sebagai anggota Direksi, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh POJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan *juncto* POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kandidat diwajibkan untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Seluruh anggota Direksi saat ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jika masa jabatan anggota Direksi telah habis, pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan kembali, namun tergantung pada penilaian kinerja yang diawasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi jika Komite akan mengesahkan anggota

Direksi yang telah habis masa jabatannya untuk diangkat kembali. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris akan mengusulkan pengangkatan kembali anggota Direksi tersebut dalam RUPS.

PERSYARATAN BAGI ANGGOTA DIREKSI

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;

DIREKSI

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - g. Memenuhi persyaratan tambahan untuk Direktur Independen.
- d. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan manajemen yang strategis agar dapat mengembangkan Perusahaan menjadi lembaga keuangan yang sehat.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PROFIL ANGGOTA DIREKSI

Jumlah anggota Direksi minimal dua orang, dengan satu di antaranya diangkat menjadi Presiden Direktur. Paling kurang satu orang dari anggota Direksi dapat dipilih terlebih dulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham Perusahaan tersebut tercatat.

Selama periode 2018, susunan Direksi BFI Finance tidak mengalami perubahan. Susunan Direksi yang saat ini menjabat adalah berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan melalui Akta No. 06 tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0027398 tanggal 19 Januari 2018.

Selain hal-hal di atas, anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Memiliki pengetahuan yang cukup dan relevan mengenai jabatannya;
- b. Memiliki pemahaman atas hukum dan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan serta hukum dan peraturan lain yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan;
- c. Memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pembiayaan dan bidang lain yang relevan dengan posisinya; dan

Susunan Direksi sejak 25 Oktober 2017 dapat dilihat di Tabel 105.

TABEL 105 Komposisi Direksi

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Keputusan
1	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-2021/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
2	Sudjono	Direktur Keuangan	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014	RUPS 2019	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-1294/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014

TABEL 105 Komposisi Direksi

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan
3	Sutadi	Direktur Bisnis	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014	RUPS 2019	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-1292/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014
4	Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tanggal 18 April 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-465/NB.11/2017 tanggal 14 Agustus 2017
5	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-218/NB.11/2016 tanggal 29 Maret 2016

Profil masing-masing anggota Direksi disajikan pada bagian Profil Direksi dalam bab Profil Perusahaan (halaman 70-72).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Dewan Komisaris dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 226).

Terkait Direksi, Pedoman tersebut mengatur:

1. Fungsi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Syarat Menjadi Anggota Direksi
4. Etika Jabatan Direksi
5. Tugas dan Kewajiban Direksi
6. Wewenang Direksi
7. Hak Direksi
8. Rapat Direksi
9. Evaluasi Kinerja Direksi
10. Organ Pendukung Direksi

ETIKA JABATAN DIREKSI

Etika Jabatan Direksi mengatur prinsip-prinsip etika bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang berkaitan dengan aspek:

1. Keteladanan
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. Peluang Perusahaan
4. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
5. Benturan Kepentingan
6. Keuntungan Pribadi
7. Etika Berusaha dan Antikorupsi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Tugas dan tanggung jawab utama Direksi adalah menjaga aset Perusahaan dan memberikan imbal balik yang pantas atas investasi para

pemegang saham, juga sambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Tanggung jawab ini meliputi:

1. Mengembangkan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Perusahaan, serta rencana strategis yang dikonsolidasikan dalam anggaran bisnis;
2. Membangun struktur organisasi yang kuat dan dengan jelas menentukan fungsi-fungsi dari setiap unit kerja dan mengelola sumber daya manusia secara efektif;
3. Membentuk suatu sistem bagi mekanisme kontrol internal dan manajemen risiko yang memastikan implementasi fungsi audit internal di seluruh jajaran manajemen, yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur; dan
4. Mengelola kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan.

Tugas Khusus

Secara khusus, tugas dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Terkait etika berusaha dan antikorupsi, anggota Direksi:
 - a. Dilarang untuk menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dan bernilai dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.
 - b. Wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS.
 - c. Wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Terkait sistem pengendalian internal dan audit internal, anggota Direksi wajib:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perusahaan;
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
 - d. Melaksanakan sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan;
 - e. Melaksanakan monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan segala temuan penyimpangan dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - f. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk masing-masing butir di atas, sesuai kebutuhan Perusahaan;
 - g. Membentuk Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan organisasi, serta mendeteksi dan mencegah praktik korupsi dan kolusi;

- h. Memastikan sistem pengendalian internal yang efektif, dengan Presiden Direktur secara struktural dibantu oleh seluruh Pejabat Struktural sampai dengan tingkat Kepala Departemen/Unit;
 - i. Menetapkan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi Unit Audit Internal sesuai dengan Keputusan Direksi; dan
 - j. Mendorong terciptanya lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - filosofi dan gaya manajemen;
 - cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab;
 - pengorganisasian dan pengembangan SDM; dan
 - perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Terkait aspek keterbukaan dan kerahasiaan informasi, anggota Direksi wajib:
- a. Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;
 - b. Memastikan informasi mengenai Perusahaan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap;
 - c. Mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG;
 - d. Menyampaikan rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris);
 - e. Tetap merahasiakan informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok dalam menjaga kerahasiaan informasi.
4. Terkait strategi dan rencana kerja, anggota Direksi wajib:
- a. Mempersiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan;
 - b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahan;
 - d. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai;
 - e. Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang; dan
 - f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.
5. Terkait manajemen risiko, Direksi wajib mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten. Sistem manajemen risiko yang dikembangkan terdiri dari tahapan berikut:
- a. Identifikasi Risiko
 - b. Pengukuran Risiko
 - c. Penyusunan Profil Risiko
 - d. Penanganan Risiko
 - e. Pemantauan Risiko
 - f. Evaluasi Risiko
 - g. Pelaporan dan Pengungkapan

6. Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, Direksi wajib memastikan terjaminnya hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan semua pemangku kepentingannya, serta memastikan Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya.
7. Direksi menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi disajikan pada Tabel 106.

TABEL 106 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Nama dan Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Francis Lay Sioe Ho Presiden Direktur	Sebagai Chief Executive Officer (CEO), beliau merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam Perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan target bisnis. Bersama anggota Direksi lainnya, beliau memimpin formulasi dan implementasi tujuan strategis dan rencana bisnis Perusahaan. Beliau menerima laporan langsung dari seluruh Direktur dan pimpinan dari unit-unit kerja, yang terdiri dari Information Technology (IT) Head, dan Channel Head yang menangani segmen Digital Business dan Direct Marketing. Beliau juga mengawasi fungsi Kepatuhan (Compliance), Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Project Management Office (PMO).
Sudjono Direktur Keuangan	Sebagai Chief Financial Officer (CFO), beliau bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang diterapkan. Beliau juga bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pendanaan; termasuk penggalangan dana untuk mendukung seluruh aktivitas pembiayaan Perusahaan; menjaga kecukupan posisi kas Perusahaan dan manajemen risiko yang memadai dalam keseluruhan aktivitas Treasury & Finance, dan memegang jabatan rangkap sebagai Sekretaris Perusahaan. Unit-unit kerja di bawah pengawasan beliau terdiri dari Financial Control & Reporting, Treasury & Finance, Budgeting & Performance Monitoring, Corporate Secretariat, Hubungan Investor (Investor Relations), dan Corporate Communication.
Sutadi Direktur Bisnis	Sebagai Chief Marketing Officer (CMO), beliau bertanggung jawab merumuskan strategi dan rencana kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis tahunan, menyusun rencana anggaran tahunan untuk bisnis pembiayaan yang meliputi segmen produk untuk pelanggan ritel (kendaraan bermotor roda empat baru dan bekas, roda dua bekas, properti) dan produk komersial untuk pelanggan korporasi (alat berat dan mesin). Beliau bekerja sama dengan Divisi Risiko Perusahaan (<i>Enterprise Risk</i>) dalam mengelola tingkat risiko setiap segmen produk ritel dan korporasi untuk mendukung pencapaian target profitabilitas. Unit-unit kerja di bawah pengawasan beliau, antara lain, Product Management & Development untuk Kendaraan Roda Empat dan Dua, Alat Berat dan Mesin, Property-Backed Financing (PBF), Channel Acquisition, Telemarketing, dan Business Development.
Andrew Adiwijanto Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Sebagai Chief Operating Officer (COO), beliau bertanggung jawab memastikan penyelarasan fungsi-fungsi dalam organisasi agar operasional Perusahaan berjalan dengan baik dan mematuhi kebijakan internal. Beliau juga bertanggung jawab memantau pengembangan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), serta menstandarisasikan pelayanan pelanggan demi tercapainya tingkat kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Beliau menerima laporan langsung dari Human Capital Management Head dan Network Development & Management Head.

TABEL 106 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Nama dan Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Sigit Hendra Gunawan Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Sebagai Chief Risk Officer (CRO), beliau bertanggung jawab mengawasi manajemen risiko di seluruh Perusahaan, yang meliputi risiko-risiko dari sisi kredit/pembiayaan, likuiditas dan pendanaan, operasional, hukum dan peraturan, strategi/bisnis, serta reputasi. Tugas utamanya adalah meninjau ulang dan menyetujui risiko bisnis yang diajukan, implementasi dan pemantauan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, manajemen operasional kredit untuk mendukung tujuan bisnis, dan menjaga Sistem Manajemen Informasi (MIS) yang komprehensif dan prasarana analitis. Beliau bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Unit-unit kerja di bawah pengawasan beliau, antara lain, Collection & Recovery (termasuk Legal & Litigation), Credit Operations, dan Risk Portfolio & Policy.

WEWENANG DAN HAK DIREKSI

Direksi memiliki wewenang berikut dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional:

1. Melaksanakan pengembangan usaha;
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk pengangkatan, mutasi, suksesi dan pemberhentian, penetapan gaji, imbalan pascakerja dan jaminan hari tua, serta penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan; dan
5. Menetapkan keputusan strategis dan operasional yang mengandung risiko dan ketidakpastian.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional, Direksi juga memiliki hak-hak berikut:

1. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Perusahaan sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Setiap anggota Direksi berhak melakukan pembelaan dalam RUPS jika RUPS sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi.
3. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.
4. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
5. Anggota Direksi berhak memperoleh gaji dan/atau tunjangan.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi saat ini telah mencerminkan keberagaman anggotanya, dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan juga keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi yang mendukung Perusahaan untuk berkinerja secara optimal. Kondisi keberagaman dari anggota Direksi telah terpenuhi secara implisit dengan terpenuhinya persyaratan sebagai anggota Direksi, yang salah satunya adalah memiliki keahlian dalam bidang-bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

TABEL 107 Keberagaman Komposisi Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kompetensi
1	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Pendidikan: Master of Business Management (M.B.M.), Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Pengalaman kerja: Presiden Direktur, Direktur dan Pendiri Perusahaan, Credit Manager, Treasury Officer, Executive Officer Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) di Singapura Usia: 70 tahun
2	Sudjono	Direktur Keuangan	Pendidikan: Enterprise Risk Manager (ERM™), Master of Business Administration (M.B.A.), Sarjana Ekonomi Akuntansi Pengalaman kerja: Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Auditor Senior Usia: 48 tahun
3	Sutadi	Direktur Bisnis	Pendidikan: Sarjana Teknik Industri Pengalaman kerja: Kepala Divisi (Division Head), Pimpinan Wilayah (Regional Manager), Pimpinan Cabang (Branch Manager), Sales Executive, Collection & Credit Analyst Officer Usia: 44 tahun
4	Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Pendidikan: Master of Business Administration (M.B.A.), Sarjana Teknik Elektro Pengalaman kerja: Marketing Officer, Pimpinan Cabang (Branch Manager) dan Pimpinan Wilayah (Regional Manager) di berbagai daerah di Indonesia, Kepala Departemen (Department Head) dan Kepala Divisi (Division Head) berbagai bagian di kantor pusat, Komite Nominasi dan Remunerasi Usia: 50 tahun
5	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Pendidikan: Certified Business Management, Certified Business Management-Operation, Sarjana Teknik Industri Pengalaman kerja: Direktur, Head of Enterprise Risk, Kepala Divisi Kredit, Deputy Director - Head of Credit & Collection, Account Management Department Head, Credit Analyst & Risk Department Head (Fleet Division) Usia: 50 tahun

INDEPENDENSI DIREKSI

Semua anggota Direksi BFI Finance tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan.

TABEL 108 Independensi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Francis Lay Sioe Ho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sudjono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sutadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andrew Adiwijanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sigit Hendra Gunawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

TABEL 109 Kepemilikan Saham Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Nama	Jabatan	BFI Finance	Perusahaan Lain
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Sudjono	Direktur Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
Sutadi	Direktur Bisnis	Tidak ada	Tidak ada
Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Tidak ada	Tidak ada

DIREKTUR INDEPENDEN

Mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang antara lain menetapkan bahwa Perusahaan harus mengangkat Direktur yang Tidak Terafiliasi, dan sesuai dengan perubahan peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014), di mana istilah 'Direktur Tidak Terafiliasi' digantikan dengan istilah 'Direktur Independen', Perusahaan telah mengangkat Direktur Independen yaitu Sigit Hendra Gunawan.

Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagai anggota Direksi, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan paling kurang selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur pada perusahaan lain; dan
- Tidak menjadi Orang Dalam pada Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Masa jabatan Direktur Independen adalah paling banyak dua periode berturut-turut berdasarkan Surat Edaran BEI No. SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat.

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan Pasal 9 POJK 30, anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain, kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga perusahaan lain, kecuali anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 6 POJK 33, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada satu emiten atau perusahaan publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi Perusahaan per 31 Desember 2018 telah mematuhi ketentuan POJK 30 dan POJK 33 dimaksud.

TABEL 110 Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Tidak ada
Sudjono	Direktur Keuangan	Tidak ada
Sutadi	Direktur Bisnis	Tidak ada
Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	Tidak ada
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Tidak ada

RAPAT DIREKSI

Kebijakan mengenai Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi (*teleconference*) atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak memberikan kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut bersifat mutlak. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pejabat satu level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Pembuatan Risalah Rapat Direksi

Risalah Rapat Direksi dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan dalam risalah rapat tersebut wajib dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (jika ada). Risalah Rapat Direksi dapat dibuat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, termasuk menyimpan dan mendistribusikan kepada peserta rapat. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Di 2018, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 23 kali, terdiri dari:

1. Rapat Direksi sebanyak 12 kali; dan
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali.

Tanggal penyelenggaraan Rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Direksi di 2018 disajikan pada Tabel 111.

TABEL 111 Jadwal dan Kehadiran Rapat Direksi

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Sudjono	Sutadi	Andrew Adiwijanto	Sigit Hendra Gunawan
23 Januari 2018	√	√	√	√	√
19 Februari 2018	√	√	√	√	√
22 Maret 2018	√	√	√	√	√
17 April 2018	√	√	√	√	√
22 Mei 2018	√	√	√	√	√
27 Juni 2018	√	√	√	√	√
24 Juli 2018	√	√	√	√	√
21 Agustus 2018	√	√	√	√	√
25 September 2018	√	√	√	√	√
23 Oktober 2018	√	√	√	√	√
21 November 2018	√	√	√	√	√
12 Desember 2018	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	12	12	12	12	12
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 112 Agenda Rapat Direksi

Tanggal	Agenda Rapat
23 Januari 2018	Pembahasan dan evaluasi mengenai kinerja keuangan dan bisnis di 2017, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Desember 2017, prediksi makroekonomi dan industri multifinance di 2019 pada umumnya, hal lain-lain
19 Februari 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Januari 2018, hal lain-lain
22 Maret 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 19 Februari 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 28 Februari 2018, tinjauan awal agenda RUPS 2018 dan draft Laporan Direksi, hal lain-lain
17 April 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 22 Maret 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per triwulan I 2018, tinjauan akhir dan persetujuan untuk agenda dan Laporan Direksi untuk RUPS 2018, hal lain-lain
22 Mei 2018	Pembahasan mengenai kinerja cabang baru yang dibuka selama 2017, kinerja bisnis ritel dan analisa produk ritel, perkembangan pembiayaan properti (PBF), kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 April 2018, kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
27 Juni 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Mei 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
24 Juli 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan bisnis triwulan II 2018, laporan keuangan dan manajemen risiko per 30 Juni 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
21 Agustus 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Juli 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
25 September 2018	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya per 21 Agustus 2018, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Agustus 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain

TABEL 112 Agenda Rapat Direksi

Tanggal	Agenda Rapat
23 Oktober 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan bisnis triwulan III 2018, laporan keuangan dan manajemen risiko per 30 September 2018, perkembangan kasus hukum dari pemegang saham terdahulu, hal lain-lain
21 November 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan bisnis, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Oktober 2018, proyeksi bisnis hingga akhir November dan Desember 2018, proyeksi bisnis di 2019, hal lain-lain
12 Desember 2018	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 November 2018, hal lain-lain

Sebagaimana tercantum pada Tabel 111, Direksi telah memenuhi Pasal 16 ayat (2) POJK 30 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah Rapat Direksi dalam periode satu tahun.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Secara rutin, Direksi mengadakan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Di 2018, diselenggarakan 11 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Tanggal penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama 2018 disajikan pada Tabel 113.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada bagian Dewan Komisaris dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 236-237).

TABEL 113 Jadwal dan Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Sudjono	Sutadi	Andrew Adiwijanto	Sigit Hendra Gunawan
23 Januari 2018	√	√	√	√	√
19 Februari 2018	√	√	√	√	√
22 Maret 2018	√	√	√	√	√
17 April 2018	√	√	√	√	√
22 Mei 2018	√	√	√	√	√
27 Juni 2018	√	√	√	√	√
24 Juli 2018	√	√	√	√	√
21 Agustus 2018	√	√	√	√	√
25 September 2018	√	√	√	√	√
23 Oktober 2018	√	√	√	√	√
21 November 2018	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	11	11
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	100%

EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kebijakan Umum

Kinerja Direksi beserta anggotanya dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual terhadap dua penilaian, yaitu penilaian kolektif berdasarkan pencapaian anggaran perusahaan dan penilaian individu berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing Direktur, menjadi bagian tak terpisahkan yang dipertimbangkan dalam penyusunan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan, khususnya bagi Pemegang Saham, untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi dituangkan dalam KPI. Kriteria kinerja Direksi secara kolektif maupun individu yang berdasarkan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lain yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi diajukan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk disetujui. KPI Direksi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Kontribusi dalam aktivitas bisnis Perusahaan;
2. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
3. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;
5. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan; dan
6. Pencapaian kinerja sesuai target individual yang telah ditetapkan.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris yang diberikan kuasa berdasarkan RUPST. Remunerasi Direksi ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya.

RUPST 17 April 2018 menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

Remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu pada kebijakan internal Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja Perusahaan. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

GRAFIK 20 Mekanisme Remunerasi Direksi

Mekanisme remunerasi Direksi ditetapkan sebagai berikut:

- Direksi, dengan mempertimbangkan posisi keuangan Perusahaan, mengajukan usulan jumlah remunerasi bagi Direksi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mempelajari usulan remunerasi bagi Direksi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kondisi keuangan Perusahaan dan perbandingan dengan industri yang relevan dengan ukuran dan bisnis yang sebanding.
- Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan dalam RUPS.

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi terdiri dari:

- gaji;
- tunjangan;
- fasilitas; dan
- tantiem/insentif kinerja.

Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan Direksi untuk 2018 adalah sebesar Rp44,33 miliar.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU

BFI Finance memberikan program orientasi bagi anggota baru Direksi, untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perusahaan secara umum dan agar anggota Direksi saling mengenal satu sama lain dan dapat bekerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Orientasi bagi anggota baru Direksi dilaksanakan dalam Rapat Direksi yang pertama kali dihadiri oleh anggota baru tersebut.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Perusahaan mengalokasikan anggaran bagi anggota Direksi untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui berbagai seminar dan pelatihan. Daftar pelatihan di 2018 yang diikuti anggota Direksi tercantum pada Tabel 114.

TABEL 114 Pelatihan dan Seminar untuk Meningkatkan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	8 Mei 2018	Seminar Nasional “Perusahaan Pembiayaan di Mata Perbankan”	Jakarta	APPI
		15 November 2018	Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019”		
Sudjono	Direktur Keuangan	8 Mei 2018	Seminar Nasional “Perusahaan Pembiayaan di Mata Perbankan”	Jakarta	APPI
		15 November 2018	Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019”		
Sutadi	Direktur Bisnis	26 Juli 2018	Seminar Nasional “Industri Pembiayaan di Pasar Modal”	Jakarta	APPI
		15 November 2018	Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019”		
Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	26 Juli 2018	Seminar Nasional “Industri Pembiayaan di Pasar Modal”	Jakarta	APPI
		15 November 2018	Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019”		
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	26 Juli 2018	Seminar Nasional “Industri Pembiayaan di Pasar Modal”	Jakarta	APPI
		15 November 2018	Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019”		

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga akhir 2018, seluruh organ yang dibawah Direksi berbentuk divisi, departemen, atau unit kerja. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan usaha dan kapasitas internalnya, Perusahaan belum memandang kebutuhan yang mendesak bagi Direksi untuk membentuk suatu komite di bawahnya. Sementara itu, penilaian kinerja dari setiap divisi, departemen, dan unit kerja dilakukan dengan menggunakan pencapaian KPI sebagai kriteria penilaiannya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BFI Finance menjalankan usaha pembiayaan syariah melalui terbentuknya Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Langkah ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk mulai memasuki segmen pembiayaan berbasis syariah di Indonesia, sebagaimana diatur oleh OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai bentuk kepatuhan terkait bisnis yang dijalankan UUS, pada 2017 Perusahaan membentuk Dewan Pengawas Syariah.

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah di BFI Finance didasarkan pada Keputusan RUPSLB 25 Oktober 2017. Komposisi Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2018 adalah:

1. Asrori S. Karni (Ketua)
2. Helda Rahmi Sina (Anggota)

Profil kedua anggota Dewan Pengawas Syariah disajikan pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah dalam bab Profil Perusahaan, pada halaman 73.

Kedua anggota Dewan Pengawas Syariah BFI Finance telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Surat keputusan dari Anggota Dewan Komisiner OJK atas kelulusan *fit and proper test* tersebut telah disampaikan ke Perusahaan pada Januari 2018.

TABEL 115 Komposisi Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan
1	Asrori S. Karni	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-104/NB.22/2017 tanggal 27 Desember 2017
2	Helda Rahmi Sina	Anggota	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017	RUPS 2022	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-105/NB.22/2017 tanggal 27 Desember 2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut:

1. Menjadi perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perusahaan;
2. Mengawasi kegiatan usaha Cabang Perwakilan Syariah Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menjadi penasihat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan UUS, dan Pimpinan Cabang Perwakilan Syariah Perusahaan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan
4. Menjadi mediator antara Perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional dalam menyampaikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perusahaan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Semua anggota Dewan Pengawas Syariah BFI Finance tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan.

TABEL 116 Independensi Dewan Pengawas Syariah

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Asrori S. Karni	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Helda Rahmi Sina	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Pasal 35 POJK 30, anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama, namun diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah dari lebih dari empat lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan per 31 Desember 2018 telah mematuhi ketentuan POJK 30 dimaksud.

TABEL 117 Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Asrori S. Karni	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dosen Program Studi Perbankan Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Wakil Ketua Bidang Hukum (Qanuniah) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Helda Rahmi Sina	Anggota	Kepala Divisi Pelatihan dan Konsultasi Keuangan Syariah, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Pasal 40 dari Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK 30), Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit enam kali dalam setahun.

Di 2018, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak enam kali. Tanggal penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah dan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat-rapat tersebut di 2018 disajikan pada Tabel 118, sementara agenda rapat-rapat tersebut dicantumkan pada Tabel 119.

TABEL 118 Jadwal dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tanggal Rapat	Asrori S. Karni	Helda Rahmi Sina
6 Maret 2018	√	√
16 Mei 2018	√	√
17 Juli 2018	√	√
18 Oktober 2018	√	√
21 November 2018	√	√
27 Desember 2018	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	6	6
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%

TABEL 119 Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tanggal	Agenda Rapat
6 Maret 2018	Mekanisme Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada produk <i>Refinancing</i> Syariah Rencana presentasi ulang Akad IMBT ke OJK <i>Update</i> perkembangan kegiatan Unit Usaha Syariah BFI Finance Persetujuan dokumen (Akad, Struktur, Pedoman, dan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS))
16 Mei 2018	<i>Update</i> perkembangan kegiatan Unit Usaha Syariah BFI Finance Skema proses serah terima barang pada Akad Murabahah IPPS produk baru (pembiayaan pendidikan, kesehatan, pernikahan)
17 Juli 2018	Permintaan persetujuan IPPS <i>My Hajat</i> Permintaan persetujuan IPPS <i>My Ta'lim</i> Penandatanganan atas dokumen yang telah disetujui Hal-hal lain yang memerlukan opini Dewan Pengawas Syariah
18 Oktober 2018	<i>Update</i> perkembangan kegiatan Unit Usaha Syariah BFI Finance Tinjauan dokumen Akad Murabahah Hal-hal lain yang memerlukan opini Dewan Pengawas Syariah
21 November 2018	Tinjauan dokumen Akad Murabahah Hal-hal lain yang memerlukan opini Dewan Pengawas Syariah Penyerahan Sertifikat Workshop Annual Meeting 2018
27 Desember 2018	Penandatanganan persetujuan untuk dokumen Akad Murabahah dan Ijarah Multijasa

PROGRAM PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Untuk meningkatkan kompetensi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendorong keikutsertaan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam berbagai program pelatihan dan seminar secara teratur.

Di 2018, daftar program pelatihan dan seminar yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan tercantum dalam Tabel 120.

TABEL 120 Pelatihan dan Seminar untuk Meningkatkan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Asrori S. Karni	Ketua Dewan Pengawas Syariah	26 Juli 2018	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Pasar Modal"	Jakarta	APPI
		3 Oktober 2018	Pra-Ijtima' Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 Bidang Pembiayaan, Modal Ventura, dan Pegadaian Syariah	Jakarta	Dewan Syariah Nasional - MUI
		8 November 2018	Ijtima' Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia 2018		
Helda Rahmi Sina	Anggota	26 Juli 2018	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Pasar Modal"	Jakarta	APPI
		3 Oktober 2018	Pra-Ijtima' Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 Bidang Pembiayaan, Modal Ventura, dan Pegadaian Syariah	Jakarta	Dewan Syariah Nasional - MUI
		8 November 2018	Ijtima' Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia 2018		
		11 Desember 2018	Lokakarya "Sustainable Finance"	Jakarta	LPPI
		13 Desember 2018	The 4 th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC)	Surabaya	Bank Indonesia

KOMITE AUDIT

DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

Komite Audit dibentuk oleh Perusahaan pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Ref. No. 315/BEJ/06/2000 tanggal 30 Juni 2000, dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK 55).

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan pengelolaan Perusahaan, sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan serta prinsip-prinsip GCG, memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris atau sesuai penugasan Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada pedoman kerja yang dirangkum dalam Piagam Komite Audit. Ini memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berlangsung secara konsisten, transparan, dan independen, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Audit ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/I/2016-01 tanggal 26 Januari 2016, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 55.

Piagam Komite Audit telah dipublikasikan di situs web Perusahaan dan mengatur, antara lain: tugas dan tanggung jawab, wewenang, jumlah anggota, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas, rapat, serta masa jabatan anggota Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan atau pihak otoritas lainnya, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Menelaah ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko dari Perusahaan;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perusahaan.

WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Komite Manajemen Risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diperlukan; dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

JUMLAH ANGGOTA, KOMPOSISI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Komite Audit paling kurang terdiri dari tiga orang, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Perusahaan. Per akhir 2018, Komite Audit terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 orang sebagai anggota yang merupakan pihak luar Perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Komite Audit, persyaratan sebagai anggota Komite Audit Perusahaan adalah:

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain pada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

- Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan;
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
- Salah satu anggota Komite Audit wajib berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Direksi atau Ketua Komite Audit dapat mengusulkan calon dari luar Dewan Komisaris Perusahaan untuk dinominasikan sebagai anggota Komite Audit. Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan wawancara dan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon. Setelah evaluasi, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan anggota Komite Audit. Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan memberitahukan Direksi untuk menerbitkan surat pengangkatan bagi calon yang telah disetujui.

GRAFIK 21 Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit



SUSUNAN KOMITE AUDIT

Susunan Komite Audit Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- **Ketua:** Emmy Yuhassarie
(Komisaris Independen)
- **Anggota:**
 - Friso Palilingan
 - Edy Sugito

Susunan anggota Komite Audit ini dikukuhkan dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Juni 2016.

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil masing-masing anggota Komite Audit disajikan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 74).

Latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada Tabel 121.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit yang menjabat per 31 Desember 2018 dicantumkan pada Tabel 121.

TABEL 121 Profil dan Masa Jabatan Komite Audit

Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan dan Keahlian	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit	Hukum, Konsultan Hukum	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Friso Palilingan	Anggota	Audit, Manajemen, Akuntansi	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Edy Sugito	Anggota	Audit, Akuntansi, Pasar Modal	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, seluruh anggota Komite telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Independensi masing-masing anggota Komite Audit dijelaskan dalam Tabel 122.

TABEL 122 Independensi Komite Audit

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Emmy Yuhassarie	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Friso Palilingan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Edy Sugito	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

KEBIJAKAN DAN REMUNERASI UNTUK KOMITE AUDIT

Komite Nominasi dan Remunerasi membuat rekomendasi pada Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Komite Audit, berdasarkan kebijakan Perusahaan dan mempertimbangkan peninjauan pasar atas remunerasi Komite Audit. Remunerasi Komite Audit terdiri atas honorarium saja. Anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota manajemen senior dari pemegang saham pengendali tidak berhak atas remunerasi tambahan sebagai anggota Komite Audit.

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit mengatur tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas Komite Audit sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan sistem pengendalian internal Perusahaan, Komite Audit melakukan pertemuan berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang, serta melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan.
2. Dalam hubungannya dengan penelaahan atas risiko yang terkait dengan risiko usaha Perusahaan, Komite Audit melakukan pembahasan dengan Komite Manajemen Risiko atas pengelolaan risiko yang telah dilakukan manajemen risiko Perusahaan.
3. Komite Audit memberikan pertanggungjawaban tahunan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya menjelang Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sejalan dengan itu Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya.
4. Komite Audit bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi Komite Audit serta penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*). Risalah rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2018, Komite Audit melakukan empat kali rapat. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris. Jadwal rapat dan kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat disajikan pada Tabel 123, sementara agenda rapat Komite Audit 2018 disajikan pada Tabel 124.

TABEL 123 Jadwal dan Kehadiran Rapat Komite Audit

Tanggal Rapat	Emmy Yuhassarie	Friso Palilingan	Edy Sugito
19 Februari 2018	√	√	√
17 April 2018	√	√	√
24 Juli 2018	√	√	√
23 Oktober 2018	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	4	4	4
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%

TABEL 124 Agenda Rapat Komite Audit

Tanggal	Agenda Rapat
19 Februari 2018	Pembahasan mengenai presentasi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan mengenai draft Laporan Audit per 31 Desember 2017 dan laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal
17 April 2018	Pembahasan mengenai tinjauan draft Laporan Keuangan per 31 Maret 2018, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan hal lain-lain
24 Juli 2018	Pembahasan mengenai tinjauan draft Laporan Keuangan per 30 Juni 2018, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan presentasi rencana kerja audit tahunan 2018 oleh BDO Tanubrata
23 Oktober 2018	Pembahasan mengenai tinjauan draft Laporan Keuangan per 30 September 2018, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan hal lain-lain

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Komite Audit wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan, serta laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris. Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Audit dapat menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT 2018

Program Kerja Komite Audit 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat Komite Audit setiap tiga bulan sekali;
2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemegang saham. Komite ini bertanggung jawab untuk meninjau ulang risiko utama Perusahaan yang terkandung dalam register risiko Perusahaan dan memastikan bahwa semua risiko baik yang baru maupun yang timbul dievaluasi sewajarnya dan tindakan lebih lanjut diidentifikasi.

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. Com/JS/SK/III/2003 tanggal 18 Maret 2003. Tugas dan tanggung jawab, prosedur pengawasan, serta pelaporan Komite Manajemen Risiko telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK 10) dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (SEOJK 14).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memantau dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Mengevaluasi kebijakan dan praktik manajemen risiko yang digunakan dalam mengelola risiko, yang berhubungan dengan perubahan lingkungan bisnis dan parameter risiko;
2. Meninjau ulang identifikasi profil risiko oleh Divisi Manajemen Risiko dan peninjauan kriteria batas risiko maksimum yang dapat ditoleransi;
3. Memastikan kegiatan bisnis ada dalam parameter risiko yang dapat diterima; dan
4. Meninjau ulang analisis yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempunyai potensi risiko bagi Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

JUMLAH ANGGOTA, KOMPOSISI, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Komite Manajemen Risiko setidaknya terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 1 orang anggota yang merupakan pihak luar Perusahaan. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam pengangkatan anggota Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris melihat beberapa kriteria yang merujuk pada tugas dan tanggung jawab Komite. Kriteria tersebut adalah:

- Berintegritas tinggi dan mampu menjadi independen dalam manajemen Perusahaan;
- Memahami bisnis, produk dan layanannya;
- Memiliki pengetahuan cukup tentang ekonomi makro dan dampaknya terhadap industri;
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- Ketua Komite Manajemen Risiko harus merupakan anggota independen dari Dewan Komisaris.

Direksi atau Ketua Komite Manajemen Risiko dapat mengusulkan kandidat dari luar Dewan Komisaris Perusahaan untuk dinominasikan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan wawancara dan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Setelah evaluasi, Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko. Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan memberitahukan Direksi untuk menerbitkan surat pengangkatan bagi calon yang telah disetujui.

GRAFIK 22 Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko



SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Susunan Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- **Ketua:** Johannes Sutrisno (Komisaris Independen)
- **Anggota:** Jono Effendy

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko disajikan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 75).

Latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko disajikan pada Tabel 125.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa tugas anggota Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan selanjutnya. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang menjabat per 31 Desember 2018 dicantumkan pada Tabel 125.

TABEL 125 Profil dan Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan dan Keahlian	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Manajemen Risiko	Keuangan, Akuntansi, Komite Audit, GCG	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Jono Effendy	Anggota	Audit, Manajemen Risiko	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, seluruh anggota Komite telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Independensi masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko dijelaskan dalam Tabel 126.

TABEL 126 Independensi Komite Manajemen Risiko

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Johanes Sutrisno	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jono Effendy	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

KEBIJAKAN DAN REMUNERASI UNTUK KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Nominasi dan Remunerasi membuat rekomendasi pada Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Komite Manajemen Risiko, berdasarkan kebijakan Perusahaan dan mempertimbangkan peninjauan pasar atas remunerasi Komite Manajemen Risiko. Remunerasi Komite Manajemen Risiko terdiri atas honorarium saja. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota manajemen senior dari pemegang saham pengendali tidak berhak atas remunerasi tambahan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun dan melaporkan seluruh hasil rapat kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2018, Komite Manajemen Risiko melakukan empat kali rapat. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris. Jadwal rapat dan kehadiran anggota komite dalam rapat disajikan pada Tabel 127, sementara agenda rapat Komite Manajemen Risiko 2018 disajikan pada Tabel 128.

TABEL 127 Jadwal dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Tanggal Rapat	Johanes Sutrisno	Jono Effendy
19 Februari 2018	√	√
17 April 2018	√	√
24 Juli 2018	√	√
23 Oktober 2018	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	4	4
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%

TABEL 128 Agenda Rapat Manajemen Risiko

Tanggal	Agenda Rapat
19 Februari 2018	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional
17 April 2018	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional
24 Juli 2018	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update kualitas portofolio, usulan perubahan, prosedur dan ketentuan pelaksanaan pengelolaan risiko, dan penyesuaian sistem pelaporan tingkat risiko berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015
23 Oktober 2018	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO 2018

Program kerja Komite Manajemen Risiko ditujukan untuk memastikan bahwa manajemen mempunyai sistem peringatan dini atas kemungkinan timbulnya risiko yang dapat mempengaruhi jalannya Perusahaan, serta menghindari kejutan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Program tersebut meliputi:

1. Melakukan pertemuan tiga bulan sekali dengan Divisi Manajemen Risiko Perusahaan serta Direksi untuk membahas *risk monitoring dashboard*;
2. Memastikan bahwa kebijakan yang diambil di bidang manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik;
3. Menelaah laporan manajemen risiko atas evaluasi *risk exposure* Perusahaan, khususnya terkait risiko kegiatan perusahaan pembiayaan, yakni risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan, berdasarkan POJK 10 dan SEOJK 14.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. Com/JS/SK/XII/2005-007 tanggal 29 Desember 2005. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini menjabat ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/VI/2017-0103 tanggal 2 Juni 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Sejak 2015, pelaksanaan tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 34).

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada 1 Desember 2015, BFI Finance menerbitkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mengacu pada POJK 34 dan anggaran dasar Perusahaan, sebagai pedoman kerja bagi Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Komite tersebut diterbitkan berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: BOC/I/2015-05.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur tugas dan tanggung jawab, wewenang,

komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas, rapat, serta masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Terkait fungsi nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

2. Terkait fungsi remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite.

WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Perusahaan;
2. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain; dan
3. Jika diperlukan, melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

JUMLAH ANGGOTA, KOMPOSISI, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi setidaknya terdiri dari tiga orang anggota, dengan ketentuan berikut:

1. Satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama;
2. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Perusahaan mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- **Ketua:** Alfonso Napitupulu (Komisaris Independen)
- **Anggota:**
 - Sunata Tjiterosampurno (Komisaris)
 - Priyambodo

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Profil masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam bab Profil Perusahaan (halaman 76).

Latar belakang pendidikan dan keahlian dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan pada Tabel 129.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat per 31 Desember 2018 dicantumkan pada Tabel 129.

TABEL 129 Profil dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan dan Keahlian	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Hukum, Konsultan Hukum	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris merangkap Anggota	Administrasi Bisnis, Keuangan, Riset Ekuitas, Investment Banking, Audit, Manajemen Risiko, Pemantau Risiko	SK Dewan Komisaris No. BOC/VI/2017-0103 tanggal 2 Juni 2017	2017-2021
Priyambodo	Anggota	Akuntansi, Manajemen SDM	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dijelaskan dalam Tabel 130.

TABEL 130 Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Alfonso Napitupulu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sunata Tjiterosampurno*	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Priyambodo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

KEBIJAKAN DAN REMUNERASI UNTUK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi; baik secara langsung maupun tidak langsung; dari kegiatan BFI Finance selain penghasilan yang sah. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur berikut:
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait kebijakan remunerasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi setidaknya satu kali dalam setahun.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala, paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan salah satunya yang hadir merupakan Ketua Komite.

Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. Risalah rapat tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tiga kali rapat. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris. Jadwal rapat dan kehadiran anggota komite dalam rapat disajikan pada Tabel 131, sementara agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 2018 disajikan pada Tabel 132.

TABEL 131 Jadwal dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggal Rapat	Alfonso Napitupulu	Sunata Tjiterosampurno	Priyambodo
19 Februari 2018	√	√	√
24 Juli 2018	√	√	√
23 Oktober 2018	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	3	3	3
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%

TABEL 132 *Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi*

Tanggal	Agenda Rapat
19 Februari 2018	Pembahasan mengenai gaji, tunjangan dan/atau tantiem Dewan Komisaris dan Direksi
24 Juli 2018	<i>Review</i> kebijakan remunerasi yang berlaku bagi karyawan Perusahaan
23 Oktober 2018	Pembahasan mengenai anggaran kenaikan gaji dan tunjangan karyawan

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi, kepada Dewan Komisaris. Ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS. Pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan pada situs web Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2018

Komite Nominasi dan Remunerasi pada 2018 melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain, mengevaluasi usulan Direksi terkait penetapan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

BFI Finance memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk investor.

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 35), Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan GCG, penyusunan laporan manajemen, serta kegiatan terkait kesekretariatan, penanganan hukum, pengelolaan kehumasan (*relations officer*), sistem manajemen mutu, dan sistem manajemen informasi Perusahaan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari BFI Finance.

Sekretaris Perusahaan di BFI Finance dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Corp/CH/L/VII/07-0115 tanggal 9 Juli 2007 dengan mengacu pada POJK 35. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Sekretaris Perusahaan merupakan jabatan perorangan sekaligus penanggung jawab dari unit-unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Departemen Corporate Secretariat, yang dikepalai seorang Head of Corporate Secretariat;
- Departemen Investor Relations (Hubungan Investor), yang dikepalai seorang Head of Investor Relations; dan
- Departemen Corporate Communication, yang dikepalai seorang Head of Corporate Communication & CSR.

KEDUDUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Jabatan Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh salah satu anggota Direksi. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Apabila terjadi kekosongan posisi Sekretaris Perusahaan, BFI Finance akan menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Selama periode kekosongan tersebut, jabatan Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau individu lain yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara, tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan yang diatur dalam POJK 35.

Sepanjang 2018, Sekretaris Perusahaan berdomisili di Indonesia.

PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Persyaratan bagi Sekretaris Perusahaan adalah:

- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
- Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
- Dapat berkomunikasi dengan baik; dan
- Berdomisili di Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, berdasarkan POJK 35, adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan melakukan sosialisasinya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perusahaan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK, BEI, dan lembaga regulator lainnya tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, termasuk mempersiapkan proses penyelenggaraan (pelaporan rencana RUPS, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil RUPS), mempersiapkan materi RUPS (termasuk Laporan Tahunan Perusahaan), dan pelaksanaan RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program pengenalan terhadap Perusahaan untuk anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2018 dijabat oleh Sudjono. Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 48 tahun dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014. Beliau adalah anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Keuangan. Profil beliau disajikan dalam bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi (halaman 71).

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sepanjang 2018, Sekretaris Perusahaan yang dirangkap oleh Direktur Keuangan, Sudjono, telah mengikuti seminar dan pelatihan sebagaimana diungkapkan di dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tabel 114.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2018

Sepanjang 2018, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab berikut dengan baik:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pasar modal, termasuk peraturan-peraturan baru di bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI;
2. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Menyediakan informasi Perusahaan secara transparan, yang meliputi laporan keterbukaan informasi terkait informasi RUPS, laporan keuangan berkala, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, paparan publik, laporan registrasi saham, laporan insidental terkait rencana pengembangan baru, serta memberikan informasi yang diperlukan pemegang saham;
4. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan mempublikasikan hasil keputusan rapat;
5. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan korporasi;
6. Membuat buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dalam satu buku yang disebut Laporan Tahunan Terintegrasi;
7. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan CSR bersifat pengembangan komunitas di lingkup eksternal dan internal Perusahaan melalui keberadaan Unit CSR di bawah koordinasi Departemen Corporate Communication & CSR;
8. Menjaga dan memelihara hubungan dengan media dan sarana informasi lainnya;
9. Mengoordinasikan rapat-rapat Perusahaan, seperti RUPS, rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan paparan publik;
10. Mencatat risalah rapat-rapat Perusahaan, seperti RUPS, rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan paparan publik;
11. Mengoordinasikan aksi korporasi Perusahaan, yaitu:
 - Penerbitan obligasi;
12. Menyampaikan 40 kali korespondensi Perusahaan ke OJK dan 50 kali ke BEI.

AUDIT INTERNAL

DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (POJK 56), Audit Internal di Perusahaan berfungsi memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi independen dan objektif secara internal bagi Perusahaan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Departemen Audit Internal mempunyai Piagam Audit Internal yang ditetapkan pada 1 Maret 2009. Piagam Audit Internal memberikan pedoman kerja bagi Departemen Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan amanat dari Direksi Perusahaan. Hal-hal lainnya yang menyangkut aspek teknis, operasional, dan etis dari setiap anggota Departemen Audit Internal juga dibahas dalam Piagam Audit Internal.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Perusahaan membentuk Departemen Audit Internal pada 31 Maret 2010, berdasarkan Surat Pengangkatan Anggota Audit Internal Perusahaan. Departemen Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan mempunyai akses langsung kepada Komite Audit untuk menjamin pelaksanaan tugasnya secara independen dan memfasilitasi proses konsultasi rencana proses pemeriksaan.

Dalam struktur tata kelola perusahaan di BFI Finance, Departemen Audit Internal bertindak sebagai badan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyempurnakan proses-proses operasional

Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, Departemen Audit Internal berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komite Audit, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Departemen Audit Internal dipimpin oleh Kepala Departemen dan setidaknya harus beranggotakan sepuluh orang, yang seluruhnya berasal dari internal Perusahaan. Dengan demikian, semua staf Departemen Audit Internal tunduk kepada peraturan Perusahaan yang berlaku, termasuk prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta penilaian kinerja anggota Audit Internal.

Kepala Departemen Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika Kepala Departemen Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, maka Presiden Direktur dapat memberhentikan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Auditor internal Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen Audit Internal (*Internal Audit Head*).

Jumlah pegawai (auditor internal) pada Departemen Audit Internal per 31 Desember 2018 adalah 184 orang, yang terdiri dari:

- Audit Umum: 36 orang;
- Audit Lapangan: 129 orang; dan
- Kantor Pusat: 19 orang.

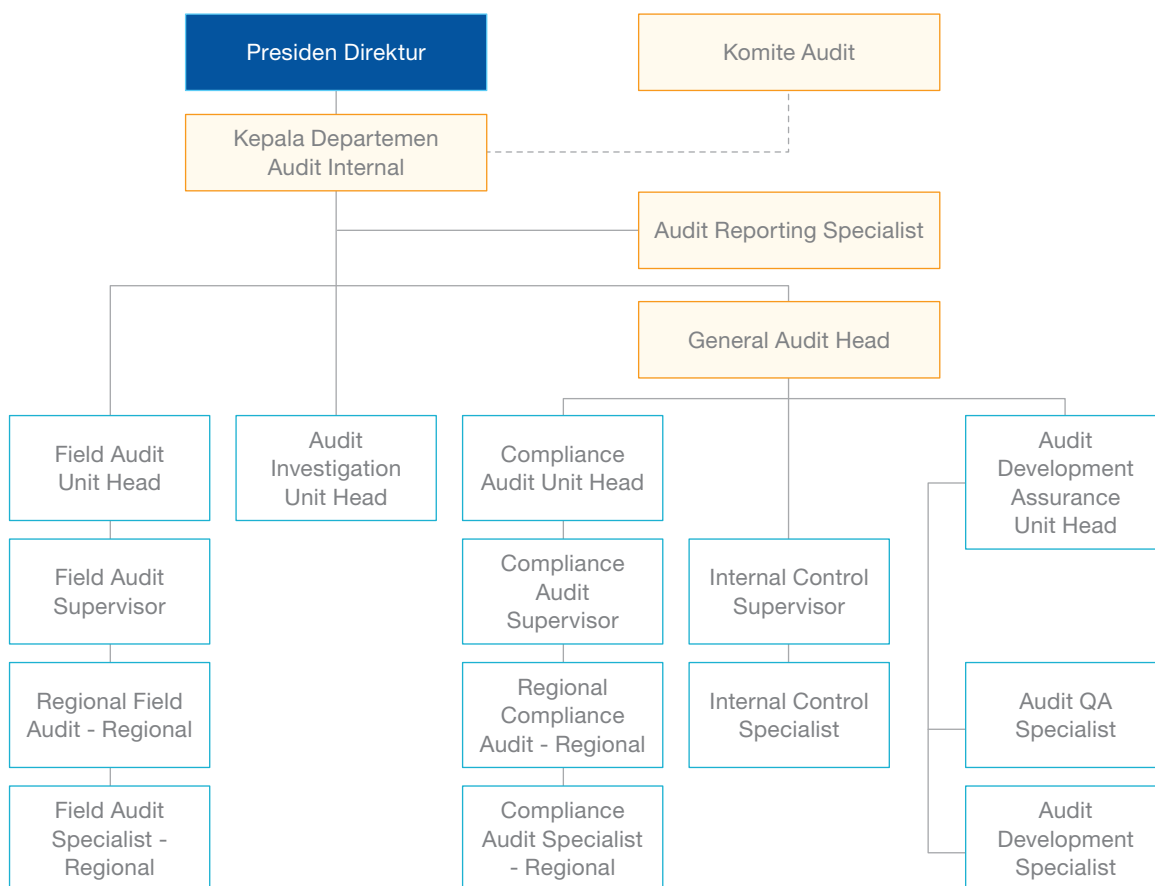
Perusahaan mengikutsertakan auditor internalnya dalam program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi, untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan juga Departemen Audit Internal. Selama 2018, diselenggarakan

sejumlah pelatihan peningkatan kompetensi, termasuk pelatihan tingkat lanjut untuk auditor, *Management Trainee Program* (MTP), *Leadership Development Program* (LDP), dan asesmen bagi auditor. Hingga akhir 2018, belum terdapat auditor internal yang telah memiliki sertifikasi atau kualifikasi keprofesian di bidang audit internal.

Pada 2018, struktur organisasi Departemen Audit Internal mengalami penyempurnaan dengan penambahan tiga fungsi kerja baru, yaitu:

- *Unit Internal Control*
- *Unit Audit Investigation*
- *Unit Audit Assurance & Development*

GRAFIK 23 Struktur Organisasi Departemen Audit Internal



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab fungsi Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal;
9. Melakukan pemeriksaan/audit khusus jika diperlukan; dan
10. Menyusun peringkat hasil audit per kantor cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing kantor cabang terhadap peraturan, kebijakan, dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Departemen Audit Internal dalam menjalankan tugas-tugasnya berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait tugas dan fungsinya;

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Departemen Audit Internal secara independen menjalankan kegiatan audit di seluruh kantor cabang dan kantor pusat. Audit Internal mengaudit aspek keuangan dan memantau kepatuhan pihak yang diaudit terhadap kebijakan dan SOP Perusahaan, serta senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Proses audit internal dilakukan dengan konsep Audit Berbasis Risiko, dan difokuskan pada bidang-bidang dengan risiko terbesar sebagaimana ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko, sesuai masukan dari Komite Audit. Departemen Audit Internal melaporkan setiap temuan dari semua kejadian yang merugikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit.

Departemen Audit Internal menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Departemen Audit Internal merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan tugas auditnya secara bebas dan mandiri, tanpa dipengaruhi kepentingan manapun sesuai dengan pertimbangan profesionalisme dan standar audit yang berlaku serta berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Untuk memastikan

independensi dan objektivitasnya, seluruh anggota Departemen Audit Internal tidak dapat menerima penugasan dan mengambil tanggung jawab operasional pada unit kerja atau fungsi bisnis. Apabila menjumpai kondisi yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitasnya, Departemen Audit Internal wajib melaporkannya kepada Presiden Direktur.

KUALIFIKASI AUDIT INTERNAL

Secara umum, kualifikasi bagi anggota Departemen Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- Perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan audit tahunan terhadap kinerja dan data-data pada sistem dan operasional kantor pusat dan kantor cabang;
- Pengembangan sistem kerja, prosedur dan standar pelayanan dari masing-masing unit di Departemen Audit Internal;
- Analisis cara kerja pengendalian internal di kantor pusat dan kantor cabang;
- Riset informasi mengenai ketentuan dan peraturan Perusahaan terkini terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan dan aplikasinya;
- Koordinasi dengan departemen dan unit kerja lain di Perusahaan untuk memperoleh jawaban, penjelasan dan masukan terhadap suatu masalah atau dugaan temuan;
- Penyusunan laporan hasil audit, melakukan analisa temuan dan memberikan rekomendasi untuk solusi perbaikan serta sanksi yang diperlukan; dan
- Pelaporan kepada Kepala Departemen Audit Internal mengenai temuan yang memerlukan penanganan segera.

Kualifikasi bagi pemegang jabatan Kepala Departemen Audit Internal adalah:

- Mampu melakukan perencanaan dan pemantauan terhadap produktivitas Departemen Audit Internal;
- Mampu menerapkan analisis dalam melakukan evaluasi dan memastikan tersedianya laporan audit yang berkualitas untuk dipertanggungjawabkan kepada Komite Audit dan Presiden Direktur; dan
- Mampu memberikan rekomendasi terhadap hasil temuan audit.

KODE ETIK AUDIT INTERNAL

1. Integritas
Auditor Internal menciptakan kepercayaan sehingga melahirkan keyakinan atas kesimpulan yang diambilnya.
2. Objektivitas
Auditor Internal menunjukkan tingkat objektivitas dan profesionalisme tertinggi dalam pengambilan, evaluasi, dan penyebaran informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal melakukan asesmen yang berimbang atas seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dalam membuat suatu kesimpulan.
3. Kerahasiaan
Auditor Internal menghargai nilai dan kepemilikan atas informasi dan data-data yang diterima dan tidak menyebarkan informasi dan data tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas.
4. Kompetensi
Auditor Internal memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya.

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal (Internal Audit Head) sejak 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014. Beliau berkarier di BFI Finance sejak 2005 sebagai Audit Staff, kemudian menjadi Audit Team Leader pada 2007, Audit Supervisor pada 2010, General Audit Unit Head pada Maret 2011, dan Field Audit Unit Head pada Agustus 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Islam Indonesia (UII) pada 2004. Aktif sebagai trainer berbagai program pelatihan bagi karyawan Perusahaan sejak 2009, beliau juga pernah mengikuti program-program pengembangan kompetensi antara lain:

- Prinsip Dasar Audit Internal oleh BFI Finance (internal)
- Teknik Wawancara oleh BFI Finance (internal)
- Deteksi Fraud oleh BFI Finance (internal)
- The Most Powerful Rules in Management oleh ACADEMIA Education & Training
- Proven Techniques Build Successful Teams oleh ACADEMIA Education & Training
- Middle-Management Development Program (MMDP) Batch 1 diselenggarakan dengan kerja sama BFI Finance dan Prasetyia Mulya Business School
- Know Your Customer oleh BFI Finance (internal)
- Problem Solving & Decision Making oleh BFI Finance (internal)
- Situational Leadership Training oleh BFI Finance (internal)
- Fraud Mitigation & Investigation Training oleh BFI Finance (internal)
- Training of Basic Certification Program – program pelatihan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk sertifikasi manajerial berupa Sertifikasi Dasar Pembiayaan dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPi)
- Sosialisasi Pelatihan Fraud Investigation

Fledy Rizmara

Warga Negara: Indonesia

Usia: 38

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 2018 DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT

Secara umum, Departemen Audit Internal secara independen dan objektif menjalankan kegiatan audit di seluruh kantor pusat ataupun cabang, yang meliputi audit keuangan, audit kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP, dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

AUDIT EKSTERNAL

Di 2018, proses audit internal di Perusahaan diperkaya oleh masukan dari Departemen Manajemen Risiko, sehingga proses audit internal menjadi lebih bersifat preventif, alih-alih korektif, terhadap kasus-kasus yang sering dijumpai dalam audit. Masukan yang dimaksud antara lain hasil peringkat (*scoring*) kantor cabang di bidang manajemen risiko. Dengan demikian, mitigasi risiko dan penyelesaian masalah yang berakar dari faktor-faktor risiko Perusahaan menjadi lebih efektif.

Kegiatan Audit Internal pada 2018 meliputi:

- Penyusunan program kerja audit tahunan 2018 dan evaluasi realisasi pelaksanaan program kerja 2017;
- Audit atas unit kerja di kantor pusat dan cabang-cabang;
- Pemantauan pelaksanaan rekomendasi audit yang telah disepakati; dan
- Pelaksanaan rapat rutin dengan Komite Audit untuk membahas program kerja Audit Internal, dan hal-hal terkait temuan-temuan penting yang memerlukan perhatian manajemen sesuai dengan fungsi pengawasan Komite Audit.

Di 2018, Audit Internal melaksanakan 183 pekerjaan audit di 228 cabang, serta 6 pekerjaan audit di kantor pusat. Proses audit internal sepanjang 2018 telah berlangsung efektif. Manajemen telah menanggapi temuan-temuan audit internal, dan dalam kasus penipuan yang terungkap, Perusahaan memberikan penalti yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penggantian atas kerugian Perusahaan hingga pemutusan hubungan kerja. Selama 2018, jumlah nilai kerugian finansial Perusahaan lebih kecil dari 1% dari pendapatan Perusahaan.

Audit eksternal atas laporan keuangan Perusahaan setiap tahunnya dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan yakni Auditor Eksternal, dalam rangka memberikan pemastian bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara baik dan benar sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.7 – No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai keputusan RUPST 17 April 2018, Perusahaan menunjuk KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, anggota jaringan global BDO International Limited, sebagai Auditor Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2018. RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi KAP tersebut.

Penunjukan KAP tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Komite Audit telah meninjau dan mengkaji calon KAP yang akan digunakan, dan merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris, yang telah mendapat kuasa dari RUPS untuk menunjuk KAP yang akan digunakan.

Auditor Eksternal yang ditunjuk Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali Perusahaan, yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dan mempengaruhi independensi akuntan publik serta para auditornya. Auditor Eksternal melaksanakan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja, serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.



BIAYA JASA AUDIT

Biaya jasa audit profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tahun buku 2018 adalah Rp374 juta.

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak memberikan jasa lain kepada Perusahaan, di luar jasa audit profesional sebagaimana disebutkan di atas.

KOMUNIKASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Eksternal berkomunikasi dengan Komite Audit melalui rapat-rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal. Hasil rapat dilaporkan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Selama 2018, dilakukan dua kali rapat antara Komite Audit dan Auditor Eksternal. Pokok pembahasan dalam rapat-rapat ini beserta hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah disampaikan dalam rapat berikutnya antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris.

Pembahasan yang dilakukan dalam rapat-rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal meliputi:

1. Perencanaan audit, termasuk:
 - a. Susunan tim Auditor Eksternal;
 - b. Pendekatan tata cara dan kebijakan audit;
 - c. Jadwal pelaksanaan dan penyampaian laporan hasil audit;
 - d. Asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam audit;
2. Hasil temuan audit;
3. Rekomendasi auditor;
4. Draft laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan
5. Pernyataan opini Auditor Eksternal terhadap laporan keuangan hasil audit.

Laporan hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 akan disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS yang akan diselenggarakan di 2019.

RIWAYAT PENUNJUKAN KAP

Riwayat penunjukan KAP sebagai Auditor Eksternal bagi Perusahaan selama lima tahun ke belakang (2014-2018) adalah sebagai berikut:

TABEL 133 Riwayat Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Periode	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Opini
2014	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Santanu Chandra	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Santanu Chandra	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Asep Ugi Sugianto	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Fahmi	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Susanto Bong	Wajar Tanpa Modifikasian

MANAJEMEN RISIKO

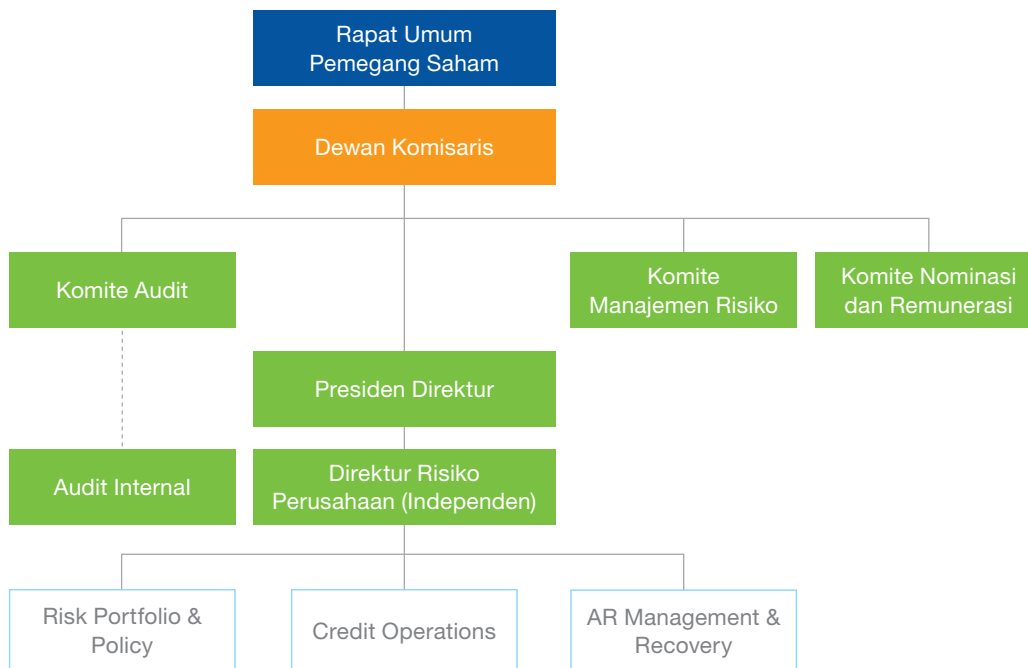
BFI Finance menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif secara disiplin untuk menjamin keberlangsungan proses-proses bisnis secara optimal, melalui pengelolaan setiap faktor risiko yang dijumpai dalam kegiatan operasionalnya sepanjang waktu. BFI Finance juga mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko ini dan terus memperlengkapinya dengan berbagai fitur dan standar terbaru, untuk pengelolaan risiko yang lebih baik.

Penerapan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada POJK 1/2015, SEOJK 1/2016, dan SEOJK 15/2016, dan mencakup hal-hal berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam aktivitas manajemen risiko sesuai tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab menyetujui kerangka kerja dan kebijakan risiko Perusahaan. Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Direksi untuk menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan sesuai profil risiko dan *risk appetite* Perusahaan.

GRAFIK 24 Struktur Manajemen Risiko



2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, dan limit terkait risiko yang dijalankan secara rutin dan diperiksa kesesuaiannya terhadap kegiatan usaha, strategi bisnisnya, dan regulasi terkini. Kebijakan ini turut mencakup otorisasi untuk transaksi kredit dan pencadangan kerugian piutang.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Perusahaan memiliki mekanisme dan struktur yang memadai untuk melakukan seluruh proses terkait risiko, mulai dari identifikasi hingga mitigasinya. Mekanisme manajemen risiko ini dijalankan secara menyeluruh, sejak penetapan profil konsumen hingga penyelesaian kewajiban konsumen.

4. Sistem informasi manajemen risiko

Perusahaan memiliki sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan basis data yang kuat serta prosedur internal yang memadai untuk mendukung proses manajemen risiko serta meningkatkan kualitas pelaporan kinerja portofolio. Sistem ini juga memungkinkan deteksi dini berbagai risiko dan pembuatan KPI berbasis manajemen risiko.

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada pendekatan Tiga Lini Pertahanan, yakni fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertahanan Lapis Pertama

Unit-unit bisnis dan operasional bertindak sebagai lini pertahanan pertama dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan menanggulangi risiko. Tanggung jawab utamanya adalah mengelola eksposur risiko secara harian, sesuai dengan target pasar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pertahanan Lapis Kedua

Direktorat Manajemen Risiko, Departemen Pengawasan Keuangan, dan Departemen Hukum dan Litigasi adalah unit-unit utama dalam lapis pertahanan kedua melalui fungsi pengawasan independen. Direktorat Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan kajian dan persetujuan atas strategi dan tingkat risiko yang dapat diterima, serta bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional dalam memastikan pengelolaan risiko sesuai batasan-batasan yang ditetapkan. Departemen Hukum dan Litigasi mengelola risiko kepatuhan terkait hukum dan bertanggung jawab memastikan bahwa peraturan yang berlaku telah disosialisasikan dan dipatuhi seluruh unit terkait.

3. Pertahanan Lapis Ketiga

Demi memastikan bahwa seluruh unit bisnis dan operasional melakukan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, Departemen Audit Internal melakukan pengujian dan audit secara independen terhadap setiap proses yang dijalankan unit-unit tersebut.

GRAFIK 25 Tiga Lini Pertahanan dalam Manajemen Risiko



KINERJA MANAJEMEN RISIKO 2018

Sepanjang 2018, fungsi manajemen risiko ditingkatkan peranannya melalui berbagai inisiatif berikut:

- Mengembangkan infrastruktur penagihan terkait penanganan *account* dengan sistem tersentralisasi berdasarkan wilayah, pengembangan *tele-collection* dan penerapan *mobile collection* agar kinerja menjadi lebih efisien dan efektif;
- Bekerja sama dengan biro kredit; dan
- Mengembangkan penilaian kelayakan kredit dengan penerapan sistem *credit scoring*.

Berjalannya proses manajemen risiko di 2018 berhasil mengelola rasio NPF agar tetap dalam batas yang terkendali dan di bawah rata-rata industri, sementara peningkatan pertumbuhan bisnis baru (*booking*) BFI Finance jauh di atas rata-rata industri.

Per akhir 2018, BFI Finance memegang peringkat 'AA-' dari Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit independen. Ini mencerminkan tingkat kepercayaan eksternal terhadap posisi BFI Finance yang solid sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia.

MATRIKS RISIKO 2018

BFI Finance telah menggolongkan berbagai risiko yang dihadapinya berdasarkan POJK 1/2015, dan telah mengembangkan matriks risiko yang mencantumkan potensi dampak dan mitigasi dari setiap faktor risiko, sebagaimana tercantum di halaman 292. Profil risiko Perusahaan di 2018 tidak mengalami perubahan fundamental dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat natur bisnis Perusahaan juga tidak berubah selama periode tersebut.

TABEL 134 Matriks Risiko 2018

Jenis Risiko	Sumber	Aspek yang Berpotensi Terdampak	Mitigasi	Peringkat Risiko
Risiko Strategi	Kegagalan penetapan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran utama	Seluruh aspek bisnis dan operasional	1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi 2. Evaluasi dan penyesuaian rencana strategis secara berkala	Sedang - Rendah

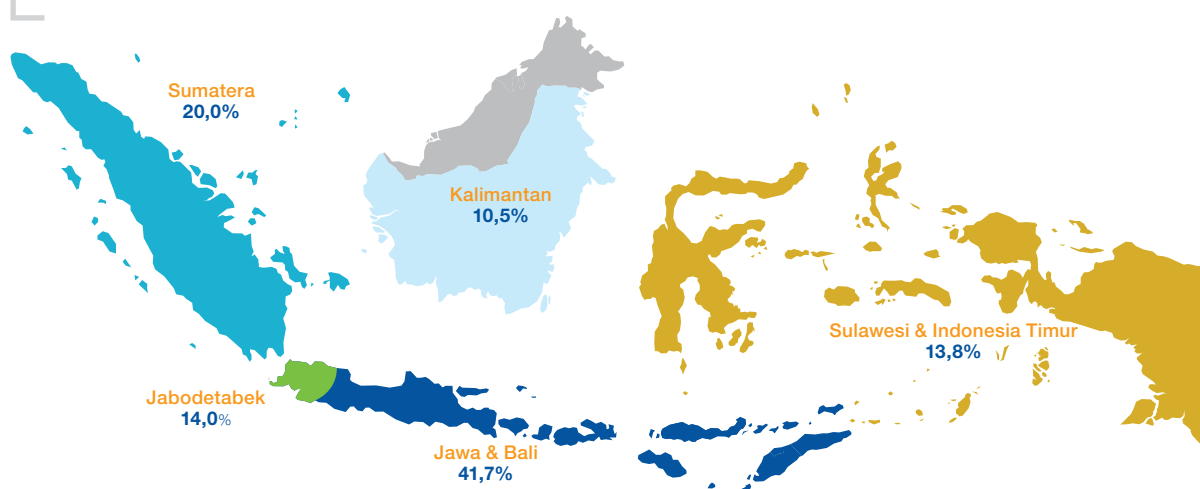
TABEL 134 Matriks Risiko 2018

Jenis Risiko	Sumber	Aspek yang Berpotensi Terdampak	Mitigasi	Peringkat Risiko
Risiko Operasional	Kegagalan proses di lingkungan internal dan eksternal; gangguan operasional dan keuangan; isu regulasi; kecurangan internal ataupun eksternal	Produk dan jasa; proses bisnis; kegiatan operasional; sistem dan infrastruktur; reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penerapan SOP untuk setiap proses kerja untuk menghindari penyimpangan 2. Keberadaan Unit Operational Risk Management (ORM), Risk Quality Management, dan Operational Risk Monitoring 3. Keberadaan <i>Disaster Recovery Plan</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> 4. Pengawasan oleh Audit Internal 5. Program kesadaran dan pencegahan kecurangan yang komprehensif 6. Indikator peringatan dini 	Rendah
Risiko Aset dan Liabilitas	Kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas	Kondisi keuangan; reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan strategi dan kebijakan terkait aset dan liabilitas oleh Departemen Keuangan dan Treasury 2. Pengumpulan dan analisis data dan indikator penting 3. Manajemen likuiditas, <i>gap</i>, dan <i>pricing</i> 	Rendah – Sedang
Risiko Kepengurusan	Kegagalan untuk memelihara komposisi terbaik, kompetensi, dan integritas dari pengurus	Seluruh aspek bisnis dan operasional	Pembentukan komposisi kepengurusan yang terdiri dari para profesional yang kompeten di bidang-bidang yang relevan dalam industri pembiayaan	Rendah
Risiko Tata Kelola	Kegagalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola; ketidaktepatan gaya manajemen; kecurangan dan perilaku tidak terpuji	Seluruh aspek bisnis dan operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi informasi 2. Akuntabilitas setiap pihak yang terkait atas kinerja 3. Pertanggungjawaban setiap karyawan sesuai fungsi dan jabatan 4. Independensi antara sesama karyawan 5. Kesetaraan dan kewajaran dalam menjaga kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lainnya 	Rendah
Risiko Pendanaan	Ketidakcukupan dana atau modal; kurangnya akses tambahan dana atau modal; keterbatasan sumber-sumber pendanaan	Kegiatan operasional penyaluran pembiayaan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan oleh Komite Manajemen Risiko, Direksi, dan Departemen Treasury & Finance 2. Analisis kesenjangan likuiditas 3. Diversifikasi sumber dana 4. Pengelolaan arus kas internal secara bijak 5. Pengelolaan eksposur terhadap mata uang asing 6. Pengelolaan eksposur terhadap suku bunga melalui proporsi pendanaan yang tepat 	Rendah

TABEL 134 Matriks Risiko 2018

Jenis Risiko	Sumber	Aspek yang Berpotensi Terdampak	Mitigasi	Peringkat Risiko
Risiko Pembiayaan (Kredit)	Kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajiban terhadap Perusahaan; perubahan faktor-faktor eksternal	Kondisi keuangan; reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan kebijakan dan prosedur penentuan target pasar, persetujuan penerimaan kredit, tingkat bunga, pembatasan limit dan eksposur 2. Manajemen penagihan 3. Penerapan MIS untuk mengukur kinerja portofolio 4. Pengenalan masalah dan penyelesaian masalah secara cepat dan tepat 5. <i>Stress test</i> dan sistem deteksi dini 6. Kebijakan diversifikasi portofolio dan basis konsumen 7. Pencadangan kerugian pinjaman sesuai PSAK 55 	Rendah

GRAFIK 26 Peta Diversifikasi Pembiayaan berdasarkan Piutang yang Dikelola



EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO 2018

Secara keseluruhan, profil risiko Perusahaan untuk tahun 2018 berada pada kategori Risiko Rendah (*Low Risk*), berdasarkan penilaian sendiri yang dilakukan sesuai POJK 10/2016.

Perusahaan juga telah memiliki struktur manajemen risiko yang memadai, yang tercermin dari keberadaan Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas analisis portofolio risiko, menjaga kualitas kredit, menjaga kualitas aset sampai dengan *recovery*; keberadaan fungsi Audit Internal yang independen melakukan pengawasan dan evaluasi proses operasional, serta keberadaan Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit, yang secara independen melakukan pengawasan Perusahaan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem manajemen risiko BFI Finance berjalan efektif di 2018.

FOKUS & RENCANA PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO 2019

Untuk 2019, BFI Finance akan memperkuat kinerja sistem manajemen risikonya dengan menerapkan sejumlah rencana berikut:

- Secara berkesinambungan melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja dan peningkatan kualitas penagihan dengan pengembangan infrastruktur dan strategi yang lebih efektif dan efisien;
- Secara berkesinambungan meningkatkan *scoring model* untuk mengestimasi tingkat risiko pembiayaan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal Perusahaan;
- Sesuai arahan OJK, ikut menerapkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); dan
- Menerapkan pencadangan kerugian sesuai dengan PSAK 71, dan terus memantau kecukupan permodalan Perusahaan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di BFI Finance merupakan bagian dari proses bisnis yang terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perusahaan taat terhadap aturan dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian internal membantu Perusahaan memastikan kegiatan bisnisnya berjalan efektif dan efisien, laporan keuangannya akurat dan andal, serta asetnya dipelihara dengan bijak. Implementasi sistem pengendalian internal di Perusahaan tercermin dari pelaporan keuangan dan operasional bisnis Perusahaan yang senantiasa sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

PENGENDALIAN FINANSIAL DAN OPERASIONAL

Dalam pengendalian aspek keuangan, Perusahaan memisahkan fungsi pencatatan dengan pengeluaran *cash*. Selain itu, Perusahaan menjalankan proses persetujuan pengeluaran anggaran secara berjenjang melalui proses *check and re-check*.

Dalam pengendalian aspek operasional, Perusahaan menilai tingkat kepatuhan setiap fungsi terhadap kebijakan dan prosedur yang relevan. Implementasinya antara lain diwujudkan dalam diberlakukannya Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, pedoman operasional, prosedur, petunjuk pelaksanaan, instruksi kerja, dan dokumen acuan Perusahaan lainnya.

KOMPONEN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di Perusahaan terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian**
Direksi dan seluruh karyawan harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan Perusahaan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat.
2. **Penilaian Risiko**
Masing-masing unit kerja harus mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasionalnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar Perusahaan.
3. **Aktivitas Pengendalian**
Pengendalian diterapkan pada pelaksanaan kegiatan Perusahaan di setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain melalui pengaturan mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan pengamanan aset Perusahaan.
4. **Sistem Informasi dan Komunikasi**
Perusahaan menyusun laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.
5. **Monitoring**
Kegiatan *monitoring* dilakukan untuk menilai kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan.

Secara keseluruhan, Perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian berjenjang yang meliputi organ tata kelola Perusahaan, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris: melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan terkait proses pengelolaan Perusahaan, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Direksi: menerapkan kebijakan dan prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku, antara lain dengan pengelolaan manajemen risiko, penetapan rencana strategis Perusahaan, serta pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Direksi;
- Audit Internal: melaksanakan audit dan senantiasa meningkatkan kinerja pengendalian internal dalam berbagai kegiatan operasional dan keuangan Perusahaan;
- Direksi menindaklanjuti segala temuan audit berdasarkan laporan hasil Audit Internal; dan
- Komite Audit: menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Audit Internal agar dapat memberikan rekomendasi penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal. Komite Audit juga memastikan telah terdapat prosedur peninjauan atas informasi yang dikeluarkan Perusahaan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Melalui Departemen Audit Internal, Perusahaan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2018. Departemen Audit Internal menggunakan kriteria evaluasi yang ditetapkan Komite Audit.

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian internal memuat rekomendasi hasil audit internal dan eksternal, yang dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam mengambil langkah perbaikan atau menyempurnakan sistem pengendalian internal ataupun kebijakan (perubahan prosedur, pedoman kerja, dan lain-lain), sehingga pada akhirnya akan memperkuat kondisi dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2018, sistem pengendalian internal Perusahaan atas pelaporan keuangannya telah berjalan efektif.

KASUS HUKUM 2018

Selama 2018, Perusahaan menghadapi atau terlibat dalam kasus-kasus hukum berikut:

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
1	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 415/Pdt/2012/PT.Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara No. 35/Pdt.G/2011/PN.Mkt di Pengadilan Negeri Mojokerto. 	Edy Setiawan selaku Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Edy Setiawan mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi belum menyerahkan Memori Kasasi sampai dengan saat ini.
2	Perkara No. 304/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat, melawan: <ul style="list-style-type: none"> Fransiskus Borgias selaku Tergugat I, Novy Sumadi selaku Tergugat II. 	Fransiskus Borgias dan Novy Sumadi mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3	Perkara No. 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat, melawan: <ul style="list-style-type: none"> Ahesa Panji Buana selaku Tergugat, Lalu Eka selaku Turut Tergugat. 	Lalu Eka mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4	Perkara No. 205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> Hermanto selaku Tergugat I, Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II. 	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Gugatan PT BFI Finance Indonesia Tbk secara verstek. Saat ini masih dalam proses pemberitahuan isi Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Hermanto dan Artina Yuni Dhartuty.
5	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Selamat Suyanto selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Ngatiwan selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
7	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Andri Rustiaji selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Secara lisan pengaduan dinyatakan telah selesai oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya dikarenakan Andri Rustiaji melanjutkan pembayaran angsuran dan tidak jadi melakukan pelunasan, namun tidak ada salinan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Sunarmen selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
9	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Titik Murda Ningsih selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
10	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Trimo selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
11	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Samali selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
12	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Abdul Rozak selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
13	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

KASUS HUKUM 2018

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
14	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Berlin Siahaan selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
15	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Hasan Basri Ginting selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
16	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Sulaiman selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
17	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Hotmatua Sitompul selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
18	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Herry (selaku ahli waris dari Bambang Yamin) selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
19	Perkara No. 07/PDT.Sus-Pem. Perdamaian/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk selaku Termohon Pailit.	Sedang dalam proses pemberesan oleh Tim Kurator.
20	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Jumiin selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
21	Perkara No. 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.	Henry Thenoch, Tontje Thenoch dan PTBangun Wenang Beverages COY selaku Termohon Pailit.	Sedang dalam proses pemberesan oleh Kurator.
22	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 25/PDT/2018/ PT.PBR di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Perkara No. 18/PDT.G/2017/ PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 	Ivan Dhori Suranta Meliala selaku Penggugat /Pembanding melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat /Terbanding.	Ivan Dhori Suranta Meliala mengajukan proses Banding kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
23	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 2786 K/PDT/2018 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 26/PDT.G/2018/PT.BDG di Pengadilan Tinggi Bandung, Perkara No. 101/PDT.G/2017/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung. 	Iwan Suhendar selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.	Berdasarkan website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Iwan Suhendar telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
24	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 14/PDT/2017/PT.GTO di Pengadilan Tinggi Gorontalo, Perkara No. 8/PDT.G/2017/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo. 	Abdul Manan Yusuf selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menolak upaya banding Abdul Manan Yusuf. Saat ini masih dalam proses pemberitahuan isi Putusan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo.
25	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukittinggi.	Yeni Hemilda selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukittinggi.
26	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kotamobagu.	Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kotamobagu.
27	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Banyuwangi.	Hariyadi selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Banyuwangi.
28	Perkara No. 366/PDT.G/2017/PN.MDI di Pengadilan Negeri Manado.	Novie Alexander Tumbol selaku Terbanding/Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding I/Tergugat I, Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Gorontalo selaku Terbanding II/Tergugat II. 	Pengadilan Negeri Manado telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini Novie Alexander Tumbol sedang mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Manado.
29	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 223/PDT/2018/PT.SMG di Pengadilan Tinggi Semarang. Perkara No. 416/PDT.G/2017/PN.SMR di Pengadilan Negeri Semarang. 	Sya'roni selaku Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Semarang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi relatif PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini PT BFI Finance Indonesia Tbk mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KASUS HUKUM 2018

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
30	Perkara No. 76/PDT.G/2017/PN.Sgn di Pengadilan Negeri Sragen.	Isman selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Negeri Sragen telah mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini Isman mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang.
31	Perkara No. 216/PDT.G/2017/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo.	Hudan Mustaqin selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan Gugatan Hudan Mustaqin tidak dapat diterima. Saat ini Hudan Mustaqin mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya.
32	Perkara No. 186/PDT.G/2018/PN.YYK di Pengadilan Negeri Yogyakarta.	Aris Nugroho selaku Penggugat melawan <ul style="list-style-type: none"> • PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat. • PT Bintang Cakra Kencana selaku Turut Tergugat. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.
33	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 226/PDT/2018/PT.SMG di Pengadilan Tinggi Semarang, • Perkara No. 27/PDT.G/2017/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang. 	Kusnadi bin Sukandar (Alm) selaku Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Penggugat I dan Siti Muntafi'ah binti Sumardi selaku Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Semarang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang yang pada intinya menolak Gugatan Kusnadi bin Sukandar (Alm) dan Siti Muntafi'ah binti Sumardi. Saat ini Kusnadi bin Sukandar (Alm) dan Siti Muntafi'ah binti Sumardi mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
34	Perkara No. 217/PDT.G/2018/PN.PLG di Pengadilan Negeri Palembang.	S. Marlina selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> • AIA Financial selaku Tergugat, • PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Turut Tergugat I, • RSUP DR Mohamad Hoesin Palembang selaku Turut Tergugat II. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Palembang.
35	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 371/PDT/2018/PT.MKS di Pengadilan Tinggi Makassar, • Perkara No. 1/PDT.G/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. 	Ir. Leonard Tjioemena selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Negeri Makassar telah menolak Gugatan Ir. Leonard Tjioemena. Saat ini Ir. Leonard Tjioemena mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Makassar.
36	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 126/PDT/2018/PT BTN di Pengadilan Tinggi Banten, • Perkara No. 966/PDT.G/2017/PN. Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. 	Mamun selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Banten telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang pada intinya menyatakan Gugatan Mamun tidak dapat diterima. Saat ini Pengadilan Negeri Tangerang dalam proses memberitahukan isi putusan kepada Mamun.

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
37	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 14/PDT/2018/PT.GTO di Pengadilan Tinggi Gorontalo, Perkara No. 22/PDT.G/2018/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo. 	Amin Ibrahim selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang pada intinya menolak Gugatan Amin Ibrahim. Saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo dalam proses memberitahukan isi putusan kepada Amin Ibrahim.
38	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 115/PDT/2018/PTSBR di Pengadilan Tinggi Samarinda, Perkara No. 08/PDT.G/2018/PN.Bon di Pengadilan Negeri Bontang. 	<p>Abdul Rahman selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kadapi Saputra selaku Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I. PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II. Notaris Silvia Eny Kristian, SH selaku Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III. 	Berdasarkan informasi pada pada SIPP Pengadilan Negeri Bontang, Abdul Rahman mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang yang menolak Gugatan Abdul Rahman untuk seluruhnya.
39	Perkara No. 18/PDT.G/2018/PN. GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo.	Yosep Mokolengsang selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Pengadilan Negeri Gorontalo telah menolak Gugatan Yosep Mokolengsang. Saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo dalam proses memberitahukan isi putusan kepada Yosep Mokolengsang.
40	Perkara No. 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT. PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT Gatramas Internusa selaku Termohon Pailit.	Sedang dalam proses pemberesan oleh Tim Kurator.
41	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banyuwangi.	Sumiyati selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banyuwangi.
42	Perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Jpa di Pengadilan Negeri Jepara.	<p>Ninda Rosyada selaku Penggugat I dan Siti Rohmah selaku Penggugat II melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Detty Afriyanti selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II. 	Pengadilan Negeri Jepara telah mengabulkan eksepsi PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan menyatakan Gugatan Ninda Rosyada dan Siti Rohmah kabur. Saat ini Ninda Rosyada dan Siti Rohmah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.
43	Perkara No. 174/PDT.G/2018/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung.	Rangga Gumilar selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Pengadilan Negeri Bandung telah menolak Gugatan Rangga Gumilar untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini terhadap putusan tersebut belum final karena masih dalam tenggang pengajuan upaya banding oleh Rangga Gumilar.

KASUS HUKUM 2018

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
44	Perkara No. 87/PDT.G/2018/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.	Emmy Natalia selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Negeri Palembang telah mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini Emmy Natalia mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang.
45	Perkara No. 6/PDT.SUS-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.	Jusak Wangsadjaja selaku Termohon Pailit.	Sedang dalam proses pemberesan oleh Tim Kurator.
46	Perkara No. 35/PDT.G/2018/PN.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi.	Wiwud Gunarso selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Negeri Jambi telah menolak Gugatan Wiwud Gunarso untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini Wiwud Gunarso mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.
47	Perkara No. 52/PDT.G/2018/PN.Pso di Pengadilan Negeri Poso.	Charles Lamboutoh selaku Pembanding I/Penggugat I dan Pulmin Galaento selaku Pembanding II/Penggugat II melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.	Pengadilan Negeri Poso telah menolak Gugatan Pulmin Lamboutoh dan Pulmin Galaento untuk seluruhnya. Saat ini Pulmin Lamboutoh dan Pulmin Galaento mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Palu.
48	Perkara No. 131/PDT.G/2018/PN.MKS di Pengadilan Negeri Makassar.	Herlinda Mahmyuddin selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> • Nur Darmiati selaku Tergugat I, • PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II, • Anggrainy selaku Tergugat III, • H Mubarak Pataba selaku Tergugat IV. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Makassar.
49	Perkara No. 158/PDT.G/2018/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo.	Nirma Ayu Purnatama selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan selaku Turut Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.
50	Perkara No. 577/PDT.PLW/2018/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang.	Anton Sujono selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
51	Perkara No. 172/PDT.G/2018/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru.	Wato Yuwono Ramli Matali selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabulkan Gugatan Wato Yuwono Ramli Matali untuk sebagian. Saat ini PT BFI Finance Indonesia Tbk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
52	Perkara No. 168/PDT.G/2018/PN.PLB di Pengadilan Negeri Palembang.	Eli Darniawati selaku Penggugat melawan Indramaya selaku Tergugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Turut Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Palembang.
53	Perkara No. 35/PDT.G/2018/PN.LMG di Pengadilan Negeri Lamongan.	Sudarto selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I dan Iman Junaidi selaku Tergugat II.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Lamongan.
54	Perkara No. 691/PDT.G/2018/PN.TGR di Pengadilan Negeri Tangerang.	Tien Krisen selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I dan PT Smart Multi Finance selaku Tergugat II.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
55	Perkara No. 799/PDT.G/2018/PN.TGR di Pengadilan Negeri Tangerang.	Salehuddin Ahmad selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
56	Perkara No. 890/PDT.G/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya.	Nur Rachaman selaku Penggugat melawan Ade Abrianto selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II, Giarta Sudira selaku Turut Tergugat I dan Martio selaku Turut Tergugat II.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
57	Perkara No. 111/PDT.G/PN.BGR di Pengadilan Negeri Bogor.	Auda Thariq selaku Penggugat I dan Muhammad Heikal selaku Penggugat II melawan Hendra Winata selaku Tergugat I, Josse Saputra selaku Tergugat II dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat III.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Bogor.
58	Perkara No. 68/PDT.G/2018/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo.	Julian selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo.
59	Perkara No. 234/PDT.G/2018/PN.PLB di Pengadilan Negeri Palembang.	Wendy Romansyah selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Palembang.
60	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuk Linggau.	Gema Fernando selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lubuk Linggau.
61	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sarolangun.	Sayuti selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sarolangun.
62	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon.	Eny Mutia selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon.

KASUS HUKUM 2018

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
63	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kuningan.	Yadi selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kuningan.
64	Perkara No. 27/PDT.G/2018/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi.	Ardinal selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi.
65	Perkara No. 120/G/2018/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.	PT Aryaputra Teguharta (APT) selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) selaku Tergugat; • PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengajukan diri selaku Tergugat II Intervensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTUN Jakarta mengabulkan permohonan BFI Finance selaku Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela tanggal 28 Juni 2018; 2. PTUN Jakarta mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan (<i>Schorsing</i>) yang dimohonkan APT atas Obyek Sengketa Tata Usaha Negara melalui Penetapan No.120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2018; 3. PTUN Jakarta mengabulkan Gugatan APT terhadap Kemenkumham RI melalui Putusan No. 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 12 November 2018 (Putusan PTUN Jakarta); 4. BFI Finance mengajukan Banding atas Penetapan <i>Schorsing</i> dari PTUN Jakarta kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 20 Juli 2018; 5. BFI Finance mengajukan Banding atas Putusan PTUN Jakarta kepada PTTUN Jakarta pada 12 November 2018, dan Kemenkumham RI juga mengajukan Banding atas putusan yang sama kepada PTTUN Jakarta pada 21 November 2018.

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
66	Perkara No. 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	APT selaku Penggugat melawan BFI Finance dan Direksi BFI Finance yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar, dan Cornelius Henry Kho) selaku Tergugat, dengan tuntutan, antara lain, pembayaran uang paksa (<i>dwangsom</i>) karena belum mengembalikan atau menyerahkan saham-saham APT yang dihitung sampai dengan tanggal Gugatan pada 19 September 2018 sebesar Rp80.360.000.000,00.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
67	Perkara No. 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	<p>APT selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> BFI Finance dan Direksi BFI Finance yang menjabat pada saat ini (Francis Lay Sioe Ho, Sudjono, Sutadi, Sigit Hendra Gunawan, dan Andrew Adiwijanto), Direksi BFI Finance yang menjabat pada saat itu (Cornelius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar), Harry Jesus Rodriquez Palmer (mantan Komisaris BFI Finance), Notaris BFI Finance (Aulia Taufani, S.H., Fathiah Helmi, S.H., dan Herna Gunawan, S.H.), yang seluruhnya selaku Tergugat; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Sirca Datapro Perdana, ketiganya selaku Turut Tergugat; <p>dengan tuntutan, antara lain, pembayaran dividen tahun buku 2002-2017 sebesar Rp644.814.929.646,00, bunga sebesar Rp133.930.161.542,00, ganti rugi immaterial karena tidak membayarkan dividen sebesar Rp500.000.000.000,00, dan pembayaran bunga sebesar 6% per tahun dari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan pembayaran dimaksud.</p>	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	No. Perkara	Subjek Hukum	Status
68	Perkara No. 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	<p>APT selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BFI Finance, Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Trinugraha Capital & Co SCA, TPG Capital, Northstar Group Pte. Ltd., Compass Banca SPA, Mediobanca SPA, OJK, BEI (seluruhnya selaku Tergugat); • PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT KSEI, PT Sirca Datapro Perdana (ketiganya selaku Turut Tergugat); <p>dengan tuntutan, antara lain, pengembalian dan penyerahan 32,32% saham BFI Finance kepada APT, serta pembatalan transaksi jual-beli saham yang dibuat oleh Trinugraha Capital & Co SCA dengan Compass Banca SPA dan pihak ketiga lainnya.</p>	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara dan klaim yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan / material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama 2018, Perusahaan menerima surat teguran terkait dengan keterlambatan Perusahaan dalam menyerahkan laporan kepada OJK, serta hasil audit OJK. Seluruh teguran yang disampaikan tersebut telah terselesaikan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Teguran tertulis pertama sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan oleh Perusahaan Pembiayaan.
2. Peringatan pertama terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final terhadap POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan pasal 9 huruf b, pasal 13 ayat (4), pasal 18 ayat (2), pasal 31 ayat (2), pasal 41 ayat (4) huruf d, dan pasal 66.
3. Peringatan pertama terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final terhadap pasal 22 POJK No. 29/POJK.05/2014.

Tidak ada lagi isu yang perlu ditindaklanjuti.

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perusahaan berkepentingan untuk memastikan terciptanya mekanisme yang jelas dan efektif dalam hal penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi.

Mekanisme penyebaran informasi di Perusahaan mencakup mekanisme internal dan eksternal, yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berbeda, bergantung pada jenis informasi yang mereka perlukan.

Perusahaan melaksanakan penyebaran informasi ke berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan, pemahaman, dan mendorong terciptanya persepsi positif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Perusahaan.

Akses terhadap informasi dan data Perusahaan tersedia untuk seluruh pemangku kepentingan dan investor, melalui situs web www.bfi.co.id. Pada situs tersebut tercantum berbagai informasi mengenai profil, produk dan jasa, laporan kinerja dan keuangan Perusahaan, dan lain-lain.

Jalur-jalur penyebaran informasi lainnya yang dikelola Perusahaan termasuk:

1. *Customer Care Hotline*: 1500018
(*one-stop solution*)
2. *Email Customer Care*: customercare@bfi.co.id
3. *SMS Customer Care*: 08158 767 234
4. Media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan LinkedIn:
 - Facebook: BFI Finance
 - Twitter: @BFIFinance
 - Instagram: [bfifinance](https://www.instagram.com/bfifinance)
 - LinkedIn: PT BFI Finance Indonesia Tbk
 - YouTube: BFI Finance Official

Pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan informasi lainnya yang tidak tersedia dari jalur-jalur di atas, dapat langsung menghubungi Kantor Pusat BFI Finance pada alamat berikut:

PT BFI Finance Indonesia Tbk

u.p. Unit Corporate Communication (CorComm)

BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan 15322
Indonesia

Tel: (62-21) 2965 0300, 2965 0500

Fax: (62-21) 2966 0757, 2966 0758

E-mail: corporate.communication@bfi.co.id

Situs web: www.bfi.co.id

KOMUNIKASI PERUSAHAAN

Fungsi untuk menyampaikan informasi, kabar terbaru, dan pesan yang mengatasmakan Perusahaan secara menyeluruh, sekaligus membangun koordinasi yang efektif di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan, yang dapat membangun dan memelihara reputasi Perusahaan di mata para pemangku kepentingan ada di Corporate Communication.

Corporate Communication berada di bawah naungan Departemen Corporate Communication & Corporate Social Responsibility (CorComm & CSR), bertugas untuk mengelola berbagai kegiatan komunikasi dan mengatur seluruh fungsi komunikasi internal dan eksternal Perusahaan, menjaga kepuasan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan Pemerintah melalui penyediaan informasi dan data Perusahaan. Komunikasi Perusahaan kepada para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui tiga cara berikut:

- Komunikasi Eksternal (Umum);
- Komunikasi Internal; dan
- *Corporate Branding*.

Komunikasi Eksternal (Umum)

Perusahaan menjalankan kegiatan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal dengan cara mengelola dan menyebarkan informasi Perusahaan ke berbagai media massa serta pihak ketiga lainnya. Langkah ini diyakini membantu terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dan kalangan masyarakat umum. Informasi yang diperlukan terkait kondisi bisnis Perusahaan disampaikan secara tepat waktu dan akurat.

Fungsi komunikasi eksternal Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi di semua media komunikasi Perusahaan;
2. Mengembangkan materi publikasi untuk meningkatkan profil Perusahaan dan kegiatan pemasaran Perusahaan;
3. Memastikan adanya konten terkini dan sesuai, membuat perbaikan fungsi, menerapkan dan memperluas strategi media sosial untuk meningkatkan profil Perusahaan;
4. Memastikan komunikasi dan pedoman merek Perusahaan berjalan dengan baik dan memantau segala hal yang berkaitan dengan merek (*brand*) Perusahaan;
5. Bertanggung jawab atas isi dan informasi dalam setiap media komunikasi dan materi promosi, baik bersifat *above-the-line* maupun *below-the-line*, baik internal maupun eksternal;
6. Bekerja sama dengan unit-unit lain yang terkait untuk memastikan adanya fungsi komunikasi yang terintegrasi dan saling melengkapi;
7. Mendukung semua kegiatan atau acara Perusahaan yang berjalan baik internal maupun eksternal;
8. Bekerja sama dengan komunitas atau kelompok pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan visi dan misi Perusahaan; dan
9. Bekerja sama secara komprehensif dengan regulator untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam kesehariannya, Perusahaan menggunakan saluran komunikasi eksternal sebagai berikut:

- Komunikasi melalui Situs Web Perusahaan



Situs web Perusahaan, www.bfi.co.id, merupakan jalur penyediaan informasi terkini terkait pencapaian kinerja keuangan Perusahaan secara triwulan, keterbukaan terkait aksi korporasi, serta informasi terkini lainnya tentang Perusahaan. Situs web Perusahaan diperbarui dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan pelanggan dan masyarakat mempelajari program-program promosi terbaru, kesaksian pelanggan, dan jasa-jasa pembiayaan yang Perusahaan tawarkan.

Pengunjung situs web dapat berkomunikasi dengan staf *Customer Care* seputar produk-produk jasa pembiayaan, menyampaikan keluhan atau saran, serta bertanya tentang lowongan pekerjaan dan beasiswa. Sejak 2016, situs web BFI Finance telah dilengkapi dengan fungsi komunikasi dan akses data untuk memudahkan masyarakat umum, pelanggan dan calon pelanggan, investor dan calon investor, serta regulator, mengetahui berbagai berita seputar kinerja, aktivitas, dan pencapaian Perusahaan terkini.

Pengembangan dan pengkinian situs web Perusahaan diterapkan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

- Jejaring Sosial Perusahaan



BFI Finance memperhatikan perkembangan terkini di dunia media sosial dan memanfaatkannya untuk menjalin komunikasi interaktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan membuka saluran komunikasi *online* melalui Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan YouTube. Sarana ini dikelola secara bersama-sama oleh Unit Corporate Communication dan Unit Digital Marketing.

- Siaran Pers



BFI Finance menerbitkan siaran pers dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik. Siaran pers ini dimuat di berbagai media, baik cetak maupun *online*, di seluruh Indonesia.

- Jalur Komunikasi Lainnya

Perusahaan mengelola jalur komunikasi lainnya untuk memudahkan interaksi dengan para pelanggan dan calon pelanggan (konsumen secara umum), yaitu:

1. Fasilitas SMS *Customer Care*: 08158 767 234;
2. *Customer Care Hotline*: 1500018; dan
3. Email *Customer Care*: customer-care@bfi.co.id.

Komunikasi Internal

Perusahaan menyediakan akses terhadap informasi terkait berbagai aspek dalam bisnis Perusahaan bagi para karyawannya. Akses dan komunikasi internal ini memastikan karyawan mengetahui informasi dan memiliki pemahaman terkini yang akurat tentang kondisi Perusahaan, selain juga informasi umum lainnya yang relevan dengan aktivitas bisnis Perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi yang Perusahaan terapkan dengan para pemangku kepentingan eksternal juga dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal dengan cara ini, sehingga kualitas interaksi antara manajemen dengan para pemangku kepentingan internal, khususnya para karyawan, semakin baik.

Perusahaan juga memberlakukan sistem komunikasi satu pintu untuk komunikasi internal dan eksternal. Seluruh informasi Perusahaan yang bersifat umum dikelola oleh Unit CorComm.

Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal Perusahaan antara lain:

- Media Elektronik

Di Perusahaan, sarana komunikasi melalui media cetak (seperti buletin) telah lama digantikan dengan media digital yang menerapkan konsep bebas kertas (*paperless*) untuk meminimalkan penggunaan bahan kertas, meningkatkan efisiensi operasional, dan melestarikan lingkungan. Media elektronik yang Perusahaan gunakan untuk komunikasi internal ini termasuk *e-mail blast*, situs web Perusahaan, dan portal internal Service Insight Community (SIC) yang merupakan pusat sarana informasi elektronik khusus bagi karyawan, yang memuat informasi terkini terkait aktivitas bisnis, aktivitas karyawan, sarana berbagi informasi dari karyawan untuk karyawan, informasi umum, serta kampanye hidup sehat dan peduli lingkungan.

- Pertemuan



Perusahaan menyelenggarakan pertemuan yang berisi dialog dan *sharing* dari para manajemen senior Perusahaan dan pembicara eksternal kepada para karyawan mengenai topik-topik terkini, baik yang berhubungan dengan aktivitas bisnis Perusahaan maupun pengembangan kepribadian.

Corporate Branding

Corporate branding berfungsi untuk melakukan koordinasi berbagai aktivitas Perusahaan untuk meningkatkan citra Perusahaan di mata publik, terutama pemangku kepentingan eksternal. Fungsi *corporate branding* bertugas menstandarisasi dan menentukan batasan baku untuk segala hal yang terkait identitas Perusahaan dan cara-cara yang efektif untuk mengomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan eksternal dan internal.

Di 2017, Perusahaan telah meluncurkan Panduan Identitas Perusahaan atau *Corporate Brand Guidelines* terbarunya. Panduan ini difungsikan untuk:

- Memperkuat identitas Perusahaan melalui komunikasi visual yang kuat, seragam dan menyeluruh, dengan grafik atau gambar yang sesuai dengan rumusan visi, misi, posisi dan komitmen Perusahaan;
- Menjadi patokan untuk seluruh program dan strategi untuk membentuk citra positif Perusahaan di benak pelanggan dan calon pelanggan di masa yang akan datang;
- Menjadi landasan bagi sistem operasional Perusahaan yang menyeluruh;
- Menyampaikan identitas Perusahaan dengan jelas sehingga masyarakat mengenalinya dengan lebih baik; dan
- Mendukung perangkat pemasaran dan promosi Perusahaan.

Aktivitas *corporate branding* yang dilakukan di 2018, antara lain:

- Memantau standarisasi berbagai atribut terkait identitas Perusahaan;
- Menyebarkan *tagline* Perusahaan *#SelaluAdaJalan* sebagai salah satu kunci penyebaran visi dan misi BFI Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang siap membantu kebutuhan masyarakat dan mendukung swasembada masyarakat melalui usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar;
- Memberikan konsultasi dan bantuan ke berbagai unit kerja di Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan acara resmi Perusahaan, atau melibatkan partisipasi sponsor dari Perusahaan agar selaras dengan aturan-aturan standar identitas Perusahaan;

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Memberikan konsultasi dan bantuan untuk mendukung kampanye produk-produk pembiayaan dari Perusahaan;
- Memastikan bahwa segala atribut yang dipergunakan dan membawa nama Perusahaan, baik untuk kegiatan tingkat nasional maupun lokal di kantor cabang, telah sesuai dengan standar identitas Perusahaan;
- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan bisnis digital sederhana lewat sosial media, bagi 150 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Malang, Jawa Timur;



- Menyelenggarakan agenda rutin tahunan sebagai puncak perayaan ulang tahun Perusahaan, yaitu BFI RUN 2018; dan



- Mengelola produk cetakan berupa souvenir Perusahaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensi Perusahaan.

Materi Promosi Perusahaan



Perusahaan menyebarluaskan *branding* Perusahaan melalui materi promosi berupa suvenir dan barang cetakan lainnya.

Sementara informasi produk untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan dalam memanfaatkan layanan pembiayaan Perusahaan, menarik minat pelanggan baru, menjaga kestabilan penjualan dalam kondisi pasar yang lesu, membedakan serta mengunggulkan produk layanan pembiayaan yang dimiliki oleh Perusahaan dibandingkan produk para pesaing, serta membentuk citra produk di mata pelanggan dikelola oleh Unit Marketing Communication atau MarComm (mencakup fungsi *strategic communication* dan *event activation*) dan Digital Marketing. Aktivitas yang dilakukan unit-unit ini telah dirinci pada bagian Aspek Pemasaran dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 152).

KORESPONDENSI DENGAN OJK DAN BEI

Selama 2018, Perusahaan berkorespondensi kepada OJK sebanyak 40 kali dan kepada BEI sebanyak 50 kali. Fungsi ini dijalankan oleh Unit Capital Market Regulatory Compliance yang bernaung di bawah Departemen Corporate Secretariat.

HUBUNGAN INVESTOR

Fungsi Hubungan Investor di BFI Finance adalah untuk membina komunikasi dan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan pemegang saham, investor prospektif, dan analis.

Melalui fungsi tersebut, Perusahaan berupaya untuk memungkinkan interaksi efektif antara Perusahaan dengan masyarakat luas, untuk menyebarluaskan perkembangan terkini dan informasi yang penting untuk diketahui oleh pasar, dengan cara penyampaian yang konsisten dan transparan. Ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelaksanaan *analyst meeting* (termasuk paparan publik), konferensi, kunjungan investor ke Perusahaan dan *conference call*, dan juga penyampaian informasi melalui situs resmi Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Hubungan Investor memiliki tugas dan tanggung jawab berikut:

- Memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama pemegang saham, investor prospektif, dan lembaga pemerintah terkait pasar modal dan investasi;
- Mengoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan;
- Menangani proses publikasi laporan-laporan Perusahaan secara online di situs web Perusahaan, www.bfi.co.id; dan
- Bertindak sebagai penyelenggara, koordinator utama, dan pengawas berbagai kegiatan Perusahaan, seperti RUPS dan Paparan Publik.

Beliau menjabat sebagai Investor Relations Head sejak Januari 2011. Sebelum bergabung dengan BFI, beliau menjabat sebagai Vice President Equity Capital Markets di CIMB Investment Bank di Malaysia dan Indonesia hingga 2009. Beliau mengawali kerierinya sebagai Analis di Nikkei Pacific Corporate Advisors, Kuala Lumpur, pada 2001, dan selanjutnya mengikuti Program Manajemen Keuangan di General Electric pada 2002–2004. Beliau memegang gelar Bachelor of Arts atau B.A. (Hons) di bidang Ekonomi Industri dari University of Nottingham, Inggris, lulus tahun 1999, dan Master of Science atau M.Sc. di bidang Sekuritas, Investasi, dan Perbankan Internasional dari ISMA Centre di University of Reading, Inggris, lulus tahun 2000.

Koon Pek, Ng

Warga Negara: Malaysia

Usia: 41

Domisili: Jakarta, DKI Jakarta



PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR 2018

Pada 2018, Unit Hubungan Investor melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berikut:

TABEL 135 Kegiatan Hubungan Investor 2018

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
<i>Analyst Meeting</i>	2 kali
Konferensi	3 kali
Kunjungan Investor	68 kali

KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan di Perusahaan bertugas untuk memantau kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan Perusahaan, serta memastikan pemenuhan peraturan yang berlaku. Melalui program-program yang terencana dan terpadu, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan budaya kepatuhan dan mempertahankan efektivitas manajemen risikonya.

Unit Kepatuhan di BFI Finance dikelola oleh Direksi. Melalui rapat Direksi, setiap bulan dilakukan pemantauan atas kepatuhan setiap pimpinan di divisi, departemen, dan unit Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Unit Kepatuhan berada di bawah pengawasan langsung Presiden Direktur dan Sekretaris Perusahaan.

Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, selama 2018 Perusahaan mengikuti pelatihan di bidang kepatuhan yang diselenggarakan oleh lembaga eksternal terkait sosialisasi peraturan baru dan pengkinian peraturan yang ada, serta mengkaji dan menyebarkan tata tertib dan peraturan baru di lingkungan internal Perusahaan.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

KODE ETIK

BFI Finance memiliki dan menerapkan Kode Etik Perusahaan, yakni serangkaian kebijakan terkait standar etika bisnis dan perilaku bagi karyawannya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya, agar sesuai dengan visi, misi, dan budaya Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip GCG berikut:

- **Transparansi**, diterapkan dengan memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji;
- **Kemandirian**, diterapkan dengan menjalankan kegiatan secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik tanpa dapat dipengaruhi pihak manapun;
- **Akuntabilitas**, diterapkan dengan menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing;
- **Pertanggungjawaban**, diterapkan dengan menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- **Kewajaran**, diterapkan dengan memberikan rasa keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Isi Kode Etik

Kode Etik Perusahaan terdiri dari etika bisnis dan etika perilaku.

Etika bisnis menjelaskan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan, sesuai prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai dasar Perusahaan, dengan tetap menjaga profitabilitas.

Etika perilaku merupakan seperangkat aturan nilai yang mencerminkan suatu sikap dan komitmen dalam memenuhi ketentuan perilaku untuk menjaga nama baik, kerahasiaan, serta hal-hal penting lainnya yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan memuat nilai-nilai dasar Perusahaan yang dimanifestasikan dalam perilaku-perilaku berikut:

Giat Memperbaiki Diri secara Berkesinambungan

Nilai ini merupakan komitmen dari Perusahaan untuk selalu berkembang, baik dalam sisi kualitas maupun kuantitas, dalam hal perkembangan bisnis maupun kekuatan sumber daya manusia, pemikiran maupun tindakan yang lebih efektif dan produktif, proses maupun hasil kerja yang nyata, untuk mendukung pertumbuhan organisasi. Komitmen pengembangan ini juga diikuti dengan perbaikan secara konsisten dan terus-menerus dalam segala aspek, yaitu dalam pengembangan organisasi, bisnis, produk, proses kerja dan kualitas sumber daya manusia.

Realisasikan Saling Menghormati dan Peduli

Menghormati dan menunjukkan kepedulian merupakan budaya Perusahaan yang dilakukan secara konsisten, tidak hanya terbatas kepada sesama karyawan, tetapi juga keseluruhan organisasi. Menghormati sesama karyawan

dengan cara menghargai perbedaan yang ada, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan, serta mencari persamaan untuk membentuk Perusahaan yang lebih kokoh. Peduli pada kondisi dan situasi Perusahaan, dan turut serta dalam mendukung pencapaian Perusahaan dalam situasi apapun.

Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal

Nilai ini diartikan sebagai tuntutan yang terus-menerus untuk menciptakan kepuasan dalam pelayanan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Pemikiran ini sangat penting sebagai pedoman Perusahaan dalam hal penyusunan prinsip kebijakan dan strategi, aktivitas bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dalam pemberian layanan.

Absolut dalam Integritas

Integritas mencakup keutuhan dan keseimbangan antara pemikiran (perspektif), perkataan dan tindakan terhadap kondisi dan situasi yang ada, dan termasuk di dalamnya adalah kejujuran, ketulusan dan komitmen terhadap suatu keadaan. Integritas juga tercermin dalam kesesuaian dan konsistensi perkataan dan perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan (*walk the talk*) dalam melakukan peraturan Perusahaan demi kemajuan organisasi. Integritas dapat terlihat dalam melakukan hal yang benar dan berani mengakui kesalahan demi terciptanya budaya yang transparan dan positif.

Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya

Kerja sama yang utuh dan optimal dapat diperoleh melalui kepercayaan yang dibangun melalui berbagai kondisi yang ada. Saling percaya merupakan modal utama organisasi untuk mengikat dan mempererat hubungan antara sesama karyawan, antara karyawan dan Perusahaan, dan sebaliknya. Adanya saling percaya disertai itikad dan semangat positif demi kemajuan organisasi adalah

menjadi dasar terciptanya hubungan dan kerja sama untuk jangka waktu yang panjang.

Esensi dari Kode Etik Perusahaan ini selanjutnya dicerminkan dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha yang berlaku di BFI Finance, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Tanggung Jawab Perusahaan

Di dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, BFI Finance mengakui adanya lima bidang tanggung jawab Perusahaan, sebagai berikut:

1. Kepada Pemegang Saham

Perusahaan akan menjalankan usaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham berdasarkan prinsip-prinsip GCG. BFI Finance bermaksud untuk memberikan hasil usaha yang optimal dengan senantiasa memelihara tingkat pengembalian investasi kepada para pemegang saham, serta juga mempertahankan kecukupan dana untuk menggerakkan pertumbuhan Perusahaan. BFI Finance menghargai hubungan dengan para pemegang saham dan akan memberikan informasi tepat waktu, teratur, dan dapat dipercaya mengenai kegiatan, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perusahaan.

2. Kepada Pelanggan

Perusahaan berkomitmen mendapatkan dan mempertahankan para pelanggan dengan menyediakan produk jasa pembiayaan yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dari segi manfaat dan biayanya.

3. Kepada Karyawan

Perusahaan menghargai para karyawan sebagai sumber daya yang penting melalui komitmennya terhadap pengembangan mereka secara berkelanjutan. BFI Finance akan merekrut, mempekerjakan, memberikan pelatihan dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka. Perusahaan

bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat dan menjamin keselamatan para karyawan.

4. Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Perusahaan senantiasa memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan para kreditur, mitra usaha dan pihak lainnya dengan siapa Perusahaan berbisnis, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

5. Kepada Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dengan menghormati undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatannya tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Partisipasi Perusahaan, baik dalam pemberian sumbangan maupun penyelenggaraan pelatihan serta kegiatan sosial lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi lingkungan sekitarnya dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh penerimanya.

Integritas Usaha

BFI Finance beserta seluruh kantor cabangnya dituntut untuk mengutamakan kejujuran, integritas dan kewajaran di semua aspek usaha Perusahaan dan mengharapkan hal yang sama dalam hubungan dengan semua pihak dengan siapa BFI Finance berbisnis. Seluruh transaksi bisnis atas nama Perusahaan dicatat secara akurat sesuai dengan prosedur operasional standar dan tunduk pada audit. Para karyawan perlu mengesampingkan keperluan pribadi mereka ketika menjalankan bisnis Perusahaan.

Pemakaian Dan Perlindungan Aset Perusahaan

BFI Finance memastikan setiap karyawan bertanggung jawab atas pemakaian yang wajar, perlindungan dan pelestarian aset dan sumber daya Perusahaan. Aset dan sumber daya Perusahaan, maupun kesempatan-kesempatan apapun yang timbul berdasarkan kedudukan seseorang, digunakan semata-mata untuk kepentingan pencapaian tujuan Perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karyawan BFI Finance dilarang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan.

Pengungkapan Informasi

BFI Finance menganggap informasi di bidang strategi bisnis merupakan aset penting bagi Perusahaan yang harus dilindungi terhadap kehilangan, pelanggaran serta pemakaian dan pengungkapan yang tidak selayaknya.

Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

BFI Finance akan senantiasa memastikan bahwa semua karyawan mentaati aturan-aturan perdagangan orang dalam. Ini berarti bahwa adanya informasi bukan untuk umum yang dapat mempengaruhi harga saham BFI Finance dirahasiakan dengan baik sampai diumumkan oleh manajemen yang berwenang. Karyawan yang mempunyai informasi sensitif yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham BFI Finance dan hak-hak terkait, tidak boleh melakukan transaksi langsung maupun tidak langsung atas saham BFI Finance dan hak-hak terkait tersebut. Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Pakta Integritas Perusahaan dengan sebaik-baiknya sejalan dengan

pelaksanaan kebijakan strategis yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Guna mendukung penerapan kode etik, Perusahaan mewajibkan beberapa hal berikut:

1. Kode etik yang ditetapkan Perusahaan berlaku bagi seluruh karyawan, termasuk seluruh anggota Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, serta Direksi dan manajemen;
2. Kode etik tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan; dan
3. Manajemen memberi teladan bagi bawahannya dalam penerapan kode etik tersebut.

Sosialisasi kode etik yang dilakukan di 2018 dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Nilai-Nilai Dasar Perusahaan dan panduan perilaku karyawan. Selain itu, Departemen Human Capital juga menyebarluaskan informasi mengenai kode etik melalui *e-mail blast* dan di 2018 telah melakukan pembaruan Kebijakan Perusahaan.

Manajemen BFI Finance memiliki Pakta Integritas yang memuat komitmen Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Pakta Integritas Perusahaan dengan sebaik-baiknya. Pakta Integritas BFI Finance mengatur tentang Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha.

Dalam pelaksanaan Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha ini, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, tanpa melihat posisinya, wajib mematuhi dengan sungguh-sungguh etika pada tingkat tertinggi yang ditanamkan dalam Nilai-Nilai Dasar

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Perusahaan. Manajemen dan karyawan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar tersebut yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan.

Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

BFI Finance memantau penegakan Kode Etik Perusahaan dan menyediakan fasilitas pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik tersebut. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan yang terdiri dari perwakilan Departemen Audit Internal dan Human Capital dan akan diberikan sanksi sesuai jenis dan tingkatan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki nilai-nilai dasar yang dianjurkan untuk dipahami dan dipatuhi sebagai budaya Perusahaan. Nilai-nilai dasar Perusahaan yang disingkat menjadi GREAT adalah:

- Giat Memperbaiki Diri secara Berkesinambungan;
- Realisasikan Saling Menghormati dan Peduli;
- Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal;
- Absolut dalam Integritas; dan
- Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya.

Penjelasan mengenai GREAT sebagai nilai-nilai dasar BFI Finance dijelaskan pada bagian Nilai-Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan dalam Bab Profil Perusahaan (halaman 50).

BFI Finance mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawannya untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang adil, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan komitmen tersebut, BFI Finance mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BFI Finance melakukan pelaporan mengenai pelanggaran yang bermasalah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara berkala.

Kebijakan antikorupsi di Perusahaan juga mencakup, antara lain, penerapan transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa, serta pemberian dan penerimaan hadiah oleh dan bagi Perusahaan.

TRANSPARANSI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prinsip dan Kebijakan

Perusahaan memiliki prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip GCG tanpa benturan kepentingan. Perusahaan menjunjung prinsip kejujuran dan kemandirian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, bersamaan dengan kinerja, karakter, dan semangat bekerja mereka.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa serta hubungan dengan pemasok di Perusahaan meliputi:

1. Penerapan Memo Internal dan Prosedur Operasional untuk pengadaan barang dan jasa;
2. Proses pengadaan barang dilakukan berdasarkan nominal dan tingkat otoritas, khususnya di kantor cabang untuk mempercepat proses dalam pemenuhan barang dan jasa. Pengadaan barang di atas nominal tertentu dilakukan secara terpusat di kantor pusat;
3. Pemasok utama baik barang maupun jasa diwajibkan menyerahkan dokumen legalitas secara lengkap, untuk menjamin hak dan kewajiban dari Perusahaan maupun pemasok dilakukan sesuai dokumen yang ada;
4. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan melarang karyawan Perusahaan untuk menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun dari pemasok; dan
5. Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala untuk seluruh pemasok, untuk memastikan mereka dapat menunjang aktivitas Perusahaan.

Sistem Pengadaan

Perusahaan menyelenggarakan proses pengadaan dalam beberapa tahapan berikut:

1. Perencanaan: pembuatan rencana pengadaan;
2. Persiapan: kerangka acuan kerja, syarat prakualifikasi, dokumentasi pengadaan, strategi metode pemilihan penyedia barang dan jasa;
3. Pemilihan barang dan jasa: pengumuman atau undangan bagi vendor yang memiliki sertifikasi dan prakualifikasi, evaluasi penawaran dan negosiasi, penetapan pemenang, proses kontrak; dan
4. Penggunaan dan pengelolaan aset Perusahaan.

Sistem tersebut dijalankan secara terbuka dan kompetitif dengan mengikutsertakan calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Selain melalui tahapan pengadaan barang dan jasa tersebut, Perusahaan juga menggunakan metode lain, seperti pelelangan, pemilihan langsung, dan pembelian langsung.

Kebijakan dan sistem tersebut membantu memastikan bahwa jumlah dan kualitas barang dan jasa yang diperoleh Perusahaan sesuai kebutuhan, dan diperoleh dengan harga yang kompetitif, pengiriman yang tepat waktu, dan pelayanan purnajual yang baik.

Pengadaan barang, baik di kantor cabang maupun kantor pusat dapat dipantau setiap saat melalui sistem *Fixed Assets Management*.

Asuransi atas Harta Tetap Perusahaan

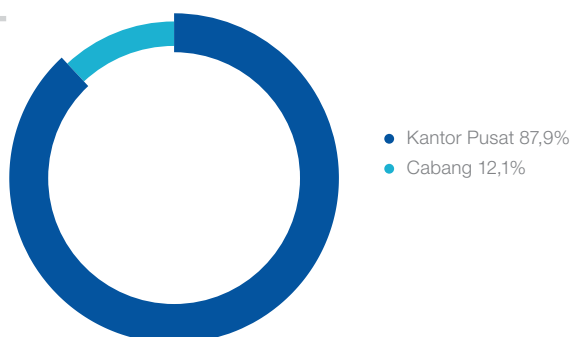
Untuk mengurangi risiko kerugian atau kehilangan atas harta tetap Perusahaan, Perusahaan telah mengasuransikan harta tetap pada perusahaan asuransi. Perusahaan mengasuransikan harta tetap berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Polis Asuransi atas Properti;
2. Polis Asuransi Kehilangan atas Barang Bergerak;
3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor; dan
4. Polis Asuransi Tanggung Gugat (*Public Liabilities*).

TABEL 136 Pengeluaran untuk Pembelian Aset 2018 berdasarkan Lokasi Pembelian

Lokasi	Nilai Pengadaan (Rp)	Persentase	Jumlah Pengadaan	Persentase
Kantor Pusat	157.912.943.804	87,9%	3.099	55,0%
Cabang	21.835.964.079	12,1%	2.531	45,0%

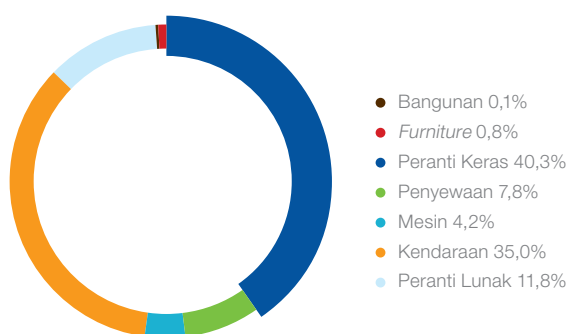
GRAFIK 27 Pembelian Aset 2018 berdasarkan Lokasi Pembelian



TABEL 137 Pengeluaran berdasarkan Jenis Pembelian Aset pada 2018

Jenis Aset	Nilai Pengadaan (Rp)	Persentase	Jumlah Pengadaan	Persentase
Bangunan	115.563.500,00	0,1%	8	0,1%
Furniture	1.370.033.027,30	0,8%	528	9,4%
Peranti Keras	72.433.408.593,21	40,3%	2.261	40,2%
Penyewaan	14.087.713.302,57	7,8%	643	11,4%
Mesin	7.494.237.974,50	4,2%	1.570	27,9%
Kendaraan	63.052.504.375,56	35,0%	509	9,0%
Peranti Lunak	21.195.447.109,81	11,8%	111	2,0%

GRAFIK 28 Pengeluaran berdasarkan Jenis Pembelian Aset pada 2018



PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Pemberian hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian oleh Perusahaan atau pihak yang mewakili Perusahaan kepada pihak-pihak tertentu, dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perusahaan di luar batas-batas kewajaran.

Penerimaan hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh Perusahaan atau pihak yang mewakili Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dengan maksud mempengaruhi keputusan jajaran Perusahaan yang menguntungkan pihak pemberi hadiah.

Terdapat peraturan di Perusahaan tentang pemberian hadiah, suap, dan sejenisnya, pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata, dalam bentuk barang atau jasa.

Dalam hal penerimaan hadiah, karyawan yang menerima hadiah, berapapun nilainya dan dalam bentuk apapun, wajib melaporkan kepada atasan langsung mereka. Penerimaan hadiah dari pihak manapun dalam rangka promosi Perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata, dapat diterima sebagai suatu keputusan dalam pergaulan sehari-hari, dengan ketentuan:

- Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi; dan
- Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pemberi yang sama kepada Perusahaan maksimal tiga kali dalam setahun. Setiap individu yang merupakan bagian dari Perusahaan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif bagi Perusahaan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan menjalankan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perusahaan No. SOP/031 tanggal 22 Maret 2013, sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama tanggung jawab dan kewajaran. Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dimaksudkan untuk memastikan kinerja yang optimal dan kepatuhan hukum dari setiap karyawan BFI Finance dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BFI Finance, setiap individu di lingkungan Perusahaan dapat mengajukan keluhan dan/atau laporan tentang penipuan dan/atau pelanggaran atas tata tertib Perusahaan ataupun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengirimkan laporan mereka melalui salah satu jalur berikut:

1. Surat elektronik (*email*) di fraud_investigator@bfi.co.id;
2. Layanan pesan singkat (SMS) di nomor 082258888911;

3. Alamat surat-menyurat di:
Kantor Pusat PT BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan 15322
Indonesia
u.p. Departemen Audit Internal

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN PENANGANAN PENGADUAN

Setiap pihak yang melakukan pengaduan atau pelaporan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BFI Finance dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perusahaan juga bertanggung jawab secara moral untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor tersebut.

Semua laporan pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran BFI Finance dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya juga dijamin.

Selama 2018, pengaduan dan laporan pelanggaran yang diterima berjumlah 39 laporan, dengan rinciannya disajikan pada Tabel 138 dan proses tindak lanjutnya dijelaskan pada Grafik 29.

TABEL 138 Jumlah Laporan Pelanggaran di 2018 dan Penanganannya

Jenis Laporan/Keluhan	Dalam Proses	Selesai	Jumlah
Dugaan penipuan	0	13	13
Lain-lain	0	26	26
Jumlah	0	39	39

GRAFIK 29 Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran



TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran menerima laporan atau pengaduan yang segera diperiksa oleh pihak pengelola pengaduan, yaitu Departemen Audit Internal dan Divisi Manajemen Risiko. Apabila hasil pemeriksaan terbukti sah sesuai prosedur, maka Perusahaan akan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan SK yang berlaku di Perusahaan.

Pada 2018, seluruh laporan pelanggaran yang masuk telah diselesaikan, dan sanksi yang sepadan untuk setiap pelaku pelanggaran telah diberikan.

AKSI KORPORASI

Di 2018, Perusahaan menjalankan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV senilai Rp2.165.000.000.000,00 pada Maret 2018 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I senilai Rp740.000.000.000,00 pada Juni 2018.

Selain itu, Perusahaan melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp39,00 per saham atau setara dengan Rp583.611.000.000,00. Sebesar Rp344.181.000.000,00 dibayarkan pada 18 Desember 2017, dan sisanya sebesar Rp239.430.000.000,00 dibayarkan pada 18 Mei 2018.

OPSI SAHAM

Pada 2018, Perusahaan tidak menjalankan Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham. Program sejenis terakhir kali dilaksanakan pada 2012 dan telah berakhir di 2016.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BFI Finance telah menyusun sejumlah laporan yang menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan disampaikan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, antara lain:

1. Laporan Tahunan Terintegrasi, yang mencakup:
 - a. Ikhtisar data keuangan penting, termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil Perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk satu tahun buku dan disajikan dalam perbandingan dengan satu tahun buku sebelumnya; dan
 - c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi.

2. Laporan Keuangan publikasi per semester (enam bulan), dipublikasikan di media massa.
3. Laporan Keuangan per triwulan, dipublikasikan pada situs web BFI Finance dan situs web BEI.
4. Laporan Keberlanjutan
BFI Finance telah melakukan pembahasan informasi kegiatan CSR dalam Laporan Keberlanjutan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Terintegrasi.
5. Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BFI Finance telah menyampaikan informasi produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut tersedia bagi pelanggan, antara lain, dalam bentuk *leaflet*, brosur, atau bentuk tertulis lainnya, di setiap outlet BFI Finance pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui situs web BFI Finance, portal *online* yang menyediakan informasi mengenai karakteristik produk finansial di Indonesia serta perbandingan antarproduk tersebut.



Pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi gaung penyemangat kami. BFI Finance turut berinovasi dan menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra bisnis ternama untuk kemudahan pembiayaan.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- 330 Keberadaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 333 Implementasi Program CSR
- 338 Kontribusi untuk Pembangunan



KEBERADAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Interaksi Perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasinya meliputi penyediaan jasa pembiayaan, pelayanan pelanggan, hingga pengembangan ekonomi setempat. Kualitas setiap aktivitas ini menentukan keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan nilai yang bermanfaat bagi seluruh pemegang saham. Oleh karenanya, Perusahaan mengupayakan terwujudnya CSR secara utuh, berkelanjutan, dan berorientasi pada pertumbuhan.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sasaran utama program CSR BFI Finance adalah mempertahankan tingkat kesejahteraan karyawan, mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta melestarikan lingkungan hidup untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup di sekitar wilayah operasionalnya.

Sektor-sektor yang menjadi fokus program CSR BFI Finance adalah Pendidikan, Lingkungan dan Infrastruktur, Kesehatan, Keagamaan, dan Donasi Umum.

KEBIJAKAN STRATEGIS CSR PERUSAHAAN

BFI Finance memiliki kebijakan strategis CSR yang diimplementasikan melalui formulasi strategi, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan CSR di setiap wilayah operasionalnya. Kebijakan ini dirangkum dalam Visi dan Misi CSR Perusahaan, sebagai berikut:

Visi CSR

Menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menjaga keseimbangan 3P (*Profit, People,*

Planet) dan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat.

Misi CSR

- Memberantas keterbelakangan sosial-ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Perusahaan
- Berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi
- Pemberdayaan keluarga-keluarga ekonomi bawah melalui pembiayaan mikro
- Penyediaan saluran distribusi untuk usaha-usaha kecil
- Mengimplementasikan cara-cara konservasi energi dalam rutinitas bisnis sehari-hari

KEBIJAKAN PROGRAM CSR

Think

Semua lapisan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan, memikirkan dan merasakan isu-isu sosial yang terjadi di luar dan di dalam Perusahaan. Hal ini merupakan bentuk pola pikir diri sendiri yang sadar akan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan mulai memikirkan cara untuk terlibat aktif di dalamnya.

Act

Semua lapisan di dalam lingkungan Perusahaan membantu memberikan solusi atas isu-isu tersebut dan mengimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata dari diri sendiri, sebagai hasil dari pemikiran dan keterlibatan secara aktif dalam lingkungan sekitar.

Preserve

Hasil implementasi dan tindakan nyata tersebut dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan oleh semua lapisan Perusahaan, sehingga memperlihatkan hasil yang positif dari tindakan nyata tersebut.

Berdasarkan kebijakan “*Think, Act, Preserve*” tersebut, kegiatan CSR menjadi pilar pendukung bisnis BFI Finance dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, menerapkan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan mempromosikan citra Perusahaan di mata masyarakat. Dengan demikian, hubungan yang harmonis dan saling membangun dapat tercipta di antara Perusahaan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Selain itu, BFI Finance memiliki kebijakan untuk mengatur aspek perencanaan dan perumusan anggaran, pemetaan sosial, pengendalian, evaluasi dan pemantauan program CSR Perusahaan, melalui Kebijakan Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Program CSR.

ANGGARAN PROGRAM CSR

Pelaksanaan program CSR merupakan tanggung jawab Unit CSR yang berada di bawah pengawasan Divisi Keuangan dan Departemen Corporate Communication & CSR. Alokasi anggaran untuk kegiatan CSR mempertimbangkan kesesuaian kegiatan dengan visi dan misi Perusahaan, proyeksi dan rencana bisnis tahunan Perusahaan, serta hasil evaluasi kegiatan CSR di tahun sebelumnya.

Berikut penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan CSR BFI Finance untuk bidang lingkungan, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab kepada konsumen di 2018:

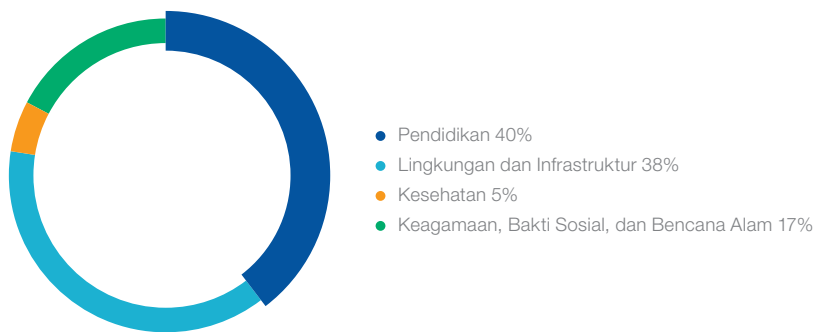
TABEL 139 Penggunaan Anggaran Program CSR

Keterangan	Jumlah (Rp juta)
Lingkungan (termasuk Infrastruktur)	660
Praktik Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	66.545
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	1.107
Tanggung Jawab kepada Konsumen	2.066
Jumlah	70.378

KEBERADAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Anggaran kegiatan CSR BFI Finance di 2018 di bidang Lingkungan dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan adalah sebesar Rp1,77 miliar, meningkat 20% dari anggaran 2017 sebesar Rp1,48 miliar. Penggunaan terbesar anggaran CSR BFI Finance adalah untuk bidang Pendidikan, mencakup 39% dari jumlah anggaran.

GRAFIK 30 Anggaran CSR



IMPLEMENTASI PROGRAM CSR

PELESTARIAN LINGKUNGAN

Sebagai perusahaan jasa keuangan, BFI Finance menghasilkan sejumlah dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, yang terutama menggunakan energi listrik secara intensif, serta penggunaan material umum seperti air, kertas, dan BBM, dalam jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan kegiatan usaha lainnya.

Menyadari dampak tersebut, BFI Finance berkomitmen menjalankan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui penerapan sejumlah upaya konservasi energi dalam kegiatan operasionalnya, di antaranya:

1. Penggunaan peralatan kantor yang hemat energi;
2. Kewajiban mematikan lampu pada jam istirahat;
3. Pembatasan operasi fasilitas pendingin udara; dan
4. Pengurangan pemakaian barang sekali pakai, seperti kertas tisu, *styrofoam*, dan air minum dalam kemasan.

Implementasi program CSR di 2018 untuk lingkungan (termasuk infrastruktur), meliputi:

1. Edukasi lingkungan mengenai sampah organik dan non-organik melalui *talk show* dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah;
2. Pengadaan dan pembangunan fasilitas sanitasi air bersih dan toilet/kamar mandi di beberapa wilayah di Indonesia;
3. Renovasi Bank Sampah di wilayah Yogyakarta;
4. Pengenalan budaya cocok tanam (hidroponik) kepada siswa-siswa SD di wilayah Serpong;
5. Pembangunan fasilitas dan sarana pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan sarana lainnya; dan
6. Pembangunan Sekolah Indonesia Cepat Tanggap di Lombok, berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik UI (ILUNI FT UI).

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Program pengembangan sosial dan kemasyarakatan Perusahaan terdiri dari empat bidang kegiatan utama, yaitu:

- Pendidikan: fokus jangka panjang dalam program pengembangan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi, program Beasiswa S1, pengembangan keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat.
- Kesehatan: program rutin donor darah, pengobatan dan operasi gratis bagi warga kurang mampu.
- Keagamaan: program kepedulian masyarakat dalam rangka perayaan hari besar keagamaan (bulan Ramadhan, Idul Adha, Natal).
- Program sosial dan donasi umum: pemberian bantuan bagi korban bencana alam (internal dan eksternal).

Bidang Pendidikan

- Beasiswa Mahasiswa Strata Satu (S1)
Penerima beasiswa S1 BFI Finance menerima paket lengkap pembayaran biaya kuliah, uang saku, dan tunjangan lain, serta mendapat jaminan bekerja di BFI Finance setelah menyelesaikan kuliah. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa S1 berprestasi di universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang mendaftar secara online melalui www.bfi.co.id.
- Apresiasi Prestasi Anak Karyawan
BFI Finance memberikan beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi dengan pendidikan SD hingga SMA/SMK di berbagai wilayah Indonesia.
- Rumah Jahit BFI
Bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), BFI Finance menyelenggarakan

IMPLEMENTASI PROGRAM CSR



Yessi Setiawan Santoso,
Penerima Beasiswa S1 BFI Finance, 2010

BFI Finance telah secara aktif memberikan fasilitas pendidikan dalam bentuk beasiswa selama bertahun-tahun. Saya menerima beasiswa di 2010 dan telah bergabung di BFI Finance sejak 2013. Perusahaan selalu memberikan ruang belajar bagi karyawannya untuk berkembang dan berinovasi, sehingga ilmu yang diperoleh dari kegiatan peningkatan kompetensi karyawan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Saya sangat puas dengan kuatnya semangat profesionalisme yang ditanamkan di lingkungan kerja, terutama dukungan para pemimpin dalam pengambilan keputusan serta pemberian arahan dan apresiasi. Hal ini membuat saya optimis akan potensi pengembangan karier setiap insan.



program kewirausahaan Rumah Belajar di Duri Kepa, Jakarta Barat untuk memberikan pendidikan keterampilan kepada anak-anak dan remaja. Salah satu perwujudan dari Rumah Belajar adalah pembentukan Rumah Jahit BFI. Di 2018, Perusahaan memberikan modal awal sebagai tahap pengembangan program ini, dan memperluas kurikulum, bekerja sama dengan Kostoom, salah satu mitra bisnis BFI Finance.

- Gerakan 1000 untuk Anak Bangsa
Di 2018, BFI Finance memberikan program pelatihan karakter untuk seribu siswa SMK di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sukabumi, Jawa Barat.

- Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Sekolah
Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah, seperti alat tulis, seragam, dan perlengkapan mengajar, juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia melalui kantor-kantor cabang BFI Finance.

Bidang Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, BFI Finance melaksanakan berbagai program peduli kesehatan. Beberapa program yang dilakukan di 2018 adalah:

- Donor Darah PMI dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Kegiatan donor darah yang dikoordinasikan dengan Palang Merah Indonesia (PMI) diselenggarakan rutin setiap tahun. Pada 2018, BFI Finance menyelenggarakan tiga kali acara donor darah, masing-masing untuk memperingati Hari Ulang Tahun BFI Finance, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan di pertengahan Desember 2018 untuk memeriahkan tutup tahun. BFI Finance juga melakukan kegiatan donor darah di beberapa daerah lainnya di Indonesia.
- Operasi Bibir Sumbing Gratis
Sejak 2012, BFI Finance bekerja sama dengan Yayasan Citra Baru (YCB) untuk melaksanakan Program Operasi Gratis bagi Penderita Celah Bibir (Bibir Sumbing) dan Celah Langit-Langit Mulut. Hingga 2018, BFI Finance telah mendanai kegiatan operasi untuk 34 orang penerima manfaat dari kalangan kurang mampu.
- Khitanan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
BFI Finance melaksanakan program pelayanan kesehatan di beberapa wilayah operasionalnya dalam bentuk khitanan massal, senam sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum.

Bidang Keagamaan

Dalam rangka meningkatkan toleransi beragama di tengah masyarakat, BFI Finance menyelenggarakan kegiatan berikut:

- Bakti Sosial Ramadhan dan Perayaan Keagamaan Lain
BFI Finance melaksanakan Bakti Sosial Ramadhan 1439 H melalui pembagian makanan buka puasa (takjil) kepada warga kurang mampu di berbagai wilayah cabang. Bakti sosial ini diprioritaskan bagi janda miskin, keluarga kurang mampu berdasarkan data kependudukan dari

pemerintah daerah setempat, petugas pemungut sampah, dan petugas penyapu jalan.

- BFI Berkurban
Perusahaan turut merayakan Idul Adha 1439 H dengan menyelenggarakan acara 'BFI Berkurban'. Dalam acara ini, Perusahaan membagikan daging kurban kepada sejumlah yayasan panti asuhan di Tangerang Selatan.

Bidang Sosial dan Donasi Umum

Kegiatan amal berbentuk donasi dilakukan secara selektif dengan pertimbangan kemanusiaan. Donasi berupa bahan pokok bagi korban bencana alam (seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan musibah besar lainnya) di Indonesia. BFI Finance juga menyalurkan bahan pokok ke panti asuhan dan pihak lain yang membutuhkan, serta memberikan bantuan fasilitas fisik dan infrastruktur bagi sejumlah tempat ibadah dan yayasan di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BFI Finance berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kualitas dari seluruh karyawannya agar dapat menjalankan aktivitas secara lebih efektif dan efisien, serta dapat menghasilkan kinerja terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

Bentuk penerapan pengembangan sumber daya manusia BFI Finance dalam rangka memastikan tingkat kesejahteraan karyawannya terpenuhi dengan baik, antara lain:

- Struktur gaji dan bonus kerja yang disesuaikan dengan prestasi dan kontribusi karyawan serta dengan standar upah minimum;
- Tunjangan dan fasilitas, antara lain, tunjangan kesehatan, transportasi, perumahan, program kepemilikan sepeda motor dan mobil, fasilitas

IMPLEMENTASI PROGRAM CSR

perlindungan dalam bentuk program Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Jiwa, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

- Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara ketat. Klausul-klausul K3 dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani karyawan dan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan mempromosikan gaya hidup yang seimbang dan sehat bagi karyawannya dengan menyediakan sarana olahraga, pemeriksaan kesehatan rutin, dan informasi tentang pola hidup sehat; dan
- Program BFI 4 U, yaitu program pengembangan kemampuan kerja yang bersifat strategis sekaligus berkontribusi secara sosial, yang diselenggarakan selama tiga bulan dan diikuti lima kelompok karyawan kantor pusat yang terdiri dari 9-10 karyawan dengan misi dan visi yang sama, namun memiliki konsep berbeda. Program ini meliputi penyusunan strategi dan rancangan eksekusi program sosial, pemantapan program, dan peningkatan kolaborasi tim dalam implementasi program yang akan dijalankan sesuai dengan visi dan misi CSR Perusahaan di berbagai bidang.

FOKUS PADA LAYANAN PELANGGAN

Untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam memanfaatkan produk-produk pembiayaan sekaligus memperkuat loyalitas mereka terhadap Perusahaan, BFI Finance melaksanakan program-program terencana untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan menetapkan standar pelayanan yang tinggi bagi setiap karyawannya. Pelayanan pelanggan di BFI Finance terus disempurnakan dari segi sistem, prosedur, keandalan jaringan, hingga penanganan keluhan. Dalam menjalankan program pelayanan pelanggan tersebut, BFI Finance menerapkan suatu nilai dasar pelayanan yang

disebut *Service Insight*, yang dijelaskan pada bagian Pengembangan Jaringan & Operasional dalam bab Unit Pendukung Bisnis, di halaman 126.

Program-program pelayanan pelanggan yang BFI Finance jalankan di 2018 sebagai bagian dari perwujudan tanggung jawab kepada konsumen, antara lain:

1. Pelatihan karyawan dalam aspek pelayanan;
2. Kerja sama dengan berbagai *merchant* favorit di setiap wilayah di mana Perusahaan beroperasi, untuk memberikan penawaran diskon khusus bagi seluruh pelanggan BFI Finance;
3. Penerapan *Special Treatment* bagi pelanggan tertentu yang berpredikat *Excellent*; dan
4. "BM Goes to Front Office" dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional.

BFI Finance menyediakan sarana komunikasi yang memadai bagi pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk-produk pembiayaan serta sarana untuk menyampaikan keluhan terkait produk dan pelayanan Perusahaan.

Informasi produk pembiayaan BFI Finance tersedia pada situs web Perusahaan.

BFI Finance mencatat semua umpan balik dari konsumen dan masyarakat umum lainnya yang masuk melalui berbagai jalur. Di 2018, terdapat 12.663 umpan balik dalam bentuk keluhan dan saran, dengan 60% di antaranya merupakan pertanyaan seputar produk Perusahaan. Tidak terdapat keluhan apapun dari konsumen mengenai pelanggaran atas hak atas privasi dan data yang diterima Perusahaan di 2018.

Sesuai dengan SLA Perusahaan, setiap pengaduan di 2018 telah ditindaklanjuti dengan tuntas dalam waktu kurang dari 20 hari. Pencapaian ini diharapkan dapat menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi atas produk dan pelayanan BFI Finance.





Herdiana Sheilla Jessica Sinurat,
Penerima Beasiswa S1 BFI Finance, 2017,
Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi

Saya menerima beasiswa ini di 2017 karena saya tertarik dengan program dan fasilitas yang ditawarkan. Saya meyakini BFI Finance menaruh perhatian khusus kepada peningkatan kualitas SDM-nya, terutama di bidang pendidikan. Saya sangat puas dengan fasilitas beasiswa ini, yang meliputi biaya kuliah hingga semester sembilan, biaya skripsi, biaya wisuda, uang saku, kesempatan magang di BFI Finance, dan peluang bekerja lewat program *Management Trainee*.



KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN

Kontribusi BFI Finance kepada para pemangku kepentingannya tidak hanya diwujudkan dalam penyediaan produk dan layanan pembiayaan bagi seluruh pelanggannya, mitra bisnis dan masyarakat sekitar, namun Perusahaan juga berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan berkelanjutan masyarakat Indonesia melalui distribusi nilai ekonomi yang diperoleh Perusahaan kepada berbagai pihak eksternal.

Dalam aspek ekonomi, BFI Finance berkontribusi terhadap pemangku kepentingan dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, dividen kepada pemegang saham, dan secara tidak langsung mendorong perekonomian melalui pembayaran yang dilakukan kepada karyawan.

TABEL 140 Distribusi Manfaat Ekonomi

Kinerja Ekonomi (Rp juta)	2016	2017	2018
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan			
• Pendapatan	3.227.107	4.042.317	5.018.243
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan			
• Biaya Operasi	1.485.261	1.684.050	2.126.612
• Biaya Pegawai	715.765	868.834	1.050.204
• Dividen	389.074	583.611	*
• Pembayaran kepada Pemerintah (Pajak, Retribusi, dll)	233.505	322.026	392.889
• Investasi Sosial (Biaya CSR)	1.468	1.484	1.767
Nilai Ekonomi yang Ditahan (Nilai Ekonomi yang Dihasilkan – Nilai Ekonomi yang Didistribusikan)	402.034	582.312	1.446.772

* Tidak ada pembagian dividen tunai interim untuk 2018.

Selama menjalankan operasinya, BFI Finance tidak pernah memberikan bantuan finansial ataupun bentuk lainnya kepada partai politik ataupun kepada kandidat politik manapun, dan tidak pernah menerima bantuan finansial dalam bentuk apapun dari pemerintah.

MANFAAT BAGI MASYARAKAT

Selain manfaat finansial dari nilai ekonomi yang disalurkan kepada pihak eksternal dan internal, BFI Finance berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kegiatan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia, di antaranya:

- Pembiayaan alat berat untuk mendorong pertumbuhan sektor komoditas dan konstruksi, serta pembiayaan kendaraan bermotor untuk meningkatkan mobilitas masyarakat agar dapat mendukung aktivitas produktif mereka;
- Pembiayaan bagi UKM sebagai salah satu target pasar Perusahaan untuk produk-produk pembiayaannya. Keberadaan UKM di masyarakat sangat berperan dalam memberdayakan perekonomian, dan aktivitas ekonomi mereka mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia; dan
- Produk pembiayaan pendidikan, dengan menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendistribusikan produk pembiayaan ini bagi masyarakat. Melalui program ini, BFI Finance turut menyebarkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Data Penunjang Perusahaan

342 Alamat Outlet





BFI Finance senantiasa siap menghadapi perubahan dalam semua lini untuk menjawab tantangan dari masa ke masa. Hal ini terbukti dengan berani meninggalkan cara konvensional yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan bergerak dinamis tanpa meninggalkan identitasnya sebagai perusahaan dengan value dan etos kerja yang luar biasa.

ALAMAT OUTLET

KANTOR PUSAT

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2
 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
 BSD City
 Tangerang Selatan 15322
 Tel/Phone: (62-21) 2965 0300, 2965 0500
 Fax: (62-21) 2966 0757, 2966 0758
 Situs web: www.bfi.co.id

Cabang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
DKI Jakarta		
Jakarta-Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80 Jl. Utama Griya, Sunter	Jakarta Utara
Jakarta Utara	Rukan Grand Orchard Square Blok C/20 Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura	Jakarta Utara
Jakarta Utara 2	Rukan Bandengan Indah Blok B-3 Jl. Bandengan Utara No. 80 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan	Jakarta Utara
Jakarta-Meruya	Jl. Lapangan Bola No. 1-1A Meruya, Kebon Jeruk	Jakarta Barat
Jakarta-Cengkareng	Sedayu Square Blok C-02 Jl. Outer Ring Road Cengkareng Barat	Jakarta Barat
Jakarta Timur	Ruko Radin Inten Center No. 8D Jl. Radin Inten, Duren Sawit	Jakarta Timur
Jakarta-Cawang	Jl. Dewi Sartika No. 292F RT 004/RW 005 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati	Jakarta Timur
Jakarta Selatan	Jl. Ciputat Raya No. 1C RT 003/RW 010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan
Jakarta Selatan 2	Jl. Raya Rawa Bambu No. 18 RT 13/RW 5 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan
Jakarta-Corporate Leasing	Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No. 31 Jl. Let. Jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran	Jakarta Pusat
Banten		
Tangerang	Jl. Imam Bonjol No. 279-281 RT 01/RW 04 Kel. Bojong Jaya, Kel. Karawaci	Tangerang
Tangerang 2	Kompleks Balaraja Ultimate For Business Retail Ruko C No. 3A Jl. Raya Serang Km. 24 RT 001/RW 001 Desa Telagasari, Kec. Balaraja	Tangerang
Tangerang 3	Ruko Prabu Kian Santang No. 2 Jl. Prabu Kian Santang RT 01/RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk	Tangerang
Tangerang 5	Ruko Spark Blok C No. 12 Jl. Boulevard Gading Serpong Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua	Tangerang
Bintaro	Ruko Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No. 09 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren	Tangerang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Cikupa	Citra Raya Grand Boulevard Blok E1 No. 286-288 RT 03 RW 03 Desa Ciakar, Kec. Panongan	Tangerang
Pamulang	Jl. Raya Siliwangi No. 57G RT 01/RW 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang	Tangerang
Cilegon	Jl. Ahmad Yani No. 135C RT 004/RW 002 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang	Cilegon
Serang	Ruko Titan Arum Blok F Jl. Raya Cilegon Km 3 Legok RT 01/RW 13 Desa Drangong, Kec. Taktakan	Serang
Serpong-Tangerang Selatan	BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City	Tangerang Selatan
Jawa Barat		
Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472 Kel. Batu Nunggal, Kec. Bandung Kidul	Bandung
Bandung-Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No. 12B	Bandung
Bandung 3	Ruko Soreang Square Blok B No. 10 Jl. Raya Soreang Kel. Cingcin, Kec. Soreang	Bandung
Bandung 4	Kompleks Tritan Point Bandung Blok B5 No. 10 Jl. Jend. A.H. Nasution Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Bandung
Bandung 5	Jl. Sari Asih Raya No. 12 RT 06/RW 09 Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari	Bandung
Bandung 6	Istana Sudirman Square No. 12 RT 01/RW 05 Kel. Cibuntu, Kec. Bandung Kulon	Bandung
Bekasi	Kompleks Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47 Jl. Mayor Hasibuan, Margajaya	Bekasi
Bekasi 2	Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32 Harapan Indah	Bekasi
Bekasi 3	Ruko Taman Jatimakmur Indah No. 11 Jl. Raya Jatimakmur Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede	Bekasi
Bekasi 4	Jl. Sultan Hasanudin No. 233 Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan	Bekasi
Bekasi 5	Ruko Mall Ciputra Blok R.2 No.18 Jl. Alternative Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sempurna	Bekasi
Bogor	Jl. Raya Tajur No. 39 D-E RT 001/RW 006 Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan	Bogor
Bogor 2	Ruko Taman Yasmin Sektor 6 Jl. Abdullah Bin Nuh No. 218 (Ring Road Bogor Utara) Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat	Bogor
Cibinong	Cibinong City Centre A-30 Jl. Tegar Beriman I RT 05/RW 12 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong	Bogor
Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6 Jl. Jenderal Sudirman No. 100 Desa Pucung, Kec. Kotabaru	Karawang
Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No. 3A Jl. Niaga Raya, Jababeka 2 Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan	Cikarang
Cimahi	Jl. Jend. Amirmachmud No. 572 RT 002/RW 001 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah	Cimahi
Cirebon	Jl. Tuparev No. 115A Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung	Cirebon
Cirebon 2	Jl. Prabu Kiansantang RT 001/RW 08 Desa Sukadana, Kec. Pabuaran	Cirebon
Cirebon 3	Jl. Rd. Dewi Sartika, Blok Palsanga RT 005/RW 006 Kel. Kenanga, Kec. Sumber	Cirebon
Depok	Ruko Margonda Residen No. 12A-14 Jl. Margonda Raya Kav. 461	Depok
Depok 2	Ruko Galeria Sawangan Blok A No. 10 Jl. Raya Sawangan, RT 03/RW 05 Kel. Rangkapan Jasa, Kec. Pancoran Mas	Depok
Garut	Jl. Cikuray No. 72C RT 05/RW 06 Kel. Regol, Kec. Garut Kota	Garut
Indramayu	Jl. Raya Sleman No. 3B RT 01/RW 03 Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeg	Indramayu
Karawang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73 Bypass RT 04/RW 12, Karangpawitan Karawang Barat	Karawang
Kuningan	Jl. RE Martadinata 53A, Cijoho	Kuningan
Majalengka	Jl. K.H. Abdul Halim No. 104 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka	Majalengka

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Purwakarta	Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga Ruko No. 5-6, Kel. Nagrikaler	Purwakarta
Subang	Jl. Kapten Hanafiah Blok B No. 4 RT 98/RW 97 Kel. Karanganyar, Kec. Subang	Subang
Sukabumi	Jl. Brawijaya No. 4 RT 02/RW 12 Kel. Sriwidari, Kec. Gunung Puyuh	Sukabumi
Tasikmalaya	Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A Jl. H.Z. Mustofa	Tasikmalaya
Jawa Tengah		
Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No. 03 Jl. M.T Haryono	Semarang
Semarang 2	Jl. Taman Setiabudi Rukan A-8 RT 01/RW 18 Kel. Sronдол Wetan, Kec. Banyumanik	Semarang
Semarang 3	Jl. Brigjen Sudiarto No. 587B RT 01/RW 04 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan	Semarang
Banjarnegara	Jl. S. Parman No. 28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancanggih, Kec. Banjarnegara	Banjarnegara
Cilacap	Ruko Dualima Jaya No. 7 Jl. Suprpto, RT 02/RW 02 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah	Cilacap
Grobogan	Ruko The Grand City Blok E Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63 Purwodadi	Grobogan
Jepara	Jl. Pemuda No. 2 RT 03/RW 04 Kel. Potroyudan, Kec. Jepara	Jepara
Kebumen	Perum Graha Mahardika 2 Jl. Kutoarjo D3 Kel. Selang, Kec. Kebumen	Kebumen
Kendal	Jl. Lingkar Pasar 1 No. 1 RT 03/RW 02 Kel. Pekauman, Kec. Kendal	Kendal
Klaten	Jl. Veteran No. 256A Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara	Klaten
Kudus	Ruko Bitingan Indah (Panjunan) Jl. Ahmad Yani, B 07-B 08 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus	Kudus
Magelang	Ruko Metro Square F6 Jl. Mayjen Bambang Soegeng Mertoyudan	Magelang
Pekalongan	Jl. Dr. Cipto No. 22D	Pekalongan
Purwokerto-Banyumas	Jl. Gerliya Timur No. 35 Ruko No. 3 Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan	Purwokerto
Rembang	Jl. Pemuda No. 3B	Rembang
Salatiga	Ruko Wijaya Square Blok A3 Jl. Diponegoro RT 02/RW 05, Sidorejo Lor	Salatiga
Solo	Jl. R.M. Said No. 160C RT 2/RW3 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari	Surakarta
Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03 Solo Baru	Sukoharjo
Sragen	Ruko Harlin Sragen Blok B-1 Jl. Sukowati Kel. Sine, Kec. Sragen	Sragen
Tegal	Ruko Nirmala Estate No. 3-4 Jl. Yos Sudarso No. 20 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur	Tegal
Daerah Istimewa Yogyakarta		
Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav. 2 Jl. Monjali Sinduadi Mlati Sleman	Yogyakarta
Yogyakarta 2	Jl. Gedongkuning No. 110, RT 35 Kel. Rejowinangun, Kec. Kota Gede	Yogyakarta
Jawa Timur		
Surabaya	Jl. Ngagel Jaya 39	Surabaya
Surabaya 2	Komp. Ruko Sentra Darmo Villa Blok A No. 6 Jl. Raya Darmo Permai Selatan Kel. Prada Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis	Surabaya
Surabaya 3	Jl. Soka 21C RT 004/RW 007 Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari	Surabaya
Surabaya 4	Jl. Kalibutih No. 91A RT 009/RW 006 Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan	Surabaya
Babat	Jl. Raya Plaosan RT 003 RW 003 Kel. Plaosan Kec. Babat	Lamongan
Banyuwangi	Jl. S. Parman No. 131D Kel. Kalirejo, Kec. Kabat	Banyuwangi
Blitar	Jl. Cemara No. 36	Blitar
Bojonegoro	Jl. M.H. Thamrin 103	Bojonegoro
Gresik	Ruko Green Garden Blok A-2 Jl. Dr. Wahidin No. 3-4 Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas	Gresik
Gresik 2	Komplek Ruko Gading Mutiara Blok AA No. 7 Jl. Raya Kepatihan Kel. Kepatihan, Kec. Menganti	Gresik
Jember	Jl. Diponegoro No. 32 Ruko 32B Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates	Jember
Jombang	Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1 Jl. Merdeka Desa Mojongapit Kec. Jombang	Jombang
Kediri	Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No. 7-8 Jl. Hayam Wuruk	Kediri

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Kediri 2	Ruko Business Park Kharisma No. 12 (B-1) Jl. PB Sudirman No. 114 RT 16/RW 04 Kel. Pare, Kec. Pare	Kediri
Lamongan	Jl. Basuki Rahmat No. 203 Kel. Sukomulyo, Kec. Lamongan	Lamongan
Madiun	Jl. Serayu Timur No. 144 RT 043/RW 015 Kel. Pandean, Kec. Taman	Madiun
Malang	Jl. Letjen Sutoyo No. 148	Malang
Malang 2	Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Business Center A11-A12 Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen	Malang
Malang 3	Jl. Panglima Sudirman No. 148 Kav. E-E1 RT 003/RW 007 Kel. Pagentan, Kec. Singosari	Malang
Mojokerto	Ruko Kranggan Permai Blok A05-06 Jl. Pahlawan	Mojokerto
Nganjuk	Jl. Gatot Subroto No. 29 RT 03/RW 04 Kel. Kauman, Kec. Nganjuk	Nganjuk
Pandaan	Kompleks Ruko Pandaan Central Business Kav. A3-A5 Jl. Raya Bypass Pandaan RT 01/ RW 014 Desa Karangjati, Kec. Pandaan	Pasuruan
Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No. 40A Kel. Purworejo, Kec. Purworejo	Pasuruan
Ponorogo	Jl. Soekarno Hatta No. 238	Ponorogo
Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman No. 188 RT 04/RW 06 Kel. Jati, Kec. Mayangan	Probolinggo
Sidoarjo	Kompleks Ruko Gateway No. C1 -C2 Jl. Raya Waru (Aloha) Des. Sawotratap, Kec. Gedangan	Sidoarjo
Sidoarjo 2	Jl. Mojopahit No. 32B	Sidoarjo
Sidoarjo 3	Ruko La Diva Junction No.369-370 Jl. Gubernur Sunandar No. 136-138 RT 01/RW 01 Kel. Sidomulyo, Kec. Krian	Sidoarjo
Tuban	Jl. Letda Sucipto No. 5A, Perbon	Tuban
Tulungagung	Jl. W.R. Supratman No. 103	Tulungagung
Bali		
Denpasar	Jl. Gatot Subroto No. 463 Desa Padangsabian Kaja Kec. Denpasar Barat	Denpasar
Denpasar-Sudirman	Kompleks Sudirman Agung Blok C No.8 Jl. PB. Sudirman	Denpasar
Denpasar 3	Kompleks Imam Bonjol Square 555B Blok A 8-9 Jl. Imam Bonjol Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat	Denpasar
Buleleng	Jl. Udayana No. 16 Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng	Buleleng
Gianyar	Jl. By Pass Dharma Giri No. 27	Gianyar
Tabanan	Jl Ir. Soekarno Kel. Banjar Anyar Kec. Kediri	Tabanan
Nusa Tenggara Barat		
Mataram	Jl. Brawijaya No.22-24 RT. 02, Lingk.Karang Kelebut Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara	Mataram
Mataram 2	Jl. Selaparang Sweta Kel. Mayura, Kec. Cakranegara	Mataram
Manggarai	Jl. Wae Ces RT 004/RW 02 Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong	Manggarai
Sumbawa	Jl. Diponegoro No.63 RT 002/RW 010 Kel. Bugis, Kec. Sumbawa	Sumbawa
Nusa Tenggara Timur		
Kupang	Jl. Frans Seda RT 042/RW 013 Kel. Fatululi, Kec. Oebobo	Kupang

SUMATERA

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Sumatera Utara		
Medan	Jl. Ir. H Juanda No.26 Lingkungan IV Kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia	Medan
Medan 2	Jl. Bambu II No. 67 B-C Kel. Durian, Kec. Medan Timur	Medan
Asahan	Jl. Sisingamangaraja No. 48E, Lingk. III E Kel. Kisaran Timur, Kec. Kota Kisaran Timur Kota Kisaran	Asahan
Binjai	Kompleks Ruko Surya Permai Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	Binjai

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

SUMATERA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Deli Serdang	Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 79 Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam	Deli Serdang
Karo	Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe	Karo
Rantauprapat	Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B Labuhan Batu	Rantauprapat
Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 8F Kel. Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara	Padangsidempuan
Pematangsiantar	Jl. Kartini No. 48E Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat	Pematangsiantar
Riau		
Pekanbaru	Jl. Soekarno Hatta No. 88 Kel. Delima, Kec. Tampan	Pekanbaru
Pekanbaru 3	Jl. Setiabudi No. 89-89A	Pekanbaru
Pekanbaru 5	Jl. H. Imam Munandar No. 341 RT 04/RW 13 Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya	Pekanbaru
Air Molek-Indragiri Hulu	Jl. Jend. Sudirman Kel. Sekar Mawar, Kec. Pasir Penyu	Indragiri Hulu
Bagan Batu	Jl. Jendral Sudirman, Bagan Batu	Rokan Hilir
Dumai	Jl. Sultan Hasanuddin RT 14/RW 00 Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota	Dumai
Pelalawan	Jl. Maharaja Indah RT 001/RW 009 Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci	Pelalawan
Ujung Batu	Jl. Sudirman Desa Ujung Batu Timur, Kec. Ujung Batu	Rokan Hulu
Kepulauan Riau		
Tanjung Pinang	Jl. D.I. Panjaitan Km. 08 Kec. Tanjung Pinang Timur, Kel. Air Raja	Tanjung Pinang
Batam	Komplek King Business Center Blok B2 No. 9 & 10 Jl. Raja Isa Batam Center Kel. Belian, Kec. Batam	Batam
Batam 2	Komplek Mahkota Raya Blok B No. 11 Kel. Teluk Tereng, Kec. Batam Kota	Batam
Karimun	Jl Ahmad Yani, RT 005/RW 001 Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun	Karimun
Sumatera Barat		
Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E	Padang
Bukittinggi	Jl. Raya Kapas Panji No. 49B Jambu Air Nagari Taluak IV Suku Kec. Banuhampu, Agam	Bukittinggi
Dharmasraya	Jl. Lintas Sumatera Jorong Pasar Koto Baru	Dharmasraya
Pasaman Barat	Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM Kompleks Gunung Tulas, Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua, Kec. Pasaman	Pasaman Barat
Jambi		
Jambi	Jl. Prof. M. Yamin S.H. No. 65-66 RT 29, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung	Jambi
Muara Bungo	Jl. Sudirman No. 45-46 RT 003/RW 001 Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah	Muara Bungo
Muaro Jambi	Jl. Lintas Timur, RT 16/RW 02 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan	Muaro Jambi
Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan No. 3 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang Tebo	Rimbo Bujang
Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun No. 17 RT 06, Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun	Sarolangun
Bengkulu		
Bengkulu	Jl. Danau No. 08 Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati	Bengkulu
Sumatera Selatan		
Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4 RT 016/RW 012 Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II	Palembang
Palembang 2	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 20/RW 04 Kel. Alang-Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar	Palembang
Palembang 3	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. R-19, RT 010/RW 02 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus	Palembang
Baturaja	Jl. Dr. Moh. Hatta, RT 04/RW 04 Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur Ogan Komering Ulu (OKU)	Baturaja
Lahat	Jl. Kolonel Burlian No. 95 RT 09/RW 03 Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat	Lahat
Lubuklinggau	Jl. Yos Sudarso No. 48, RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur I	Lubuklinggau
Pangkalan Balai	Jl. Merdeka No. 2E RT 11/RW 04 Kel. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III	Banyuasin
Prabumulih	Jl. Jend. Sudirman No. 10 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur	Prabumulih

SUMATERA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Kepulauan Bangka Belitung		
Pangkal Pinang	Kompleks Bangka Square Ruko No. 2 Jl. Raya Koba Km. 5 No. 17 Kec. Pangkalan Baru	Bangka Tengah
Belitung	Jl. Jend. Sudirman No. 32B RT 09/RW 04 Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjung Pandan	Belitung
Lampung		
Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No. 55 Kota Baru, Tanjung Karang Timur	Bandar Lampung
Bandar Lampung 2	Jl. Sultan Agung No.19J Kel. Way Halim Permai, Kec. Sukarame	Bandar Lampung
Bandar Jaya	Jl. Proklamator Raya No. 28-29 Kec. Terbanggi Besar, Bandar Jaya	Lampung Tengah
Metro	Jl. Jend. Sudirman No. 282 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat	Metro
Pringsewu	Jl. A. Yani, RT 012/RW 01 Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu	Pringsewu
Tulang Bawang	Jl. Lintas Timur Sumatera Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung	Tulang Bawang
KALIMANTAN		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Kalimantan Barat		
Pontianak	Jl. M. Sohor No. 45 Blok E-F RT 05/RW 02 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan	Pontianak
Ketapang	Jl. D.I. Panjaitan No. B16 Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan	Ketapang
Sanggau	Jl. Jenderal Sudirman No. 23 RT 22/RW 08 Kel. Beringin, Kec. Kapuas	Sanggau
Sintang	Jl. Lintas Melawi No. 70 Kel. Ladang	Sintang
Kalimantan Tengah		
Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km. 3,5 No. 6-7 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya	Palangkaraya
Pangkalan Bun	Jl. Pasanah (Kawitan 1) RT 23 Sidorejo	Pangkalan Bun
Sampit	Jl. Jendral Sudirman Km. 1,5 No. 19 RT 43/RW 08 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur	Sampit
Kalimantan Selatan		
Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 7,8 No. 30 Kertak Hanyar, Kab. Banjar	Banjarmasin
Banjarbaru	Jl. Ahmad Yani Km. 34,500 RT 003/RW 002 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara	Banjarbaru
Barito Kuala	Jl. Trans Kalimantan No. 70 RT 022/RW 002 Kel. Berangas Timur, Kec. Alalak	Barito Kuala
Hulu Sungai Tengah	Jl. Murakarta No. 8C, RT 005 Kel. Bukat, Kec. Barabai	Hulu Sungai Tengah
Tanah Bumbu	Jl. Raya Batulicin, RT 3/RW 1 Desa Sejahtera Kampung Baru-Simpang Empat	Tanah Bumbu
Tanjung	Jl. Ahmad Yani RT II Mabu'un Murung Pudak, Tabalong	Tanjung
Kalimantan Timur		
Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	Samarinda
Samarinda 2 Seberang	Kompleks Ruko Sentra Samarinda Seberang Ruko No. 15 Jl. Bung Tomo, Samarinda Seberang	Samarinda
Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 14/295, RT 06 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan
Berau	Jl. Durian 1, Ruko No. 4, RT 25 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb	Berau
Bontang	Ruko Primagama Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16F	Bontang
Paser	Jl. R.A. Kartini No. 21A RT 13/RW 4 Kel. Tanah Grogot	Paser
Penajam Paser Utara	Jl. Propinsi, RT 007, Km.18 Kel. Petung, Kec. Penajam	Penajam Paser Utara
Sengata	Jl. A.W. Syahrani RT 04/RW 01 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sengata Utara	Kutai Timur
Tarakan	Jl. Gajah Mada No. 75 Kel. Karang Anyar Pantai	Tarakan

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

KALIMANTAN

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Tenggarong	Jl. Patin No. 99B Tenggarong	Kutai Kartanegara
Kalimantan Utara		
Bulungan	Jl. Durian No. 87, RT 41/RW 05 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor	Bulungan

SULAWESI

Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Sulawesi Utara		
Manado	Jl. Bethesda No. 18 Kel. Ranotana, Kec. Sario	Manado
Bitung	Jl. Wolter Monginsidi No. 45 Kel. Girian Bawah, Kec. Girian	Bitung
Bolaang Mongondow Utara	Jl. Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26 Kec. Bolang Itang Barat	Bolaang Mongondow Utara
Kotabagau	Jl. Brigjen Katamso, Kel. Kotabangun	Kotabagau
Minahasa Selatan	Lingkungan IV Kel. Uwuran I, Kec. Amurang	Minahasa Selatan
Tahuna-Kepulauan Sangihe	Jl. Raramenusa Kel. Sawang Bender, Lingkungan III	Tahuna
Tomohon	Jl. Samratulangi Lingkungan VI Kel. Manata 3, Kec. Tomohon Tengah	Tomohon
Gorontalo		
Gorontalo	Jl. Agus Salim No. 290 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah	Gorontalo
Marisa	Graha Arwana, Jl. Trans Sulawesi Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiada	Pohuwato
Sulawesi Barat		
Mamuju	Jl. Diponegoro Ruko No. 2 Kel. Karema, Kec. Mamuju	Mamuju
Mamuju Utara	Jl. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu	Mamuju Utara
Polewali Mandar	Jl. H. Andi Depu Ruko Taman Asri No. 1 Kel. Takkatidung, Kec. Polewali	Polewali Mandar
Sulawesi Tengah		
Palu	Ruko Moh. Hatta Center Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21D-E RT 11/RW 03 Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur	Palu
Kotaraya	Jl. I Gusti Ngurah Rai Desa Kotaraya, Kec. Mepanga	Parigi Moutong
Luwuk	Jl. Yos Sudarso No. 15 Kel. Karaton, Kec. Luwuk	Banggai
Parigi Moutong	Jl. Trans Sulawesi Kel. Bantaya, Kec. Parigi	Parigi Moutong
Poso	Jl. Pulau Sumba No. 7 Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota	Poso
Tolitoli	Jl. Magamu No. 63 Kel. Baru, Kec. Baolan	Tolitoli
Sulawesi Selatan		
Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aeropala) No. 98 Kel. Karunrung, Kec. Rappocini	Makassar
Makassar 2	Jl. Kima Raya 2 No. A20 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya	Makassar
Makassar 3	Jl. Cendrawasih No. 69C RT 02/RW 03 Kel. Mario, Kec. Mariso	Makassar
Bone	Jl. Ahmad Yani Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat	Watampone
Bulukumba	Jl. Samratulangi, Dusun Lajae Desa Polewali, Kec. Gantarang	Bulukumba
Gowa	Jl. Poros Gowa Takalar Kel. Manggali, Kec. Pallangga	Gowa
Luwu Timur	Jl. Trans Sulawesi Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni	Luwu Timur
Luwu Utara	Jl. Ahmad Yani No. 76, RT 1/RW 1 Kel. Kappuna, Kec. Masamba	Luwu Utara
Palopo	Jl. Kelapa, Kel. Dangerakko Kec. Wara	Palopo
Parepare	Ruko Pelangi No. 1 Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung	Parepare
Toraja	Jl. Poros Makale-Rantepao No. 474A Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara	Tana Toraja

SULAWESI		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Sulawesi Tenggara		
Kendari	Jl. Brigjend. Moh. Yunus Bypass	Kendari
Bau-Bau	Jl. Bataraguru No. 39 Kel. Wajo, Kec. Murhum	Bau-Bau
Kolaka	Jl. Dr. Sutomo No. 51 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka	Kolaka
Konawe	Jl. Sapati No. 15D Kel. Tumpas, Kec. Unaha	Konawe
MALUKU & PAPUA		
Cabang	Alamat	Kota/Kabupaten
Maluku		
Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07 Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lateri, Kec. Bagualan	Ambon
Maluku Tengah	Jl. Abdullah Souliisa No. 20 RT 02/RW 03 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi	Maluku Tengah
Maluku Utara		
Ternate	Jl. Stadion No. 36, RT 01/RW 01 Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah	Ternate
Tobelo	Jl. Kemakmuran Desa Rawajaya, Kec. Tobelo	Halmahera Utara
Papua Barat		
Manokwari	Jl. Trikora Wosi, Ruko No. 3 RT 003/RW 007 Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat	Manokwari
Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9,5 Kel. Remu Selatan	Sorong
Papua		
Jayapura	Komplek Ruko No. 11 & 12 Jl. Amphibi Hamadi Kel. Argapura, Kec. Jayapura Selatan	Jayapura
Biak Numfor	Jl. Selat Sunda No. 07, Fandoi, Biak	Biak Numfor
Merauke	Ruko Parako No. 03 Jl. Parakomando, RT 001/RW 001 Kel. Mandala, Kec. Merauke	Merauke
Nabire	Jl. Merdeka No. 69 Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire	Nabire

Gerai

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
DKI Jakarta		
Cakung	Jl. Raya Penggilingan RT 03/RW 07 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung	Jakarta Timur
Cijantung	Jl. Gongseng No. 28 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo	Jakarta Timur
Ciracas	Kompleks PERUMNAS Jl. Kelapa Dua Wetan Blok B No. 12 RT 04/RW 05 Kel. Kelapa Dua Wetan, Ciracas	Jakarta Timur
Matraman	Galur Sari Raya No.26A Blok R RT 02 RW 01 Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman	Jakarta Timur
Johar Baru	Jl. Pangkalan Asem Raya No. 45 Kel. Galur, Kec. Johar Baru	Jakarta Pusat
Kalideres	Jl. Warung Pojok Kampung Asem No. 114 RT 005/RW 005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres	Jakarta Barat
Pademangan	Jl. Pademangan III Gg. 18 No. 249B RT 07/RW 07 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan	Jakarta Utara
Pesanggrahan	Jl. Ciledug Raya No. 6 RT 10/RW 04 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan	Jakarta Selatan
Tebet	Gedung Regatama Blok A No. 106 Jl. Pariaman Kel. Manggarai, Kec. Tebet	Jakarta Selatan
Banten		
Babakan	Jl. Kisamaun No. 218 RT 04/RW 01 Kel. Babakan, Kec. Tangerang	Tangerang
Batuceper	Jl. Raya Poris Indah RT 02/RW 03 Kel. Poris Indah, Kec. Batuceper	Tangerang

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Curug	Jl. Raya Curug RT 02/RW 07 Kel. Curug Wetan, Kec. Curug	Tangerang
Jatiuwung	Jl. Raya Gatot Subroto Kp. Jatake, RT 006/RW 002 Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung	Tangerang
Karawaci	Jl. Mendut Raya Blok CC No. 19 Taman Borobudur 2 Perumnas II	Tangerang
Larangan	Jl. Inpres Raya No. 3 RT 1/RW 6 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan	Tangerang
Sepatan	Jl. Raya Sepatan Km.9 No. 71 RT 001/RW 004 Kel. Sepatan, Kec. Sepatan	Tangerang
Tigaraksa	Jl. Raya Syeh Mubarak RT 01 RW 04 Kel. Matagara, Kec. Tigaraksa	Tangerang
Ciputat	Jl. Raya Jombang No. 49 RT 002/RW 011 Kel. Jombang, Kec. Ciputat	Tangerang Selatan
Ciputat Timur	Jl. W.R. Supratman No. 3 RT 01/RW 08 Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur	Tangerang Selatan
Ciputat Timur 2	Jl. Purnawarman No. 01 RT 05/RW 05 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur	Tangerang Selatan
Pondok Aren	Kebon Manggis RT 03/RW 04 Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren	Tangerang Selatan
Serpong 2	Jl. Raya Ciater RT 002/RW 009 Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong	Tangerang Selatan
Serpong Utara	Jl. SKKI RT 08/RW 02 Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara	Tangerang Selatan
Setu 2	Jl. Lingkar Selatan RT 01/RW 03 Kel. Muncul, Kec. Setu	Tangerang Selatan
Jawa Barat		
Cibeunying Kidul	Jl. Padasuka No. 31 RT 02/RW 10 Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying	Bandung
Cicendo	Jl. Sukaraja II No. 190 RT 01/RW 06 Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo	Bandung
Ciparay	Jl. Raya Laswi Kp. Sukapura, RT 005/RW 014 Desa Bumiwangi, Kec. Ciparay	Bandung
Ciwidey	Kp. Sukasari RT 02/RW 20 Desa Ciwidey, Kec. Ciwidey	Bandung
Katapang	Jl. Terusan Kopo Km. 11 No. 46 Cilampeni	Bandung
Kiaracondong	Jl. Babakan Sari I No 147 RT 10/RW 11 Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracondong	Bandung
Mandalajati	Jl. A.H. Nasution No. 135 RT 01/RW 06 Kel. Karangpamulang, Kec. Mandalajati	Bandung
Padalarang	Jl. Raya Ciburuy, RT 03/RW 17 Kel. Padalarang, Kec. Padalarang	Bandung Barat
Bantar Gebang	Jl. Pasar Lama No. 40, RT 03/RW 09 Bantar Gebang	Bekasi
Bekasi Barat	Jl. Panjang RT 04/ RW 06B Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat	Bekasi
Bekasi Timur	Jl. Pahlawan RT 001/RW.02 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur	Bekasi
Jatiasih	Jl. Raya Jatiasih No. 36A Kp. Kebantenan, RT 005/RW 010 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih	Bekasi
Karang Bahagia	KP. Sukamantri RT 06/RW 01 Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia	Bekasi
Pondok Gede	Jl. Cempaka 2 No. 19 RT 06/RW 01 Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede	Bekasi
Serang Baru	Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Pasirandu, RT 07/RW 04 Desa Sukasari, Kec. Serang Baru	Bekasi
Setu	Jl. Raya Setu RT 009/RW 008 Desa Ciledug, Kec. Setu	Bekasi
Bogor Utara	Jl. Mandala Simpang Pomad No. 1 RT 005/RW 002 Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	Bogor
Bojong Gede	Jl. Raya Bojong Gede No. 65 Kp. Pasar Lama, RT 02/RW 09 Kel. Bojonggede, Kec. Bojonggede	Bogor
Ciomas	Jl. Raya Kreteg Pagelaran Kp. Sukajaya, RT 001/RW 001 Kel. Pagelaran	Bogor
Citeureup	Jl. Raya Mayor Oking Atmaja No. 2A RT 02/RW 01 Kel. Puspanegara, Kec. Citeureup	Bogor
Gunung Putri	Jl. Pertigaan Mercedes Kp. Poncol, RT 003/RW 002 Kel. Tiajung Udik, Kec. Gunung Putri	Bogor
Parung	Jl. Raya Parung No. 667 Kel. Parung, Kec. Parung	Bogor
Bojongsari	Jl. Raya Parung-Ciputat RT 002/RW 004 Kel. Bojongsari Lama, Kec. Bojongsari	Depok
Cimanggis	Jl. Pekapuran, RT 01/RW 05 Kel. Curug, Kec. Cimanggis	Depok
Pancoran Mas	Jl. Pitara Raya No. 7 RT 04/RW 15 Kel. Pancoran Mas	Depok
Karangmalang	Jl. Pasar Baru Blok G No.18 Jangkar Mas Residence RT 17/RW 02 Kel. Karangmalang, Kec. Indramayu	Indramayu
Rengasdengklok	Jl. Proklamasi RT 02/RW 06 Kel. Amansari, Kec. Rengasdengklok	Karawang
Telagasari	Jl. Syeh Quro Dusun Krajan I, RT 03/RW 01 Kec. Telagasari	Karawang

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Talaga	Jl. Banjar Layungan RT 08/RW 02 Kel. Talaga Wetan, Kec. Talaga	Majalengka
Jawa Tengah		
Ngaliyan	Pondok Ngaliyan Asri Kav. 1 RT 01/RW 14 Kel. Tambak Aji, Kec. Ngaliyan	Semarang
Ungaran	Jl. Sutoyo No. 57 Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur	Semarang
Blora	Jl. Pemuda No. 71 RT 002/RW 001 Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora	Blora
Boyolali	Jl. Pandanaran No. 127 Kp. Koplak, RT 03/RW 06 Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali	Boyolali
Wirosari	Jl. Kusuma Bangsa RT 005/RW 005 Kel. Kunden, Kec. Wirosari	Grobogan
Mayong	Kompleks Ruko Atthoyibah No. 2 Jl. Kudus, RT 3/RW 2 Pelemkerep, Kec. Mayong	Jepara
Tasikmadu	Jl. Lawu No. 196 RT 07/RW 10 Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu	Karanganyar
Juwana	Jl. Dukutalit RT 06/RW 02 Kel. Dukutalit, Kec. Juwana	Pati
Buaran	Jl. Raya Kertijayan No. 216 RT 09/RW 03 Kel. Kertijayan, Kec. Buaran	Pekalongan
Bayan	Jl. Gajah Mada RT 04/RW 03 Kel. Bayan, Kec. Bayan	Purworejo
Gemolong	Jl. Lojirejo RT 01 RW 03 Kel. Gemolong, Kec. Gemolong	Sragen
Kartasura	Jl. Adi Sumarmo No. 73 RT 01/RW 03 Ngabeyan, Kartasura	Sukoharjo
Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi No. 22 RT 22 Gayam	Sukoharjo
Adiwerna	Jl. Raya Tegal Slawi RT 17/RW 04 Kel. Tembok Luwung, Kec. Adiwerna	Tegal
Daerah Istimewa Yogyakarta		
Sedayu	Jl. Wates Km. 10 No.09, RT 01 Kel. Pedes Argomulyo, Kec. Sedayu	Bantul
Triharjo	Jl. Dr. Rajimin Kel. Sucean, Kec. Triharjo	Sleman
Kalasan	Jl. Keniten, RT 05 RW 02 Kel. Taman Martani, Kec. Kalasan	Sleman
Jawa Timur		
Benowo	Jl. Klakah Rejo BCD R6 RT 02/RW 08 Kel. Kandangan, Kec. Benowo	Surabaya
Gunung Anyar	Jl. Kyai Abdul Karim No.67 RT 01/RW 04 Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar	Surabaya
Jambangan	Jl. Jambangan Tama No. 2A RT 07/RW 03 Kel. Jambangan, Kec. Jambangan	Surabaya
Sukolilo	Jl. Semolowaru Utara No. 149D RT 01/RW 01 Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo	Surabaya
Tenggiling Mejoyo	Jl. Kutisari Selatan No. 110 RT 04/RW 03 Kel. Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo	Surabaya
Wiyung	Jl. Menganti Wiyung 121 RT 01/RW 04 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung	Surabaya
Wonokromo	Jl. Indragiri No. 4E RT 03/RW 08 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo	Surabaya
Tandes	Jl. Manukan Dalam I Blok 17D – 1 Kel. Manukan, Kec. Tandes	Surabaya
Genteng	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 7A RT 003/RW 004 Kel. Genteng Kulon, Kec. Genteng	Banyuwangi
Wlingi	Jl. Gajah Mada No. 39 RT 02/RW 04 Kel. Wlingi, Kec. Wlingi	Blitar
Sumberrejo	Jl. Raya Sumberrejo No. 210 Dusun Badug, RT 05/RW02 Sumuragung, Kec. Sumberrejo	Bojonegoro
Balompanggung	Dusun Banci, RT 01/RW 01 Desa Balompanggung, Kec. Balompanggung	Gresik
Cerme	Jl. Raya Cerme Kidul No. 104 RT 001/RW 006 Desa Cerme Kidul, Kec. Cerme	Gresik
Driyorejo	Jl. Raya Driyorejo No. 127 Kel. Driyorejo	Gresik
Kedamean	Jl. Raya Kedamean Dusun Watupasang, RT 12/RW 05 Desa Kedamean, Kec. Kedamean	Gresik
Menganti	Jl. Raya Bringkang, RT 003/RW 002 Kec. Menganti	Gresik
Sidayu	Jl. Pemuda No. 78, Sidayu	Gresik
Mojoagung	Jl. Raya Yos Sudarso No. 161 RT 001/RW 002 Kel. Janti, Kec. Mojoagung	Jombang
Kandangan	Jl. Kandangan – Jombang RT 001/RW 021 Ds. Kandangan, Kec. Kandangan	Kediri
Wates	Jl. Raya Tawang, RT 19/RW 08 Kel. Desa Tawang, Kec. Wates	Kediri
Mejayan	Jl. Ahmad Yani No. 04 RT 02/RW 01 Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan	Madiun
Batu	Jl. Agus Salim No. 60 RT 01/RW 01 Kel. Sisi, Kec. Batu	Batu

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Lawang	Ruko Dr. Wahidin No. 2 Jl. Dr Wahidin 19, RT 04/RW 01 Desa Kalirejo, Kec. Lawang	Malang
Pakis	Jl. Bunut Wetan, RT 8/RW 6 Kel. Bunut Wetan, Kec. Pakis	Malang
Gondang	Desa Pohjejer RT 001/RW 001 Kec. Gondang	Mojokerto
Mojosari	Jl. Gajah Mada, RT 007/RW 001 Kel. Menanggal, Kec. Mojosari	Mojokerto
Tanjunganom	Krajan Selatan, RT 05/RW 06 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjunganom	Nganjuk
Beji	Ds. Sidowayah, RT 03/RW 03 Kel. Sidowayah, Kec. Beji	Pasuruan
Porong	Jl. Bhayangkari RT 12/RW 04 Kel. Juwetkenongo, Kec. Porong	Sidoarjo
Sukodono	Jl. Raya Dungus, RT 16/RW 04 Kel. Sukodono, Kec. Sukodono	Sidoarjo
Taman	Jl. Raya Kletek No. 115A RT 012/RW 006 Desa Kletek, Kec. Taman	Sidoarjo
Tulangan	Jl. Raya Tulangan No. 35 RT 03/RW 06 Kel. Tulangan, Kec. Tulangan	Sidoarjo
Waru	Jl. Raya Berbek No.16 RT 002/RW 002 Kel. Berbek, Kec. Waru	Sidoarjo
Bali		
Denpasar Timur	Jl. Padma, Br. Kelod Kangin Desa Penatih, Kec. Denpasar Timur	Denpasar
Kuta	Jl. Uluwatu Kelan, Lingkungan Kelan Desa Kel. Tuban, Kec. Kuta	Badung
Kuta Utara	Jl. Raya Anyar No. 7 Lingkungan Anyar Kaja Kerobokan Kec. Kuta Utara	Badung
Ubud	Jl. Raya Andong No. 26 Desa Peliatan, Kec. Ubud	Gianyar
Nusa Tenggara Barat		
Narmada	Jl. Raya Ahmad Yani No. 68, RT 002 Desa Narmada, Kec. Narmada	Lombok Barat

SUMATERA

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Sumatera Utara		
Medan Marelan	Jl. Marelan Raya No. 149 Link 12 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan	Medan
Medan Helvetia	Jl. Gaperta Ujung No.7 Kel.Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia	Medan
Percut Sei Tuan	Jl. Besar Tembung No. 26 Dusun IX, RT 010/RW 005 Kel. Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	Deli Serdang
Tanjung Morawa	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 488/8C Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa	Deli Serdang
Bilah Hulu	Jl. Lintas Sumatera Dusun Perbaungan Bawah, Aek Nabara Kec. Bilah Hulu	Labuhan Batu
Stabat	Jl. Proklamasi No. 14 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat	Langkat
Pematang Bandar	Jl. Sangnawaluh Kel. Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar	Simalungun
Sumatera Barat		
Lubuk Kilangan	Jl. Bandar Buat No.10 Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan	Padang
Riau		
Marpoyan Damai	Jl. Kaharuddin Nasution No. 260 RT 002/RW 006 Kel. Maharatu	Pekanbaru
Rumbai	Jl. Sembilang No. 23 RT 03/RW 03 Kel. Lembah Sari	Pekanbaru
Tampan	Jl. Garuda Sakti Km. 15 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan	Pekanbaru
Tenayan Raya	Jl. Lintas Timur Km. 12 RT 003/RW 001 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya	Pekanbaru
Kepulauan Riau		
Bintan Timur	Jl. Perikanan No. 42 Kp. Kuala Lupur, Kel. Kijang Kota	Tanjung Pinang (Pulau Bintan)
Bintan Utara	Jl. Permaisuri No. 5A Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara	Bintan (Pulau Bintan)
Sagulung	Winner Bugis Junction Blok A3 No. 07 RT 8/RW 1 Kel. Sagulung, Kec. Sagulung	Batam (Pulau Batam)

SUMATERA

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Jambi		
Alam Barajo	Jl. Pattimura, RT.001 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo	Jambi
Jambi Timur	Jl. Sentot Alibasa, RT 07 Kel. Payo Selincah, Kec. Jambi Timur	Jambi
Sumatera Selatan		
Sako	Jl. Siaran Sako No. 15 RT 018/RW 07 Kel. Sako, Kec. Sako	Palembang
Betung	Jl Raya Palembang Betung RT 006/RW 002 Kel. Betung, Kec. Betung	Banyuasin
Bangka Belitung		
Taman Sari	Jl. Ahmad Yani Dalam No. 43 RT 03/RW 03 Kel. Kacang Pedang, Kec.Taman Sari	Pangkal Pinang
Lampung		
Jati Agung	Jl. Raya Karang Anyar, RT 02/RW 01 Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung	Lampung Selatan
Tanjung Bintang	Jl. Raya Serdang, RT 24/RW 4B Kel. Serdang, Kec. Tanjung	Lampung Selatan
Kalirejo	Jl. Jend. Sudirman Dusun 02, RT 02/RW 07 Kp. Kalirejo, Kec. Kalirejo	Lampung Tengah

KALIMANTAN

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Kalimantan Timur		
Loa Janan	Jl. Cipto Mangunkusumo RT 09/RW 00 Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir	Samarinda
Palaran	Jl. Ampera, RT 13 Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran	Samarinda
Samarinda Ulu	Jl. Suryanata No.61, RT 030 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu	Samarinda
Sambutan	Jl. Sultan Sulaiman RT 09/RW 01 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan	Samarinda
Sungai Kunjang	Jl. Slamet Riyadi, RT 003 Kel. Karang Asem Ilir, Kec. Sungai Kunjang	Samarinda
Balikpapan Utara	Jl. Soekarno Hatta No. 17, RT 01 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan
Balikpapan Selatan	Jl. Mulawarman No. 52, RT 52 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan
Tenggarong Seberang	Jl. Mulawarman RT 17 Kel. Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang	Kutai Kartanegara
Kalimantan Barat		
Pontianak Timur	Jl. Tanjung Raya 2 No. 99 RT 004/RW 002 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur	Pontianak
Pontianak Utara	Jl. Gusti Situt Mahmud RT 03/RW 37 Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara	Pontianak
Sungai Raya	Jl. KH Abdurrahman Wahid No.26 RT 03/RW 01 Kel. Kuala Dua, Kec. Sungai Raya	Kubu Raya
Kalimantan Selatan		
Banjarmasin Barat	Jl. Belitung Laut No. 2 RT 03/RW 01 Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat	Banjarmasin
Sungai Tabuk	Jl. Martapura Lama Km. 6,2, RT 4, Kel. Sungai Luhut, Kec. Sungai Tabuk	Banjarmasin
Astambul	Pingaran Ilir, RT 01 Kel. Pingaran Ilir, Kec. Astambul	Banjar
Alalak	Jl. Trans Kalimantan No. 73 RT 008/RW 002 Kel. Berangas Seberang, Kec. Alalak	Barito Kuala

SULAWESI

Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Sulawesi Utara		
Tikala	Jl. RE Martadinata Kel. Paal Dua, Kec. Tikala	Manado
Tuminting	Jl. Pogidon Raya No.103 Kel. Tumumpa Satu Lingk I, Kec. Tuminting	Manado
Mapanget	Jl. A.A Maramis Kel. Paniki Bawah Ling. III, Kec. Mapanget	Manado
Bolaang/Inobonto	Jl. AKD Trans Sulawesi Kel. Inobonto, Kec. Bolaang	Bolaang Mongondow

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

SULAWESI		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Airmadidi	Komplek Terminal Tumatenden Airmadidi Jl. Arnold Mononutu Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara	Minahasa Utara
Kawangkoan	Kompleks Tugu Kacang Jl. Raya Kawangkoan Kel. Talikuran Barat Lingkungan I Kec. Kawangkoan Utara	Tomohon
Aertembaga	Jl. Daan Mogot No. 2 RT 001/RW 001 Kel. Winenet Satu, Kec. Aertembaga	Bitung
Kotamobagu Selatan	Jl. Labot Dugian Kel. Kopandakan I, Kec. Kotamobagu Selatan	Kotamobagu
Gorontalo		
Kabila	Jl. Prof. DR. BJ Habibie No.03 RT 01/ RW 02 Kel. Tumbihe, Kec. Kabila	Gorontalo
Limboto	Jl. KH.Wahid Hasyim, RT 008/RW 03 Desa Kayubulan, Kec. Limboto	Gorontalo
Tibawa	Jl. Trans Sulawesi Desa Isimu, Kec. Tibawa	Gorontalo
Sulawesi Tengah		
Palu Barat	Jl. Diponegoro No.104 RT 004/RW 005 Kel. Lere, Kec. Palu Barat	Palu
Tawaeli	Jl. Trans Sulawesi, RT 003/RW 001 Kel. Lambara, Kec. Tawaeli	Palu
Sigi Biromaru	Jl. Lasoso No. 5B RT 002/RW 001 Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru	Sigi
Sulawesi Selatan		
Manggala	Jl. Ujung Bori Lama No. 15 RT 02/RW 03 Kel. Antang, Kec. Manggala	Makassar
Wajo	Jl. Tarakan No. 23 RT 001/RW 002 Kel. Mampu, Kec. Wajo	Makassar
Turikale	Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 56 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale	Maros
Walenrang Utara	Dusun Bolong No. 1 Km. 27 Kec. Walenrang Utara	Luwu
Sulawesi Tenggara		
Abeli	Jl. Setiabudi Kel. Lapulu, Kec. Abeli	Kendari
MALUKU & PAPUA		
Gerai	Alamat	Kota/Kabupaten
Maluku		
Nusaniwe	Jl. NN Saar Sopacua No. 63 RT 005/RW 004 Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe	Ambon
Teluk Ambon	Jl. Ir. M. Putuhena No. 3 RT 007/RW 004 Kel. Wayame, Kec. Teluk Ambon	Ambon
Salahutu	Dusun Mamokeng No. 43 RT 02/RW 00 Kel. Tulehu, Kec. Salahutu	Maluku Tengah
Maluku Utara		
Ternate Selatan	Jl. Flamboyan, RT 005/RW 002 Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan	Ternate
Papua Barat		
Aimas	Jl. Buncis, RT 005/RW 010 Malaweke, Aimas	Sorong
Mariat	Jl. Nusa Indah No. 253 RT 003/RW 003 Kel. Mariyai, Kec. Mariat	Sorong
Sorong Barat	Jl. Yos Sudarso, RT 002/RW 002 Kel. Kampung Baru, Kec. Sorong Barat	Sorong
Papua		
Tanah Miring	Jl. Teuku Umar No. 171 RT 008/RW 02 Kel. Yasa Mulya, Kec. Tanah Miring	Merauke

Cabang Perwakilan Syariah

CABANG	ALAMAT	KOTA/ KABUPATEN
Jakarta Meruya Syariah	Jl. Lapangan Bola No. 1-1A Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk	Jakarta Barat
Jakarta Sunter Syariah	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80 Jl. Utama Griya, Sunter	Jakarta Utara
Tangerang Syariah	Jl. Imam Bonjol No. 279-281 RT 01/RW 04 Kel. Bojong Jaya, Kec. Karawaci	Tangerang
Bekasi Syariah	Kompleks Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47 Jl Mayor Hasibuan, Margajaya	Bekasi
Depok Syariah	Ruko Margonda Residen No. 12A-14 Jl. Margonda Raya Kav. 461	Depok
Bandung Syariah	Jl. Soekarno Hatta No. 472 Kel. Batu Nunggal, Kec. Bandung Kidul	Bandung
Karawang Syariah	Jl. Jendral Ahmad Yani-Bypass Karawang RT 05/RW 12 Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat	Karawang
Semarang Syariah	Ruko Mataram Plaza Blok D No 03 Jl. MT Haryono Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah	Semarang
Solo Syariah	Jl. RM Said No. 160 C RT.002/RW.003 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari	Surakarta
Yogyakarta Syariah	Ruko Monjali Permai Kav.2 Jl. Monjali RT.011 RW.034 Desa Sinduadi, Kec. Mlati	Yogyakarta
Surabaya Syariah	Jl. Ngagel Jaya No.39 Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng	Surabaya
Kediri Syariah	Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No. 7-8 Jl. Hayam Wuruk	Kediri
Sidoarjo Syariah	Kompleks Ruko Gateway Blok B No.2 Desa Sawotratap, Kec. Gedangan	Sidoarjo
Mataram Syariah	Jl. Brawijaya No.22-24 RT 02 Lingk. Karang Kelebut Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara	Mataram
Medan Syariah	Jl. Ir. H Djuanda No.26 Lingkungan IV Kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia	Medan
Padang Syariah	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E Kel. Belanti Timur, Kec. Padang Utara	Padang
Pekanbaru Syariah	Jl. Soekarno Hatta No. 88 Kel. Delima, Kec. Tampan	Pekanbaru
Jambi Syariah	Jl. Prof. M Yamin SH No. 65-66 Rt. 29, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung	Jambi
Palembang Syariah	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4 RT 016/RW 05 Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II	Palembang
Lampung Syariah	Jl. Gajah Mada No. 55 Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur	Bandar Lampung
Banjarmasin Syariah	Jl. A. Yani Km. 8.1 No. 01 Kel. Kertak Hanyar, Kec. Banjar	Banjarmasin
Makassar Syariah	Jl. Hertasning Baru (Aeropala) Kel. Karunrung, Kec. Rappocini	Makassar



BFI Finance yang telah melayani masyarakat Indonesia lebih dari 30 tahun hadir tak sekadar sebagai mitra solusi keuangan. BFI Finance melalui BFI Education mengajak masyarakat mengejar cita-citanya serta memperkaya pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan yang sejahtera.



Laporan Keuangan Tahunan

358 Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

DAN ENTITAS ANAKNYA/
AND ITS SUBSIDIARY

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017/
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017

DAN/AND

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**

DAFTAR ISI

CONTENTS

Pernyataan Direksi		Directors' Statement
	Ekshibit/ Exhibit	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	A	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	B	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	C	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	D	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	E	<i>Notes to the Consolidated Financial Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Francis Lay Sioe Ho
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014 Pondok Pinang Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Sudjono
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36
RT 002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Direktur


menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Tangerang Selatan, 19 Februari 2019 / South Tangerang, 19 February 2019


Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur/President Director


Sudjono
Direktur/Director



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2

Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322

Phone (021) 2965 0300, 2965 0500 Fax (021) 2966 0757, 2966 0758

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY**

We, the undersigned :

1. Name : Francis Lay Sioe Ho
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014, Pondok Pinang Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Telephone : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Title : President Director
2. Name : Sudjono
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36
RT 002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong,
Tangerang Selatan
Telephone : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Title : Director

declare that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements;
2. PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
- 3.a. All information contained in PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's internal control system.

We certify the accuracy of this statement.

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit A

Exhibit A

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017*)	
ASET				ASSETS
KAS DAN SETARA KAS	2d,e,4	755.247	225.203	CASH AND CASH EQUIVALENTS
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 157.419 dan Rp 85.492 pada tahun 2018 dan 2017	2d,f,5	11.357.670	9.435.315	FINANCE LEASES RECEIVABLES - net of allowance for impairment losses of Rp 157,419 and Rp 85,492 in 2018 and 2017
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 220.443 dan Rp 151.990 pada pada tahun 2018 dan 2017	2d,g,6,39	5.922.788	5.739.410	CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - net of allowance for impairment losses of Rp 220,443 and Rp 151,990 in 2018 and 2017
PIUTANG IJARAH	2d,h	105	-	IJARAH RECEIVABLES
PIUTANG LAIN-LAIN - bersih	2d,i,7,39	198.271	414.127	OTHER RECEIVABLES - net
ASET DERIVATIF	2d,j,t,8	110.170	-	DERIVATIVE ASSETS
BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	2k,9	53.430	43.071	PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
ASET IJARAH - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 504 pada tanggal 31 Desember 2018	2l,10	2.332	-	IJARAH ASSETS - net of accumulated depreciation of Rp 504 as of 31 December 2018
ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 349.566 dan Rp 298.954 pada tahun 2018 dan 2017	2m,11	530.145	457.376	FIXED ASSETS - net of accumulated depreciation of Rp 349,566 and Rp 298,954 in 2018 and 2017
ASET TAK BERWUJUD - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 63.772 dan Rp 54.400 pada tahun 2018 dan 2017	2n,12	32.374	20.552	INTANGIBLE ASSETS - net of accumulated amortization of Rp 63,772 and Rp 54,400 in 2018 and 2017
ASET PAJAK TANGGUHAN	2o,15c	68.382	65.588	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2d,13,39	86.391	82.631	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET		19.117.305	16.483.273	TOTAL ASSETS

*) direklasifikasi (Catatan 39)

*) as reclassified (Note 39)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Pinjaman yang diterima	2d,p,u,14	6.899.860	6.819.052	Fund borrowings
Utang pajak	2o,15a	67.063	140.151	Taxes payable
Surat berharga yang diterbitkan - setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi sebesar Rp 9.780 dan Rp 8.589 pada tahun 2018 dan 2017	2d,q,16a 16b	5.196.220	3.909.411	Securities issued - net of unamortized securities issuance cost of Rp 9,780 and Rp 8,589 in 2018 and 2017
Beban yang masih harus dibayar	2d,u,17	287.878	293.527	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2r,18	202.498	199.716	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas derivatif	2d,j,u,8	-	817	Derivative liabilities
Utang dividen	2z,19	1.758	1.612	Dividend payables
Utang lain-lain	2d,20	258.232	214.721	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		12.913.509	11.579.007	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp 25 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp 25 (full amount) per share
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				Authorized capital - 20,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 15.967.115.620 saham	21	399.178	399.178	Issued and fully paid capital - 15,967,115,620 shares
Tambahan modal disetor - bersih	22	553.286	553.286	Additional paid-in capital - net
Saham treasuri	2w,21	(252.160)	(252.160)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	2j,8,34	1.684	(35.477)	Cumulative gain (loss) on derivative instrument for cash flows hedges - net
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	2r,18,34	(41.926)	(75.928)	Loss on defined benefit actuarial program
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		86.307	72.733	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		5.457.423	4.242.633	Unappropriated
		6.203.792	4.904.265	
Kepentingan non-pengendali		4	1	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		6.203.796	4.904.266	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		19.117.305	16.483.273	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) direklasifikasi (Catatan 39)

*) as reclassified (Note 39)

Tangerang Selatan, 19 Februari 2019/ 19 February 2019


Sudjono
Direktur/ Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017*)	
PENDAPATAN				INCOME
Sewa pembiayaan	2d,f,s,23	2.871.964	2.281.670	Finance lease
Pembiayaan konsumen	2d,g,s,24	2.021.182	1.654.331	Consumer financing
Syariah	2d,h,s	529	-	Sharia
Kuangan	2d,s	20.217	7.166	Finance
Lain-lain	2d,m,s,25	104.351	99.150	Others
Jumlah Pendapatan		5.018.243	4.042.317	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2r,s,26,30	1.050.204	868.834	Salaries and benefits
Bunga dan keuangan	2d,p,q,s,27,39	1.035.650	895.645	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	2k,m,n,s,28,39	566.925	482.075	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai				Provision for impairment losses
Piutang sewa pembiayaan	2d,s,5	215.537	125.700	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	2d,s,6	293.645	177.056	Consumer financing receivables
Piutang syariah		1	-	Sharia receivables
Lain-lain	2d,s,29,39	16.182	5.221	Others
Jumlah Beban		3.178.144	2.554.531	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK		1.840.099	1.487.786	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	2o,15b	372.305	300.276	Income Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN		1.467.794	1.187.510	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	2j,8,34	46.452	(3.252)	Effective portion of the fair value change of the derivative instrument - cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15c,34	(9.291)	650	Income tax relating to item that will be reclassified to profit or loss
		37.161	(2.602)	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	2r,18,34	42.502	(33.173)	Gain (loss) on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	15c,34	(8.500)	6.635	Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss
		34.002	(26.538)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		71.163	(29.140)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE THE YEAR - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.538.957	1.158.370	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

*) direklasifikasi (Catatan 39)

*) as reclassified (Note 39)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B/2


Exhibit B/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.467.794	1.187.510	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		-	-	Non-controlling interests
		<u>1.467.794</u>	<u>1.187.510</u>	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE THE YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.538.957	1.158.370	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		-	-	Non-controlling interests
		<u>1.538.957</u>	<u>1.158.370</u>	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2y,33	<u>98</u>	<u>79</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Tangerang Selatan, 19 Februari 2019 / 19 February 2019


Sudjono
Direktur / Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent																
		Keuntungan/ (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas bersih/ Cumulative gains/ (losses) on derivative instrument for cash flows hedges - net		Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net		Saham treasury/ Treasury stock		Keuntungan/ (kerugian) aktuarial program manfaat pasti/ Gain (loss) on defined benefit actuarial program		Saldo laba/Retained earnings		Jumlah sebelum kepentingan non-pengendali/ Total before non-controlling interests		Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests		Jumlah ekuitas/ Total equity		
		(35.477)		(553.286)		(252.160)		(75.928)		4.242.633		4.904.265		1		4.904.266		
		-		-		-		-		-		-		-		-		
Saldo per 31 Desember 2017		399.178		553.286		(252.160)		(75.928)		72.733		4.242.633		4.904.265		1		4.904.266
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-		-		-		-		-		1.467.794		1.467.794		-		1.467.794
Laba tahun berjalan		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak: Bagian yang efektif dan lindung nilai arus kas	2j, 8	-		-		-		37.161		-		-		37.161		-		37.161
Keuntungan aktuarial program pensiun	2r, 18	-		-		-		34.002		-		-		34.002		-		34.002
		-		-		-		37.161		-		1.467.794		1.538.957		-		1.538.957
		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	1c	-		-		-		-		-		-		-		3		3
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	19	-		-		-		-		13.574		(13.574)		-		-		-
Dividen tunai tahun 2017	2z, 19	-		-		-		-		-		(239.430)		(239.430)		-		(239.430)
Saldo per 31 Desember 2018		399.178		553.286		(252.160)		(41.926)		86.307		5.457.423		6.203.792		4		6.203.796

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent		Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas bersih/ Cumulative losses on derivative instrument for cash flows hedges - net	Kerugian aktuarial program manfaat pasti/ Loss on defined benefit actuarial program	Saldo laba/Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah sebelum non-pengendali/ Total before non-controlling interests	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net							
Saldo per 31 Desember 2016	399.178	553.286 (32.875) (49.390)	31.696	3.604.949	4.254.684	-	4.254.684
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.187.510	1.187.510	-	1.187.510
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.187.510	1.187.510	-	1.187.510
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak: Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas	2j,8	-	(2.602)	-	-	-	(2.602)	-	(2.602)
Kerugian aktuarial program pensiun	2r,18	-	-	(26.538)	-	-	(26.538)	-	(26.538)
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	1c	-	-	-	-	-	-	1	1
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	19	-	-	-	41.037 ((41.037)	-	-	-
Dividen tunai tahun 2016	2z,19	-	-	-	-	(164.608)	(164.608)	-	(164.608)
Dividen tunai interim	2z,19	-	-	-	-	(344.181)	(344.181)	-	(344.181)
Saldo per 31 Desember 2017	399.178	553.286 (35.477) (75.928)	72.733	4.242.633	4.904.265	1	4.904.266

Total comprehensive income for the year Profit for the year

Other comprehensive income net of tax:

Effective portion of cash flows hedges
 Actuarial loss from pension plan

Issuance of subsidiary's shares to non-controlling interests

Appropriation for general reserve

Cash dividends of 2016

Interim cash dividends

Balance as of 31 December 2017

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit D

Exhibit D

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Transaksi pembiayaan		18.663.015	15.051.927	Financing transactions
Pembiayaan bersama	32a	540.443	279.062	Joint financing
Bunga bank dan deposito berjangka		19.639	7.107	Interest from banks and time deposits
Lain-lain		120.925	136.917	Others
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Transaksi pembiayaan baru		(16.372.413)	(14.340.836)	New financing transactions
Beban umum dan administrasi		(1.456.141)	(1.208.183)	General and administrative expenses
Pembiayaan bersama	32a	(380.657)	(991.151)	Joint financing
Beban bunga dan keuangan		(1.077.455)	(980.143)	Interest and financing charges
Pajak penghasilan		(423.896)	(289.763)	Income taxes
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(366.540)	(2.335.063)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	11	20.465	28.431	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	11	(158.519)	(123.332)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset tak berwujud	12	(20.296)	(7.425)	Acquisition of intangible assets
Uang muka pembelian aset tetap	13	-	(81.055)	Advance purchase for fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(158.350)	(183.381)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Pinjaman yang diterima	14,35	5.938.380	8.036.520	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	16a,b,35	2.905.000	1.835.000	Securities issued
Penerimaan setoran modal dari kepinginan non-pengendali		3	1	Receipts of paid-in capital from non-controlling interests
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pinjaman yang diterima	14,35	(5.931.898)	(5.866.460)	Fund borrowings
Penerusan pinjaman (<i>channeling</i>) dan jual beli piutang	32a	(121)	(26.013)	Channeling and receivables sales and purchase
Pelunasan pokok surat berharga yang diterbitkan	16a,b,35	(1.617.000)	(892.000)	Repayment of securities issued principal
Dividen tunai	19	(239.430)	(508.789)	Cash dividends
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		1.054.934	2.578.259	Net cash flows provided by financing activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>530.044</u>	<u>59.815</u>	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		<u>225.203</u>	<u>165.388</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		<u>755.247</u>	<u>225.203</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:
Kas dan bank	4	<u>452.095</u>	<u>200.084</u>	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka	4	<u>303.152</u>	<u>25.119</u>	Time deposits
		<u>755.247</u>	<u>225.203</u>	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia pada tanggal 7 April 1982 berdasarkan Akta No. 57 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Berdasarkan Akta No. 54 yang dibuat dihadapan Inge Hendarmin, S.H., pengganti dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 September 1986, nama Perusahaan diubah dari PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Intitama Leasing Indonesia, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6977-HT.01.04.TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 November 1986, Tambahan No. 1451. Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 22 November 1989 jo Akta No. 27 tanggal 8 Maret 1990 keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H., nama Perusahaan diubah dari PT Bunas Intitama Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1441-HT.01.04.TH.90 tanggal 13 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1990, Tambahan No. 1537. Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 8 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., nama Perusahaan diubah dari PT Bunas Finance Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9625-HT.01.04.TH.96 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 7 Februari 1997, Tambahan No. 552. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta No. 116 tanggal 27 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668-HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information of the Company

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“the Company”) was established as PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia on 7 April 1982 based on Notarial Deed No. 57 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice (recently known as the Ministry of Law and Human Rights) of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 dated 28 October 1982 and was published in the State Gazette No. 102, dated 21 December 1982, Supplement No. 1390. Based on Notarial Deed No. 54 of Inge Hendarmin, S.H., a substitute of Kartini Muljadi S.H. in Jakarta dated 17 September 1986, the Company's name changed from PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia to PT Intitama Leasing Indonesia, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. 6977-HT.01.04.TH.86 dated 7 October 1986 and was published in the State Gazette No. 94 dated 25 November 1986, Supplement No. 1451. Based on Notarial Deed No. 80 dated 22 November 1989, number Deed 27 dated 8 March 1990, both of which were made before Kartini Muljadi S.H. the Company's name changed from PT Bunas Intitama Leasing Indonesia to PT Bunas Finance Indonesia, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-1441-HT.01.04.TH.90 dated 13 March 1990 and was published in the State Gazette No. 34 dated 28 April 1990, Supplement No. 1537. Based on Deed No. 37 dated 8 August 1996 made before Achmad Abid, SH, the name of the Company was changed from PT Bunas Finance Indonesia to PT Bunas Finance Indonesia Tbk, a change which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C2-9625 -HT.01.04.TH.96 dated 21 October 1996 and was published in the State Gazette No. 11 dated 7 February 1997, Supplement No. 552. The Company's Articles of Association has been amended several times, which one of the amendments was based on Notarial Deed No. 116 dated 27 June 2001 of Aulia Taufani, S.H., a substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, in connection with the change of name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-03668-HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001 and was published in the State Gazette No. 35 dated 30 April 2002, Supplement No. 4195.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM (Lanjutan)**

a. **Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (Lanjutan)**

Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H.,M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0024031.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diselesaikan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982, yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Pada tanggal 20 Februari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-038/KM.5/2006.

Melalui amandemen ini, izin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk berlaku surut sejak adanya persetujuan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk dari instansi yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Sewa pembiayaan
- b. Pembiayaan konsumen
- c. Anjak piutang
- d. Usaha kartu kredit

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29), ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. **GENERAL (Continued)**

a. **Establishment and General Information of the Company (Continued)**

The latest amendment based on Deed No. 7 dated 25 October 2017 made before Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, concerning the approval of Article 3 amendment which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter Number AHU-0024031.AH.01.02 Year 2017 dated 16 November 2017 and amendments to Article 20, Article 21, Article 22, Article 23, and Article 24 that have been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced in the Letter of Acceptance of the Deed of Amendment of the Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0191568 dated 16 November 2017. As of the date of the consolidated financial statements were completed, this change is still in the process of being announced in the State Gazette.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance by virtue of his decree No. KEP-038/KM.11/1982 dated 12 August 1982 as amended by Decree No. 493/KMK.013/1990 dated 23 April 1990.

On 20 February 2006, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia amended the Company's license in its decision letter No. KEP-038/KM.5/2006.

Through this amendment, the previous license granted to PT Bunas Finance Indonesia Tbk was applied for retroactively since the approval of the change in the name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk from the regulatory authority in its decision letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company is mainly engaged in financing activities through the provision of financing or capital goods comprising the followings:

- a. Finance lease
- b. Consumer financing
- c. Factoring of accounts receivable
- d. Credit card

Furthermore, to meet the regulatory requirements of the Financial Services Authority (OJK) No. 29/POJK.5/2014 concerning the Implementation of Financing Company (POJK 29), the scope of activities of the Company has been changed to be as follows:

- a. Investment financing
- b. Working capital financing
- c. Multipurpose financing
- d. Other business activities under approval of Financial Services Authority (OJK)

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan
(Lanjutan)

Perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai POJK 29 tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0934483.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 serta telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank sesuai surat dari Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan No. S-4171/NB.111/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan kembali mengalami perubahan setelah RUPSLB menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

Berdasarkan Akta tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- I. Usaha Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan multiguna
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- II. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - a. Pembiayaan jual beli
 - b. Pembiayaan investasi
 - c. Pembiayaan jasa.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perusahaan dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Februari 2018.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1982. Saat ini, Perusahaan menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Kantor pusat Perusahaan terletak di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan.

Perusahaan dan entitas anaknya (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai grup) mempunyai masing-masing 228 kantor cabang, 173 gerai dan 22 kantor cabang syariah pada tanggal 31 Desember 2018, dan 218 kantor cabang dan 124 gerai pada tanggal 31 Desember 2017 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment and General Information of the Company (Continued)

The amendment of the articles of association related to the intent and purpose as well as the business activities of the Company in accordance with the POJK 29 has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0934483.AH.01.02 Year 2015 dated 30 April 2015 and has been recorded in the administration of the Directorate of Institutional and Industrial Products of Non-Bank Finance in accordance with a letter from the Director of Institutional Product of Industrial Products of Non-Bank Financial Service Authority No. S-4171/NB.111/2015 dated 5 August 2015.

The scope of the Company's business activities changed again after the EGMS approved the amendment of the Company's Articles of Association pursuant to Deed of Minutes of EGMS No. 6 dated 25 October 2017 in conjunction with Deed of Meeting Decision Letter No. 7 dated 25 October 2017 made before Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang.

Based on the Deed, the Company may carry out the following main business activities:

- I. Financing:
 - a. Investment financing
 - b. Working capital financing
 - c. Multipurpose financing
 - d. Other financing activities under the approval of the Financial Service Authority.
- II. Sharia Financing:
 - a. Financing sale and purchase
 - b. Investment financing
 - c. Financing services.

To undertake a sharia financing business, the Company has received a copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Service Authority Number Kep-27/NB.223/2018 concerning the License to Open Sharia Business Unit to the Company and the Decree effective on 8 February 2018.

The Company started its commercial operations in 1982. Currently, the Company mainly engages in financing comprises of finance lease and consumer financing activities. The Company's registered office is located at BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, South Tangerang.

The Company and its subsidiary (hereinafter collectively referred to as the group) have 228 branches, 173 kiosks and 22 sharia branch as of 31 December 2018, and 218 branches and 124 kiosks as of 31 December 2017, representative office and kiosks throughout Indonesia.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM (Lanjutan)**

b. **Penawaran Umum Saham Perusahaan**

Pada tahun 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp 5.750 (nilai penuh) per saham. Pada tahun 1993, Perusahaan melakukan penawaran tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal per saham yang sama melalui bursa efek di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 1993, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 10 (sepuluh) saham yang dimiliki, sebanyak 1.062.500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan juga menyetujui untuk menerbitkan saham bonus dengan dasar 17 (tujuh belas) saham baru untuk setiap 20 (dua puluh) saham yang dimiliki, sebanyak 9.934.668 saham dengan nilai nominal yang sama. Pada tanggal 22 Januari 1994, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 3 (tiga) saham yang dimiliki, sebanyak 7.207.390 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/BAPEPAM-LK dan terakhir dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/OJK) (BAPEPAM) melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka penawaran umum terbatas pertama (I) Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham dengan harga penawaran sejumlah Rp 1.500 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 1 (satu) saham baru. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui surat No. S-71/PM/1997 dalam rangka penawaran umum terbatas kedua Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp 1.000 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 2 (dua) saham baru.

Pada tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 500 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* atau Obligasi Wajib Konversi (MCB) yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan.

Pada bulan Mei 2006, seluruh MCB telah dikonversi menjadi sebanyak 414.384.585 saham biasa sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham pada tanggal 31 Desember 2006.

1. **GENERAL (Continued)**

b. **Public Offering of the Company's Shares**

In 1990, the Company conducted an initial public offering of its 2,125,000 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share through the stock exchanges in Indonesia at an offering price of Rp 5,750 (full amount) per share. In 1993, the Company offered an additional of 8,500,000 shares at the same par value per share through a stock exchange in Indonesia.

On 8 April 1993, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 10 (ten) shares held totaling 1,062,500 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share. On the same date, the shareholders of the Company also approved to issue bonus shares on the basis of 17 (seventeen) new shares for every 20 (twenty) shares held totaling 9,934,668 shares at the same par value. On 22 January 1994, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 3 (three) shares held totaling 7,207,390 shares at a par value of Rp 1,000 (full amount) per share.

On 18 April 1994, the Company received effective statement from the Capital Market Supervisory Board (was then changed to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency/BAPEPAM-LK and recently known as the Financial Services Authority/OJK) (BAPEPAM) through letter No. S-639/PM/1994 to conduct the first rights issue of the Company's shares on a 1 (one) for 1 (one) basis totaling 28,829,558 shares at an offering price of Rp 1,500 (full amount) per share. Moreover, on 17 January 1997, the Company received effective statement from the BAPEPAM-LK through letter No. S-71/PM/1997 to conduct the second rights issue of the Company's shares on the basis of 2 (two) new shares for every 1 (one) shares held totaling 115,318,232 shares at an offering price of Rp 1,000 (full amount) per share.

On 17 June 1997, the shareholders of the Company approved a stock split, resulting in a change in par value per share from Rp 1,000 (full amount) to Rp 500 (full amount), thus resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 172,977,348 shares to 345,954,696 shares.

In respect with the debt restructuring, the Company's shareholders through Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 27 January 2000 approved to issue the Mandatory Convertible Bonds (MCB) which should be converted into 414,384,585 shares of the Company.

In May 2006, all of the MCB had been converted into ordinary shares totaling 414,384,585 shares, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 760,339,281 shares as of 31 December 2006.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta notaris No. 65 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp 500 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham, dan menyetujui untuk mengubah Pasal 15 ayat 3b mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Pemecahan saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

RUPSLB tersebut juga telah menyetujui penerbitan saham untuk pelaksanaan program *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juni 2014. BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI.

Pada tanggal 31 Mei 2013, 30 Mei 2014, 29 Mei 2015, dan 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru masing-masing sebanyak 5.936.000, 23.320.000, 16.025.000 dan 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* untuk Tahap I - Grant Date 1 dan 2, dan Tahap II - Grant Date 1 dan 2, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562 saham pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 18 pada tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP untuk tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan harga pelaksanaan yang mengacu kepada sebagaimana diatur dalam butir V.1 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap II secara pra-pencatatan di BEI sebanyak-banyaknya 46.777.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.205 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (Continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (Continued)

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 65 dated 21 June 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the amendment to Paragraphs 1 and 2 of Article 4 of the Articles of Association concerning the changes in par value of the Company's share (stock split) from Rp 500 (full amount) to Rp 250 (full amount) per share, thus, resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 760,339,281 shares to 1,520,678,562 shares, and Paragraph 3b of Article 15, concerning the Duties and Authorities of the Directors.

The stock split was approved by the BEI through letter No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 dated 31 July 2012.

The EGM had also approved the issuance of shares for the implementation of the Phase 1 of the *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* on the Indonesia Stock Exchange, totaling 60,826,400 shares with par value of Rp 250 (full amount) per shares, up to 20 June 2014. BEI through its letter No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 dated 6 July 2012 had approved the Company's pre-listing of its MESOP on the Indonesia Stock Exchange for the implementation of phase I.

On 31 May 2013, 30 May 2014, 29 May 2015, and 31 May 2016, the Company has issued the additional 5,936,000, 23,320,000, 16,025,000 and 30,752,000 shares, respectively, for the implementation of the MESOP for Phase I - Grant Date 1 and 2, and Phase II - Grant Date 1 and 2, for options that has been exercised, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 1,596,711,562 shares as of 31 December 2016.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 18 dated 6 May 2014 of Aryanti Artisari, S.H., Notary in Jakarta, had approved the issuance of new shares the results of the implementations of the MESOP program phase II up to 30 June 2016 with exercised price which referred to point V.1 Listing Regulation No. I-A as included in the Appendix of the Decision Decree of virtue of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated on 20 January 2014.

BEI through its letter No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 dated 6 June 2014 approved the registration of the Company's pre-listing of its MESOP on the Stock Exchange for the implementation of phase II maximum 46,777,000 shares with exercised price Rp 2,205 (full amount) per share.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM (Lanjutan)**

b. **Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta No. 25 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (*stock split*) dari sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 25 (nilai penuh) per saham. Pemecahan nilai saham ini telah mendapat persetujuan dari BEI melalui surat No.S-02820/BEI.PP1/05-2017 tertanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian, sejak 31 Desember 2017 jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh menjadi 15.967.115.620 saham.

c. **Entitas Anak**

Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), berdasarkan akta notaris Herna Gunawan, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 15 September 2017, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 29 September 2017. FIT bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perusahaan merupakan salah satu pemegang saham pendiri FIT dengan persentase kepemilikan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang ditempatkan dan modal disetor FIT. Melalui Surat No.S-588/NB.213/2018 tertanggal 31 Juli 2018, permohonan FIT atas platform <http://www.pinjammodal.id> sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disetujui untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, FIT wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak terdaftar di OJK.

d. **Pembelian Kembali (Buy-Back) Saham Perusahaan**

Pada tanggal 15 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp 341.000.

Per tanggal 15 Oktober 2016, program *buyback shares* ini dinyatakan berakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan adalah sebanyak 1.002.732.000 saham (setelah pemecahan saham) dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya diharapkan akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share/EPS*).

1. **GENERAL (Continued)**

b. **Public Offering of the Company's Shares (Continued)**

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 25 dated 18 April 2017 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the par value split of the Company's share from Rp 250 (full amount) per share to Rp 25 (full amount) per share (*stock split*). The stock split was approved by the BEI through its letter No.S-02820/BEI.PP1/05-2017 dated 23 May 2017. Therefore, since 31 December 2017 total issued and fully paid capital was 15,967,115,620 shares.

c. **Subsidiary**

The Company established a subsidiary under the name of PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), based on Notarial Deed No. 4 of Herna Gunawan, S.H., M.Kn on 15 September 2017. The deed of establishment was approved the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0043022.AH.01.01 dated 29 September 2017. FIT is engaged in lending and borrowing services based on information technology. The Company is one of the founding shareholders of FIT with a percentage of ownership of 99.96% (ninety nine point ninety six percent) of the issued and fully paid capital of FIT. Based on Decision Letter No.S-588/NB.213/2018 dated 31 July 2018, the application for FIT on the platform <http://www.pinjammodal.id> as the organizer of Information Technology-Based Lending and Borrowing Services is approved to be registered and supervised by the OJK. Furthermore, FIT is required to apply for a business license as an Information Technology-Based Money-Borrowing Service provider within a maximum period of one year after being registered with the OJK.

d. **Treasury Shares**

On 15 April 2015, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) approved the buy-back of outstanding shares of the Company up to a maximum of 10% of the total shares issued and fully paid-up capital of the Company or as much of 154,993,456 shares. The funds reserved to repurchase shares for a maximum period of 18 (eighteen) months from the EGM should not more than Rp 341,000.

As of 15 October 2016, the shares buyback program was officially ended.

As of 31 December 2018, total shares bought back by the Company was totaling 1,002,732,000 shares (after stock split) for a total purchase price of Rp 252,160.

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation expected to increase the value of Earnings per Share (EPS).

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Surat Berharga yang Diterbitkan

e. Securities Issued

Surat berharga yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Securities issued for the last 5 (five) years are as follows:

Surat berharga/ Securities	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Total emisi/ Amount issued	Jumlah per seri Obligasi/ Amount per Series	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Total limit : (Rp 2.500.000)		28 Februari/ February 2014 (No. S-121/D.04/2014)				
Tahap I Tahun 2014 Seri/Series A:	10 Maret/ March 2014		500.000	225.000	17 Maret/ March 2015	Lunas/Paid
Seri/Series B:				55.000	7 Maret/ March 2016	Lunas/Paid
Seri/Series C:				220.000	7 Maret/ March 2017	Lunas/Paid
Tahap II Tahun 2015	20 Maret/ March 2015		1.000.000			
Seri/Series A:				345.000	29 Maret/ March 2016	Lunas/Paid
Seri/Series B:				105.000	19 Maret/ March 2017	Lunas/Paid
Seri/Series C:				550.000	19 Maret/ March 2018	Lunas/Paid
Tahap III Tahun 2016	26 Februari/ February 2016		1.000.000			
Seri/Series A:				200.000	5 Maret/ March 2017	Lunas/Paid
Seri/Series B:				142.000	25 Februari/ February 2018	Lunas/Paid
Seri/Series C:				658.000	25 Februari/ February 2019	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Total limit : (Rp 5.000.000)		17 Oktober/ October 2016 (No.S588/D.04/2016)	1.000.000			
Tahap I Tahun 2016 Seri/Series A:	26 Oktober/ October 2016			317.000	5 November 2017	Lunas/Paid
Seri/Series B:				550.000	25 Oktober/ October 2019	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series C:				133.000	25 Oktober/ October 2021	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Tahap II Tahun 2017 Seri/Series A:	3 Maret/ March 2017		1.000.000	540.000	12 Maret/ March 2018	Lunas/Paid
Seri/Series B:				460.000	2 Maret/ March 2020	Belum jatuh tempo/ Not yet due

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Surat Berharga yang Diterbitkan (Lanjutan)

Surat berharga yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Securities Issued (Continued)

Securities issued for the last 5 (five) years are as follows: (Continued)

Surat berharga/ Securities	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Total emisi/ Amount issued	Jumlah per seri Obligasi/ Amount per Series	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status
Tahap III Tahun 2017 Seri/Series A:	10 November 2017		835.000	335.000	19 November 2018	Lunas/Paid
Seri/Series B:				100.000	9 November 2019	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series C:				400.000	9 November 2020	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Tahap IV Tahun 2018 Seri/Series A:	7 Maret / March 2018		2.165.000	946.000	16 Maret / March 2019	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series B:				253.000	6 Maret / March 2020	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series B:				966.000	6 Maret / March 2021	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Total limit : (Rp 8.000.000)		7 Juni/ June 2018 (No.S-67/D.04/2018)	740.000			
Tahap I Tahun 2018 Seri/Series A:	27 Juni / June 2018			188.000	6 Juli/ July 2019	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Series B:				552.000	26 Juni/ June 2021	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia II Tahun 2014	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ Not listed on Stock Exchange	4 Juni/ June 2014	130.000	130.000	14 Juni/ June 2015	Lunas/Paid
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ Not listed on Stock Exchange		100.000			
Seri/Series A:		13 April 2015		50.000	13 April 2017	Lunas/Paid
Seri/Series B:		13 Mei/ May 2015		50.000	13 Mei/ May 2018	Lunas/Paid
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ Not listed on Stock Exchange	5 Agustus/ August 2015	155.000	155.000	15 Agustus/ August 2016	Lunas/Paid

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perusahaan No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0027398 tanggal 19 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris (Independen)	:	Emmy Yuhassarie	:
Komisaris	:	Dominic John Picone	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:	President Director
Direktur Keuangan	:	Sudjono	:	Finance Director
Direktur Bisnis	:	Sutadi	:	Business Director
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	:	Andrew Adiwijanto	:	Operations and Human Capital Director
Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	:	Sigit Hendra Gunawan	:	Enterprise Risk Director (Independent)

Dewan Pengawas Syariah*)

Ketua	:	Asrori S. Karni	:	Chairman
Anggota	:	Helda Rahmi Sina	:	Member

*) Berlaku efektif terhitung sejak tanggal kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu tanggal 27 Desember 2017.

1. GENERAL (Continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees

Based on Deed of Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company No. 6 dated 25 October 2017, in conjunction with the Deed of Meeting Decision Letter No. 19 dated 21 December 2017 made before Herna Gunawan, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0027398 dated 19 January 2018, the composition of the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner (Independent)	:
Commissioner (Independent)	:
Commissioner (Independent)	:
Commissioner	:
Commissioner	:
Commissioner	:

Directors

President Director	:
Finance Director	:
Business Director	:

Sharia Supervisory Board*)

Chairman	:
Member	:

*) Effective as of the date of passing the Fit and Proper Test of the Financial Service Authority (OJK) on 27 December 2017.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM (Lanjutan)**

- f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (Lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Emmy Yuhassarie	:
Anggota	:	Edy Sugito	:
		Friso Palilingan	

Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014, Kepala Unit Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Fledy Rizmara.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Sudjono.

Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Karyawan tetap	6.646
Karyawan tidak tetap	4.525
Jumlah	<u>11.171</u>

Personil manajemen kunci Perusahaan mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. **GENERAL (Continued)**

- f. *Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (Continued)*

The composition of the Audit Committee of the Company and its subsidiary as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

Audit Committee

	:		:
	:		:

Internal Audit

Based on the Virtue of the Board of Directors of the Company No. SK/BOD/VII/14-009 dated 16 July 2014, Head of Internal Audit Unit of the Company as of 31 December 2018 and 2017 is Fledy Rizmara.

Corporate Secretary

Based on the Virtue of the Board of Directors of the Company No. BOD-BOC/VI/2014-0011 dated 24 June 2014, Corporate Secretary as of 31 December 2018 and 2017 is Sudjono.

Employees

The total number of the Company and its subsidiary's employees as of 31 December 2018 and 2017 was as follows:

	<u>2017</u>	
	5.982	Permanent employees
	3.902	Non-permanent employees
	<u>9.884</u>	Total

Key management personnel of the Company consist of members of Boards of Commissioners and Directors.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 19 Februari 2019.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK"), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun atas dasar akrual dan berdasarkan konsep nilai historis, kecuali untuk instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar dan utang atas kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset program.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan dan entitas anaknya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah ditetapkan secara konsisten pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary were authorized for issuance by Directors on 19 February 2019.

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS"), which includes the Interpretations of Financial Accounting Standards, issued by the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("Bapepam-LK", which the function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") since 1 January 2013) Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emiten or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except the consolidated statement of cash flows, were prepared on the accrual basis and under the historical cost concepts, excepts for derivative financial instruments which are measured at fair value and the liability for post-employment benefit obligations which is recognized at the present value of defined benefit obligations less the fair value of plan asset.

The consolidated statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of each entities are measured using the currency of primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company and its subsidiaries' functional and presentation currency.

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

c. Change in Accounting Policies

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Changes to Statement of Financial Accounting Standards (" SFAS ") and Interpretations of Financial Accounting Standards (" IFAS ")

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 yang relevan bagi Perusahaan dan entitas anaknya namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya, yaitu Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas - Prakarsa Pengungkapan", Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi -Pengalihan Properti Investasi", PSAK 15 (Penyesuaian) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap - Agrikultur: Tanaman Produktif", Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tanggahan untuk Rugi yang Belum Direalisasi", Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham - Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham", PSAK 67 (Penyesuaian), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", PSAK 69 "Agrikultur" dan PSAK 111 "Akuntansi Wa'd "

Amendments of the following standards and interpretations which effective for periods beginning on or after 1 January 2018 and relevant for Company and its subsidiary but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies, namely amendment of SFAS 2 "Statements of Cash Flows - Disclosure Initiative", Amendments to SFAS 13 "Investment Property - Transfer to Investment Property", SFAS 15 (Improvements) "Investments in Associates and Joint Ventures", Amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment - Agriculture: Bearer Plants", Amendments to SFAS 46 "Income Taxes - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses", Amendments to SFAS 53 "Share-based Payment - Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions", SFAS 67 (Improvements), "Disclosures of Interest in Other Entities", SFAS 69 "Agriculture" and SFAS 111 "Wa'd Accounting".

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan dan entitas anaknya, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka", Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang dan Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi", PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dan PSAK 73 "Sewa".

New standards and amendments issued and relevant for the Company and its subsidiary but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2018 are Amendment to ISAK 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration", Amendment to SFAS 15 "Investments in Associate and Joint Venture: Long-term Interest in Associate and Joint Ventures", Amendment to SFAS 62 "Insurance Contract", SFAS 71, Financial Instruments", Amendment to SFAS 71 "Financial Instrument: Prepayment Features with Negative Compensation", SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers", and SFAS 73 "Leases".

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, manajemen Perusahaan dan entitas anak sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

As of the independent auditors' report date, the Company and its subsidiary's management is currently evaluating the impact of these standards and interpretations on the Company's financial statements.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

d. Financial Assets and Liabilities

Aset keuangan Perusahaan, terdiri dari kas dan setara kas, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, aset derivatif dan pinjaman kepada karyawan (dicatat sebagai bagian dari "piutang lain-lain").

The Company's financial assets, consist of cash and cash equivalents, finance lease receivables, consumer financing receivables, derivative assets and loans to employees (recorded as part of "other receivables").

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar, liabilitas derivatif, surat berharga yang diterbitkan, utang premi asuransi dan utang kepada dealer yang dicatat sebagai bagian dari liabilitas lain-lain.

The Company and its subsidiary's financial liabilities consist of fund borrowings, accrued expenses, derivative liabilities, securities issued, insurance premium payables and payable to dealer which are recorded as part of other liabilities.

d.1. Klasifikasi

d.1. Classification

Berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2014), Perusahaan mengelompokkan seluruh aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, kecuali untuk aset derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Based on PSAK 55 (2014 Revision), the Company classifies all of its financial assets as loans and receivables, except for derivative assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.1. Klasifikasi (Lanjutan)

d.1. Classification (Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and the Company does not intend to sell immediately or in the near terms. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired.

Perusahaan mengelompokkan seluruh liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk liabilitas derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Company classifies all of its financial liabilities as other financial liabilities measured at amortized cost, except for derivative liabilities which are classified as financial instruments measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

d.2. Pengakuan

d.2. Recognition

Perusahaan dan entitas anaknya pada awalnya mengakui aset dan liabilitas keuangan pada tanggal perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut.

The Company and its subsidiary initially recognizes financial assets and liabilities on the date of their origination.

Pada saat pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klarifikasi aset dan liabilitas keuangan tersebut.

At initial recognition, the Company and its subsidiary's financial assets or liabilities are measured at fair value plus/minus (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issue of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classifications.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasikan selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga dan keuangan untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of consumer financing income and finance lease income for transaction costs related to financial assets and as part of interest and financing charges for transaction costs related to financial liabilities.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.3. Penghentian pengakuan

d.3. Derecognition

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat Perusahaan dan entitas anaknya mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Company and its subsidiary derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company and its subsidiary transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognized as a separate asset or liability.

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan pada saat dilakukannya penarikan jaminan kendaraan. Selain itu, Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

The Company and its subsidiary derecognize consumer financing receivables and finance lease receivables at the time when the vehicle collateral has been taken out. In addition, the Company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anaknya secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anaknya tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transaction where the Company and its subsidiary neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of a financial asset, the Company and its subsidiary derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The right and obligation retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers where control over the asset is retained, the Company and its subsidiary continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

Perusahaan dan entitas anaknya menghapus bukukan saldo piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, pada saat Perusahaan dan entitas anaknya menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada kemampuan keuangan konsumen sehingga konsumen tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau konsumen atau unit yang dibiayai tidak dapat ditemukan atau dikuasai oleh pihak ketiga atau nilai realisasi bersih atas jaminan yang dikuasai kembali diperkirakan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan.

The Company and its subsidiary writes off a consumer financing receivable and finance lease receivables, when the Company and its subsidiary determines that the asset is uncollectible. This decision was taken after consideration of information such as the occurrence of significant changes to the financial ability of consumers so that consumers can no longer pay the loan, or consumer or units being financed cannot be found or is controlled by third party or the net realizable value of collateral is not expected to be sufficient to pay the entire exposure for the consumer financing receivables and finance lease receivables.

Penerimaan atau pemulihan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Collection or recovery of financial assets which had been written-off is recorded as other income.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.4. Saling hapus

d.4. Offsetting

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company and its subsidiary has legally enforceable rights to offset the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

d.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

d.5. Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

d.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan

d.6. Identification and measurement of impairment for financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

The Company and its subsidiary assesses at each reporting date, whether there is objective evidence that a financial assets are not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be reliably estimated.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perusahaan dan entitas anaknya dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Objective evidence that the financial assets are impaired can include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or advance by the Company and its subsidiary on terms that the Company would not otherwise consider, indications that a borrower will enter bankruptcy, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan entitas anaknya awalnya menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For financial assets carried at amortized cost, the Company and its subsidiary first assesses whether there is objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dan memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dinilai secara kolektif.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan model statistik dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil actual untuk memastikan estimasi tersebut masih tepat.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

d.7. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan dan entitas anaknya memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.6. Identification and measurement of impairment for financial assets (Continued)

Individual assessment is performed on the significant financial assets that have objective evidence of impairment. The financial assets that are not individually significant and have similar credit characteristic are assessed collectively.

In assessing collective impairment, the Company and its subsidiary uses statistical modeling of historical trends of the probability of default, timing of recoveries and the amount of loss incurred, adjusted for management's judgement as to whether current economic and credit conditions are such that the actual losses are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that they remain appropriate.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the reversal is recognized in the current year profit or loss.

d.7. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company and its subsidiary has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company and its subsidiary measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Company and its subsidiary establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties, and if available, reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, discounted cash flows analysis and option pricing models.

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

d.7. Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

d.7. Fair value measurement (Continued)

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan dan entitas anaknya, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk-return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anaknya mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Company and its subsidiary, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The Company and its subsidiary calibrates valuation techniques and tests them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang), atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received, unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with the other observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging), or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. When transaction price provides the best evidence of fair value at initial recognition, the financial instrument is initially measured at the transaction price and any difference between this price and the value initially obtained from a valuation model is subsequently recognized in the statement of profit or loss depending on the individual facts and circumstances of the transaction but not later than when the valuation is supported wholly by observable market data or the transaction is closed out.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Fair values reflect the credit risk of the financial instruments and include adjustments to take into account the credit risk of the Company and counterparty where appropriate. Fair value estimates obtained from models are adjusted for any other factors, such as liquidity risk or valuation model uncertainties, to the extent that the Company believes a third-party market participation would take them into account in pricing a transaction.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sepanjang deposito berjangka tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less since the date of placement, as long as these time deposits are not pledged as collaterals for borrowings nor restricted.

f. Sewa Pembiayaan

Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2011), suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklarifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

f. Finance Leases

Based on PSAK 30 (2011 Revision), leases are classified as finance leases if such leases transfer substantially all the risks and rewards related to the ownership of the lease assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased assets.

Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan Piutang sewa bersih. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi Perusahaan sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

The Company recognizes assets held under a financing lease and present them as a receivable at an amount equal to the net finance lease receivables. Lease payment is treated as repayment of principal and financing lease income. The recognition of financing lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company's finance lease receivables. The Company acts as a lessor in finance leases.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima oleh perusahaan sewa pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Investasi dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

At initial recognition, the fair value of finance lease receivables represents finance lease receivables plus the residual value at the end of the lease period deducted by unearned lease income and security deposits. The difference between the gross lease receivables and the present value of the lease receivables is recognised as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to the current year statement of income using the effective interest rate. finance lease receivables are classified as loans and receivables.

g. Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum di amortisasi dan dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

g. Consumer Financing

Consumer financing receivables are receivables plus (minus) unamortized transaction cost (fee) and minus unearned consumer financing income and allowance for impairment losses of consumer financing receivables.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, akan diakui pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Unearned consumer financing income, which represents the difference between total installments to be received from the consumer and the principal amount financed, plus or deducted with the unamortized transaction cost (income), will be recognized as income over the term of the contract using effective interest method of the related consumer financing receivable.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

g. Consumer Financing (Continued)

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi adalah pendapatan administrasi proses pembiayaan dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen tersebut.

Unamortized transaction cost (income) are financing administration income and transaction costs which are incurred at the first time the financing agreement is signed and directly attributable to consumer financing.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dipertakutkan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan pendapatan yang timbul terkait penyelesaian kontrak ini diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting income related to this early termination of a contract is recognized in the current year profit or loss.

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukkan setelah menunggak lebih dari 270 hari (untuk properti) dan lebih dari 210 hari (untuk produk mobil dan motor). Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukkan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

Consumer financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 270 days (for property) and more than 210 days (for cars and motorcycles). Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

Pembiayaan Bersama

Joint Financing

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama konsumen tanpa tanggung renteng (*without recourse*) dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

All joint financing agreements entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments are recorded as consumer financing receivables in the statement of financing position (net approach). Consumer financing income is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income after deducting the portions belong to other parties participated to these joint financing transactions.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen".

In joint financing without recourse, arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates to consumer than the interest rates stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Consumer Financing Income".

h. Piutang Ijarah

h. Ijarah Receivables

Piutang ijarah (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan piutang pendapatan ijarah merupakan akrual piutang sewa atas bagian keuntungan (ujroh) transaksi ijarah muntahiyah bittamlik dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional.

Ijarah receivables are based on unrealized accrual rent income from principal portion and ijarah receivable represents portion of accrual rent income from the following month's installment of ijarah muntahiyah bittamlik which is recognized proportionally.

Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Akad ijarah is a contract for the provision of funds in the context of transferring the use rights or benefits of a good or service based on a lease transaction, without being followed by the transfer of ownership of such goods to the lessee.

Piutang pendapatan ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa porsi ujroh dan piutang ijarah sebesar sewa porsi pokok yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

Ijarah revenue receivables are recognized at maturity amounting to the rent of ujroh and ijarah receivables amounting to the portion of the principal outstanding which has not been received and presented at net realizable value, which is the outstanding amount of the receivables.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Piutang dalam Proses Penyelesaian

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait, yaitu pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual objek yang dijaminan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

j. Instrumen Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko

Seluruh instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan digunakan untuk tujuan manajemen risiko. Instrumen derivatif ini digunakan untuk lindung nilai eksposur risiko suku bunga dan risiko mata uang Perusahaan. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, beberapa kriteria tertentu harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan mendokumentasikan secara formal hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai. Perusahaan menilai, pada awal hubungan lindung nilai dan juga secara berkesinambungan, apakah instrumen lindung nilai diharapkan akan "sangat efektif" dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dari unsur yang dilindung nilai sepanjang periode dimana lindung nilai tersebut ditetapkan, dan apakah hasil aktual dari setiap lindung nilai berada dalam kisaran 80-125 persen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Receivables in the Settlement Process

Receivables in the settlement process represent receivables from collateral recovered and stated at net realizable value which is carrying amount or principal amount of related financing receivables, namely consumer financing and finance lease receivables less allowance for decline in market value of the collateral retained. Consumer financing receivables and finance lease receivables are reclassified to receivables in the settlement process when the collateral is withdrawn because the consumer is not able to meet its obligations after going through the stages stipulated in the financing agreement with the consumer.

Customer authorizes the Company to sell the pledged object or performing other actions in solving the debts in the event of default of the financing agreement. Excess result of a settlement with the total obligations of the consumer is the right of the customer, while the shortage of the settlement proceeds will be charged to written-off other receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables in the settlement process are classified as financial assets classified as loans and receivables.

j. Derivative Instrument for Risk Management Purposes

All derivative instruments held by the Company are for risk management purposes. These derivative instruments are used to hedge the Company's exposures to interest rate risk and currency risk. Derivative instruments held for risk management are measured at fair value in the statement of financial position. To qualify for hedge accounting, certain criteria are to be met, including formal documentation to be in place at the inception of the hedge.

On initial designation of the hedge, the Company formally documents the relationship between the hedging instruments and hedge items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. The Company makes an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be "highly effective" in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the respective hedged item during the period for which the hedge is designated, and whether the actual results of each hedge are within a range of 80-125 percent.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Instrumen Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau terhadap unsur yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dalam tahun yang sama dimana arus kas yang dilindungi nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada unsur yang sama dalam laporan laba rugi.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi ketika unsur yang dilindungi nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika suatu prakiraan transaksi akan dilindungi nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi.

k. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode flat (proporsional).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Derivative Instrument for Risk Management Purposes (Continued)

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the current year statement of profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the items being hedged in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

The Company and its subsidiary designates derivatives as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of income as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently transferred to the statement of profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss.

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognized immediately in the statement of profit or loss.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged as an expense over the periods of benefit using the straight-line method.

l. Ijarah Asset

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial positions at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Income from ijarah is recognised over the period of the contract with flat (proportional) method.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

m. Aset Tetap

m. Fixed Assets

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Fixed assets are initially recognized at acquisition cost. After initial measurement, fixed assets are measured using the cost model, carried at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Acquisition cost includes purchase price and any costs directly attributable to bring the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets other than land are calculated on the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives as follows:

	Masa manfaat/ Useful lives (Tahun/ Year)	Tarif/ Rates	
Bangunan dan prasarana	20	5 %	Building and improvements
Peralatan kantor	5	20 %	Office equipment
Kendaraan	5	20 %	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	5	20 %	Furniture and fixtures

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi periode dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Repairs and maintenance costs, are charged to the the statement of profit or loss during the period in which they are incurred. Expenditures that extend the future life of assets or provide further economic benefits are capitalized and depreciated.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

The carrying amount of fixed assets are derecognized upon disposal or when there is no longer a future economic benefit expected from its use or disposal.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak digunakan lagi atau dijual), maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are derecognized (retired or disposed of), their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statement of financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss.

Aset dalam penyelesaian untuk pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Asset in progress under development are stated at cost and presented as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount which is determined at the higher of net selling price or value in use.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur dan metode penyusutan dikaji ulang dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

At the end of each year, residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

n. Aset Tak Berwujud

n. Intangible Assets

Perangkat lunak

Software

Perangkat lunak pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal perangkat lunak meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa perangkat lunak siap dipakai. Setelah pengakuan awal, perangkat lunak diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Software is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of software consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the software to its intended use. After initial recognition, software is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Subsequent expenditure on software assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah lima tahun.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the estimated useful life of software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is five years.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tak berwujud ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan diakui di dalam laporan laba rugi.

Gains or losses on disposal of intangible assets are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are recognized in profit or loss.

o. Pajak Penghasilan

o. Income Tax

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk bagian yang langsung diakui di komponen ekuitas lainnya, dimana beban pajak yang terkait dengan bagian tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the statement of profit or loss except to the extent it relates to items recognized directly in other equity components, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Beban pajak kini adalah utang pajak yang ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the current year, using tax rates enacted or substantively enacted at reporting date.

Beban pajak tangguhan diakui sehubungan dengan adanya perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai aset dan liabilitas yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila besar kemungkinan manfaat pajak terkait tidak lagi mungkin direalisasi. Pengurangan tersebut akan berlaku terbalik saat kemungkinan laba fiskal di masa depan membaik. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan tersedia untuk merealisasikan manfaat pajak tersebut.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

p. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with recourse. Fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with recourse disajikan secara gross, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

o. Income Tax (Continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Current tax assets and current tax liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

The extra amount of tax principal and penalties stipulated by the Tax Assessment Letter (SKP) is recognized as income or expense in the current operations, unless further proposed settlement efforts. The extra amount of tax principal and penalties stipulated by SKP are deferred as long as it meets the criteria for asset recognition.

p. Fund Borrowings

Borrowings represent funds received from various banks and financial institutions, including with recourse joint financing facilities. With recourse joint financing facilities are presented gross, i.e loans granted to customers and borrowings received from banks are recorded at their full amount with repayment obligations in accordance with the terms of the agreement.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of loans are deducted from total borrowings. See Note 2d for the accounting policy on financial liabilities measured at amortized cost.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan meliputi utang Obligasi dan *Medium Term Notes*.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

r. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Amandemen 2014): "Imbalan Kerja", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan, yaitu imbalan kerja jenis manfaat pasti, yang mencakup pensiun, uang pesangon, uang penghargaan dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perusahaan" yang telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2013.

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja dimasa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaria independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan atau beban komprehensif lainnya pada tahun dimana keuntungan/(kerugian) aktuarial terjadi. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat di saldo laba.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

q. *Securities Issued*

Securities issued consist of Bonds payable and Medium Term Notes.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Additional cost directly attributable to the issuance of securities are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

Refer to Note 2d for accounting policy of financial liabilities at amortized cost.

r. *Employees' Benefits*

Short-term employees' benefits

Short-term employees' benefits are recognized when they are owed to the employees based on an accrual method.

Long-term and post-employment benefits

The Company applies SFAS 24 (Amendment 2014): "Employee Benefits", which became effective as of 1 January 2016.

Long-term and post-employment benefits as stipulated under the Labor Law regarding to pension, severance pay, service pay, compensation pay and other benefits, are calculated in accordance with "Company Regulation" which is in line with Labor Law No. 13/2013.

The obligation for post-employment benefits recognized in the statement of financial position is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior years, deducted by any plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly fully recognized to other comprehensive income or expense in the year when such actuarial gain/(losses) occur. Accumulated actuarial gains and losses are recorded in retained earnings.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya telah memiliki program pensiun iuran pasti yang mana Perusahaan membayar iuran ke dana pensiun lembaga keuangan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terutang.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari sewa pembiayaan (Catatan 2f) dan pembiayaan konsumen (Catatan 2g), pendapatan bunga dan beban bunga diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh biaya yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perusahaan dan entitas anaknya tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan pembiayaan konsumen Perusahaan disajikan bersih setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

r. Employees' Benefits (Continued)

The Company and its subsidiary has a defined contribution pension program where the Company pays contributions to a financial institution pension plan which is calculated at a certain percentage of fixed income of the employees who meet the Company's criteria. The contributions are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as they become payable.

s. Revenue and Expenses Recognition

Income from finance lease (Note 2f) and consumer financing (Note 2g), interest income and interest expense are recognised over the term of the contract based on the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Company and its subsidiary estimates future cash flow considering all contractual term of the financial instrument (for example, prepayment options, call option and other similar options) but does not consider future credit losses.

The calculation includes all fees, commissions and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums discounts.

Transaction costs are additional charges that are directly attributable to the acquisition, issuance or disposal of financial assets or financial liabilities.

Additional costs are costs that would not occur if the Company and its subsidiary does not obtain, publish or otherwise dispose of financial instruments.

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

The Company's consumer financing income is presented net of with consumer financing income belongs to the bank in relation with channeling transactions, joint financing cooperations, factoring, and the appointment as manager of accounts receivable.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2d).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

t. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pengujian penurunan nilai suatu aset non-keuangan menggunakan masa manfaat ekonomi tidak terbatas dilakukan setiap tahun pada akhir periode pelaporan keuangan. Aset non-keuangan lain duji penurunan nilai ketika telah terjadi atau ada perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak terpulihkan. Apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan (yaitu mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi untuk menjual), maka aset tersebut diturunkan nilainya.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs utama yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

	2018 (nilai penuh)/ (full amount)
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	14.481

Penjabaran mata uang asing dicatat sesuai dengan PSAK 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.

v. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
(1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

s. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Income from excess of insurance premiums and excess of commission expenses and subsidy to dealer, administration income, late charges and termination income are recognised as an adjustment to the effective interest rate of the loan and receivables (Note 2d).

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

t. Impairment of non-financial assets

Impairment test on non-financial assets with indefinite useful economic lives are undertaken annually at the financial year end. Other non-financial assets are subject to impairment test whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable. Where the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of value in use and fair value less costs to sell), the asset is written down accordingly.

u. Balances in Foreign Currency Transactions

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The main exchange rates used for translating the foreign currency as of 31 December 2018 and 2017 are based of the mid rates published by Bank Indonesia, are as follows:

	2017 (nilai penuh)/ (full amount)	
	13.548	1 United States Dollars (USD)

Foreign currency translation is recorded in accordance with SFAS 10 (revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

v. Operating Segment

An operating segment is a component of entity which:
(1) involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Segmen Operasi (Lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
(Lanjutan)

- (2) hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perusahaan menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Perusahaan yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perusahaan adalah Direksi.

Segmen operasi Perusahaan disajikan berdasarkan segmen primer dibagi ke dalam segmen-segmen usaha berikut: sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, sedangkan segmen sekunder dibagi ke dalam segmen geografis berikut: Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi (Catatan 31).

w. Saham Treasuri

Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut (saham treasuri) dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas.

x. Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham

Karyawan (termasuk eksekutif senior) Perusahaan menerima remunerasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham, dimana karyawan memberikan jasa sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitas ('*equity-settled transactions*'). Saat opsi di eksekusi, Perusahaan menerbitkan saham baru. Hasil bersih dari eksekusi berupa biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan premi saham.

Dalam situasi di mana instrumen ekuitas yang diterbitkan dan beberapa atau seluruh barang atau jasa yang diterima oleh entitas sebagai pertimbangan tidak dapat diidentifikasi secara khusus, barang atau jasa yang diterima (atau yang akan diterima) yang tidak dapat diidentifikasi diukur sebagai selisih antara nilai wajar pembayaran berbasis saham dan nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima yang teridentifikasi pada tanggal pemberian hak. Hal ini kemudian dikapitalisasi atau dibebankan secara tepat.

Beban program opsi karyawan berbasis saham dan beban program opsi manajemen diukur pada tanggal pemberian kompensasi (*grant date*) berdasarkan nilai wajar dari seluruh opsi yang diberikan yang dihitung dengan menggunakan metode *black-scholes*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

v. Operating Segment (Continued)

An operating segment is a component of entity which:
(Continued)

- (2) operations result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and
- (3) separate financial information is available.

The Company presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision-maker is Board of Directors.

Operating segments presented by the primary segments are divided into the following business segments: finance leases and consumer financing, while the secondary segments are divided into the following geographic segments: Java, Kalimantan, Sumatera and Sulawesi (Note 31).

w. Treasury Stock

If the entity regain its equity instruments, then those instruments (treasury shares) are deducted from equity. Gains or losses arising from the purchase, sale, issuance, or cancellation of the entity's equity instruments are not recognized in profit or loss. Compensation paid or received is recognized directly in equity.

x. Management and Employees Stock Option Program

Employees (including senior executives) of the Company receive remuneration in the form of share-based payment transactions, whereby employees render services as consideration for equity instruments ('*equity-settled transactions*'). When the options are exercised, the Company issues new shares. The proceeds received net of any directly attributable transaction costs are credited to share capital (nominal value) and share premium.

In situations where equity instruments are issued and some or all of the goods or services received by the entity as consideration cannot be specifically identified, the unidentified goods or services received (or to be received) are measured as the difference between the fair value of the share-based payment transaction and the fair value of any identifiable goods or services received at the grant date. This is then capitalised or expensed as appropriate.

Employee stock option program and management option program costs are measured at grant date based on the fair value of the stock option using a *black-scholes* model.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

y. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56 "Laba per saham", laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Jika jumlah saham yang beredar meningkat akibat dari pemisahan saham (*stock split*), maka perhitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian harus disesuaikan secara retrospektif.

Perusahaan dan entitas anaknya tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, oleh karena itu laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

z. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

bb. Kontinjensi

Liabilitas kontinjen tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjen tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis.

y. Earnings per Share

In accordance with SFAS 56 "Earning per share", earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during current year.

Diluted earning per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

If the outstanding number of shares increase as result of stock split, the computation of basic earnings per share for all presentation periods is adjusted retrospectively.

The Company and its subsidiary has no outstanding dilutive potential dilutive ordinary shares as of 31 December 2018 and 2017, accordingly no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss other comprehensive income.

z. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statement in the period which the dividends are approved by the Company's shareholders. Interim dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

aa. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiary has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre - tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

bb. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

cc. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

cc. Events After the Reporting Period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti dari kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

The preparation of the Company's financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, commitments and contingent liabilities which are reported. Due to inherent uncertainty in the estimates thus can lead to actual results reported in future periods differ from those estimates.

I. Penggunaan Pertimbangan

I. Use of Judgements

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

(i) Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

(i) Classification of financial assets and financial liabilities

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan kategori atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2015) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

The Company and its subsidiary determines the category of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 55 (Revised 2015). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2d.

(ii) Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan

(ii) Allowance for impairment of financial assets

Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu, hubungan dengan pelanggan dan status piutang dari pelanggan berdasarkan catatan piutang pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anaknya.

The Company and its subsidiary evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current receivables status based on any available third party receivables reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiary expected to collect.

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. **PENGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

I. **Penggunaan Pertimbangan (Lanjutan)**

(ii) **Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)**

Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pembiayaan dan cadangan piutang pembiayaan konsumen. Nilai tercatat dari piutang sewa pembiayaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 11.515.089 dan Rp 9.520.807. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5. Nilai tercatat dari piutang pembiayaan konsumen Perusahaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 6.143.231 dan Rp 5.891.400. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

II. **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

(i) **Nilai wajar atas instrumen keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 37.

3. **USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)**

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

I. **Use of Judgements (Continued)**

(ii) **Allowance for impairment of financial assets (Continued)**

These specific allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of finance lease receivables and consumer financing receivables. The carrying amount of the Company's finance lease receivables before allowance for impairment losses as of 31 Desember 2018 and 2017 were amounted to Rp 11,515,089 and Rp 9,520,807, respectively. Further details are shown in Note 5. The carrying amount of the Company's consumer financing receivables before allowance for impairment losses as of 31 Desember 2018 and 2017 were amounting to Rp 6,143,231 and Rp 5,891,400, respectively. Further details are shown in Note 6.

II. **Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiary. Such changes reflected in the assumptions as they occur.

(i) **Fair value of financial instruments**

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models. Further details are shown in Note 37.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(ii) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya telah menelaah pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Perusahaan membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan cadangan perubahan kerugian penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5 dan 6.

(iii) Estimasi umur manfaat aset tetap dan aset tak berwujud

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Lihat Catatan 11 untuk jumlah tercatat aset tetap.

(iv) Imbalan pasca-kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca-kerja.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(ii) Allowance for impairment losses of financial assets

The Company and its subsidiary has reviewed loans and receivables at each statements of financial positions date to assess whether impairment should be recognized in the profit or loss or not. In particular, justification by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment. In the estimation of cash flows, the Company makes the justification of the financial condition of debtors and net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in reserves of changes in these impairment losses in the future.

Allowance for impairment losses that collectively assessed includes inherent credit losses in financing receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances. Further details are shown in Notes 5 and 6.

(iii) Useful life estimate for fixed assets and intangible assets

The Company and its subsidiary reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. See Note 11 for the carrying amount of fixed assets.

(iv) Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. **PENGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. **Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

(iv) **Imbalan pasca-kerja (Lanjutan)**

Perusahaan dan entitas anaknya menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas.

Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

(v) **Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham**

Perusahaan dan entitas anaknya mengukur biaya *equity-settled transactions* karyawan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal diberikan. Estimasi nilai wajar untuk pembayaran berbasis saham untuk menentukan model penilaian yang paling sesuai, tergantung pada persyaratan dan kondisi pemberian. Estimasi ini juga mengharuskan menentukan *input* yang paling tepat untuk valuasi model termasuk masa manfaat yang diharapkan dari opsi saham, volatilitas dan *dividend yield* dan membuat asumsi yang digunakan.

(vi) **Pajak penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15b.

(vii) **Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15c.

3. **USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)**

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. **Estimates and Assumptions (Continued)**

(iv) **Post-employment benefits (Continued)**

The Company and its subsidiary determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations.

In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions. Further details are shown in Note 18.

(v) **Management and employees stock option program**

The Company and its subsidiary measures the cost of equity-settled transactions with employees by reference to the fair value of the equity instruments at the date at which they are granted. Estimating fair value for share-based payment transactions requires determining the most appropriate valuation model, which is dependent on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determining the most appropriate inputs to the valuation model including the expected life of the share option, volatility and dividend yield and making assumptions about them.

(vi) **Income tax**

Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiary recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are shown in Note 15b.

(vii) **Deferred tax assets**

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are shown in Note 15c.

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS	2018	2017	
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Kas	26.778	36.337	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	201.080	-	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	160.579	67.810	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	30.935	46.696	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	20.267	-	PT Bank Victoria International Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	6.199	16.188	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.965	13.447	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.343	3.875	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.165	802	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain (Saldo di bawah Rp 1.000)	1.784	14.929	Others (Balances below Rp 1,000)
Jumlah bank	425.317	163.747	Total cash in banks
Jumlah kas dan bank	452.095	200.084	Total cash on hand and in banks
Setara kas			Cash equivalents
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	150.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000	-	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Bukopin	8.000	25.119	PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Pan Indonesia Tbk	152	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah setara kas	303.152	25.119	Total cash equivalents
Jumlah kas dan setara kas	755.247	225.203	Total cash and cash equivalents
Kisaran suku bunga kontraktual dari deposito berjangka di atas adalah sebagai berikut:			The range of the contractual interest rates from the above time deposits is as follows:
	2018	2017	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	6,00% - 9,75%	7,00% - 9,50%	Time deposit interest rate per annum Rupiah
Tidak ada saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.			There is no restricted cash and cash equivalents as of 31 December 2018 and 2017.

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN	2018	2017	
Rincian piutang sewa pembiayaan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:			
Piutang sewa pembiayaan - bruto	14.159.288	11.724.499	Finance leases receivables - gross
Nilai sisa yang terjamin	8.419.608	6.943.980	Guaranteed residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(2.516.944)	(2.101.622)	Unearned finance lease income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(127.255)	(102.070)	Unamortized transaction costs
Simpanan jaminan	(8.419.608)	(6.943.980)	Security deposits
Jumlah	11.515.089	9.520.807	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(157.419)	(85.492)	Less allowance for impairment losses
Bersih	11.357.670	9.435.315	Net

Ekshibit E/35

Exhibit E/35

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Angsuran piutang sewa pembiayaan - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2018	2017	
<= 1 tahun	7.976.514	6.699.641	<= 1 year
1 - 2 tahun	4.441.905	3.690.044	1 - 2 years
> 2 tahun	1.740.869	1.334.814	> 2 years
Jumlah	14.159.288	11.724.499	Total

5. FINANCE LEASES RECEIVABLES (Continued)

The installments of finance leases receivables - gross, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

Pengelompokan piutang sewa pembiayaan - bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	2018	2017	2018 %	2017 %	
Belum jatuh tempo	12.030.305	10.084.710	84,96	86,02	Current
Lewat jatuh tempo:					Past due:
1-30 hari	1.777.399	1.412.841	12,55	12,05	1-30 days
31-90 hari	241.570	159.489	1,71	1,36	31-90 days
91-120 hari	43.665	20.329	0,31	0,17	91-120 days
121-180 hari	44.872	30.852	0,32	0,26	121-180 days
> 180 hari	21.477	16.278	0,15	0,14	> 180 days
Jumlah	14.159.288	11.724.499	100,00	100,00	Total

The classification of finance leases receivables - gross based on days overdue are as follows:

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses of finance leases receivables based on individual and collective assessments are as follows:

	2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	12.472	73.020	85.492	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	62.202	153.335	215.537	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(16.546)	(127.064)	(143.610)	Written-off
Saldo akhir	58.128	99.291	157.419	Ending balance
	2017			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	60.306	60.306	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	33.042	92.658	125.700	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(20.570)	(79.944)	(100.514)	Written-off
Saldo akhir	12.472	73.020	85.492	Ending balance

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah piutang sewa pembiayaan sebesar 1,37% dan 0,90% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Percentage of the allowance for impairment losses to finance leases receivables was 1.37% and 0.90% as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan tersebut.

Seluruh transaksi sewa pembiayaan dilakukan dengan pihak ketiga.

Jangka waktu kontrak sewa pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor dan alat-alat berat berkisar antara 6 - 60 bulan.

Rincian bunga kontraktual per tahun untuk piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2018
	%
Alat berat dan mesin	14 - 17
Kendaraan bermotor	18 - 22

Sebagai jaminan atas piutang sewa pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur atas kendaraan bermotor/alat berat/obyek jaminan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan. Simpanan jaminan ini akan digunakan sebagai pembayaran pada akhir masa sewa pembiayaan.

Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 4.526.819 dan Rp 4.243.795 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 14) dan sebesar Rp 1.708.455 dan Rp 1.619.833 digunakan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan (Catatan 16).

5. FINANCE LEASES RECEIVABLES (Continued)

The management believes that the allowance for impairment losses was sufficient to cover possible losses arising from uncollectible finance leases receivables.

All of the Company's finance lease transactions are entered into with third parties.

The period of finance leases for vehicle and heavy equipment contract ranged from 6 - 60 months.

The detail of contractual interest rates per annum on finance lease receivables are as follows:

	2017	
	%	
Alat berat dan mesin	15 - 18	Heavy equipment and machinery
Kendaraan bermotor	17 - 22	Vehicles

As the collateral to the finance lease receivables, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB) and purchase invoices of the motor vehicles/heavy equipment/collateral asset financed by the Company.

At the time of execution of the finance leases contracts, the lessees pay security deposits. The security deposits are used as the final installment at the end of the finance lease period.

Finance leases receivable as of 31 December 2018 and 2017 amounting to Rp 4,526,819 and Rp 4,243,795 were used as collateral to borrowings (Note 14) and amounting to Rp 1,708,455 dan Rp 1,619,833 were used as collateral to securities issued, respectively (Note 16).

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini merupakan piutang dalam Rupiah yang dikenakan bunga, yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk kendaraan kepada pemakai akhir dengan pembayaran angsuran secara berkala.

	2018
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	
Pihak ketiga	8.528.184
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	
Pihak ketiga	(1.750.279)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	47.307
	6.825.212
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	(681.981)
	6.143.231
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220.443)
Jumlah piutang pembiayaan konsumen-bersih	5.922.788

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

This account represents interest bearing receivables denominated in Rupiah arising from financing activities in the form of provision of vehicle to end users with periodic installment payment schedule.

	2017	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	8.041.032	Consumer financing receivables - gross
Pihak ketiga		Third parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui		Unearned consumer financing income
Pihak ketiga	(1.688.886)	Third parties
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	63.161	Unamortized transaction costs
	6.415.307	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	(523.907)	Joint financing and channeling - net
	5.891.400	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(151.990)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan konsumen-bersih	5.739.410	Total consumer financing receivables - net

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (Continued)

Angsuran piutang pembiayaan konsumen - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of consumer financing receivables - gross, which will be collected from customer in accordance with the due dates are as follows:

	2018	2017	
<= 1 tahun	4.703.837	4.311.690	<= 1 year
1 - 2 tahun	2.209.319	2.149.321	1 - 2 years
> 2 tahun	1.615.028	1.580.021	> 2 years
Jumlah	8.528.184	8.041.032	Total

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen-bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The classification of consumer financing receivables-gross based on days overdue are as follows:

	2018	2017	2018 %	2017 %	
Belum jatuh tempo	7.066.332	6.817.115	82,86	84,78	Current
Lewat jatuh tempo:					Past due:
1-30 hari	1.164.074	981.866	13,65	12,21	1-30 days
31-90 hari	185.728	158.176	2,18	1,97	31-90 days
91-120 hari	37.925	24.626	0,44	0,30	91-120 days
121-180 hari	50.398	41.613	0,59	0,52	121-180 days
> 180 hari	23.727	17.636	0,28	0,22	> 180 days
Jumlah	8.528.184	8.041.032	100,00	100,00	Total

Jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor berkisar antara 6 - 60 bulan dan perumahan (KPR) berkisar 12 - 180 bulan.

The term of consumer financing contracts financed by the Company on vehicles range between 6 - 60 months and housing ranges between 12 - 180 months.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen berdasarkan penilaian secara kolektif adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses of consumer financing receivables based on collective assessments are as follows:

	2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	2.521	149.469	151.990	Beginning balance
Penambahan cadangan selama periode berjalan - bersih	44.740	248.905	293.645	Additions to allowance during the period - net
Penghapusan	(15.388)	(209.804)	(225.192)	Written-off
Saldo akhir	31.873	188.570	220.443	Ending balance
	2017			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	122.695	122.695	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	10.163	166.893	177.056	Additions to allowance during the year - net
Penghapusan	(7.642)	(140.119)	(147.761)	Written-off
Saldo akhir	2.521	149.469	151.990	Ending balance

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar 3,59% dan 2,58% pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Percentage of the allowance for impairment losses to consumer financing receivables was 3.59% and 2.58% as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen tersebut.

Suku bunga kontraktual setahun untuk pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	2018	2017
	%	%
Mobil	15 - 19	16 - 20
Sepeda motor	37 - 40	38 - 41
Properti	17 - 20	17 - 21

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas kendaraan bermotor dan properti (bangunan) yang dibiayai Perusahaan.

Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.912.016 dan Rp 2.267.700 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 14) dan sebesar Rp 1.546.965 dan Rp 662.055 digunakan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan (Catatan 16).

Perusahaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi dalam menutup asuransi kendaraan bermotor konsumen yang dibiayai Perusahaan, terutama dengan PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN), dan PT MAPFRE ABDA Assistance. Seluruh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Perusahaan tersebut adalah pihak ketiga.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	2018	2017
Piutang dalam proses penyelesaian - bersih	93.307	67.099
Piutang penerimaan angsuran konsumen	61.491	44.418
Piutang karyawan	21.713	24.606
Piutang opsi saham karyawan (MESOP)	7.618	22.177
Premi asuransi	2.422	4.945
Piutang kerjasama pembiayaan digital	-	179.657
Piutang Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas pajak dividen	-	57.944
Lain-lain	11.720	13.281
Jumlah	198.271	414.127

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (Continued)

The management believes that the allowance for impairment losses was sufficient to cover possible losses arising from uncollectible consumer financing receivables.

The detail of contractual interest rates per annum on consumer financing is as follows:

	2018	2017	
	%	%	
Mobil	15 - 19	16 - 20	Cars
Sepeda motor	37 - 40	38 - 41	Motorcycles
Properti	17 - 20	17 - 21	Property

As the collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB), Proprietary Certificate (SHM) and Property Use Right Certificate (SHGB) of the vehicles and property (building) financed by the Company.

Consumer financing receivable as of 31 December 2018 and 2017 amounting to Rp 1,912,016 and Rp 2,267,700 were used as collateral to borrowings (Note 14) and amounting to Rp 1,546,965 dan Rp 662,055 were used as collateral to bonds payable, respectively (Note 16).

The Company engages several insurance companies, in covering the insurance on the consumers vehicles that financed by the Company, mainly with PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) and PT MAPFRE ABDA Assistance. All insurance companies that the engaged by the Company are third parties.

7. OTHER RECEIVABLES

	2018	2017	
Piutang dalam proses penyelesaian - bersih	93.307	67.099	Receivables in the settlement process - net
Piutang penerimaan angsuran konsumen	61.491	44.418	Customer installment receipt receivables
Piutang karyawan	21.713	24.606	Employee receivables
Piutang opsi saham karyawan (MESOP)	7.618	22.177	Employee share option (MESOP) receivables
Premi asuransi	2.422	4.945	Insurance premium
Piutang kerjasama pembiayaan digital	-	179.657	Joint financing digital receivables
Piutang Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas pajak dividen	-	57.944	Receivables from Indonesia Central Securities Depository (KSEI) on dividend tax
Lain-lain	11.720	13.281	Others
Jumlah	198.271	414.127	Total

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Finaccel Teknologi Indonesia (Finaccel), sebuah perusahaan teknologi untuk menyalurkan pembiayaan berbasis digital melalui aplikasi Kredivo. Finaccel menjamin pembayaran dari konsumen yang dibiayai dengan melakukan mekanisme *buy back* atas akun yang mengalami keterlambatan pembayaran diatas 60 hari.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah keseluruhan piutang yang dibiayai oleh Perusahaan dan disalurkan melalui aplikasi Kredivo adalah sebesar Rp 177.275 untuk pembiayaan kepada *end user*.

Per tanggal 31 Desember 2018, perjanjian kerjasama Perusahaan dengan Finaccel telah berakhir.

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen yang diantaranya dilakukan secara *online* melalui fasilitas layanan pembayaran pelanggan (*payment point*) seperti jaringan ATM Prima, ATM Bersama, Kantor Pos Indonesia, jaringan toko ritel Indomaret dan Alfamart (termasuk di dalamnya jaringan Alfa Midi, Lawson dan Alfa Express). Fasilitas *payment point* ini akan meneruskan angsuran yang dibayarkan konsumen tersebut ke rekening Perusahaan di beberapa bank dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dari tanggal angsuran konsumen diterima.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 37.581 dan Rp 35.077 cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang dalam proses penyelesaian - pihak ketiga.

7. OTHER RECEIVABLES (Continued)

The Company entered into a cooperation agreement with PT Finaccel Teknologi Indonesia (Finaccel), a technology company, for the purpose of channeling a digital based financing through Kredivo application. Finaccel provides guarantee over the loan payment from customer through a buy back mechanism for past due accounts of over 60 days.

On 31 December 2017, total outstanding loans which represents channeling loans by the Company through Kredivo application was amounting to Rp 177,275 for receivables due from end user.

As of 31 December 2018, the cooperation agreement with Finaccel has ended.

Customer installment receipt receivables are customer installment such paid through online customer's payment channel (payment point) such as ATM networks of Prima, ATM Bersama, the Indonesian Post Office, and outlets of Indomaret and Alfamart retail stores (including the store chains of Alfa Midi, Lawson and Alfa Express). These channels will transfer the installment paid to the Company's bank account in several bank within 1 (one) day up to 2 (two) days from the date that the customer installment is received.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables in the settlement process - third parties as of 31 December 2018 and 2017 amounting to Rp 37,581 and Rp 35,077, respectively, are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables from receivables in the settlement process - third parties.

8. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan memiliki beberapa kontrak *cross currency* dan *interest rate swap* dengan beberapa bank. Perincian dari kontrak-kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

8. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES)

The Company has several *cross currency* and *interest rate swap* contracts with several bank. The details of these contracts are as follows:

2018					
Pihak lawan/ Counterparty	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)		Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/Fair value Aset (liabilitas) derivatif/ Derivative assets (liabilities)
<i>Cross Currency and Interest Rate Swap</i>					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	4.166.667	8-Dec-2016	10-Jan-2020	3.879
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD	42.000.000	13-Jun-2017	24-Aug-2020	48.499
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD	46.500.000	13-Jun-2017	11-Dec-2020	58.749
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	10.666.667	21-Nov-2017	14-Dec-2020	10.742
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD	10.000.000	9-Oct-2018	11-Apr-2019	(11.699)
					<u>110.170</u>

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF (Lanjutan)

8. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES) (Continued)

Perusahaan memiliki beberapa kontrak *cross currency* dan *interest rate swap* dengan beberapa bank. Perincian dari kontrak-kontrak tersebut adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The Company has several *cross currency* and *interest rate swap* contracts with several bank. The details of these contracts are as follows: (Continued)

2017					
Pihak lawan/ Counterparty	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/Fair value	
				Aset (liabilitas) derivatif/ Derivative assets (liabilities)	
<i>Cross Currency and Interest Rate Swap</i>					
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 2.142.857	23-Jan-2015	12-Feb-2018	1.942	
PT Bank ANZ Indonesia	USD 10.000.000	20-Mar-2015	27-Jun-2018	3.096	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 1.935.484	11-Jun-2015	25-Jun-2018	92	
PT Bank Permata Tbk	USD 37.500.000	30-Jul-2015	13-Nov-2018	(11.215)	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 7.500.000	8-Dec-2016	10-Jan-2020	(1.130)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 20.000.000	4-Apr-2017	4-Apr-2018	(343)	
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 60.000.000	13-Jun-2017	24-Aug-2020	(3.421)	
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	USD 65.000.000	13-Jun-2017	11-Dec-2020	11.982	
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	18-Aug-2017	10-Oct-2018	93	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 16.000.000	21-Nov-2017	14-Dec-2020	(1.913)	
				(817)	

Perusahaan melakukan kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima.

The Company entered into *cross currency swap* and *interest rate swap* contracts to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from exchange rates and interest rates on borrowing.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait, dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut diakui pada perkiraan laba rugi.

Changes in the fair value of *cross currency swap* and *interest rate swap* contract designated hedging instruments that effectively offset the variability of cash flows associated with the borrowings are recorded in equity. The amounts subsequently are recognized to the profit or loss as adjustments of the exchange rate differences and interest payments related to the hedged borrowings in the same period in which the related exchange rate differences and interest affects profit or loss.

Keuntungan (kerugian) kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 1.684 dan (Rp 35.477) disajikan sebagai "Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-bersih" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat realisasinya.

The cumulative gain (losses) arising from the changes in fair values of the derivative instruments as of 31 December 2018 and 2017 amounting to Rp 1,684 and (Rp 35,477) were presented as "Cumulative gain (losses) on derivative instrument for cash flow hedges - net" under the "Equity" section in the consolidated statement of financial position and will be recognized in the statement of profit or loss upon its realization.

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	2018	2017	
Sewa	50.555	39.891	Rent
Asuransi	299	251	Insurance
Uang muka	1.042	677	Advance payment
Lain-lain	1.534	2.252	Others
Jumlah	53.430	43.071	Total

10. ASET IJARAH

10. IJARAH ASSETS

Akun ini merupakan obyek sewa dari transaksi *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa dan *ijarah* multijasa dengan perincian sebagai berikut:

This account represents the object of lease from *ijarah* transactions with the option of transferring ownership of leased objects and multijasa *ijarah* with the following details :

	2018	2017	
Multijasa	2.907	-	Multi service
Jumlah	2.907	-	Total
Akumulasi penyusutan	(504)	-	Accumulated depreciation
Marjin pembiayaan syariah yang belum diakui	(71)	-	Unearned sharia financing margin
Nilai bersih	<u>2.332</u>	<u>-</u>	Net

Penyusutan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Depreciation was charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					Acquisition cost	
Pemilikan langsung					Direct ownership	
Tanah	109.542	(255)	(1.088)	14.525	122.724	Land
Bangunan dan prasarana	293.599	4.425	(1.502)	13.215	309.737	Building and improvements
Peralatan kantor	136.000	20.548	(5.230)	379	151.697	Office equipment
Kendaraan	176.237	61.756	(25.438)	1.585	214.140	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	15.451	7.861	(1.914)	82	21.480	Furniture and fixtures
	730.829	94.335	(35.172)	29.786	819.778	
Aset dalam penyelesaian	25.501	64.218	-	(29.786)	59.933	Asset in progress
Jumlah Harga Perolehan	756.330	158.553	(35.172)	-	879.711	Total Cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	113.900	21.771	(532)	-	135.139	Building and improvements
Peralatan kantor	99.703	16.166	(11.495)	-	104.374	Office equipment
Kendaraan	72.572	35.281	(16.443)	-	91.410	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	12.779	1.389	4.475	-	18.643	Furniture and fixtures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	298.954	74.607	(23.995)	-	349.566	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	457.376				530.145	Carrying Amount

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	2017					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	109.914	-	(372)	-	109.542	Land
Bangunan dan prasarana	281.242	2.707	(1.316)	10.966	293.599	Building and improvements
Peralatan kantor	121.345	16.438	(2.205)	422	136.000	Office equipment
Kendaraan	132.413	72.546	(31.020)	2.298	176.237	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	14.500	895	(87)	143	15.451	Furniture and fixtures
	659.414	92.586	(35.000)	13.829	730.829	
Aset dalam penyelesaian	8.584	30.746	-	(13.829)	25.501	Asset in progress
Jumlah Harga Perolehan	667.998	123.332	(35.000)	-	756.330	Total Cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	94.329	20.843	(1.272)	-	113.900	Building and improvements
Peralatan kantor	85.143	16.666	(2.106)	-	99.703	Office equipment
Kendaraan	63.802	27.936	(19.166)	-	72.572	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	10.581	2.279	(81)	-	12.779	Furniture and fixtures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	253.855	67.724	(22.625)	-	298.954	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	414.143				457.376	Carrying Amount

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, persentase penyelesaian atas bangunan dan prasarana dalam penyelesaian masing-masing adalah sebesar 83% dan 85%. Bangunan dan prasarana dalam penyelesaian diestimasi akan selesai pada akhir tahun 2019.

As of 31 December 2018 and 2017, the percentage of completion of building and improvements in progress is 83% and 85%, respectively. This building and improvements in progress is estimated will be completed by the end of 2019.

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 74.607 dan Rp 67.724 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 28).

Depreciation charged to operations was amounted to Rp 74,607 and Rp 67,724 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively (Note 28).

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") yang memiliki masa manfaat yang akan berakhir antara tahun 2019 sampai tahun 2047. Manajemen Perusahaan beryakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah karena tanah tersebut diperoleh secara sah dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.

The Company owns several plots of land with "Property Use Rights" titles ("HGB") with remaining useful lives that will expire in the various years between 2019 and 2047. The management of the Company believes that there will be no difficulty in extending the land rights as the land were acquired legally and supported by sufficient evidences of ownership.

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari penghapusbukuan peralatan kantor dan rehabilitasi gedung kantor, serta penjualan aset tetap kendaraan dan peralatan kantor dengan rincian keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Deductions of fixed assets for the years ended 31 December 2018 and 2017 consisted of written off office equipment and leasehold improvement, and sales of fixed assets - vehicles and office equipment with details of gain on sale are as follows:

	2018	2017	
Hasil penjualan	20.465	28.431	Proceeds
Jumlah tercatat	(11.177)	(12.375)	Carrying amount
Keuntungan atas penjualan aset tetap	9.288	16.056	Gain on sale of fixed assets

Keuntungan atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Gain on sale of fixed assets is recognized as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset tetap berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 303.052 dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (Catatan 14).

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir dan risiko kerugian lainnya (*all risks*) dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 388.841 dan Rp 396.889 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap terhadap risiko-risiko yang dipertanggungkan.

Manajemen Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

Manajemen Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan jumlah tercatat.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan.

11. FIXED ASSETS (Continued)

As of 31 December 2018, fixed assets in the form of land and building amounting to Rp 303,052 were pledged as collateral for the Company's loan facilities (Note 14).

All fixed assets, except for land, are covered against losses from fire, flood and other risks (*all risks*) with a total sum insured amounting to Rp 388,841 and Rp 396,889 as of 31 December 2018 and 2017, respectively. The management believes that the sum insured is sufficient to cover the possible losses that may arise from the said insured risks.

The management of the Company and its subsidiary believes that there were no conditions or event that indicate impairment in the carrying amount of its fixed assets, and therefore an allowance for impairment losses of fixed assets was not considered necessary.

The management of the Company and its subsidiary believes that there is no significant difference between the fair value and the carrying amount of fixed assets.

All of fixed assets as at the reporting date are fully used to support the Company's operation activities.

12. ASET TIDAK BERWUJUD

12. INTANGIBLE ASSETS

	2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Piranti lunak	73.260	8.414	(2)	12.862	94.534	Acquisition cost Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	1.692	12.782	-	(12.862)	1.612	Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	74.952	21.196	(2)	-	96.146	Total Cost
Akumulasi amortisasi Piranti lunak	54.400	9.374	(2)	-	63.772	Accumulated amortization Software
Jumlah Tercatat	20.552				32.374	Carrying Amount
	2017					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Piranti lunak	63.399	4.497	-	5.364	73.260	Acquisition cost Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	4.129	2.927	-	(5.364)	1.692	Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	67.528	7.424	-	-	74.952	Total Cost
Akumulasi amortisasi Piranti lunak	47.816	6.584	-	-	54.400	Accumulated amortization Software
Jumlah Tercatat	19.712				20.552	Carrying Amount

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 9.374 dan Rp 6.584 masing-masing untuk tahun yang berakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 28).

12. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Amortization charged to operations was amounted to Rp 9,374 and Rp 6,584 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively (Note 28).

13. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017	
Uang muka pembelian tanah	81.055	81.055	Advance for land acquisition
Lainnya	5.336	1.576	Others
Jumlah	86.391	82.631	Total

13. OTHER ASSETS

This account consist of:

14. PINJAMAN YANG DITERIMA - PIHAK KETIGA

Pinjaman yang diterima terdiri dari

	2018	2017	
Pinjaman (Dolar AS)			Borrowings (US Dollar)
Standard Chartered Bank (Facility Agent)	1.281.568	2.201.550	Standard Chartered Bank (Facility Agent)
PT Bank CTBC Indonesia	154.464	216.768	PT Bank CTBC Indonesia
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	144.810	-	MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.	60.338	101.610	JA Mitsui Leasing Singapore Pte. Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia	-	270.960	PT Bank ANZ Indonesia
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	-	270.960	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch	-	135.480	Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch
Standard Chartered Bank, Singapore Branch	-	29.031	Standard Chartered Bank, Singapore Branch
Emirates NBD Bank PJSC (Facility Agent)	-	26.222	Emirates NBD Bank PJSC (Facility Agent)
Sub-jumlah pinjaman (Dolar AS)	1.641.180	3.252.581	Sub-total borrowings (US Dollar)
Pinjaman (Rupiah)			Borrowings (Rupiah)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.790.624	1.360.141	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	1.032.020	536.167	PT United Tractors Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	624.722	344.167	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	447.294	72.833	PT Bank Permata Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	340.000	-	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank KEB Hana Indonesia	253.704	286.069	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	225.000	208.333	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	217.500	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	121.447	95.080	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	108.472	245.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	66.667	174.167	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bank of China (Hongkong) Limited, Jakarta Branch	37.500	87.500	Bank of China (Hongkong) Limited, Jakarta Branch
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	15.278	48.611	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.029	47.094	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	95.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Sub-jumlah pinjaman (Rupiah)	5.282.257	3.600.162	Sub-total borrowings (Rupiah)
Jumlah pinjaman	6.923.437	6.852.743	Total borrowings
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(23.577)	(33.691)	Unamortized transaction costs
Pinjaman - bersih	6.899.860	6.819.052	Borrowings - net

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

14. FUND BORROWINGS - THIRD PARTIES (Continued)

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas adalah sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on the above bank loans are as follows:

	2018	2017	
Rupiah	5,00 - 12,00	5,50 - 12,00	
Dolar AS	3,81 - 4,18	2,24 - 3,97	Rupiah US Dollar

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The detail of borrowings are as follows:

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date	Batas fasilitas/ Facility limit	Saldo pinjaman/ Outstanding loan	
				31 Desember/ 2018	December 2017
Dolar AS/US Dollar					
Standard Chartered Bank (Facility Agent)	29-Jul-2015 6-Oct-2017	13-Nov-2018 11-Dec-2020	USD 105.000.000 USD 125.000.000	-	508.050 1.693.500
PT Bank CTBC Indonesia	14-Nov-2017	14-Dec-2020	USD 16.000.000	154.464	216.768
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	30-Jun-2018	31-Dec-2019	USD 10.000.000	144.810	-
JA Mitsui Leasing Singapore Pte.Ltd.	11-Oct-2016	30-Jun-2019	USD 10.000.000	60.338	101.610
PT Bank ANZ Indonesia	18-Aug-2017	10-Oct-2018	USD 20.000.000	-	270.960
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	4-Apr-2017	4-Apr-2018	USD 20.000.000	-	270.960
Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch	19-Mar-2015	27-Jun-2018	USD 50.000.000	-	135.480
Standard Chartered Bank, Singapore Branch	27-Jan-2015	12-Feb-2018	USD 30.000.000	-	29.031
Emirates NBD Bank PJSC	8-Jun-2015	25-Jun-2018	USD 50.000.000	-	26.222
Jumlah Dolar AS/Total US Dollar			USD 436.000.000	1.641.180	3.252.581
Rupiah					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15-Aug-2016 26-Oct-2016 30-Mar-2017 23-Mar-2018 28-Jun-2018 13-Sep-2018	27-Sep-2019 20-Feb-2020 23-Feb-2021 29-Mar-2021 19-Dec-2021 23-Jul-2021	500.000 500.000 1.000.000 500.000 300.000 200.000	130.446 194.363 689.617 301.325 291.540 183.333	302.837 364.964 692.340 - - -
PT United Tractors Tbk	21-Nov-2018	2-Nov-2021	1.250.000	1.032.020	536.167
PT Bank Central Asia Tbk	10-Mar-2017 16-Jul-2018	12-May-2020 26-Jul-2021	450.000 500.000	194.167 430.555	344.167 -
PT Bank Permata Tbk	18-Dec-2017	24-May-2021	650.000	447.294	72.833
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	10-Apr-2018	17-Apr-2019	340.000	340.000	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	30-Aug-2018	16-May-2020	500.000	253.704	286.069
PT Bank Pan Indonesia Tbk	31-Aug-2017	19-Jun-2020	350.000	225.000	208.333
PT Bank ANZ Indonesia	12-Sep-2018	12-Sep-2019	217.500	217.500	-

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

14. FUND BORROWINGS (Continued)

The detail of borrowings are as follows: (Continued)

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date	Batas fasilitas/ Facility limit	Saldo pinjaman/ Outstanding loan	
				31 Desember/ December 2018	December 2017
Rupiah					
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	6-Jun-2018	21-Jun-2021	167.500	121.447	95.080
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	19-Jan-2015	28-Apr-2018	150.000	-	9.861
	22-Apr-2016	16-May-2019	120.000	16.667	56.667
	28-Sep-2016	30-Mar-2020	250.000	85.139	168.472
	22-Aug-2017	28-Dec-2020	250.000	6.666	10.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4-Apr-2018	17-Dec-2019	300.000	66.667	174.167
Bank of China (Hongkong) Limited, Jakarta Branch	20-Jun-2016	21-Jul-2019	150.000	37.500	87.500
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19-Nov-2017	20-Jun-2019	200.000	15.278	48.611
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8-Jun-2017	10-Jun-2019	400.000	2.029	47.094
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	20-Nov-2017	7-Sep-2019	500.000	-	95.000
Jumlah Rupiah/Total Rupiah			9.745.000	5.282.257	3.600.162
Jumlah pinjaman/Total borrowings				6.923.437	6.852.743

Pada tanggal 29 Juli 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (Term Loan) sebesar USD 105.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation bertindak sebagai "Mandated Lead Arranger and Bookrunner", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (the "Facility Agent"), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (the "Security Agent").

On 29 July 2015, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 105,000,000 (full amount) with several banks, whereas Standard Chartered Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation whose acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk, whose acting as the Security Agent.

Pada tanggal 12 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (Term Loan) sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank, Ltd., bersama-sama bertindak sebagai "Mandated Lead Arranger and Bookrunner", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (the "Facility Agent"), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (the "Security Agent").

On 12 June 2017, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 100,000,000 (full amount) with several banks, whereas Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG Bank, Ltd., collectively acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk, whose acting as the Security Agent.

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian di atas, dan perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 125.000.000 (nilai penuh).

On 6 October 2017, the Company signed an amendment to the above agreement and amendment related to the total facility increase to USD 125,000,000 (full amount).

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Seluruh perjanjian di atas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain, mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang normal atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh fasilitas pinjaman, dijamin dengan piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 5 dan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat aset tetap yang dijaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (Catatan 11).

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

14. FUND BORROWINGS (Continued)

All loan agreements include certain covenants which are normally required for such credit facilities, such as limitations to initiate merger or consolidation with other parties, obtain loans from other parties except loans obtained in the normal course of business, or changes in its capital structure and/or articles of association without notification to/prior written approval from creditors and maintenance of certain agreed financial ratios.

As of 31 December 2018 and 2017, all of the loan facilities, are secured by finance lease receivables and consumer financing receivables (Notes 5 and 6).

As of 31 December 2018, there were fixed assets pledged as collateral for the Company's loan facilities (Note 11).

Interest and principal loan payments have been paid by the Company on schedule.

As of 31 December 2018 dan 2017, the Company has complied with all the requirements mentioned in the loan facility agreements.

15. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2018	2017
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	19.929	24.652
Pasal 23	653	601
Pasal 25	-	25.978
Pasal 26	690	34.200
Pasal 4 (2) - Final	193	4.419
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.524	1.119
Taksiran Pajak Penghasilan Badan (Pasal 29) terutang	<u>44.074</u>	<u>49.182</u>
Jumlah	<u>67.063</u>	<u>140.151</u>

15. TAXATION

a. Taxes payable

Income Taxes:
Article 21
Article 23
Article 25
Article 26
Article 4(2) - Final
Value Added Tax (VAT)
Estimated Corporate Income Tax (Article 29)
Total

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expense

	2018	2017	
Kini	392.810	321.973	Current
Tangguhan	(20.584)	(21.750)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	79	53	Adjustment on prior fiscal year
Jumlah	372.305	300.276	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dengan beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rates to profit before income tax, and the income tax expense as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian -	1.840.099	1.487.786	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	650	-	Loss before tax of subsidiary
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.840.749	1.487.786	Profit before tax of the Company
Beban pajak dengan tarif pajak tunggal yang berlaku	368.150	297.557	Tax expense at the applicable single tax rate
Pengaruh pajak penghasilan atas: Beda tetap pada tarif pajak tunggal yang berlaku	4.076	2.666	Tax effects on: Permanent differences at the applicable single tax rate
Penyesuaian tahun lalu	79	53	Adjustment on prior fiscal year
Jumlah	372.305	300.276	Total

Ekshibit E/49

Exhibit E/49

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

b. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

b. Income tax expense (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax, as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable profit for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian -	1.840.099	1.487.786	<i>Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	650	-	<i>Loss before tax of subsidiary</i>
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.840.749	1.487.786	<i>Profit before tax of the Company</i>
Beda tetap:			Permanent differences:
Beban sewa	1.906	1.990	<i>Rent expenses</i>
Pendapatan keuangan yang pajaknya bersifat final	(24.252)	(8.859)	<i>Finance income subjected to final tax</i>
Beban asuransi	11.704	8.121	<i>Insurance expenses</i>
Beban depresiasi	3.041	5.853	<i>Depreciation expenses</i>
Beban lain-lain	27.982	6.224	<i>Other expenses</i>
Jumlah beda tetap	20.381	13.329	<i>Total permanent differences</i>
Beda temporer:			Temporary differences:
Gaji dan imbalan pasca-kerja	36.888	85.687	<i>Salaries and post-employment benefits</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain	384.983	224.391	<i>Allowance for impairment losses of finance lease receivables, consumer financing receivables and other receivables</i>
Penghapusan piutang	(368.801)	(247.356)	<i>Receivables written-off</i>
Penyusutan aset tetap	807	6.766	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap	(1.634)	(1.270)	<i>Net gain on sale of fixed assets</i>
Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan	(1.191)	1.116	<i>Amortization of securities issuance cost</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	10.114	(2.932)	<i>Unamortized transaction cost on fund borrowings</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan konsumen	41.754	42.348	<i>Unamortized transaction cost on consumer financing receivables</i>
Jumlah beda temporer	102.920	108.750	<i>Total temporary differences</i>
Taksiran laba kena pajak	1.964.050	1.609.865	<i>Estimated taxable profit</i>
Tarif pajak	20%	20%	<i>Tax rate</i>
Taksiran beban pajak penghasilan - kini	392.810	321.973	<i>Estimated income tax expense - current</i>
Dikurangi : pajak dibayar dimuka	(348.736)	(272.791)	<i>Less : prepaid taxes</i>
Taksiran utang pajak penghasilan	44.074	49.182	<i>Estimated income tax payable</i>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2018 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

The corporate income tax calculation for 2018 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company filed its Annual Corporate Income Tax Return.

Ekshibit E/50

Exhibit E/50

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

c. Pajak tangguhan

c. Deferred tax

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari:

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:

	31 Desember/ December 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Credited to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2018	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai	7.016	3.236	-	10.252	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca-kerja	39.943	532	-	40.475	Post-employment benefits
Beban yang masih harus dibayar	10.877	6.846	-	17.723	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap	(6.395)	(165)	-	(6.560)	Depreciation of fixed assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	7.113	8.351	-	15.464	Unamortized transaction cost on finance lease and consumer financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan belum diamortisasi	(1.718)	(238)	-	(1.956)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(6.738)	2.023	-	(4.715)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	15.490	-	(17.791)	(2.301)	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - Bersih	65.588	20.585	(17.791)	68.382	Deferred tax assets - Net

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

c. Pajak tangguhan (Lanjutan)

c. Deferred tax (Continued)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari: (Lanjutan)

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Credited to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2017	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai	11.609	(4.593)	-	7.016	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca-kerja	28.078	11.865	-	39.943	Post-employment benefits
Beban yang masih harus dibayar	5.605	5.272	-	10.877	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap	(7.494)	1.099	-	(6.395)	Depreciation of fixed assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	(1.356)	8.469	-	7.113	Unamortized transaction cost on finance lease and consumer financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan belum diamortisasi	(1.941)	223	-	(1.718)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(6.152)	(586)	-	(6.738)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	8.205	-	7.285	15.490	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - Bersih	36.554	21.749	7.285	65.588	Deferred tax assets - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

The management believes that future taxable profit will be sufficient to be compensated against the deductible of temporary differences.

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Pada tanggal 28 Desember 2007, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 ("PP No. 81/2007") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

On 28 December 2007, the President of the Republic of Indonesia stipulated the Government Regulation No. 81 Year 2007 ("Gov. Reg. No. 81/2007") on "Reduction of the Rate of Income Tax on Resident Corporate Tax Payers in the Forum of Publicly-listed Companies".

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Administrasi (Lanjutan)

Pada tanggal 21 November 2013, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013 ("PP No. 77/2013") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" yang kemudian telah diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 ("PP No. 56/2015") tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013.

PP No. 56/2015 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah memenuhi persyaratan di atas untuk mendapatkan penurunan tarif sebesar 5%, sehingga menggunakan tarif 20% untuk perhitungan PPh Badan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. TAXATION (Continued)

d. Administration (Continued)

On 21 November 2013, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 77 Year 2013 ("Regulation No. 77/2013") on "Income Tax Rate Reduction Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies" which was later amended back through Government Regulation No. 56 of 2015 ("PP No. 56/2015 ") on the Amendment of Government Regulation No. 77 Year 2013.

PP No. 56/2015 regulates publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate of 5% lower than the income tax rate corporate taxpayer in the country, provided they meet the prescribed criteria, ie at least 40% of the total paid-up shares recorded to be traded on the stock exchanges in Indonesia; the shares must be held by at least 300 Parties; each Party may only have a share of less than 5% of the total shares issued and fully paid; and must be met in a short time at least 183 calendar days within a tax year.

As of 31 December 2018 and 2017, the Company has met requirements to obtain the reduced income tax rate of 5%, so that the rate using of 20% for corporate income tax calculation.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of *self-assessment*. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

16. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan terdiri dari:

	2018	2017
Obligasi (a)	5.196.220	3.859.411
Medium Term Notes (MTN) (b)	-	50.000
Jumlah	5.196.220	3.909.411

16. SECURITIES ISSUED

Securities issued consisting of:

Bonds (a)	3.859.411
Medium Term Notes (MTN) (b)	50.000
Total	3.909.411

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

16. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Obligasi

a. Bonds

	2018	2017	
Nilai nominal:			<i>Nominal value:</i>
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	-	550.000	<i>Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015</i>
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	658.000	800.000	<i>Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	683.000	683.000	<i>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	460.000	1.000.000	<i>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	500.000	835.000	<i>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	2.165.000	-	<i>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	740.000	-	<i>Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018</i>
Jumlah nilai nominal	5.206.000	3.868.000	<i>Total nominal value</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Biaya emisi Obligasi yang belum diamortisasi	(9.780)	(8.589)	<i>Unamortized Bonds issuance cost</i>
Jumlah - bersih	5.196.220	3.859.411	<i>Total - net</i>
	2018	2017	
Utang Obligasi sesuai jatuh temponya:			<i>Bonds payable by maturity profile:</i>
• < 1 tahun	2.442.000	1.567.000	<i>< 1 year •</i>
• 1-2 tahun	1.113.000	1.308.000	<i>1-2 years •</i>
• 2-3 tahun	1.651.000	860.000	<i>2-3 years •</i>
• 3-5 tahun	-	133.000	<i>3-5 years •</i>
	5.206.000	3.868.000	
Amortisasi biaya emisi Obligasi yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 27)	8.392	7.044	<i>Amortization of Bonds issuance costs charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 27)</i>

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

16. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Obligasi (Lanjutan)

a. Bonds (Continued)

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 345.000	9,875%	29 Maret/March 2016	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 105.000	10,500%	19 Maret/March 2017	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series C	Rp 550.000	10,875%	19 Maret/March 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 200.000	9,75%	5 Maret/March 2017	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 142.000	10,25%	25 Februari/ February 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series C	Rp 658.000	10,75%	25 Februari/ February 2019	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 317.000	8,10%	5 November 2017	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 550.000	8,80%	25 Oktober/ October 2019	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Series C	Rp 133.000	9,10%	25 Oktober/ October 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 540.000	8,00%	12 Maret/March 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 460.000	9,15%	2 Maret/March 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 335.000	6,75%	19 November 2018	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 100.000	7,25%	9 November 2019	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Series C	Rp 400.000	7,75%	9 November 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

16. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Obligasi (Lanjutan)

a. Bonds (Continued)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap
IV Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia
Tahap IV Tahun 2018

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 946.000	6,40%	16 Maret/ March 2019	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 253.000	7,25%	6 Maret/ March 2020	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Series C	Rp 966.000	7,60%	6 Maret/ March 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap
I Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia
Tahap I Tahun 2018

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Series A	Rp 188.000	6,75%	6 Juli/ July 2019	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Series B	Rp 552.000	7,75%	26 Juni/ June 2021	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Sesuai dengan Perjanjian Perwalianan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen dengan kategori lancar sebesar 80% untuk Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia dan 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia, dari nilai pokok Obligasi yang terutang (Catatan 5 dan 6).

According to the Bonds Trustee agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of finance lease receivables and consumer financing receivables amounting to 80% for Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia and 60% for Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia and Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia, of the outstanding principal amount of the Bonds (Notes 5 and 6).

Selain itu, selama pokok Obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, membagi dividen dalam hal Perusahaan laai dalam membayar jumlah terutang obligasi, melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama, dan menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Moreover, during the time that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, declare dividends in the event that the Company defaults in bond obligations, merge unless performed on the same business, and sells or hand over more than 50% of the Company's assets, except for daily operation activity. The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi dilakukan secara triwulan.

All Bonds principal is paid in full as they fall due. All Bonds Interest is paid on quarterly basis.

b. Medium Term Notes (MTN)

b. Medium Term Notes (MTN)

	2018	2017
Nilai nominal: Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	-	50.000
Jumlah - bersih	-	50.000
MTN sesuai jatuh temponya:		
• < 1 tahun	-	50.000
	-	50.000

Nominal value:
Medium Term Notes BFI Finance
Indonesia III Tahun 2015
Total - net

MTN have the following maturity:
< 1 year •

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

b. *Medium Term Notes* (MTN) (Lanjutan)

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

MTN	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Status pembayaran/ <i>Payment status</i>	Peringkat/ <i>Rating</i>
Seri/ <i>Series</i> A	Rp 50.000	5,50%	13 April/ <i>April</i> 2017	Lunas/ <i>Paid</i>	AA-(idn)
Seri/ <i>Series</i> B	Rp 50.000	5,50%	13 Mei/ <i>May</i> 2018	Lunas/ <i>Paid</i>	AA-(idn)

Dalam perjanjian perwalianan MTN, juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen dengan kategori lancar sebesar 50% dari nilai pokok MTN yang terutang (Catatan 5 dan 6).

Selain itu, selama pokok MTN belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, membagi dividen selama Perusahaan lalai dalam membayar jumlah terutang MTN, melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama, dan menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

16. *SECURITIES ISSUED* (Continued)

b. *Medium Term Notes* (MTN) (Continued)

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

The MTN trustee agreement requires several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of finance lease receivables and consumer financing receivables amounting to 50% of the principal amount of the MTN payable (Notes 5 and 6).

Moreover, during the time that the MTN principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, declare dividends in the event that the Company defaults in MTN obligations, merge unless performed on the same business, and sells or hand over more than 50% of the Company's assets, except for daily operation activity. The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2018
Bonus dan tunjangan	134.790
Bunga	77.439
Jasa tenaga ahli	6.341
Lainnya (saldo dibawah Rp 1.000)	69.308
Jumlah	287.878

17. *ACCRUED EXPENSES*

	2017	
	111.166	Bonus and allowances
	84.408	Interest
	47.263	Professional fees
	50.690	Others (balance below Rp 1,000)
Jumlah	293.527	Total

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Sesuai dengan UU 13/2003, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Perusahaan dan entitas anaknya menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan, dimana program pensiun ini dikelola dan diadministrasikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

18. *POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES*

In accordance with Law UU 13/2003, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The Company and its subsidiary has defined contribution pension program covering its qualified permanent employees who meets the Company's criteria, where the contribution pension program is defined and administered by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Ekshibit E/57

Exhibit E/57

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Imbalan pasca-kerja meliputi pensiun, uang pisah, uang penghargaan dan imbalan lainnya dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam laporannya bertanggal 8 Januari 2019 dan 5 Januari 2018 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah 6.624 dan 5.971 karyawan.

Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuarial yang tercantum dalam laporan aktuarial di atas.

Rincian liabilitas atas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2018	2017	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	249.508	244.807	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(47.010)	(45.091)	Fair value of plan asset
Imbalan pasca-kerja	202.498	199.716	Post-employment benefits

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	2018	2017	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	244.807	181.619	Present value of defined benefit obligation at beginning of period
Biaya jasa kini	37.688	25.883	Current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	(3.535)	Past service cost due to plan amendment
Biaya bunga	18.382	15.299	Interest cost
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(2.986)	(3.408)	Benefit payment from Company
Pembayaran imbalan dari Aset Program	(2.330)	(8.416)	Benefit payment from plan assets
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.813	1.394	Liability assumed due to recognition of past services
Pengukuran kembali atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:			Remeasurement of present value of defined benefit obligation:
Keuntungan (kerugian) atas perubahan asumsi ekonomis	(53.190)	36.222	Gain (loss) from changes in financial assumption
Keuntungan (kerugian) atas penyesuaian pengalaman	5.324	(251)	Gain (loss) from experience adjustments
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	249.508	244.807	Present value of defined benefit obligation at end of period

	2018	2017	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	45.091	41.227	Fair value of plan assets at beginning of year
Pendapatan bunga atas aset program	3.613	3.482	Interest income on plan assets
luran Perusahaan	6.000	6.000	Company contribution
Pembayaran imbalan dari aset program	(2.330)	(8.416)	Benefit payment from plan assets
Imbal hasil aset program (tidak termasuk pendapatan bunga)	(5.364)	2.798	Return on plan assets excluding interest income
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	47.010	45.091	Fair value of plan assets at end of year

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Post-employment benefits include pensions, severance pay, service pay and other benefits is calculated by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, in its report dated 8 January 2019 and 5 January 2018 for the years ended 31 December 2018 and 2017, by using the "Projected Unit Credit". Number of employees entitled for the employee benefits for the years ended 31 December 2018 and 2017 was 6,624 and 5,971 employees, respectively.

The liability for post-employment benefits as of 31 December 2018 and 2017 are based on estimated actuarial calculation as stated at the actuary report above.

The details of the liabilities for post-employment benefits recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

Movements in the present value of defined benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position are as follows:

Ekshibit E/58

Exhibit E/58

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

	2018	2017	
Saldo awal	199.716	140.392	<i>Beginning balance</i>
luran Perusahaan yang dibayarkan (aktual)	(6.000)	(6.000)	<i>Contribution to plan made by the Company</i>
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(2.986)	(3.408)	<i>Benefits paid by the Company excluding excess benefits paid</i>
Beban yang diakui pada laporan laba rugi	59.195	50.117	<i>Expense recognized in profit loss statement</i>
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(42.502)	33.173	<i>Expense recognized in other comprehensive income</i>
Biaya terminasi	(4.925)	(14.558)	<i>Termination benefit</i>
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	<u>202.498</u>	<u>199.716</u>	<i>Liability recognized in statement of financial position</i>

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statement of
profit or loss and other comprehensive income are as
follows:

	2018	2017	
Biaya jasa kini	37.688	25.883	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	(3.535)	<i>Past service cost due to changes in benefit</i>
Biaya bunga	18.382	15.299	<i>Interest cost</i>
Pendapatan bunga atas aset program	(3.613)	(3.482)	<i>Interest income on plan assets</i>
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.813	1.394	<i>Liability assumed due to recognition of past services</i>
Biaya terminasi oleh Perusahaan	4.925	14.558	<i>Termination benefit by Company</i>
Jumlah beban	<u>59.195</u>	<u>50.117</u>	<i>Total expenses</i>

Riwayat penyesuaian pengalaman adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustment are as follows:

	2018	2017	2016	2015	2014	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(249.508)	(244.807)	(181.619)	(142.473)	(126.365)	<i>Present value of defined benefit obligation</i>
Nilai wajar aset program	47.010	45.091	41.227	30.506	25.587	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit	<u>(202.498)</u>	<u>(199.716)</u>	<u>(140.392)</u>	<u>(111.967)</u>	<u>(100.778)</u>	<i>Deficit</i>
Penyesuaian pengalaman liabilitas program	<u>(5.324)</u>	<u>251</u>	<u>5.082</u>	<u>(279)</u>	<u>(15.982)</u>	<i>Experience adjustment on plan liabilities</i>
Penyesuaian pengalaman aset program	<u>(5.364)</u>	<u>2.798</u>	<u>1.605</u>	<u>(3.597)</u>	<u>653</u>	<i>Experience adjustment on plan assets</i>

Ekshibit E/59

Exhibit E/59

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Kategori utama aset program per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai persentase dari total aset program adalah pasar uang 50%, pendapatan tetap 30% dan saham 20%.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja:

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

The main categories of plan assets as of 31 December 2018 and 2017 as percentage of total plan assets was money market 50%, fixed income 30% and shares 20%.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of post-employment benefits liabilities:

	2018				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja	221.340	283.052	282.482	218.981	Effect on present value of post-employment benefits liabilities
	2017				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja	214.464	281.402	280.932	211.844	Effect on present value of employment benefits liabilities

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas:

Key assumptions used in the above calculation:

	2018	2017	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
- Tingkat diskonto per tahun	8,80% - 9,60%	7,70%	Annual discount rate -
- Kenaikan gaji per tahun	10%	10%	Annual salary increase -
Asumsi demografi:			Demographic assumptions:
- Tingkat kematian	Tabel Mortalisasi Indonesia - 2011/ Mortality table of Indonesia - 2011		Mortality rate -
- Tingkat pengunduran diri	10% per tahun sebelum usia 31 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 56/ 10% per annum before the age of 31 and linearly decreasing to 0% per annum at age of 56.		Turnover rate -
- Tingkat kecacatan per tahun	10% dari Tingkat Kematian/ 10% of Mortality Rates		Disability rate per annum -
- Tingkat pensiun	100% di usia 56/ 100% at age 56		Retirement rate -

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. DIVIDEN KAS DAN SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 17 April 2018, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 39 (nilai penuh) per saham. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 23 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 344.181 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Desember 2017, sisanya sebesar Rp 16 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 239.430 yang telah dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2018. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 13.574 sebagai cadangan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 21 November 2017, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2017, sebesar Rp 23 (nilai penuh) per saham atau setara dengan Rp 344.181 kepada para pemegang saham Perusahaan, yang telah dibagikan pada tanggal 18 Desember 2017.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 18 April 2017, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 260 (nilai penuh) per saham. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 150 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 224.466 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 16 Desember 2016, sisanya sebesar Rp 110 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 164.608 yang telah dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2017. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 41.037 sebagai cadangan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 21 November 2016, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2016, sebesar Rp 150 (nilai penuh) per saham kepada para pemegang saham Perusahaan, yang telah dibagikan pada tanggal 16 Desember 2016.

19. CASH DIVIDENDS AND APPROPRIATION OF RETAINED
EARNINGS

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 17 April 2018, the Company announced a cash dividend from net profit in 2017 amounted to Rp 39 (full amount) per share. After taking into account the interim cash dividend amounted to Rp 23 (full amount) per share amounting to Rp 344,181 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 18 December 2017, the remaining balance amounted to Rp 16 (full amount) per share amounting to Rp 239,430 which has been distributed on 18 May 2018. The Company agreed to set aside Rp 13,574 for the reserve.

Based on the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of PT BFI Finance Indonesia Tbk on 21 November 2017, the Company establishes an interim cash dividend for the financial year 2017, amounted to Rp 23 (full amount) per share, equivalent to Rp 344,181 to the shareholders of the Company, which have been distributed on 18 December 2017.

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 18 April 2017, the Company announced a cash dividend from net profit in 2016 amounted to Rp 260 (full amount) per share. After taking into account the interim cash dividend amounted to Rp 150 (full amount) per share amounting to Rp 224,466 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 16 December 2016, the remaining balance amounted to Rp 110 (full amount) per share amounting to Rp 164,608 which has been distributed on 18 May 2017. The Company agreed to set aside Rp 41,037 for the reserve.

Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors PT BFI Finance Indonesia Tbk on 21 November 2016, the Company sets dividend interim cash for the financial year 2016, amounting to Rp 150 (full amount) per share, to the shareholders of the Company, which was distributed on 16 December 2016.

20. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

	2018
Titipan konsumen	119.637
Perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud	58.627
Premi asuransi	26.839
Utang kepada dealer	5.168
Utang pengurusan fidusia	808
Lainnya (saldo dibawah Rp 1.000)	47.153
Jumlah	258.232

20. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

	2017	
	104.659	Customer deposits
	-	Fixed asset and intangible assets acquisition
	43.810	Insurance premium
	31.273	Payable to dealers
	1.073	Fiducia processing payables
	33.906	Others (balance below Rp 1,000)
Total	214.721	Total

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

The composition of the shareholder of the Company based on the share register of PT Sirca Datapro Perdana, the share registrar, as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	2018			
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Amount	%	
Pemegang saham				Shareholders
Trinugraha Capital & CO SCA	6.835.249.660	170.881	42,80	Trinugraha Capital & CO SCA
DB Spore DCS A/C NT Asian Discovery Master Fund-864134218	1.581.275.640	39.532	9,90	DB Spore DCS A/C NT Asian Discovery Master Fund-864134218
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	<u>6.547.858.320</u>	<u>163.697</u>	<u>41,02</u>	Others (each below 5%)
	14.964.383.620	374.110	93,72	
Saham treasuri	<u>1.002.732.000</u>	<u>25.068</u>	<u>6,28</u>	Treasury stock
Jumlah	<u>15.967.115.620</u>	<u>399.178</u>	<u>100,00</u>	Total
	2017			
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Amount	%	
Pemegang saham				Shareholders
Trinugraha Capital & CO SCA	6.835.249.660	170.881	42,80	Trinugraha Capital & CO SCA
DB Spore DCS A/C NT Asian Discovery Master Fund-864134218	1.306.275.640	32.657	8,18	DB Spore DCS A/C NT Asian Discovery Master Fund-864134218
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	<u>6.822.858.320</u>	<u>170.572</u>	<u>42,74</u>	Others (each below 5%)
	14.964.383.620	374.110	93,72	
Saham treasuri	<u>1.002.732.000</u>	<u>25.068</u>	<u>6,28</u>	Treasury stock
Jumlah	<u>15.967.115.620</u>	<u>399.178</u>	<u>100,00</u>	Total

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta notaris No. 25 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 25 (nilai penuh) per saham (pemecahan saham/stock split). Keputusan RUPSLB ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0134738 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017.

Dengan demikian, per 31 Desember 2018 modal dasar Perusahaan yang telah ditempatkan seluruhnya dan disetor penuh adalah Rp 399.178 yang terdiri dari 15.967.115.620 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Pada bulan Agustus 2018, Trinugraha Capital & Co. SCA menandatangani Perjanjian Jual Beli sesuai dengan nilai yang akan mereka jual sebesar 2.977.912.340 saham di BFI (19,9% dari total saham) ke Kompas Banca SpA, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Mediobanca SpA, dan sekitar 1,646 juta saham (sekitar 11%) di BFI ke Star Finance S.R.L. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 transaksi pengalihan masih dalam proses.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company as covered by Notarial Deed No. 25 dated 18 April 2017 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta the shareholders approved the changes of nominal value of shares from Rp 250 (full amount) to Rp 25 (full amount) per shares (stock split). The resolutions of the EGM has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in notification letter No. AHU-AH.01.03-0134738 Tahun 2017 dated 9 May 2017.

Therefore, as of 31 December 2018 the Company's issued and fully paid-up shares capital was amounted to Rp 399,178 which comprised of 15,967,115,620 shares with par value of Rp 25 per share.

In August 2018, Trinugraha Capital & Co. SCA have entered into Shares Sale and Purchase Agreement pursuant to which they will sell 2,977,912,340 shares in BFI (19.9% of total shares) to Compass Banca SpA, a wholly owned subsidiary of Mediobanca SpA, and approximately 1,646 million shares (c. 11%) in BFI to Star Finance S.R.L. Until 31 December 2018, the shares transfer transaction is still under process.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

21. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Saham Treasuri

Per tanggal 15 Oktober 2016 program *buyback shares* ini dinyatakan berakhir.

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang diperkenankan sesuai Peraturan OJK No.2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 1.002.732.000 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share/EPS*).

Jumlah saham yang dimiliki anggota Dewan komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Sirca Datapro Perdana, biro administrasi efek, adalah sebanyak 464.844.860 dan 589.407.540 saham, yang merupakan kepemilikan sebesar 2,91% dan 3,69% dari jumlah saham Perusahaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Anggota/ <i>Name of Members</i>	Jabatan/Positions	Jumlah Saham/ Total Shares		%	
		2018	2017	2018	2017
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	389.885.080	389.885.080	2,44	2,44
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	74.500	300.000	0,00	0,00
Sudjono	Direktur/ <i>Director</i>	33.380.000	33.380.000	0,21	0,21
Sutadi	Direktur/ <i>Director</i>	21.382.800	22.000.000	0,14	0,14
Sigit Hendra Gunawan	Direktur/ <i>Director</i>	10.000.000	10.000.000	0,06	0,06
Andrew Adiwijanto	Direktur/ <i>Director</i>	10.120.000	12.120.000	0,06	0,08
Cornelius Henry Kho	Komisaris/ <i>Commissioner</i>	-	121.719.980	0,00	0,76
Johanes Sutrisno	Komisaris/ <i>Commissioner</i>	2.480	2.480	0,00	0,00
Jumlah/ Total		464.844.860	589.407.540	2,91	3,69

21. SHARE CAPITAL (Continued)

Treasury stock

As of 15 October 2016 the shares buyback program was officially ended.

The Company has bought back its shares publicly traded on the Indonesia Stock Exchange, as allowed by OJK Regulation No.2/POJK.04/2013 dated 23 August 2013.

As of 31 December 2018 and 2017, total shares bought back by the Company were 1,002,732,000 shares for a total purchase price of Rp 252,160, respectively.

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation will increase the value of Earnings per Share (EPS).

The number of shares held by the member of the board of commissioners and directors of the Company based on the share register of PT Sirca Datapro Perdana, the share registrar, was 464,844,860 and 589,407,540 shares representing 2.91% and 3.69% of the total outstanding shares of the Company as of 31 December 2018 and 2017, respectively with detail as follows:

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tahun 2018 dan 2017, saldo akun ini masing-masing sejumlah Rp 553.286 merupakan selisih lebih antara hasil yang diterima dengan nilai nominal dari setoran modal, penawaran umum perdana dan konversi dari obligasi konversi termasuk penyesuaian saldo karena kuasi reorganisasi.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

In 2018 and 2017 balance of this account amounted to Rp 553,286 was the difference between amount received and par value from paid-in capital, initial public offering and conversion of convertible bonds including adjustments balance of quasi reorganization.

23. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

	2018	2017
Pendapatan sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	2.256.173	1.777.425
Pendapatan administrasi	321.379	274.002
Denda keterlambatan	179.401	137.519
Pendapatan terminasi	115.011	92.724
Pendapatan sewa pembiayaan - bersih	2.871.964	2.281.670

Pada tahun 2018 dan 2017, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai penambah dari pendapatan sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 31.552 dan Rp 12.689.

23. FINANCE LEASE INCOME

*Finance lease income
Third parties
Administration income
Late charges
Termination income*

Finance lease income - net

In 2018 and 2017, the amortization of transaction costs recognized as an addition to finance lease income was amounted to Rp 31,552 and Rp 12,689, respectively.

Ekshibit E/63

Exhibit E/63

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

24. CONSUMER FINANCING INCOME

	2018	2017	
Pendapatan pembiayaan konsumen			Consumer financing income
Pihak ketiga	1.525.411	1.297.114	Third parties
Pendapatan administrasi	357.688	280.339	Administration income
Denda keterlambatan	134.868	122.310	Late charges
Pendapatan terminasi	46.243	44.006	Termination income
Jumlah	2.064.210	1.743.769	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama (Catatan 32)	(43.028)	(89.438)	Portion of funds financed by banks in relation to channeling and joint financing cooperation (Note 32)
Pendapatan pembiayaan konsumen - bersih	2.021.182	1.654.331	Consumer financing income - net

Pada tahun 2018 dan 2017 amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp 129.062 dan Rp 97.899.

In 2018 and 2017, the amortization of transaction costs recognized as a reduction to consumer financing income amounting to Rp 129,062 and Rp 97,899, respectively.

Pada tahun 2018 dan 2017, tidak terdapat pendapatan pembiayaan konsumen yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan kepada satu konsumen saja.

In 2018 and 2017, the Company had no consumer financing income in excess of 10% of total revenues to a single customer.

25. PENDAPATAN LAIN-LAIN

25. OTHER INCOME

	2018	2017	
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukkan dan piutang dalam proses penyelesaian	90.852	73.004	Recovery on written-off receivables and receivable in the settlement process
Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap (Catatan 11)	9.288	16.056	Gain on sale of fixed assets - net (Note 11)
Lain-lain	4.211	10.090	Others
Jumlah	104.351	99.150	Total

26. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

26. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	2018	2017	
Pihak ketiga			Third parties
Gaji dan imbalan kerja	930.938	767.969	Salaries and employee benefits
Imbalan pasca-kerja (Catatan 18)	53.998	45.867	Post-employment benefits (Note 18)
	984.936	813.836	
Pihak berelasi			Related parties
Gaji dan imbalan kerja	60.071	50.748	Salaries and employee benefits
Imbalan pasca-kerja (Catatan 18,30)	5.197	4.250	Post-employment benefits (Note 18,30)
	65.268	54.998	
Jumlah	1.050.204	868.834	Total

Lihat catatan 30 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 30 for details of balances and transactions with related parties.

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN	2018	2017	
Bunga atas pinjaman yang diterima	618.395	567.005	<i>Interest on borrowings</i>
Bunga atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 16)	408.863	321.596	<i>Interest on securities issued (Note 16)</i>
Amortisasi biaya emisi atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 16)	<u>8.392</u>	<u>7.044</u>	<i>Amortization on securities issued (Note 16)</i>
Jumlah	<u>1.035.650</u>	<u>895.645</u>	Total
<hr/>			
28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2018	2017	
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	74.607	67.724	<i>Depreciation of fixed assets (Note 11)</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	60.837	45.561	<i>Repairs and maintenance</i>
Beban penerimaan angsuran	56.455	44.211	<i>Installment collection expense</i>
Perjalanan dinas dan transportasi	46.725	38.901	<i>Travel and transportation</i>
Honorarium tenaga ahli	40.592	62.369	<i>Professional fees</i>
Asuransi	39.767	30.720	<i>Insurance</i>
Pemasaran	37.459	17.949	<i>Marketing</i>
Pendidikan dan pelatihan	32.357	28.537	<i>Training and education</i>
Pengiriman, perangko dan materai	25.434	20.299	<i>Courier, postage stamp and stamp duty</i>
Sewa kantor dan gudang	23.075	19.422	<i>Office and warehouse rental</i>
Keanggotaan dan langganan	22.440	8.539	<i>Membership and subscription</i>
Beban kantor	20.859	19.519	<i>Office expense</i>
Komunikasi	19.860	17.943	<i>Communications</i>
Listrik dan air	16.086	13.922	<i>Electricity and water</i>
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 12)	9.374	6.584	<i>Amortization of intangible assets (Note 12)</i>
Jasa pihak ketiga	5.884	4.228	<i>Third parties service</i>
Fotokopi dan legalisir dokumen	3.080	1.311	<i>Fotocopy and legalized document</i>
Beban administrasi bank	1.603	1.679	<i>Bank administration charges</i>
Program CSR	1.767	1.484	<i>CSR program</i>
Penyusutan aset ijarah	522	-	<i>Depreciation of ijarah asset</i>
Lain-lain	<u>28.142</u>	<u>31.173</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>566.925</u>	<u>482.075</u>	Total
<hr/>			
29. BEBAN LAIN-LAIN	2018	2017	
Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:			<i>The details of other expenses are as follows:</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian	2.504	9.314	<i>Provision for impairment losses of receivables in the settlement process</i>
Penghapusan (pemulihan) piutang dalam proses penyelesaian	<u>13.678</u>	<u>(4.093)</u>	<i>Written-off (recovery) receivables in the settlement process</i>
Jumlah	<u>16.182</u>	<u>5.221</u>	Total

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu sebagai berikut:

<u>Pihak berelasi/Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Transaksi/Transactions</u>
Karyawan/Employee	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Imbalan kerja jangka-pendek/ Short-term employees' benefits Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/ Management and employee stock options program
Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		Balances and transactions to or from a related party are as follows:
Beban gaji dan tunjangan		Salaries and employee benefits
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Personil manajemen kunci:		Key management personnel:
Imbalan kerja jangka-pendek	60.071	50.748
Imbalan pasca-kerja	5.197	4.250
	<u>65.268</u>	<u>54.998</u>
Persentase terhadap jumlah beban	<u>2,05%</u>	<u>2,15%</u>
		Percentage of total expenses

Transaksi dengan pihak berelasi, kecuali beban gaji dan imbalan kerja kepada personil manajemen kunci, dilakukan dengan menggunakan persyaratan usaha normal.

Transaction with related parties, except salary expense and employee benefits to key management personnel, conducted by normal operations requirements.

31. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi Perusahaan dan entitas anaknya dibagi berdasarkan produk: pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggungjawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perusahaan:

- Pembiayaan konsumen
Termasuk dalam pelaporan segmen pembiayaan konsumen adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen.
- Sewa pembiayaan
Termasuk dalam pelaporan segmen sewa pembiayaan adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari sewa pembiayaan.

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In carrying out its business activities, the Company and its subsidiary enters into transactions with certain related parties as the followings:

<u>Pihak berelasi/Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Transaksi/Transactions</u>
Karyawan/Employee	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Imbalan kerja jangka-pendek/ Short-term employees' benefits Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/ Management and employee stock options program
Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		Balances and transactions to or from a related party are as follows:
Beban gaji dan tunjangan		Salaries and employee benefits
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Personil manajemen kunci:		Key management personnel:
Imbalan kerja jangka-pendek	60.071	50.748
Imbalan pasca-kerja	5.197	4.250
	<u>65.268</u>	<u>54.998</u>
Persentase terhadap jumlah beban	<u>2,05%</u>	<u>2,15%</u>
		Percentage of total expenses

Transaction with related parties, except salary expense and employee benefits to key management personnel, conducted by normal operations requirements.

31. OPERATING SEGMENT

The Company and its subsidiary's operating segments are divided into products: consumer financing and finance leases. Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance.

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:

- Consumer financing
Included in consumer financing reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as a part of consumer financing.
- Finance lease
Included in the finance leases reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as a part of finance lease.

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Informasi mengenai hasil dari masing-masing pelaporan segmen disajikan di bawah ini sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh manajemen Perusahaan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

31. OPERATING SEGMENT (Continued)

Information regarding the results of each reportable segment is included below as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within the industry.

	2018				Jumlah/ Total	
	Sewa pembiayaan/ Finance Lease	Pembiayaan konsumen/ Consumer financing	Syariah/ Sharia	Lain-lain/ Others		
Laporan laba rugi						Statement of profit or loss
Pendapatan						Income
Pendapatan pembiayaan	2.871.964	2.021.182	529	-	4.893.675	Financing income
Lain-lain	40.655	50.197	-	33.746	124.568	Others
Jumlah pendapatan	2.912.619	2.071.379	529	33.746	5.018.243	Total income
Beban						Expenses
Gaji dan tunjangan	-	-	-	1.050.204	1.050.204	Salaries and benefits
Bunga dan keuangan	-	-	-	1.035.650	1.035.650	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	20.059	49.702	-	497.194	566.925	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai	215.537	293.645	1	-	509.183	Provision for impairment losses
Lain-lain	-	-	-	16.182	16.182	Other expenses
Jumlah beban	235.596	343.347	1	2.599.230	3.178.144	Total expenses
Laba sebelum pajak	2.677.023	1.728.032	528	(2.565.484)	1.840.099	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	-	-	-	(372.305)	(372.305)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	2.677.023	1.728.032	528	(2.937.789)	1.467.794	Profit for the year
Laporan posisi keuangan						Statement of financial position
Aset						Assets
Piutang pembiayaan - bersih	11.357.670	5.922.788	105	-	17.280.563	Financing receivables - net
Lain-lain	49.600	45.065	2.332	1.739.745	1.836.742	Others
Jumlah aset	11.407.270	5.967.853	2.437	1.739.745	19.117.305	Total assets
Liabilitas						Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.899.860	6.899.860	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	-	5.196.220	5.196.220	Securities issued - net
Lain-lain	36.012	38.056	17	743.344	817.429	Others
Jumlah liabilitas	36.012	38.056	17	12.839.424	12.913.509	Total liabilities

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SEGMEN OPERASI (Lanjutan)

31. OPERATING SEGMENT (Continued)

	2017				
	Sewa pembiayaan/ <i>Finance Lease</i>	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	2.281.670	1.654.331	-	3.936.001	Financing income
Lain-lain	32.453	40.551	33.312	106.316	Others
Jumlah pendapatan	2.314.123	1.694.882	33.312	4.042.317	Total income
Beban					Expenses
Gaji dan tunjangan	-	-	868.834	868.834	Salaries and benefits
Bunga dan keuangan	-	-	895.645	895.645	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	10.567	35.376	436.132	482.075	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai	125.700	177.056	-	302.756	Provision for impairment losses
Lain-lain	(9.710)	14.931	-	5.221	Other expenses
Jumlah beban	126.557	227.363	2.200.611	2.554.531	Total expenses
Laba sebelum pajak	2.187.566	1.467.519	(2.167.299)	1.487.786	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	-	-	(300.276)	(300.276)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	2.187.566	1.467.519	(2.467.575)	1.187.510	Profit for the year
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - bersih	9.435.315	5.739.410	-	15.174.725	Financing receivables - net
Lain-lain	29.516	208.351	1.070.681	1.308.548	Others
Jumlah aset	9.464.831	5.947.761	1.070.681	16.483.273	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	6.819.052	6.819.052	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	3.909.411	3.909.411	Securities issued - net
Lain-lain	43.549	44.630	762.365	850.544	Others
Jumlah liabilitas	43.549	44.630	11.490.828	11.579.007	Total liabilities

Segmen Geografis

Geographical Segments

	2018					Jumlah/ <i>Total</i>	
	Jawa/ <i>Java</i>	Kalimantan/ <i>Kalimantan</i>	Sumatera/ <i>Sumatera</i>	Sulawesi/ <i>Sulawesi</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>		
Jumlah Pendapatan	2.706.863	525.031	949.559	785.248	51.542	5.018.243	Total Income
Jumlah Aset	11.656.928	2.270.219	3.154.759	935.011	1.100.382	19.117.305	Total Assets
	2017					Jumlah/ <i>Total</i>	
	Jawa/ <i>Java</i>	Kalimantan/ <i>Kalimantan</i>	Sumatera/ <i>Sumatera</i>	Sulawesi/ <i>Sulawesi</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>		
Jumlah Pendapatan	2.128.885	435.277	753.143	680.461	44.549	4.042.317	Total Income
Jumlah Aset	10.683.087	1.572.537	2.848.675	873.879	505.095	16.483.273	Total Assets

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN KERJASAMA YANG PENTING

32. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS

a. Pembiayaan Bersama dan Penerusan Pinjaman

a. Joint Financing and Channeling

Dalam kaitan untuk mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, Perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan, antara lain dalam bentuk perjanjian pembiayaan bersama (*joint financing*) dan penerusan pinjaman (*chanelling*) yang dibukukan secara *off balance sheet*.

For the purpose to support funding requirement on business expansion, the Company has also engaged a partnership with banking institutions in the form of joint financing and channeling which are classified as "off balance sheet" transactions.

	2018	2017		
Pembiayaan Bersama				Joint Financing
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	668.358	337.121	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.132	141.849	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	6.433	48.341	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	
Jumlah	686.923	527.311		Total
Dikurangi:				Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2.627)	(3.350)	Unamortized transaction costs	
Jumlah - Bersih	684.296	523.961		Total - Net

Dalam perjanjian kerjasama dengan skema pembiayaan bersama (*joint financing*) porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah berkisar 5% - 10% dari Perusahaan, dan 90% - 95% dari pemberi pembiayaan bersama (bank). Sedangkan untuk jangka waktu pembiayaan bersama sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan kepada konsumen.

Pursuant to the agreements with joint financing scheme, the amount of funds to be financed by each party range from 5% - 10% from the Company, and 90% - 95% from joint financing providers (banks). As for The tenor of joint financing scheme is available up to 48 (forty eight) months.

Rincian dari pembiayaan bersama adalah sebagai berikut:

The detail of joint financing are as follows:

Pemberi pembiayaan bersama/ <i>Joint financing provider</i>	Fasilitas maksimum pembiayaan/ <i>Maximum financing facility</i>	Perjanjian terakhir/ <i>Latest agreement</i>	Jangka waktu/ <i>Period</i> (bulan/ <i>month</i>)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	19 November 2018	24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000	3 Juni/June 2016	24
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000	10 Juni/June 2015	14
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.300.000	18 Desember/December 2014	24

Fasilitas tersebut di atas berlaku sampai dengan dibayarkannya angsuran terakhir piutang pembiayaan bersama oleh konsumen.

The above facility will be expired at the time customers pay the latest installment of joint financing receivables.

Perusahaan bersama dengan pemberi pembiayaan bersama di atas bertindak sebagai penyedia dana dalam pemberian pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

The Company, together with the joint financing providers mentioned above, extend credit to consumers in accordance with certain criteria laid down in agreements. The Company is responsible to maintain the customers' documentation and administration.

Kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan ini bersifat *without recourse*, dimana Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perusahaan.

The joint financing facilities were arranged without recourse, whereby the Company is not obliged to pay installments including interest to joint financing providers in the event that the customers fail to meet their installment obligation to the Company.

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN KERJASAMA YANG PENTING (Lanjutan)

b. Penyulur kendaraan

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyulur kendaraan. Pembiayaan yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyulur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyulur kendaraan.

c. Asuransi

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN), dan PT MAPFRE ABDA Assistance dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai.

Perusahaan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang premi asuransi.

32. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS (Continued)

b. Dealers of Motor Vehicles

The Company has entered into cooperation agreements with dealers of motor vehicles. Approved financing that has not yet been paid to dealers are recorded as payable to dealers.

c. Insurance

The Company has entered into cooperation agreements with insurance companies which are PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) and PT MAPFRE ABDA Assistance to provide credit shield and insurance coverage of financed vehicles.

The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance companies are recorded as insurance premium payable.

33. LABA PER SAHAM

Labanya per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

	2018	2017	
Labanya bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	1.467.794	1.187.510	Net profit for the computation of basic earnings per shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham	14.964.383.620	14.964.383.620	The weighted average of shares outstanding
Labanya bersih per saham dasar (nilai penuh)	98	79	Basic earnings per share (full amount)

33. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average common shares outstanding during the year.

34. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Perubahan komponen penghasilan komprehensif lain yang tidak mempengaruhi laba rugi adalah sebagai berikut:

	2018	2017	
Saldo awal periode - sebelum pajak penghasilan tangguhan	(111.405)	(82.265)	Balance at the beginning of the period - before deferred income tax
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	42.502	(33.173)	Gain (loss) on defined benefit actuarial program
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai arus kas	46.452	(3.252)	Effective portion of changes in fair value of cash flow hedging instruments
	(22.451)	(118.690)	
Aset pajak tangguhan (Catatan 15c)	(17.791)	7.285	Deferred tax assets (Note 15c)
Saldo akhir periode - setelah pajak penghasilan tangguhan	(40.242)	(111.405)	Balance at the end of the period - after deferred income tax

34. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The movement of other comprehensive income component that have not yet affected the profit and loss were as follows:

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERUBAHAN PADA LIABILITAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

	2018		2017		Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflows	Pergerakan valuta asing/ Movement in foreign Exchange *)	Pergerakan Beban transaksi/ Changes in transaction cost		
Pinjaman yang diterima	6.819.052	6.482	64.212	10.114	6.899.860	Funds borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.909.411	1.288.000	-	(1.191)	5.196.220	Securities issued - net
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	10.728.463	1.294.482	64.212	8.923	12.096.080	Total liabilities from financing activities

Perusahaan dan entitas anak telah melakukan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing.

Changes in liabilities arised from financing activities are as follows:

The Company and its subsidiary has conducted hedge policy to borrowings denominated in foreign currencies.

36. MANAJEMEN RISIKO

Pendahuluan dan gambaran umum

Perkembangan dunia *multifinance* yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan dan entitas anaknya pada dasarnya sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Perusahaan dan entitas anaknya menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan empat tipe risiko utama:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko pendanaan dan likuiditas
4. Risiko operasional

Pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perusahaan, yang didasarkan pada kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan menjadi *strategic partner* bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi Perusahaan.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai, Perusahaan dan entitas anaknya terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

36. RISK MANAGEMENT

Introduction and general description

The development in *multifinance* industry followed with the improvement in complexity of financing activity has emphasized more on the importance of good corporate governance and a reliable risk management. Such both matters are important factors, which bring the investors' attention in assessing their investment targeting. Basically, the implementation of risk management within the Company and its subsidiary had been carried out since the establishment of the Company, eventhough the Company was still using a conventional manner and keep improving in accordance with the recent development of internal and external circumstances.

The Company and its subsidiary realize that risk is an integral part of its operational activity and can be managed practically and effectively day by day, with the following four particular risks:

1. Credit risk
2. Market risk
3. Funding and liquidity risk
4. Operational risk

Risk management within the Company includes overall scope of business activity within the Company, which based on the necessity of balance between business operational function and its risk management thereof. By means of proper risk management and policy, thus the risk management will become a *strategic partner* to the business in obtaining optimal outcome from the Company's course of operation.

In the event of development of proper risk management, the Company and its subsidiary keep developing and improving the integrated and comprehensive framework of risk management system and internal control structure, in order that they are able to provide information as an early warning of any potential risk and accordingly, take appropriate actions to mitigate the risk.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batasan transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh aktivitas lingkup usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut:

1. **Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup:**

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portfolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Manajemen Risiko dalam melakukan fungsi pengawasan.

2. **Kebijakan dan penerapan batasan**

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar, Ketentuan Umum dan Surat Keputusan Dewan Direksi, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terkait. Perusahaan juga menerapkan batasan persetujuan atau otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

3. **Identifikasi, pengukuran, pengawasan dan sistem informasi manajemen**

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen. Untuk menjamin ketersediaan data risiko yang terkini dan komprehensif, Perusahaan telah melakukan mengkonversi sistem operasi Perusahaan yang ada menjadi *centralized system* yang dikenal dengan CONFINS. Selain itu, Perusahaan juga melakukan implementasi sistem informasi *business intelligence* agar data atau informasi risiko dapat disediakan secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen atau pihak ketiga lainnya.

36. **RISK MANAGEMENT (Continued)**

Framework of risk management (Continued)

The framework of risk management is implemented under the form of policy, procedures, transactional limits, authorizations, and other rules as well as various risk management instruments applicable to entire business activity. In order to ensure that the policy and procedures is in line with the current business development, evaluation is frequently carried out in accordance with the change in its risk parameter.

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows:

1. **Active supervision by the Board of Commissioners and Directors, which includes:**

- Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;
- Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;
- Presence of Audit Committee and Risk Management Committee in carrying out their supervisory functions.

2. **Policy and implementation limits**

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies concerning the level of authority on approval or authorization for both credit and non-credit transactions.

3. **Identification, measurement, monitoring, and management information system**

The Company has a set of tools to identify, measure, and monitor risks, particularly the credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism. In order to ensure the availability of updated and comprehensive risk data, the Company had converted the existing operating system into a centralized system, which known as CONFINS. Moreover, the Company has also implemented business intelligence information system in order that data or risk information could be provided to the management or other third parties on a prompt and accurate manner.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut: (Lanjutan)

4. Pengendalian internal

Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tanggungjawab dari Departemen Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari proses bisnis yang ada di dalam Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan risiko Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian di dalam Perusahaan termasuk rekomendasi perbaikan yang potensial terhadap proses tersebut; dan
- Melakukan koordinasi strategis dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, hukum, sistem dan prosedur, dan audit eksternal).

Proses dan penilaian risiko

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Tugas utama dari Departemen Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan, melakukan pengukuran dan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko utama Perusahaan, yaitu risiko yang timbul apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industri, merk dan tipe barang.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, yaitu penetapan tingkat bunga pembiayaan berdasarkan risiko yang dihadapi, antara lain dinilai dari tingkat uang muka yang dibayar konsumen, usia kendaraan yang dibiayai, jenis penutupan asuransi yang dipilih dan lain sebagainya.
- Adanya *Key Performance Indicators (KPI)* sebagai "early warning system" atas suatu masing-masing produk pembiayaan maupun kantor cabang.

36. **RISK MANAGEMENT (Continued)**

Framework of risk management (Continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows: (Continued)

4. Internal control

The Company has the Internal Audit Division in place, which independently reports on process and results of assessment to the Board of Commissioners and Directors. The responsibility of the Internal Audit Division includes:

- Providing assessment on the adequacy and effectiveness of the entire existing business process within the Company;
- Conducting examination on compliance to the Company's risk policies;
- Reporting on significant issues related to the control activities within the Company, including potential improvements to these processes; and
- Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal, system and procedures, and external auditor)

Process and risk assessments

Basically, risk management processes are carried out by each unit considering that the risk faced represents individual risks which are embedded into the products, transactions, as well as process in the related unit. The primary task of Risk Management Division is to determine policies and procedures as well as doing a series of processes of collecting, measuring, and reporting to the Board of Commissioners and Directors. The determination of risk management policies is carried out through approval process by the Board of Directors.

1. Credit Risk

Credit risk is the main risk of the Company, that is the risk arising when the customer are unable to meet its obligation in accordance with the agreement as agreed upon between the customer and the Company.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Diversify the portfolio by region, economic sector and industry, brand and type of goods.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, namely setting the interest rate of financing based on the risks faced by, among others, assessed based on the level of advances paid by consumers, age of vehicles financed, type of insurance coverage selected and so forth.
- The *Key Performance Indicators (KPI)* as an "early warning system" of an individual loan products as well as branch offices.

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Penanganan kontrak bermasalah yang dilakukan secara disiplin dan proaktif.
- Analisa atas kualitas portofolio secara periodik dan tindakan preventif dan sanksi bagi cabang-cabang yang kualitas portofolionya tidak sesuai target.

Tabel berikut menjelaskan eksposur maksimum sesuai dengan konsentrasi risiko kredit:

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

1. Credit Risk (Continued)

Risk management that has been applied by the Company are as follows: (Continued)

- Handling of problematic contracts in a discipline and proactive manner.
- Analysis of portfolio quality through periodic and preventive actions and sanctions for branches whose quality of its portfolio is not on target.

The following table illustrates the Company's maximum exposure based on credit risk concentration:

	2018			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan setara kas	755.247	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	2.312.682	9.202.407	11.515.089	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	1.688	6.141.543	6.143.231	Consumer financing receivables
Piutang ijarah	-	106	106	Ijarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	-	21.713	21.713	Employee receivables
	3.179.787	15.365.769	18.545.556	
	2017			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan setara kas	225.203	-	225.203	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	1.740.819	7.779.988	9.520.807	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	1.606	5.889.794	5.891.400	Consumer financing receivables
Piutang karyawan	-	24.606	24.606	Employee receivables
	1.967.628	13.694.388	15.662.016	

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT(Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak:

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those which impaired and not impaired:

	2018			
	Tidak Mengalami Penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	755.247	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	11.405.075	110.014	11.515.089	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	6.031.606	111.625	6.143.231	Consumer financing receivables
Piutang ljarah	106	-	106	ljarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	21.713	-	21.713	Employee receivables
	<u>18.323.917</u>	<u>221.639</u>	<u>18.545.556</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(377.863)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>18.167.693</u>	
	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami Penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	225.203	-	225.203	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	9.453.348	67.459	9.520.807	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	5.808.182	83.218	5.891.400	Consumer financing receivables
Piutang karyawan	24.606	-	24.606	Employee receivables
	<u>15.511.339</u>	<u>150.677</u>	<u>15.662.016</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(237.482)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>15.424.534</u>	

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang penilaian penurunannya dibedakan antara yang dinilai secara individual dan kolektif.

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those assessed individually and collectively.

	2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	755.247	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	2.796.554	8.718.535	11.515.089	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	305.442	5.837.789	6.143.231	Consumer financing receivables
Piutang ijarah	106	-	106	Ijarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	21.713	-	21.713	Employee receivables
	<u>3.989.232</u>	<u>14.556.324</u>	<u>18.545.556</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(377.863)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>18.167.693</u>	
	2017			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	225.203	-	225.203	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	2.231.489	7.289.318	9.520.807	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	332.469	5.558.931	5.891.400	Consumer financing receivables
Piutang karyawan	24.606	-	24.606	Employee receivables
	<u>2.813.767</u>	<u>12.848.249</u>	<u>15.662.016</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(237.482)</u>	Less: Allowance for impairment losses
			<u>15.424.534</u>	

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

2. Risiko Pasar

2. Market Risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing, sementara seluruh utang Perusahaan dalam mata uang asing telah diproteksi dengan swap dalam jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sama dengan utangnya. Dalam hal suku bunga, seluruh bunga yang dibebankan ke konsumen adalah suku bunga tetap (*fixed interest rate*), sementara utang yang diperoleh sebagian besar juga dalam suku bunga tetap dan hanya sebagian kecil utang dalam bentuk bunga mengambang (*floating interest rate*).

Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates and exchange rates which could resulting in decrease in revenue, or increase in cost of capital of the Company. With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is mitigated to the minimum level. The Company has neither consumer financing nor finance lease business activity that denominated in foreign currencies, while all borrowings of the Company that denominated in foreign currencies have been protected by entering into swap transactions at amount and settlement date that similar to the borrowings thereof. In terms of interest rate, all interest rate charged to the customer is fixed interest rate, while most of the borrowings received bear fixed interest rate, and only a small portion the borrowings bear floating interest rate.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat bunga pembiayaan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

- Managing risks of foreign exchange rates.
- Performing review over the interest rate on financing associated with interest rate on borrowings.
- Limiting exposure in the investment that has fluctuating market prices.

Tabel berikut menjelaskan eksposur Perusahaan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2018. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan Perusahaan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

The following table illustrates the Company's exposure to foreign currency exchange rate risk as of 31 December 2018. Included in the table are financial instruments of the Company at carrying amounts, categorised by currency.

	2018		
	USD (Nilai penuh)/ (Full amount)	Nilai (Rp)/ Equivalent (Rp)	
Liabilitas			Liabilities
Pinjaman yang diterima	113.333.333	1.641.180	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	1.083.271	15.687	Accrued expenses
Jumlah liabilitas	114.416.604	1.656.867	Total liabilities
Liabilitas bersih	114.416.604	1.656.867	Net liabilities
Kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing	(114.416.604)	(1.656.687)	Foreign currency swap transactions contract
Eksposur bersih dalam mata uang asing	-	-	Net exposure in foreign currency

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku.

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios.

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. Risiko Pasar (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan:

	2018	2017	
<u>Pendapatan sewa pembiayaan:</u>			<u>Finance lease income:</u>
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	109.194	80.052	Increase in interest rate by 1% (100 basis point)
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(109.194)	(80.052)	Decrease in interest rate by 1% (100 basis point)
<u>Pendapatan pembiayaan konsumen:</u>			<u>Consumer finance income:</u>
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	59.212	51.363	Increase in interest rate by 1% (100 basis point)
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(59.212)	(51.363)	Decrease in interest rate by 1% (100 basis point)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table illustrates the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate:

	2018						Jumlah Total	
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate			Tingkat bunga tetap/ Fixed rate				
	< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	> 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ Years	> 2 tahun/ years		
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	755.247	-	-	-	-	-	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	-	-	1.963.541	4.286.870	3.712.404	1.552.274	11.515.089	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	1.186.058	2.188.986	1.509.117	1.259.070	6.143.231	Consumer financing receivables
Piutang ijarah	-	-	106	-	-	-	106	Ijarah receivables
Jumlah aset keuangan	755.247	-	3.149.705	6.475.856	5.221.521	2.811.344	18.413.673	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	12.437	24.917	1.049.101	3.216.167	2.099.175	498.063	6.899.860	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.601.872	834.373	1.110.071	1.649.904	5.196.220	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	12.437	24.917	2.650.973	4.050.540	3.209.246	2.147.967	12.096.080	Total financial liabilities
Bersih	742.810	(24.917)	498.732	2.425.316	2.012.275	663.377	6.317.593	Net

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. Risiko Pasar (Lanjutan)

Tabel berikut menyajikan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga: (Lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

2. Market Risk (Continued)

The following table presents the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate: (Continued)

	2017						Jumlah Total	
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate			Tingkat bunga tetap/ Fixed rate				
	< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	> 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ Years	> 2 tahun/ years		
Aset keuangan							Financial assets	
Kas dan setara kas	225.203	-	-	-	-	-	225.203	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	-	-	1.625.361	3.604.911	3.085.732	1.204.803	9.520.807	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	1.023.363	2.013.579	1.578.154	1.276.304	5.891.400	Consumer financing receivables
Jumlah aset keuangan	225.203	-	2.648.724	5.618.490	4.663.886	2.481.107	15.637.410	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	12.437	74.667	813.824	2.737.272	2.150.816	1.030.036	6.819.052	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.230.179	381.923	1.305.504	991.805	3.909.411	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	12.437	74.667	2.044.003	3.119.195	3.456.320	2.021.841	10.728.463	Total financial liabilities
Bersih	212.766	(74.667)	604.721	2.499.295	1.207.566	459.266	4.908.947	Net

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko terkait dengan kemampuan sumber dana Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai dengan periode jatuh tempo piutang, sehingga tidak terjadi *mis-match*.
- Menjaga agar posisi kas dan Perusahaan selalu dalam posisi likuid untuk mendukung aktivitas pembiayaan selama minimal 7 hari.
- Memonitor posisi kas dan bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat surplus kas yang memadai.
- Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk associated with the ability of the Company to meet its obligations when they fall due.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Obtaining borrowings with principal and interest repayment schedule that aligns with the original maturities of receivables, in order to prevent *mis-match*.
- Maintaining the cash and bank position of the Company to remain in a liquid position in supporting the financing activities for at least 7 days.
- Monitoring the cash and bank position of the Company in a regular basis, whether annually, monthly, weekly or daily, to ensure that there is always sufficient cash surplus.
- Maintaining the number of receivables due in a certain period higher than the debts maturing in the same period.

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

3. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

3. Liquidity Risk (Continued)

Tabel berikut ini menyajikan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The following table presents the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2018 and 2017:

		2018						
		Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah Total
Aset keuangan								Financial assets
	Kas dan setara kas	755.247	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
	Piutang sewa pembiayaan	-	884.560	1.078.981	4.286.870	5.071.788	192.890	Finance lease receivables
	Piutang pembiayaan konsumen	-	591.033	595.025	2.188.985	2.403.637	364.551	Consumer financing receivables
	Piutang ijarah	-	106	-	-	-	-	Ijarah receivables
	Aset derivatif	-	4.915	12.777	39.763	52.715	-	Derivative assets
	Piutang karyawan	-	27	115	4.498	6.413	10.660	Employees receivables
	Jumlah aset keuangan	755.247	1.480.641	1.686.898	6.520.116	7.534.553	568.101	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
	Pinjaman yang diterima	-	303.118	762.362	3.251.326	2.606.631	-	Fund borrowings
	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.604.000	838.000	2.764.000	-	Securities issued
	Beban bunga yang masih harus dibayar	-	77.439	-	-	-	-	Accrued interest expenses
	Utang kepada dealer	-	5.168	-	-	-	-	Payable to dealers
	Utang premi asuransi	-	-	26.839	-	-	-	Insurance premium payables
	Jumlah liabilitas keuangan	-	385.725	2.393.201	4.089.326	5.370.631	-	Total financial liabilities
	Perbedaan jatuh tempo	755.247	1.094.916	(706.303)	2.430.790	2.163.922	568.101	Difference in maturity
		2017						
		Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah Total
Aset keuangan								Financial assets
	Kas dan setara kas	225.203	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
	Piutang sewa pembiayaan	-	710.324	915.037	3.604.910	4.209.500	81.036	Finance lease receivables
	Piutang pembiayaan konsumen	-	496.781	526.582	2.013.579	2.443.991	410.467	Consumer financing receivables
	Piutang karyawan	-	82	226	2.363	10.723	11.212	Employees receivables
	Jumlah aset keuangan	225.203	1.207.187	1.441.845	5.620.852	6.664.214	502.715	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
	Pinjaman yang diterima	-	315.559	516.491	2.787.514	3.233.179	-	Fund borrowings
	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.232.000	385.000	2.168.000	133.000	Securities issued
	Beban bunga yang masih harus dibayar	-	84.408	-	-	-	-	Accrued interest expenses
	Liabilitas derivatif	-	2.186	(73)	3.257	(4.553)	-	Derivative liabilities
	Utang premi asuransi	-	-	43.810	-	-	-	Insurance premium payables
	Utang kepada dealer	-	31.273	-	-	-	-	Payable to dealers
	Jumlah liabilitas keuangan	-	433.426	1.792.228	3.175.771	5.396.626	133.000	Total financial liabilities
	Perbedaan jatuh tempo	225.203	773.761	(350.383)	2.445.081	1.267.588	369.715	Difference in maturity

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan karyawan baik yang disengaja maupun tidak; kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak berfungsinya sistem pengendalian internal dalam operasional Perusahaan sehari-hari.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat dan terkontrol secara sistem dan dimonitor dari waktu ke waktu.
- Menyiapkan *backup* dan *Disaster Recovery Plan* yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi *hardware* dan *software*.
- Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
- Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan.
- Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindarkan/ mengurangi potensi penyimpangan.
- Adanya penilaian kinerja yang *fair* dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

5. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan dan entitas anaknya dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perusahaan dan entitas anaknya memonitor permodalan berdasarkan gearing ratio. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan medium-term notes) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal.

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

4. Operational Risk

Operational risk is the risk that could potentially cause an operating loss due to employee error whether intentional or not; system failures and operational processes as well as the malfunction of the internal control system in the day-to-day operations.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Implementing a centralized system in order that business processes can be controlled by the system and monitored from time to time.
- Preparing backup and Disaster Recovery Plan that is sufficient whenever unexpected event or condition occur towards the Company's major application systems, both in terms of hardware and software.
- Implementing a sustainable compliance audit system, both in branch offices or headquarters.
- Implementing a clear code of conduct (SOP) and strict sanctions for irregularities that occurred, according to level of error identified.
- Promoting the Company's core values to employees since the early stage, in order to avoid/reduce the potential for irregularities.
- Fair and transparent performance appraisal and opportunities for career development.

5. Capital Risk

The Company and its subsidiary's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders, and maintain the optimization of capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return for the results of capital to shareholders or issue new shares to reduce lending

Consistent with other players in the industry, the Company and its subsidiary monitor capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No. 84/PMK.012/2006 dated 26 September 2006 regarding Multifinance Company, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

5. Risiko Permodalan (Lanjutan)

5. Capital Risk (Continued)

Keterangan	PMK.012/2006	Struktur Modal Perusahaan/ Company's Capital Structure		Description
		2018	2017	
Modal Disetor (dalam miliar Rupiah)	Minimal Rp 100 miliar/ Minimum Rp 100 billion	399	399	Paid-up Capital (in billion Rupiah)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	Maksimum 10x/ Maximum 10x	1,9	2,2	Debt to Equity Ratio
Pada tahun 2018 dan 2017 tingkat rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan masing-masing berada pada kondisi sehat, yaitu 1,9 kali dan 2,2 kali.		As of 2018 and 2017, debt-to-equity ratio level of the Company was healthy at 1.9 times and 2.2 times, respectively.		

37. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

37. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Fair value of financial assets and financial liabilities

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2d menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

In the following table, financial instrument have been allocated based on their respective. Significant accounting policies in Note 2d describes how each category of financial assets and financial liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The classification of financial assets has been classified as financial assets measured at fair value through profit and loss, and loans and receivables. So with the financial liabilities has been classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The following table sets out the carrying value and fair value of financial assets and financial liabilities as of 31 December 2018 and 2017:

2018	Nilai tercatat / Carrying amount					2018
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities measured at amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Carrying value amount	Jumlah nilai wajar/ Fair value amount	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	-	755.247	-	755.247	755.247	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	11.357.670	-	11.357.670	11.357.670	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	5.922.788	-	5.922.788	5.922.788	Consumer financing receivables - net
Piutang ijarah	-	105	-	105	105	Ijarah receivables
Aset derivatif	110.170	-	-	110.170	110.170	Derivative assets
Piutang karyawan	-	21.713	-	21.713	21.713	Employee receivables
Jumlah	110.170	18.057.523	-	18.167.693	18.167.693	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	6.899.860	6.899.860	6.899.860	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	-	-	287.878	287.878	287.878	Accrued expenses
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	5.196.220	5.196.220	5.196.220	Securities issued
Utang lain-lain	-	-	258.558	258.558	258.558	Other payables
Jumlah	-	-	12.642.516	12.642.516	12.642.516	Total

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

37. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)

2017	Nilai tercatat / Carrying amount				Jumlah nilai tercatat/ Carrying value amount	Jumlah nilai wajar/ Fair value amount	2017
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities measured at amortized cost				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	-	225.203	-	225.203	225.203	Cash and cash equivalents	
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	9.435.315	-	9.435.315	9.435.315	Finance lease receivables - net	
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	5.739.410	-	5.739.410	5.739.410	Consumer financing receivables - net	
Piutang karyawan	-	24.606	-	24.606	24.606	Employee receivables	
Jumlah	-	15.424.534	-	15.424.534	15.424.534	Total	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	6.819.052	6.819.052	6.819.052	Fund borrowings	
Beban yang masih harus dibayar	-	-	293.527	293.527	293.527	Accrued expenses	
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.909.411	3.909.411	3.909.411	Securities issued	
Liabilitas derivatif	817	-	-	817	817	Derivative liabilities	
Utang lain-lain	-	-	214.721	214.721	214.721	Other payables	
Jumlah	817	-	11.236.711	11.237.528	11.237.528	Total	

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Nilai wajar kas dan setara kas, deposito berjangka, beban yang masih harus dibayar dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Estimasi nilai wajar terhadap pinjaman yang diterima yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Nilai wajar pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga mengambang mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunganya sering ditinjau ulang.
- Piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan aset lain-lain dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.
- Nilai wajar untuk aset keuangan derivatif ditetapkan menggunakan harga pasar.
- The fair values of cash and cash equivalents, time deposit, accrued expenses and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.
- The estimated fair value of fund borrowings not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. The fair value of floating rate fund borrowings approximate their carrying amounts because the interest rate is repriced frequently.
- Finance lease receivables, consumer financing receivables and other assets are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Expected cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.
- The fair value for derivative financial assets is based on market rates.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Nilai wajar agregat untuk surat berharga yang diterbitkan dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva yield terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah aset keuangan derivatif.

38. LITIGASI

Ringkasan perkara antara Perusahaan dengan PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT Ongko Multicopora (OM).

Latar Belakang

APT dan OM (keduanya merupakan anak perusahaan Ongko Grup) dahulu merupakan pemegang saham BFI dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 111.804.732 (32,32%) dan 98.388.180 (28,44%). Pada saat krisis tahun 1998, anak-anak perusahaan Ongko Grup tidak dapat membayar utang kepada BFI sejumlah ± USD 100.000.000 (nilai penuh) yang mengakibatkan BFI turut gagal membayar utang kepada para krediturnya dan nyaris pailit.

Pada tanggal 1 Juni 1999, sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utang BFI kepada para krediturnya, APT dan OM menggadaikan saham-saham mereka kepada BFI berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 1 Juni 1999, sebagai jaminan atas utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar kepada BFI.

Perjanjian Gadai Saham menetapkan bahwa saham-saham APT dan OM yang dijaminan kepada BFI akan dialihkan kepada pihak ketiga sebagai kompensasi atas pembebasan utang anak-anak perusahaan Ongko Grup kepada BFI yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar tersebut. Hal ini merupakan inti dari rencana restrukturisasi utang BFI, dimana utang BFI kepada para kreditur juga akan diselesaikan melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta.

37. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value: (Continued)

- The aggregate fair values securities issued is calculated based on quoted market prices. For those notes where quoted market prices are not available, a discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term of maturity.

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- (b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- (c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The Company's financial assets that are measured and recognised at fair value (level 2) are derivative financial assets.

38. LITIGATION

Summary of the case between the Company and PT Aryaputra Teguharta (APT) and PT Ongko Multicopora (OM).

Background

APT and OM (both of which are Ongko Group subsidiaries) were formerly BFI shareholders with 111,804,732 (32.32%) and 98,388,180 (28.44%) shares respectively. At the time of the 1998 crisis, the Ongko Group's subsidiaries were unable to pay debts to BFI in the amount of ± USD 100,000,000 (full amount) which resulted in BFI failing to pay its debts to its creditors and was almost bankrupt.

On 1 June 1999, as part of BFI's debt restructuring plan to its creditors, APT and OM mortgaged their shares to BFI under the Pledge Share Agreement dated 1 June 1999, as collateral for the debt of the Ongko Group subsidiaries due and not paid to BFI.

The Pledge Share Agreement stipulates that APT and OM shares pledged as collateral to BFI will be transferred to a third party as compensation for the debts of the subsidiary Ongko Group to BFI that are due and not paid. This is at the core of BFI's debt restructuring plan, where BFI's debt to creditors will also be settled through an application for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) at the Jakarta Commercial Court.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

38. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

Sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utang BFI tersebut, serta dalam rangka pelaksanaan pengalihan gadai saham-saham APT dan OM kepada para pihak ketiga tersebut, BFI telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari APT dan OM berdasarkan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari 2000,
- RUPSLB tanggal 22 Agustus 2000,
- Persetujuan Pengalihan tanggal 7 Agustus 2000, dan
- Surat Kuasa untuk Menjual Saham yang Tidak Dapat Ditarik Kembali tanggal 7 Agustus 2000.

BFI berhasil merestrukturisasi utangnya dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian dengan para kreditur dan telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta dengan Putusan nomor 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2000.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dengan para krediturnya yang sudah disahkan tersebut, BFI menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Februari 2001, dimana saham-saham APT dan OM yang ada di BFI dialihkan kepada para kreditur oleh BFI, dengan *The Law Debenture Trust Corporation* ("LDTC") sebagai Wali Amanat dari para kreditur.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham, BFI menyerahkan Surat Pembebasan Utang kepada Ongko Grup tanggal 12 Februari 2001, dan sejak saat itu APT dan OM bukan lagi pemegang saham BFI. Nilai saham APT dan OM pada saat itu sebesar Rp 5.300 (harga pasar pada saat itu sebesar Rp 25 per saham) dikompensasi dengan utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dihapus-bukukan BFI senilai lebih dari Rp 1.000.000.

Pengalihan saham-saham mengacu Perjanjian Jual Beli Saham dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2001 melalui Bursa Efek Jakarta. Sebagai akibat dari pengalihan tersebut, LDTC tercatat sebagai pemegang saham BFI mewakili para kreditur.

Pada tahun 2003, ketika kondisi keuangan BFI mulai menunjukkan perbaikan, dan kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah selesai restrukturisasi utang BFI, APT dan OM menuntut pengembalian saham-saham yang telah dijaminakan tersebut meskipun tidak memiliki keberatan sebelumnya, selama PKPU dan proses pengalihan saham (butir 3) dengan dalih bahwa Perjanjian Gadai Saham tersebut sudah kedaluwarsa, padahal dalam Perjanjian Gadai Saham tersebut berlaku utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dijamin oleh APT dan OM dibayar lunas kepada BFI.

OM dan APT mengajukan Gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam restrukturisasi utang, antara lain, BFI dan Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar dan Cornellius Henry Kho), LDTC (sebagai Wali Amanat), Ernst & Young (sebagai Auditor), Royal Bank of Scotland (sebagai Perwakilan Kreditur), Chase Manhattan Bank (sebagai Kustodian) untuk menuntut pengembalian saham-saham yang telah mereka gadaikan kepada BFI dan yang telah dialihkan oleh BFI kepada para krediturnya, tanpa ada pembayaran utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dijamin oleh gadai saham APT dan OM, yang telah dihapus-bukukan oleh BFI.

38. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

As part of the BFI debt restructuring plan, as well as in order to carry out the transfer of mortgage for APT and OM shares to these third parties, BFI has obtained approval from APT and OM based on:

- Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 27 January 2000,
- EGMS dated 22 August 2000,
- Consent to Transfer dated 7 August 2000, and
- Power of Attorney to Sell Irrevocable Power of Attorney to Sell Shares dated 7 August 2000.

BFI has successfully restructured its debt by signing a Reconciliation Agreement with creditors and has been approved by the Jakarta Commercial Court with Decision number 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. dated 19 December 2000.

In accordance with the provisions in the Reconciliation Agreement with creditors that has been approved, BFI signed the Share Sell and Purchase Agreement dated 9 February 2001, where the shares of APT and OM in BFI were transferred to creditors by BFI, with *The Law Debenture Trust Corporation* ("LDTC") as Trustee of creditors.

In accordance with the provisions in the Pledge Share Agreement, BFI submitted a Letter of Discharge of Indebtedness to the Ongko Group on 12 February 2001, and since then APT and OM are no longer shareholders of BFI. The share value of APT and OM at that time was Rp 5,300 (The current market price of Rp 25 per share) is compensated with the debt of the Ongko Group subsidiaries which were written off by BFI worth more than Rp 1,000,000.

The transfer of shares refers to the Share Sell and Purchase Agreement held on 11 May 2001 through the Jakarta Stock Exchange. As a result of the transfer, LDTC was listed as a BFI shareholder representing creditors.

In 2003, when the financial condition of BFI began to show improvement, and approximately 3 (three) years after the completion of the debt restructuring of BFI, APT and OM demanded the return of the pledged shares even though they had no previous objections, during PKPU and the process transfer of shares (point 3) under the pretext that the Pledge Share Agreement has expired, even though the Pledge Share Agreement is valid until the debt of the subsidiaries of the Group Ongko guaranteed by APT and OM is paid in full to BFI.

OM and APT filed a lawsuit separately against the parties involved in debt restructuring, among others, BFI and the BFI Directors at that time (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar and Cornellius Henry Kho), LDTC (as Trustee), Ernst & Young (as Auditor), Royal Bank of Scotland (as Creditors Representative), Chase Manhattan Bank (as Custodian) to demand the return of shares that they have mortgaged to BFI and which BFI has transferred to its creditors, without any debt repayment the subsidiaries of the Ongko Group are guaranteed by the pledges of APT and OM shares, which have been written off by BFI.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

Berikut ini merupakan Putusan atas Gugatan APT dan OM di atas:

(a) Putusan Perkara APT:

- i. Di tingkat Pengadilan Negeri (PN), sebagian Gugatan APT dikabulkan melalui Putusan nomor 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2004.
- ii. Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi (PT) mengabulkan Banding yang diajukan BFI melalui Putusan nomor 302/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 1 September 2004.
- iii. Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi dari APT melalui Putusan nomor 677K/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2005.
- iv. Di tingkat Peninjauan Kembali (PK), MA mengabulkan sebagian Gugatan dari APT melalui Putusan nomor 240PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ("PK 240"):
 - APT adalah pemilik sah atas saham-saham APT.
 - BFI dan Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar dan Cornellius Henry Kho) dihukum untuk:
 - mengembalikan dan menyerahkan saham-saham APT kepada APT.
 - membayar Rp 20 per hari sebagai uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan saham APT kepada APT.
 - Gugatan APT terhadap pihak lain termasuk LDTC tidak dapat diterima.
 - Tuntutan APT berupa ganti kerugian tidak dapat diterima.

(b) Putusan Perkara OM:

- i. Di tingkat PN, sebagian besar Gugatan OM dikabulkan melalui Putusan nomor 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2004.
- ii. Di tingkat Banding, PT mengabulkan Banding yang diajukan BFI melalui Putusan nomor 60/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 23 Maret 2005.
- iii. Di tingkat Kasasi, MA menolak permohonan Kasasi dari OM melalui Putusan nomor 1478K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005.
- iv. Di tingkat PK, MA menolak permohonan PK dari OM melalui Putusan nomor 115PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007.

Putusan Pengadilan yang final dan mengikat telah menolak semua Gugatan yang diajukan oleh OM atas dasar pertimbangan hukum bahwa Perjanjian Gadai Saham adalah sah dan berlaku sampai utang anak-anak perusahaan Ongko Grup yang dijamin oleh saham OM telah dilunasi, dengan demikian penjualan saham OM oleh BFI kepada LDTC adalah sah menurut hukum.

38. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

The following are the Decisions of the APT and OM Lawsuit above:

(a) APT Case Verdict:

- i. At the District Court (PN) level, part of the APT lawsuit is granted through Decision number 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dated 14 April 2004.
- ii. At the Appeal level, the High Court (PT) grants the Appeal submitted by BFI through Decision number 302/Pdt/2004/PT.DKI dated 1 September 2004.
- iii. At the Cassation level, the Supreme Court (MA) rejected the Cassation application from APT through Decision number 677K/Pdt/2005 dated 20 July 2005.
- iv. At the Based on subpoena dated 30 June 2009 (PK) level, the MA granted part of the Lawsuit from APT through Decision number 240PK/Pdt/2006 dated 20 February 2007 ("PK 240"):
 - APT is the legal owner of APT shares.
 - BFI and the BFI Board of Directors at that time (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar and Cornellius Henry Kho) were punished for:
 - returning and submitting APT shares to APT.
 - paying Rp 20 per day as forced money (*dwangsom*) for the delay in returning and submitting APT shares to APT.
 - APT's lawsuit against other parties including LDTC is not acceptable.
 - APT's demands of compensation are not acceptable.

(b) OM Case Verdict:

- i. At the PN level, most OM lawsuits are granted through Decision number 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dated 2 November 2004.
- ii. At the Appeal level, the PT granted the Appeal submitted by BFI through Decision number 60/Pdt/2005/PT.DKI dated 23 March 2005.
- iii. At the Cassation level, the MA rejected the Cassation request from OM through Decision number 1478K/Pdt/2005 dated 27 October 2005.
- iv. At the level of PK, the MA rejected the PK request from the OM through Decision number 115PK/Pdt/2007 dated 19 July 2007.

The final and binding court ruling has rejected all claims filed by OM on the basis of legal considerations that the Pledge Share Agreement is valid and valid until the debt of the Group Ongko guarantees by OM shares has been repaid, thus the transfer of OM shares by BFI to LDTC is lawful.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

APT telah beberapa kali berupaya melakukan eksekusi atas Putusan PK 240 dari sejak tahun 2007 melalui PN Jakarta Pusat. Upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada saham-saham terdaftar atas nama APT dalam daftar pemegang saham BFI, oleh karena itu Ketua PN Jakarta Pusat yang berbeda mengeluarkan Surat/ Penetapan "Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Executable)" sebagai berikut:

(a) Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat (H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum.) nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 240PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 079/2007.Eks, tidak dapat dilaksanakan (Non-Executable);
- ii. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat dan memberitahukan isi Penetapan ini kepada Para Pihak."

(b) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (Hj. Andriani Nurdin, S.H., M.H.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. 4758 VII.2009.01 tanggal 3 Juli 2009, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Pada acara panggilan menghadap tertanggal 30 Juni 2009 tidak diketemukan hal-hal yang baru yang diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan permohonannya; Tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007 tentang "Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Executable);"

(c) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (H. Syahril Sidik, S.H., M.H.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. VIII.2009.03.6238 tanggal 24 Agustus 2009, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Pada panggilan menghadap tanggal 30 Juni 2009 tidak diketemukan hal-hal yang baru yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi sehubungan dengan permohonannya;
- ii. Tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007 tentang "Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Executable)."

(d) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (Suharto, S.H., M.Hum.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. X.2013.01.11412 BD tanggal 7 Oktober 2013, yang isinya dikutip sebagai berikut:

- i. "Bahwa hingga saat ini saham-saham tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga Penetapan "Tidak Dapat Dilaksanakan" (Non Executable) tetap sah;
- ii. Bahwa Pemohon Eksekusi hingga saat ini belum dapat membuktikan atau memberikan informasi tentang saham-saham yang telah dijual kepada publik."

38. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

The APT has tried several times to execute the PK 240 Decision from 2007 through the PN Central Jakarta. The effort was unsuccessful because there were no shares registered under the name of APT in the list of BFI shareholders, therefore the Chairperson of the different PN Central Jakarta issued a Letter/ Stipulation "Non-Executable" as follows:

(a) Stipulation of the Chairperson of the PN Central Jakarta (H. Cicut Sutiarso, S.H., M. Hum.) Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007, whose contents are quoted as follows:

- i. "Stating that the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 240PK/Pdt/2006 dated 20 February 2007, which is registered in the Registrar's Office of the Central Jakarta District Court under number 079/2007.Eks, cannot be implemented (Non-Executable);
- ii. Order the Registrar of the Central Jakarta District Court to record and notify the contents of this Stipulation to the Parties."

(b) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (Hj. Andriani Nurdin, S.H., M.H.) number W10.U1.HT.079/2007 Eks. 4758 VII.2009.01 dated 3 July 2009, the contents of which are quoted as follows:

- i. "At the summoning event dated 30 June 2009, no new matters were submitted by the Petitioner in connection with his petition;

There is no reason for the Central Jakarta District Court to cancel the Stipulation Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007 concerning "Non-Executable";"

(c) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (H. Syahril Sidik, S.H., M.H.) number W10.U1.HT.079/2007 Eks. VIII.2009.03.6238 dated 24 August 2009, the contents of which are quoted as follows:

- i. "Based on subpoena dated 30 June 2009, no new matters were found submitted by the Applicant for Execution in connection with his petition;

There is no reason for the Central Jakarta District Court to cancel the Stipulation Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007 concerning "Non-Executable"."

(d) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (Suharto, S.H., M.Hum.) Number W10.U1.HT.079 / 2007 Eks. X.2013.01.11412 BD dated 7 October 2013, the contents of which are quoted as follows:

- i. "That until now these shares cannot be found, so that the Stipulation of "Non-Executable" remains valid;
- ii. Whereas the Execution Applicant has not yet been able to prove or provide information about shares that have been sold to the public."

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. LITIGASI (Lanjutan)

Latar Belakang (Lanjutan)

APT telah beberapa kali berupaya melakukan eksekusi atas Putusan PK 240 dari sejak tahun 2007 melalui PN Jakarta Pusat. Upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada saham-saham terdaftar atas nama APT dalam daftar pemegang saham BFI, oleh karena itu Ketua PN Jakarta Pusat yang berbeda mengeluarkan Surat/ Penetapan "Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Executable)" sebagai berikut: (Lanjutan)

(e) Surat Ketua PN Jakarta Pusat (Gusrizal, S.H., M.Hum.) nomor W10.U1.HT.079/2007 Eks. VI.2014.01.6758 BD tanggal 12 Juni 2014, yang isinya dikutip sebagai berikut:

i. "Bahwa tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan nomor 079/2007.Eks tanggal 10 Oktober 2007 tentang "Tidak Dapat Dilaksanakan (Non-Executable)"."

(f) Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat (Dr. Yanto, S.H., M.H.) nomor 079/2007.Eks tanggal 26 Januari 2018, yang isinya dikutip sebagai berikut:

i. "Menyatakan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2007 nomor 240 PK/Pdt/2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 nomor 677 K/Pdt/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 September 2004 nomor 302/Pdt/2004/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2004 nomor 123/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2014 nomor 79/2007.Eks tidak dapat dilaksanakan oleh karena obyek eksekusi berupa saham-saham PT Aryaputra Teguharta telah dijual dan tidak berada pada penguasaan Para Tergugat lagi."

Gugatan APT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2018, APT mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ("Dirjen AHU") cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham RI") untuk menuntut pembatalan dan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menyetujui dan mencatat transaksi pengalihan saham APT yang dilakukan oleh BFI kepada LDTC, dan oleh LDTC telah dialihkan kepada pihak ketiga, serta menyesuaikan profil perusahaan BFI dengan mencantumkan APT sebagai pemilik atau pemegang dari 32,32% saham di BFI. Permintaan APT tersebut kemudian ditolak oleh Dirjen AHU melalui surat nomor AHU.2.UM.01.01-802 tanggal 8 Maret 2018.

38. LITIGATION (Continued)

Background (Continued)

The APT has tried several times to execute the PK 240 Decision from 2007 through the PN Central Jakarta. The effort was unsuccessful because there were no shares registered under the name of APT in the list of BFI shareholders, therefore the Chairperson of the different PN Central Jakarta issued a Letter/ Stipulation "Non-Executable" as follows: (Continued)

(e) Letter from the Chairperson of the Central Jakarta District Court (Gusrizal, S.H., M.Hum.) Number W10.U1.HT.079/2007 Eks. VI.2014.01.6758 BD dated 12 June 2014, the contents of which are quoted as follows:

i. "That there is no reason for the Central Jakarta District Court to cancel the Stipulation Number 079/2007.Eks dated 10 October 2007 concerning "Non-Executable"."

(f) Stipulation of the Chairperson of the Central Jakarta District Court (Dr. Yanto, S.H., M.H.) number 079/2007.Eks dated 26 January 2018, the contents of which are cited as follows:

i. "Declared the execution of the Judicial Review Decision of the Supreme Court dated 20 February 2007 number 240 PK/Pdt/2006 jo. Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated 20 July 2005 number 677K/Pdt/2005 jo. the Decision of the Jakarta High Court on 1 September 2004 number 302/Pdt/2004/PT.DKI jo. Decision of the Central Jakarta District Court dated 14 April 2004 number 123/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST based on Stipulation of the Chairperson of the Central Jakarta District Court dated 23 September 2014 number 79/2007.Eks cannot be implemented because the object execution of shares of PT Aryaputra Teguharta has been sold and is not in the possession of the Defendants anymore. "

APT Lawsuit in the Jakarta Administrative Court (PTUN)

On 26 February 2018, APT sent a letter to the Directorate General of General Legal Administration ("Director General of AHU") cq. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Kemenkumham RI") to demand cancellation and revocation of State Administrative Decrees that have approved and recorded APT share transfer transactions conducted by BFI to LDTC, and by LDTC have been transferred to third parties, as well as adjusting BFI's company profile by including APT as the owner or holder of a 32.32% stake in BFI. The APT request was later rejected by the Director General of the AHU by letter number AHU.2.UM.01.01-802 dated 8 March 2018.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. LITIGASI (Lanjutan)

**Gugatan APT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta (Lanjutan)**

Dikarenakan adanya penolakan tersebut, pada tanggal 16 Mei 2018, APT mengajukan Gugatan nomor 120/G/2018/PTUN-JKT terhadap Kemenkumham RI di PTUN Jakarta dengan tuntutan berupa menyatakan tidak sah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen AHU tersebut di bawah ini ("Obyek Sengketa TUN"), dan mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan ("Schorsing") atas Obyek Sengketa TUN dimaksud, berupa:

- i. Surat Dirjen AHU nomor AHU.2.UM.01.01-802 tanggal 8 Maret 2018.
- ii. Persetujuan dan penerimaan laporan/pemberitahuan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU atas akta perubahan anggaran dasar BFI dari tahun 2001-2017.
- iii. Data Profil Perusahaan BFI yang diterbitkan oleh Dirjen AHU.

Terkait Gugatan APT di atas, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan BFI sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut melalui Putusan Sela tanggal 28 Juni 2018.

Terhadap perkara di atas, PTUN Jakarta mengabulkan Schorsing yang dimohonkan APT atas Obyek Sengketa TUN melalui Penetapan tanggal 19 Juli 2018, dan telah diajukan banding oleh BFI pada tanggal 20 Juli 2018 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta juga telah mengabulkan Gugatan APT terhadap Kemenkumham RI melalui Putusan tanggal 12 November 2018. Putusan PTUN Jakarta tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena pada tanggal 12 November 2018 BFI Finance selaku Tergugat II Intervensi telah menyatakan Banding, demikian juga pada tanggal 21 November 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat telah menyatakan Banding, sehingga Putusan PTUN Jakarta belum efektif berlaku dan belum dapat dilaksanakan, serta tidak berpengaruh terhadap kegiatan Operasional Perusahaan.

Gugatan APT di PN Jakarta Pusat

APT juga mengajukan Gugatan terhadap BFI dan pihak-pihak tersebut di bawah ini, di PN Jakarta Pusat:

- a) Gugatan nomor 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2018 terhadap BFI dan Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Francis Lay Sioe Ho, Yan Peter Wangkar dan Cornellius Henry Kho) dengan tuntutan antara lain berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) karena belum mengembalikan atau menyerahkan saham-saham APT yang dihitung sampai dengan tanggal Gugatan tersebut sebesar Rp 80.360.

38. LITIGATION (Continued)

**APT Lawsuit in the Jakarta Administrative Court
(PTUN) (Continued)**

Due to the refusal, on 16 May 2018, APT filed lawsuit Number 120/G/2018/PTUN-JKT against Kemenkumham RI at the PTUN Jakarta with claim of declaring invalid and revoking the State Administrative Decrees issued by the Director General of AHU below ("TUN Dispute Object"), and submit an Application for Delay of Implementation ("Schorsing") of TUN Dispute Object:

- i. Letter of Director General of AHU number AHU.2.UM.01.01-802 dated 8 March 2018.
- ii. Approval and receipt of reports/ notifications issued by the Director General of AHU on the deed of amendment to BFI's articles of association from 2001-2017.
- iii. BFI Company Profile Data issued by the Director General of AHU.

Regarding the APT lawsuit above, the PTUN Jakarta granted the BFI's request as Defendant II Intervention in the case through Interlocutory Decision 28 June 2018.

With regard to the case above, the PTUN Jakarta grants the Schorsing that APT has applied for the TUN Dispute Object through Stipulation on 19 July 2018, and has been appealed by BFI on 20 July 2018 to the Jakarta Administrative High Court (PTTUN).

The PTUN Jakarta has also granted the APT lawsuit against the Kemenkumham RI through the Decision of 12 November 2018. The PTUN Jakarta decision has no permanent legal force (*inkracht van gewijsde*), because on 12 November 2018 BFI Finance as Defendant II Intervention has declared an Appeal, as well as on 21 November 2018 the Kemenkumham RI as the Defendant has stated the Appeal, so that the PTUN Jakarta Decision has not been effective and cannot be implemented, and has no effect on the Company's Operational activities.

APT Lawsuit in PN Central Jakarta

APT also filed a lawsuit against BFI and the parties below, in the Central Jakarta District Court:

- a) Claims number 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated 19 September 2018 against BFI, President Director of BFI (Francis Lay Sioe Ho), and the former BFI Directors (Yan Peter Wangkar and Cornellius Henry Kho) with demands including payment of money forced (*dwangsom*) because they have not returned or handed over the APT shares calculated up to the date of the lawsuit in the amount of Rp 80,360.

Ekshibit E/89

Exhibit E/89

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. LITIGASI (Lanjutan)

Gugatan APT di PN Jakarta Pusat (Lanjutan)

APT juga mengajukan Gugatan terhadap BFI dan pihak-pihak tersebut di bawah ini, di PN Jakarta Pusat: (Lanjutan)

- b) Gugatan nomor 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018 terhadap BFI, Direksi BFI yang menjabat pada saat ini (Francis Lay Sioe Ho, Sudjono, Sutadi, Sigit Hendra Gunawan dan Andrew Adiwijanto), Direksi BFI yang menjabat pada saat itu (Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar), Harry Jesus Rodriquez Palmer (mantan Komisaris BFI), Notaris BFI (Aulia Taufani, SH., Fathiah Helmi, SH., dan Herna Gunawan, SH.) (seluruhnya selaku Tergugat), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Sirca Datapro Perdana (ketiganya selaku Turut Tergugat) dengan tuntutan antara lain berupa pembayaran dividen tahun buku 2002-2017 sebesar Rp 644.815, bunga sebesar Rp 133.930, ganti rugi immaterial karena tidak membayarkan dividen sebesar Rp 500.000 dan pembayaran bunga sebesar 6% per tahun dari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan pembayaran dimaksud.
- c) Gugatan nomor 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018 terhadap BFI, Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Trinugraha Capital & CO SCA, TPG Capital, Northstar Group PTE LTD, Compass Banca SPA, Mediobanca SPA, OJK, BEI (seluruhnya selaku Tergugat), serta PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Sirca Datapro Perdana (ketiganya selaku Turut Tergugat), dengan tuntutan antara lain berupa pengembalian dan penyerahan 32,32% saham BFI kepada APT, serta pembatalan transaksi jual-beli saham yang dibuat oleh Trinugraha Capital & CO SCA dengan Compass Banca SPA dan pihak ketiga lainnya.

Terhadap ketiga Gugatan di atas sampai dengan tanggal laporan auditor independen masih dalam tahap pemeriksaan oleh PN Jakarta Pusat.

Manajemen berpendapat bahwa sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan secara material dan akan melakukan segala upaya yang diperlukan guna mempertahankan dan membela hak-hak Perusahaan dan juga para pemegang saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

38. LITIGATION (Continued)

APT Lawsuit in PN Central Jakarta (Continued)

APT also filed a lawsuit against BFI and the parties below, in the Central Jakarta District Court: (Continued)

- b) Claims number 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated 24 September 2018 against BFI, the current BFI Directors (Francis Lay Sioe Ho, Sudjono, Sutadi, Sigit Hendra Gunawan and Andrew Adiwijanto), former BFI Directors (Cornellius Henry Kho and Yan Peter Wangkar), Harry Jesus Rodriquez Palmer (former Commissioner of BFI), Notary (Aulia Taufani, SH., Fathiah Helmi, SH., and Herna Gunawan, SH.) (all as Defendants), as well as the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Sirca Datapro Perdana (all three as the Co-Defendants) with demands including payment of dividends for the financial year 2002-2017 of Rp 644,815, interest of Rp 133,930, immaterial compensation for not paying dividends of Rp 500,000 and interest payments of 6% per annum from the moment the Decision is legally enforceable until the payment is made.
- c) Claims number 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated 24 September 2018 against BFI, Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Trinugraha Capital & CO SCA, TPG Capital, Northstar Group PTE LTD, Compass Banca SPA, Mediobanca SPA, OJK, BEI (all as Defendants), and Indonesian Securities Guarantor Clearing House, Indonesian Central Securities Depository, PT Sirca Datapro Perdana (all three of them as the Co-Defendants), with demands including the return and delivery of 32.32% of BFI's shares to APT, and the cancellation of shares trading transactions made by Trinugraha Capital & CO SCA with Compass Banca SPA and other third parties.

Until the date of independent auditors' report date the three claims above are still in the examination stage by the PN Central Jakarta.

Management believes that up to the reporting date of the independent auditor, the cases will not affect the Company's operational activities substantially and will take every effort necessary to maintain and defend the rights of the Company as well as the shareholders recorded in the Indonesian Central Securities Depository.

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. REKLASIFIKASI

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

	2017			
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassification</i>	
Aset				Asset
Piutang lain-lain	236.788	177.339	414.127	Other receivables
Piutang pembiayaan konsumen	5.916.685	(177.275)	5.739.410	Consumer financing receivables
Aset lain-lain	82.695	(64)	82.631	Other assets
Beban				Expenses
Bunga dan keuangan	897.324	(1.679)	895.645	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	481.594	481	482.075	General and administrative
Lain-lain	4.023	1.198	5.221	Others

40. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan sedang melakukan proses penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1 triliun (nilai penuh).

39. RECLASSIFICATIONS

A few accounts in the consolidated financial statements 31 December 2017 were reclassified in order to conform with the presentation of consolidated financial statements as of 31 December 2018 as follows:

40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

As of this report was published, the Company is in the process of issuing Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 with a total amount of Rp 1 trillion (full amount).



Telp : +62-21.5795 7300
Fax : +62-21.5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountants
License No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00078/2.1068/AU.1/09/1042-1/1/II/2019
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018

No. : 00078/2.1068/AU.1/09/1042-1/1/II/2019
Re : *Consolidated Financial Statements*
31 December 2018

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Tangerang Selatan

*The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT BFI Finance Indonesia Tbk
South Tangerang*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT BFI Finance Indonesia Tbk ("The Company") and its Subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its Subsidiary as of 31 December 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP.1042/
License No. AP.1042

19 Februari 2019/ 19 February 2019

IF/yn

Halaman ini sengaja dikosongkan

PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN

Untuk memilih topik-topik yang dibahas dalam Laporan Terintegrasi ini, Perusahaan meninjau kembali topik-topik yang telah dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan BFI Finance yang diterbitkan pada 2017 dan menegaskan definisi topik-topik material yang kami sajikan dalam laporan ini.

Data dan informasi finansial disajikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sedangkan topik bahasan lain yang dilaporkan dipilih dari aspek-aspek keberlanjutan Perusahaan yang material berdasarkan Matriks Materialitas sebagaimana digambarkan berikut ini.

GRAFIK 31 Matriks Materialitas BFI Finance

Pengaruh terhadap Persepsi Pemangku Kepentingan BFI Finance	Sangat Tinggi			<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Perusahaan yang Baik (halaman 194) Pengembangan Usaha (halaman 126-157)
	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian Lingkungan (halaman 333) Pengembangan Sosial Dan Masyarakat (halaman 333) 	<ul style="list-style-type: none"> Ketenagakerjaan (halaman 98-117) Pendidikan dan Pelatihan (halaman 108-110) Tanggung Jawab kepada Konsumen (halaman 131-135,336) 	
	Sedang		<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas Karyawan (halaman 111) 	
		Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pengaruh terhadap Keberlanjutan BFI Finance				

Penentuan aspek-aspek dalam pelaporan yang dinilai bersifat material, ditentukan berdasarkan opini internal dan eksternal yang telah didiskusikan sebelum proses penyusunan laporan.

Dalam laporan ini, tidak terdapat perubahan topik material yang dilaporkan dibandingkan di Laporan Keberlanjutan BFI Finance 2017.

Perusahaan melaporkan empat bidang program tanggung jawab sosial, yaitu (1) lingkungan, (2) praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, (3) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan (4) tanggung jawab kepada konsumen.

TOPIK MATERIAL DAN RANTAI PASOKAN PERUSAHAAN

Bergerak di industri jasa keuangan, BFI Finance memiliki beberapa rantai pasokan yang lebih sederhana dibandingkan perusahaan manufaktur. Pemasok utama BFI Finance terdiri dari *dealer* dan *supplier* yang menyediakan barang yang akan dibiayai BFI Finance, perusahaan asuransi yang melakukan penutupan asuransi kerugian dan jiwa, konsultan yang memberikan berbagai jenis jasa termasuk teknologi informasi, dan pemasok barang dan jasa kebutuhan perkantoran. Tidak ada proses bisnis inti BFI Finance yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Pada 2018, terdapat 754 pemasok yang bekerja sama dengan BFI Finance. Sebanyak 100% adalah pemasok lokal, yang kami definisikan sebagai perusahaan pemasok yang memiliki domisili nasional. Pada 2018, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap rantai pasokan Perusahaan di seluruh kegiatan operasionalnya.

TABEL 141 Daftar Topik Material dan Batasannya di BFI Finance

No.	Topic	Internal		Eksternal	
		BFI Finance	Konsumen	Pemasok	Masyarakat
1.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	√		√	
2.	Pengembangan Usaha	√		√	
3.	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	√			√
4.	Ketenagakerjaan	√			√
5.	Pendidikan dan Pelatihan	√			√
6.	Tanggung Jawab kepada Konsumen	√	√	√	
7.	Produktivitas Karyawan	√			
8.	Pelestarian Lingkungan	√			√

PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan Perusahaan, berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan bisnis, adalah konsumen, pemegang saham, pemasok, karyawan, mitra kerja, masyarakat dan regulator. Perusahaan bekerja untuk membangun komunikasi yang transparan dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa saling percaya.

BFI Finance menjalin dialog yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan harapan, menyelesaikan masalah, mengelola dampak, serta mengidentifikasi peluang untuk menciptakan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

TABEL 142 Rangkuman Isu Pemangku Kepentingan BFI Finance 2018

Kelompok Pemangku Kepentingan	Metode Dialog dan Pelibatan	Isu yang Diangkat pada 2018
Konsumen	Survei konsumen, data keluhan konsumen	Layanan konsumen, penjelasan informasi produk, akses layanan
Karyawan	Survei karyawan, pertemuan dengan perwakilan karyawan, rapat, <i>town hall meeting</i> , <i>Leader's Talk</i> , <i>Internal Customer Survey (ICS)</i> , <i>Service Insight Community (SIC)</i> , dan M-BEAT	Kesejahteraan dan manfaat, pengembangan kompetensi dan karier, produktivitas
Pemegang Saham	Laporan triwulanan dan tahunan, <i>investor roadshow</i> , RUPS	Manfaat, pengembangan usaha, tata kelola dan akuntabilitas, kesehatan usaha
Pemasok	Pelibatan berbasis kontrak	Keberlanjutan pasokan, kinerja, ketepatan waktu
Mitra Kerja	Pelibatan berbasis kontrak, tinjauan kinerja	Kinerja, ketepatan waktu, evaluasi kontrak
Masyarakat	Forum, pertemuan, kemitraan dengan lembaga untuk kemasyarakatan	Dukungan pada kondisi sosioekonomi masyarakat dan lingkungan
Regulator	Pertemuan/rapat teratur, pelaporan	Kepatuhan, pengembangan usaha, tata kelola dan akuntabilitas, kesehatan usaha

BFI Finance melakukan pelibatan pemangku kepentingan lebih lanjut melalui partisipasinya dalam organisasi eksternal yang relevan dan mendukung tujuan Perusahaan.

BFI Finance berpartisipasi aktif dalam keanggotaan organisasi sebagai berikut:

1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagai anggota;
2. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sebagai anggota;
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai anggota; dan
4. Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) sebagai anggota.

GLOSARIUM

APPI	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	NPF	<i>Non-Performing Financing</i>
BAE	Biro Administrasi Efek	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
BBM	Bahan Bakar Minyak	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BECOCO	<i>BFI Enhanced Core Competencies</i>	PDB	Produk Domestik Bruto
BEI	Bursa Efek Indonesia	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
CAGR	<i>Compound Average Growth Rate</i>	PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>	Rp	Rupiah
GRI	Global Reporting Initiative	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
HC	<i>Human Capital</i>	RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	RUPST	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
IT	<i>Information Technology</i>	SDM	Sumber Daya Manusia
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
KAP	Kantor Akuntan Publik	SK	Surat Keputusan
KNKG	Komite Nasional Kebijakan Governance	SLA	<i>Service Level Agreement</i>
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia	SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
LDP	<i>Leadership Development Program</i>	SMS	<i>Short Message Service</i>
MESOP	<i>Management and Employee Stock Options Program</i>	USD	Dolar AS
MPV	<i>Multipurpose Vehicles</i>		
MTN	<i>Medium Term Notes</i>		
MTP	<i>Management Trainee Program</i>		

REFERENSI SILANG SEOJK NOMOR 30/ SEOJK.04/2016 – BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

1. Bentuk Laporan Tahunan

- | | |
|--|---|
| 1. Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan Salinan dokumen elektronik | √ |
| 2. Laporan tahunan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid dan dapat diperbanyak dgn kualitas baik | √ |
| 3. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk Salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf | √ |

2. Isi Laporan Tahunan

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketentuan umum | √ |
|-------------------|---|

a. Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai:

- 1) Ikhtisar data keuangan penting
- 2) Informasi saham (jika ada)
- 3) Laporan Direksi
- 4) Laporan Dewan Komisaris
- 5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik
- 6) Analisis dan Pembahasan Manajemen
- 7) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik
- 8) Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik
- 9) LKT yang telah diaudit
- 10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan

b. Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/ atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami

2. Uraian isi Laporan Tahunan	
-------------------------------	--

a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	10-11
-----------------------------------	-------

Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:

- 1) Pendapatan/penjualan
- 2) Laba bruto
- 3) Laba (rugi)
- 4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali
- 5) Total laba (rugi) komprehensif
- 6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali
- 7) Laba (rugi) per saham
- 8) Jumlah aset
- 9) Jumlah liabilitas
- 10) Jumlah ekuitas

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan	
14) Rasio lancar	
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas	
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten dan jenis industrinya	
<hr/>	
b. Informasi Saham	12-13
Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
a) Jumlah saham yang beredar	
b) Kapitalisasi pasar	
c) Harga tertinggi, terendah, dan penutupan	
d) Volume perdagangan	
2) Dalam hal terjadi aksi Korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sesuai point 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	
a) Tanggal pelaksanaan aksi Korporasi	
b) Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham	
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi Korporasi	
d) Harga saham sebelum dan sesudah aksi Korporasi	
3) Dalam hal terjadi suspension dan/atau delisting saham dalam tahun buku, Emiten menjelaskan alasan suspension dan/atau delisting tersebut.	
4) Dalam hal suspension dan/atau delisting sesuai poin 3 di atas masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, Emiten menjelaskan Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.	
<hr/>	
c. Laporan Direksi	38-43
Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
1) Uraian singkat mengenai kinerja Emiten paling sedikit meliputi:	40-42
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	
b) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan	
c) Kendala yang dihadapi Emiten	
2) Gambaran tentang prospek usaha	43
3) Penerapan tata kelola Emiten	42-43
4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	N/A
<hr/>	

**SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 –
BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

d. Laporan Dewan Komisaris	30-37
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten	32-34
2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten	32-36
3) Pandangan atas prospek usaha Emiten yang disusun oleh Direksi	37
4) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten	35-36
5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)	N/A
6) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi	33
e. Profil Emiten	
Profil Emiten paling sedikit memuat:	
1) Nama Emiten termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	48
2) Akses terhadap Emiten termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten meliputi: alamat, telepon, facsimile, email dan alamat Situs Web.	48
3) Riwayat singkat Emiten.	52-55
4) Visi dan Misi Emiten.	49
5) Kegiatan usaha menurut AD terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	56-59
6) Struktur organisasi Emiten dalam bentuk bagan, paling singkat 1 tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.	62-63
7) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	70-72
a) Nama dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	248-249
b) Foto terbaru	
c) Usia	
d) Kewarganegaraan	
e) Riwayat pendidikan	
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai Direksi pada Emiten	244-245
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada)	252
iii. Pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten	
g) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada)	258
h) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi	251
8) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
a) Nama	66-69
b) Foto terbaru	
c) Usia	
d) Kewarganegaraan	
e) Riwayat pendidikan	
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten ybs	226
ii. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten ybs	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	234
iv. Pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	
g) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada)	240-241
h) Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi	232
i) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada)	233
9) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan adalah susunan yang terakhir dan sebelumnya	N/A
10) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku	120-123
11) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku yang terdiri dari:	80-81
a) Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten	80
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten	80
c) Kelompok pemegang saham masyarakat (kurang dari 5%)	80-81
12) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi:	
a) Kepemilikan institusi lokal	80
b) Kepemilikan institusi asing	
c) Kepemilikan individu lokal	
d) Kepemilikan individu asing	
13) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk bagan/skema	81
14) Nama entitas anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan ventura bersama di mana Emiten memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Perusahaan tersebut (jika ada), untuk entitas anak ditambahkan informasi mengenai alamat	94
15) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten dicatatkan (jika ada)	82-87
16) Kronologis pencatatan efek lainnya selain saham, yang memuat antara lain nama efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	88-93
17) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal	95
18) Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan	-
19) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku berakhir (jika ada) yang memuat:	
a) Nama penghargaan/sertifikasi	24-27
b) Badan atau lembaga yang memberikan	
c) Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikat (jika ada)	

**SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 –
BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

- f. Analisis dan Pembahasan Manajemen
- Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yang paling sedikit memuat:
- | | |
|--|---------|
| 1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten, paling sedikit mengenai: | 145-152 |
| a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya | |
| b) Pendapatan/penjualan | |
| c) Profitabilitas | |
| 2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: | 158-182 |
| a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset | |
| b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas | |
| c) Ekuitas | |
| d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif, dan | |
| e) Arus Kas | |
| 3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan | 183-184 |
| 4) Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan | 184 |
| 5) Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan | 186 |
| 6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: | 186 |
| a) Tujuan dari ikatan tersebut | |
| b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut | |
| c) Mata uang yang menjadi denominasi | |
| d) Langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait | |
| 7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: | 187 |
| a) Jenis investasi barang modal | |
| b) Tujuan investasi barang modal | |
| c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan | |
| 8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan | 187 |
| 9) Prospek usaha dari Emiten dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya | 191 |
| 10) Perbandingan target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai, mengenai: | 185 |
| a) Pendapatan/penjualan | |
| b) Laba (rugi) | |
| c) Struktur modal (capital structure) | |
| d) Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten | |

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten untuk 1 tahun mendatang, meliputi:	191
a) Pendapatan/penjualan	
b) Laba (rugi)	
c) Struktur modal (capital structure)	
d) Kebijakan dividen	
e) Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten	
12) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, paling sedikit strategi pemasaran dan pangsa pasar	153-157
13) Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	188
a) Kebijakan dividen	
b) Tanggal dividen pembayaran kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas	
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas)	
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar	
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	188
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku	
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sesuai POJK tentang LRPD, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut	
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	188-189
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi	
b) Nama pihak yang melakukan transaksi	
c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada)	
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi	
e) Pemenuhan ketentuan terkait	
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	189-190
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	190
<hr/>	
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
Tata Kelola Emiten memuat uraian singkat, paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1) Direksi, mencakup antara lain:	243-258
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi	248-249
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi	205, 245
c) Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik	256

**SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 –
BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut	253-255
e) Informasi mengenai keputusan RUPS 1 tahun sebelumnya, meliputi:	220-225
i. Keputusan RUPS yang direalisasikan dalam tahun buku	
ii. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan	
f) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	212-220
i. Keputusan RUPS yang direalisasikan dalam tahun buku	
ii. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan	
g) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi	N/A
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	226-242
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	229-230
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman Dewan Komisaris	229
c) Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris	239-240
d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut	235-238
e) Kebijakan Emiten tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	239
i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja	
ii. Kriteria yang digunakan	
iii. Pihak yang melakukan penilaian	
f) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	242, 268, 272, 278
g) Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	N/A
i. Alasan tidak dibentuknya komite	
ii. Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku	
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam AD, paling sedikit memuat:	259-262
a) Nama	259
b) Tugas dan tanggung jawab DPS	259
c) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap Emiten	260-261
4) Komite Audit, mencakup antara lain:	263-268
a) Nama dan jabatannya dlm keanggotaan komite	265
b) Usia	74
c) Kewarganegaraan	74
d) Riwayat pendidikan	74
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	74, 266
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	
iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit	266
g) Pernyataan independensi Komite Audit	266
h) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut	267-268
i) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	268
j) Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai yang dicantumkan dalam piagam (charter) komite audit	268
5) Komite lain yang dimiliki Emiten dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	269-278
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	75-76, 270, 275
b) Usia	75-76
c) Kewarganegaraan	75-76
d) Riwayat pendidikan	75-76
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	75-76
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	75-76, 270, 275
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	
iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	
f) Periode atau masa jabatan anggota komite	270, 275
g) Uraian tugas dan tanggung jawab	269, 273- 274
h) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman komite	269, 273
i) Pernyataan independensi komite	271, 275
j) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	271-272, 277-278
k) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku	272, 278
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku	272, 278
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	
a) Nama	279-281
b) Domisili	280
c) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	279
i. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris Perusahaan	280
ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	
d) Riwayat pendidikan	280
e) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	280
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku	281
7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	282-287
a) Nama kepala unit audit internal	286
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	286
i. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal	
ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten	

**SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 –
BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada)	286
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	286-287
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal	282-283
f) Uraian tugas dan tanggung jawab	284
g) Pernyataan bahwa telah memiliki piagam (charter) unit audit internal	282
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku	282
8) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai:	296-297
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya	
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	
9) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai:	289-295
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten	
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya dan	
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten	
10) Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten, Entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	298-308
a) Pokok perkara	
b) Status penyelesaian perkara	
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten	
11) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, oleh Otoritas lainnya pada tahun buku	308
12) Informasi mengenai kode etik, meliputi:	317-321
a) Pokok kode etik	
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten	
13) Informasi mengenai budaya Perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai Perusahaan (jika ada)	50-51, 105-106, 321
14) Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten, antara lain mengenai:	327
a) Jumlah saham dan/atau opsi	
b) Jangka waktu pelaksanaan	
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	
d) Harga pelaksanaan	
15) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), antara lain meliputi:	325-326
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran	
b) Perlindungan bagi pelapor	
c) Penanganan pengaduan	
d) Pihak yang mengelola pengaduan	
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku	
ii. Tindak lanjut pengaduan	
16) Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat Ekuitas, meliputi:	206-210

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016

a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada)	
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan/atau biaya yang dikeluarkan, antara lain aspek:	330-339
a) Lingkungan hidup, antara lain:	333
i. Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang	
ii. Sistem pengolahan limbah Perusahaan	
iii. Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	
iv. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	
b) Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	99-118, 335-336
i. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja	
ii. Sarana dan kesempatan kerja	
iii. Tingkat perpindahan (<i>turnover</i>) karyawan	
iv. Tingkat kecelakaan kerja	
v. Pendidikan dan/atau pelatihan	
vi. Remunerasi	
vii. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan	
c) Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	333-335
i. Penggunaan tenaga kerja lokal	
ii. Pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan masyarakat atau pemberian edukasi	
iii. Perbaikan sarana dan prasarana sosial	
iv. Bentuk donasi lainnya dan	
v. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, serta pelatihan mengenai anti korupsi	321
d) Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	336-338
i. Kesehatan dan keselamatan konsumen	
ii. Informasi barang dan/atau jasa	
iii. Sarana, jumlah dan penganggulungan atas pengaduan konsumen	
2) Dalam hal EPP menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti <i>sustainability report</i> , maka EPP dikecualikan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan	N/A
3) <i>Sustainability report</i> sebagaimana poin 2 wajib disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan	N/A
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	358-460
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan Keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan atau POJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Efek	
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan	44-45

INDEKS ISI GRI (OPSI INTI)

Indeks Isi GRI

Pengungkapan Umum

102-1	Nama organisasi	48
102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	48
102-3	Lokasi kantor pusat	48
102-4	Lokasi operasi	60-61
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	48
102-6	Pasar yang dilayani	60-61
102-7	Skala organisasi	52
102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain	120
102-9	Rantai pasokan	463
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	463
102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	289
102-12	Inisiatif eksternal	464
102-13	Keanggotaan asosiasi	48
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	30-43
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	50
102-18	Struktur tata kelola	62, 204
102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya	62, 204
102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	62, 204
102-25	Konflik kepentingan	232-233, 251
102-26	"Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi"	245
102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	256
102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	295
102-35	Kebijakan remunerasi	116
102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	115
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	464
102-41	Perjanjian perundingan kolektif	117
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	464
102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	464
102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	464
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	94
102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	462-463
102-47	Daftar topik material	463
102-48	Penyajian kembali informasi	3
102-49	Perubahan dalam pelaporan	3
102-50	Periode pelaporan	3
102-51	Tanggal laporan terbaru	3
102-52	Siklus pelaporan	3
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	309
102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	3
102-55	Indeks isi GRI	476-477

Indeks Isi GRI		
102-56	Assurance oleh pihak eksternal	3
Pendekatan Manajemen		
103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	95, 99, 100, 108,
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	111, 127, 128, 133,
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	195, 201, 333
Kinerja Ekonomi		
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	339
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	339
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	333-336
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	333-336
Anti-korupsi		
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	321
Kepegawaian		
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	120
401-3	Cuti melahirkan	116
Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen		
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	117
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan	117
403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan	118
403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka	118
403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh	118
Pelatihan dan Pendidikan		
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	110
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	113
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara		
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	121, 122, 231, 250
Kebijakan Publik		
415-1	Kontribusi politik	339
Pemasaran dan Pelabelan		
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	135
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	135
Privasi Pelanggan		
418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	135

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2

Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo

BSD City, Tangerang Selatan 15322

Indonesia

 1500018

 corsec@bfi.co.id

 www.bfi.co.id

Laporan Tahunan
Terintegrasi

2018

PT BFI Finance Indonesia Tbk